

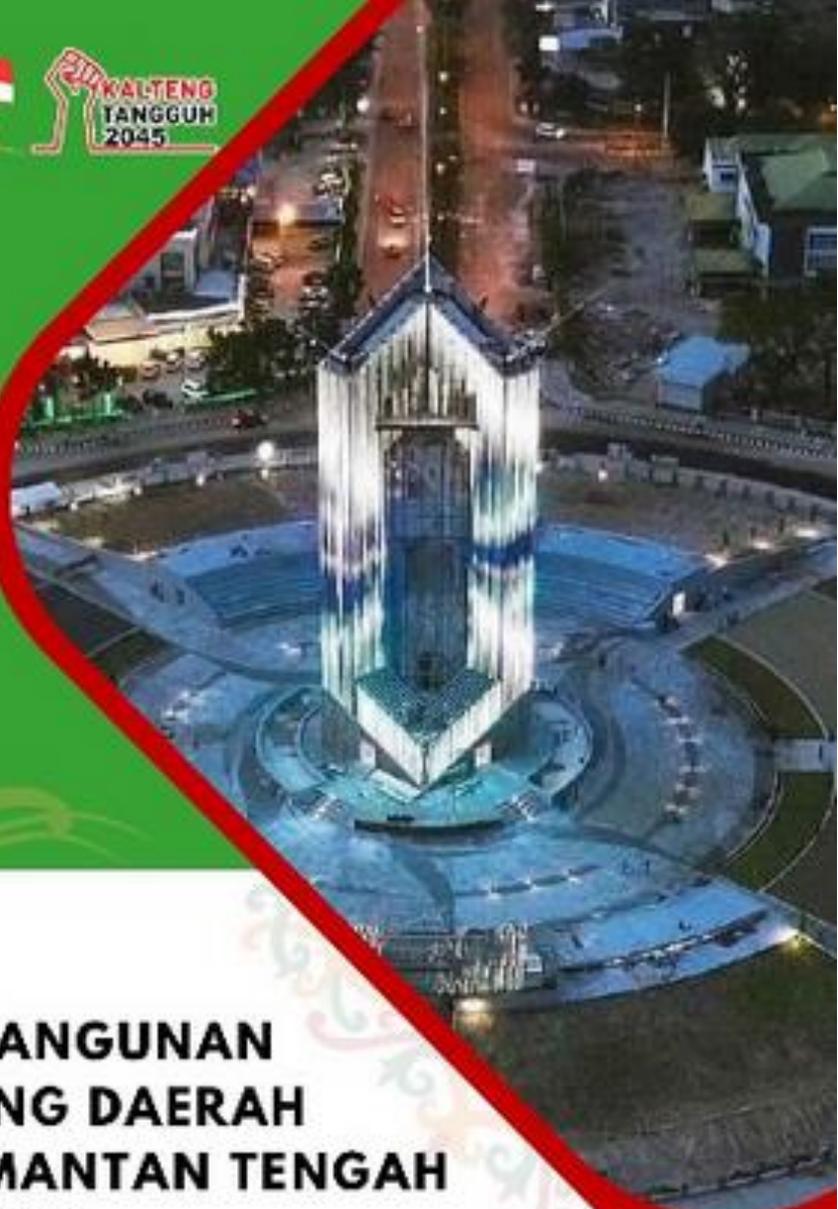
INDONESIA
EMAS
2045

20
KALITENG
TANGGUH
2045



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2024
TANGGAL 9 OKTOBER 2024



TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2045



RPJPD 2025-2045



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 260 ayat (1) dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Gubernur perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang disusun sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun tentang 2020 Nomor 288);

28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 115);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Instansi Vertikal adalah Perangkat kementerian dan/atau Lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
8. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
12. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
14. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDALITBANG adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
16. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.
17. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
18. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
19. Peraturan Kepala Daerah yang disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah.
20. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025- sampai dengan Tahun 2045.

23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Visi adalah pandangan jangka panjang selama 20 tahun mengenai pembangunan daerah yang didasarkan pada kepentingan daerah. Visi RPJPD menggambarkan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang diharapkan oleh masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat terwujud
28. Misi adalah merupakan pernyataan umum mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Misi juga dapat dianggap sebagai strategi yang akan diambil oleh pemerintahan daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dalam konteks pembangunan secara umum, termasuk untuk seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan.
29. Arah Kebijakan adalah langkah-langkah atau tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan-tujuan strategis yang ingin dicapai. Biasanya, arah kebijakan mencakup pemahaman yang mendalam mengenai masalah atau isu tertentu yang ingin diatasi, serta strategi-strategi yang akan digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Arah kebijakan juga bisa berkaitan dengan rencana jangka panjang suatu pemerintah atau organisasi untuk mengarahkan pembangunan dan pengambilan keputusan.
30. Sasaran pokok adalah elemen kunci dalam merinci kondisi yang diinginkan pada akhir periode 20 tahun.

31. Arah Pembangunan menjadi landasan serta menjadi petunjuk rambu-rambu pembangunan daerah selama periode RPJPD 2025-2045.
32. Indikator Utama Pembangunan (IUP) Daerah merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang.
33. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
34. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
35. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
36. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
37. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
38. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
39. Hari adalah hari kerja.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 2

RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam dokumen RPJMD maupun RKPD.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan RPJPN 2025-2045, RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang menggambarkan:
 - a. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - b. Arah Kebijakan, Arah Pembangunan, Tema Pembangunan dan Sasaran Pokok Daerah serta Arah Kebijakan Transformasi dan Indikator Utama Pembangunan.

Pasal 4

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ;

BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH;

BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH;

BAB VI : PENUTUP.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, dan program Gubernur.
- (2) Dalam penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan RPJM Nasional.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Gubernur yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan Gubernur berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Gubernur berikutnya.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Ketentuan mengenai RPJMD yang telah ada, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 9 Oktober 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 9 Oktober 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

MUHAMAD KATMA F.DIRUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: (10-248/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pada hakikatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMN dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun RPJMN sebagai rencana jangka menengah selanjutnya diterjemahkan secara kongkrit spesifik dan operasional menjadi rencana operasional tahunan.

Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi misi Gubernur berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, serta dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJPD merupakan pedoman bagi calon kepala daerah untuk menetapkan visi, misi, dan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur untuk 20 (dua puluh) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJPD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPJPD digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota di Kalimantan Tengah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Sistematika RPJPD merujuk pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pemangku kepentingan" adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan,

Akademisi, representasi Partai Politik, LSM/ORMAS, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota serta desa/kelurahan, pengusaha/investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, dan Kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN
2024 NOMOR 120

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2045**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	x
I. BAB I PENDAHULUAN	I-3
I.1 LATAR BELAKANG	I-3
I.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-6
I.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-7
I.3.1 Keterkaitan Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) ..	I-8
I.3.2 Keterkaitan Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	I-8
I.3.3 Keterkaitan Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah	I-9
I.3.4 Keterkaitan Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah	I-9
I.4 MAKSUD DAN TUJUAN.....	I-9
I.5 SISTEMATIKA PENULISAN	I-10
II. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-3
II.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II-3
II.1.1 ASPEK GEOGRAFI	II-3
II.1.2 ASPEK DEMOGRAFI.....	II-17
II.2 ASPEK KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN BUDAYA.....	II-22
II.2.1 KESEJAHTERAAN EKONOMI	II-22
II.2.2 KESEJAHTERAAN SOSIAL BUDAYA.....	II-36
II.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH.....	II-57
II.3.1 DAYA SAING EKONOMI DAERAH	II-57
II.3.2 DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).....	II-60
II.3.3 DAYA SAING FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR WILAYAH	II-65
II.3.4 DAYA SAING IKLIM INVESTASI	II-66

II.4	ASPEK PELAYANAN UMUM	II-67
II.4.1	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR II-67	
II.4.2	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR II-93	
II.4.3	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	II-117
II.4.4	FOKUS LAYANAN FUNGSI PENUNJANG DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN II-128	
II.5	EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025	II-138
II.6	TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK II-139	
II.6.1	PROYEKSI DEMOGRAFI TAHUN 2020-2045	II-139
II.6.2	KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA DASAR	II-150
II.7	PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH	II-153
II.7.1	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN RPJPN 2025-2045	II-153
II.7.2	INDIKASI KINERJA RTRW	II-155
II.7.3	INDIKASI KINERJA RENCANA SEKTORAL LAINNYA	II-182
II.7.4	REGIONALISASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	II-214
III.	BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	III-3
III.1	PERMASALAHAN	III-3
III.1.1	Bidang Sosial	III-3
III.1.2	Bidang Ekonomi	III-4
III.1.3	Bidang Ketahanan Ekologi	III-6
III.1.4	Bidang Tata Kelola	III-7
III.2	ISU STRATEGIS	III-7
III.2.1	Bidang Sosial	III-7
III.2.2	Bidang Ekonomi	III-13
III.2.3	Bidang Ketahanan Ekologi, Sosial, dan Budaya	III-15
III.2.4	Bidang Tata Kelola	III-17
III.2.5	Isu Khusus Kewilayahan	III-18
IV.	BAB IV VISI DAN MISI DAERAH	IV-1
IV.1	VISI	IV-1
IV.2	SASARAN VISI	IV-3
IV.3	UPAYA <i>BIG PUSH</i> PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH	IV-6
IV.3.1	Transformasi Ekonomi	IV-7
IV.3.2	Transformasi Sosial	IV-10
IV.3.3	Penguatan Ketahanan Ekologi	IV-13
IV.4	MISI	IV-13

V. BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK.....	V-3
V.1 ARAH KEBIJAKAN.....	V-3
V.2 SASARAN POKOK.....	V-4
V.2.1 ARAH PEMBANGUNAN DAERAH.....	V-4
V.2.2 ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	V-6
V.2.3 INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN.....	V-16
V.2.4 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	V-37
VI. BAB VI PENUTUP	VI-2
VI.1 Kaidah Pelaksanaan	VI-2
VI.2 Kaidah Pembiayaan Pembangunan	VI-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.3.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran	I-8
Gambar II.1.1 Peta Batas Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah	II-4
Gambar II.1.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2020	II-9
Gambar II.1.4 Perbandingan Nilai IKA, IKU, IKTL, dan IKLH Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022	II-10
Gambar II.1.5 Perbandingan Nilai IKLH Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nasional Tahun 2016-2020	II-11
Gambar II.1.6 Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalteng Tahun 2018-2022	II-13
Gambar II.1.7 Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022	II-19
Gambar II.2.2 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 - 2023	II-23
Gambar II.2.4 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2012-2022	II-24
Gambar II.2.5 Perbandingan Struktur Ekonomi Berdasarkan Kelompok Lapangan Usaha di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2022	II-26
Gambar II.2.6 Nilai PDRB per Kapita Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2022	II-28
Gambar II.2.10 Perbandingan Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022	II-30
Gambar II.2.11 Indeks Kedalaman Kemiskinan	II-32
Gambar II.2.12 Indeks Keparahan Kemiskinan	II-33
Gambar II.2.13 Kurva Perbandingan Rasio Indeks Gini di Provinsi Kalimantan Tengah dan Rata-Rata Nasional Tahun 2011-2022	II-34
Gambar II.2.14 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2023	II-36
Gambar II.2.15 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2022	II-38
Gambar II.2.16 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022	II-39
Gambar II.2.17 Angka Partisipasi Kasar Penduduk Usia Sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022	II-42
Gambar II.2.18 Angka Partisipasi Murni Penduduk Usia Sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022	II-43
Gambar II.2.19 Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 7 Tahun ke Atas di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022	II-44
Gambar II.2.20 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 - 2022	II-46
Gambar II.2.21 Persentase Guru yang Tersertifikasi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 - 2022	II-47
Gambar II.2.22 Usia Harapan Hidup Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2021	II-51
Gambar II.2.23 Perbandingan IPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Rata-rata IPM Nasional Tahun 2015-2022	II-53
Gambar II.2.24 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Tengah dan Rata-rata Nasional Tahun 2018-2022	II-54
Gambar II.2.25 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022	II-55
Gambar II.3.1 Perkembangan Pengeluaran per Kapita per Tahun	II-58

Gambar II.3.2 Perkembangan Nilai Tukar Petani di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2021.....	II-60
Gambar II.4.1 Kualitas Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020	II-81
Gambar II.4.2 Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik Terhadap Keseluruhan Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020	II-82
Gambar II.4.3 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2022	II-83
Gambar II.4.4 Perbandingan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau di Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015-2022.....	II-84
Gambar II.4.5 Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022	II-85
Gambar II.4.6 Perbandingan Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan di Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019	II-86
Gambar II.4.7 Ketaatan Terhadap RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2022II-	87
Gambar II.4.8 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2022	II-88
Gambar II.4.9 Persentase PMKS yang Tertangani.....	II-91
Gambar II.4.10 Tingkat Kesempatan Kerja di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2022	II-94
Gambar II.4.11 Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2022	II-96
Gambar II.4.12 Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Berakta Kelahiran Tahun 2015-2022II-	99
Gambar II.4.13. Rasio Kepemilikan KTP.....	II-100
Gambar II.4.15 Grafik Indeks Desa Membangun Tahun 2018-2022	II-101
Gambar II.4.16 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020	II-104
Gambar II.4.17 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020	II-105
Gambar II.4.18 Jumlah Jaringan Telepon Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022II-	109
Gambar II.4.19 Indeks SPBE Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022.....	II-110
Gambar II.4.20 Perbandingan Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022	II-111
Gambar II.4.21 Grafik IPLM Nasional dan Kalimantan Tengah Tahun 2020-2022	II-115
Gambar II.4.22. Grafik Proyeksi Jumlah Industri Kecil dan Tenaga Kerja Industri Kecil. II-	124
Gambar II.4.23 Grafik Perbandingan Persentase Rumah tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN (Persen) Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2012-2022	II-127
Gambar II.4.24 Grafik Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020II-	128
Gambar II.6.1 Grafik Proyeksi Proporsi dan Laju Pertumbuhan Penduduk	II-142
Gambar II.6.2 Grafik Proyeksi Proporsi Penduduk menurut Kelompok Umur	II-143
Gambar II.6.3 Grafik Proyeksi <i>Dependency Ratio</i> Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2045	II-144
Gambar II.6.4 Proyeksi <i>Sex Ratio</i> Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2045 ...	II-145

Gambar II.6.5 Proyeksi Jumlah Penduduk Per Kluster Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2045	II-148
Gambar II.6.6 Proyeksi <i>Sex Ratio</i> Per Kluster Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2045	II-149
Gambar II.6.7 Proyeksi <i>Dependency Ratio</i> Per Kluster Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2045	II-150
Gambar II.7.1 Tema Pembangunan Regional	II-153
Gambar II.7.2 Arah Pembangunan Pulau Kalimantan	II-154
Gambar II.7.3. Peta Pembagian Zona Wilayah di Kalimantan Tengah	II-214
Gambar IV.2.1 Penyeragaman Sasaran Utama Visi RPJPD Kalimantan Tengah	IV-4
Gambar IV.3.1. Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi	IV-8
Gambar IV.3.2. Proyeksi Piramida Penduduk Kalimantan Tengah Tahun 2025, 2035, dan 2045	IV-10
Gambar IV.3.3 Grafik Perbandingan Produktivitas dan Pertambahan Angkatan Kerja (BAU)	IV-11
Gambar IV.3.4. Grafik Perbandingan Produktivitas dan Pertumbuhan Penduduk Bekerja (<i>Big Push</i>)	IV-12
Gambar IV.3.5. Grafik IKLH Asumsi BAU (kiri) dan Intervensi/ <i>Big Push</i> (kanan)	IV-13
Gambar IV.4.1. Huma Betang Kerangka RPJPD Kalteng 2025-2045	IV-14
Gambar V.1.1 Periodisasi Arah Kebijakan Pembangunan Kalteng	V-3
Gambar V.2.1. Grafik Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Klaster Asumsi BAU (kiri) dan Asumsi Intervensi (kanan)	V-37
Gambar V.2.2. Pembagian Tema Pembangunan Menurut Zona	V-42
Gambar V.2.3. Peta Klasterisasi Wilayah Pembangunan Zona Barat	V-43
Gambar V.2.4. Peta Klasterisasi Wilayah Pembangunan Zona Tengah	V-V-57
Gambar V.2.5. Peta Klasterisasi Wilayah Pembangunan Zona Timur	V-72

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.1 Capaian Kinerja Per Tahapan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025	I-5
Tabel II.1.1 Luas Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah	II-3
Tabel II.1.2 Nama-Nama Sungai menurut Panjang, Kedalaman, dan Lebar	II-7
Tabel II.1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan	II-17
Tabel II.1.4 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kelompok Umur Tahun 2011-2022	II-18
Tabel II.1.5 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah	II-20
Tabel II.1.6 Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022	II-20
Tabel II.1.7 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022	II-21
Tabel II.2.1 Proporsi Per Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 - 2023	II-27
Tabel II.2.2 Indikator Komponen IPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022	II-52
Tabel II.2.3 Jumlah Indikator Berdasarkan Tujuan TPB yang Relevan di Provinsi Kalimantan Tengah	II-56
Tabel II.3.1 Pengeluaran per Kapita Bulanan Menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2021	II-59
Tabel II.4.1 Kondisi Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022	II-67
Tabel II.4.2 Kondisi Kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022	II-72
Tabel II.4.3 Capaian Indikator Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	II-89
Tabel II.4.4 Capaian Indikator Bidang Sosial	II-90
Tabel II.4.5 Capaian Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-92
Tabel II.4.6 Data Izin Lokasi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 - 2020	II-97
Tabel II.4.7 Kinerja Indikator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-101
Tabel II.4.8 Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017-2022	II-102
Tabel II.4.9 Capaian Indikator Bidang Olahraga	II-112
Tabel II.4.10 Capaian Indikator Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2023	II-114
Tabel II.4.11 Capaian Indikator Urusan Perpustakaan	II-116
Tabel II.4.12 Capaian Indikator Urusan Kearsipan Provinsi Kalimantan Tengah	II-116
Tabel II.4.13 Jumlah Produksi Perikanan Berdasarkan Jenis Budidaya Tahun 2016-2021	II-117
Tabel II.4.14 Jumlah Total Kunjungan Wisatawan di Kalimantan Tengah Tahun 2019-2022	II-118
Tabel II.4.15 Luas Panen Setiap Komoditas	II-119
Tabel II.4.16 Nilai Produktivitas Setiap Komoditas	II-120
Tabel II.4.17 Produktivitas Pertanian	II-120
Tabel II.4.18 Jumlah Pasar	II-122
Tabel II.4.19 Aktivitas Ekspor di Kalimantan Tengah	II-122
Tabel II.4.20 Jumlah Industri Besar Beserta Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar	II-124
Tabel II.4.21 Jumlah Industri Kecil beserta Tenaga Kerja Industri Kecil	II-124
Tabel II.4.22. Capaian Indikator Bidang Transmigrasi	II-125
Tabel II.4.23 Capaian Indikator Bidang Pengawasan	II-129
Tabel II.4.24. Capaian Indikator Bidang Perencanaan	II-130
Tabel II.4.25 Kondisi Indikator Bidang Kepegawaian Provinsi Kalimantan Tengah	II-131

Tabel II.4.26 Capaian Indikator Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2015-2020	II-134
Tabel II.4.27 Capaian Indikator Bidang Penelitian dan Pengembangan	II-136
Tabel II.4.28 Capaian Indikator Bidang Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2022	II-138
Tabel II.6.1 Proyeksi Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kelompok Umur, 2020-2045 (ribu jiwa)	II-140
Tabel II.6.2 Ringkasan Kondisi Demografi Hasil Proyeksi Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2045	II-140
Tabel II.6.3 Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2045 Berdasarkan Kluster Perencanaan Pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah	II-146
Tabel II.6.4 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar Provinsi Kalimantan Tengah ..	II-150
Tabel II.7.1 Strategi Penataan Ruang RTRW Kalteng 2023-2043	II-155
Tabel II.7.2 Sasaran Program RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035	II-159
Tabel II.7.3su Strategis dan Sasaran Prioritas KLHS RPJMD Kalteng Pilar Sosial	II-182
Tabel II.7.4 Isu Strategis dan Sasaran Prioritas KLHS RPJMD Kalteng Pilar Ekonomi.....	II-189
Tabel II.7.5 Isu Strategis dan Sasaran Prioritas KLHS RPJMD Kalteng Pilar Lingkungan	II-193
Tabel II.7.6 Isu Strategis dan Sasaran Prioritas KLHS RPJMD Kalteng Pilar Hukum dan Tata Kelola	II-198
Tabel II.7.7 Isu Strategis Lingkungan Hidup.....	II-200
Tabel II.7.8 <i>Gap</i> Pelaksanaan Indikator Turunan SDG's	II-201
Tabel II.7.9 Roadmap GDPK Kalimantan Tengah 2024-2049.....	II-206
Tabel II.7.10 Target Pengembangan <i>Food Estate</i> /Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah	II-212
Tabel II.7.11. Pembagian Zona dan Klaster di Kalimantan Tengah.....	II-215
Tabel IV.1.1 Komparasi Visi Pembangunan.....	IV-1
Tabel IV.2.1. Sasaran Utama Visi RPJPD Kalimantan Tengah	IV-5
Tabel IV.2.2 Tabel Periodisasi Sasaran Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2045....	IV-6
Tabel IV.3.1. Target Kontribusi Pulau Kalimantan	IV-7
Tabel IV.3.2. Proyeksi Kontribusi PDRB Asumsi BAU* di Pulau Kalimantan	IV-9
Tabel IV.3.3. Proyeksi Kontribusi PDRB dengan <i>Big Push</i> di Pulau Kalimantan	IV-9
Tabel IV.3.4. Proyeksi Angka Ketergantungan Kalimantan Tengah.....	IV-11
Tabel IV.4.1 Tabel Cascading Misi RPJPD	IV-15
Tabel V.2.1 Arah Kebijakan Transformasi Pembangunan Kalteng 2025-2045	V-6
Tabel V.2.2 Tabel Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kalteng 2025-2045.....	V-16
Tabel V.2.3 Periodisasi Indikator Utama Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045	V-27
Tabel V.2.4. Proyeksi Kontribusi PDRB Asumsi BAU per Zona	V-38
Tabel V.2.5. Proyeksi Kontribusi PDRB Asumsi BAU per Klaster.....	V-38
Tabel V.2.6. Proyeksi Kontribusi PDRB Klaster dengan Intervensi/ <i>Big Push</i>	V-39
Tabel V.2.7. Proyeksi Kontribusi PDRB Sektor di Klaster Palangkaraya	V-40
Tabel V.2.8. Proyeksi Kontribusi PDRB Sektor di Klaster Buntok.....	V-40
Tabel V.2.9. Proyeksi Kontribusi PDRB Sektor di Klaster Muara Teweh.....	V-41
Tabel V.2.10. Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Pangkalan Bun	V-44
Tabel V.2.11. Sasaran Pembangunan Klaster Pangkalan Bun	V-50
Tabel V.2.12. Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Sampit	V-50
Tabel V.2.13. Sasaran Pembangunan Klaster Sampit.....	V-56
Tabel V.2.14. Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Palangkaraya	V-58
Tabel V.2.15. Sasaran Pembangunan Klaster Palangkaraya.....	V-64

Tabel V.2.16. Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Kuala Kapuas	V-64
Tabel V.2.17. Sasaran Pembangunan Klaster Kuala Kapuas.....	V-71
Tabel V.2.18. Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Buntok.....	V-73
Tabel V.2.19. Sasaran Pembangunan Klaster Buntok	V-79
Tabel V.2.20. Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Muara Teweh.....	V-79
Tabel V.2.21. Sasaran Pembangunan Klaster Muara Teweh	V-85

BAB 1

PENDAHULUAN



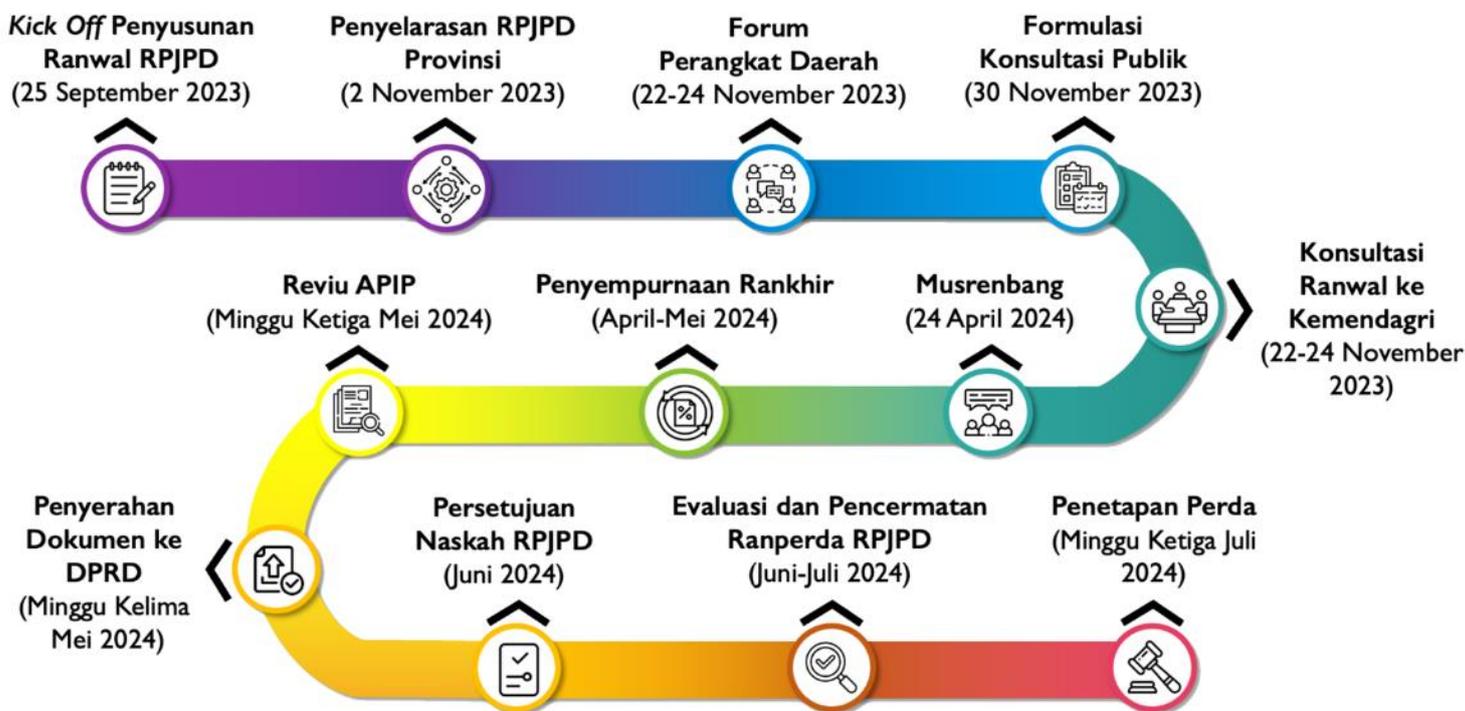
BAB PENDAHULUAN

INTRODUCTION

Capaian Kinerja Per Tahapan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025

Tahapan RPJPD		Kesejahteraan Masyarakat	Pelayanan Umum	Daya Saing
1.	RPJMD Tahun 2006-2011	Tidak Dievaluasi		
2.	RPJMD Tahun 2011-2016	Tidak Dievaluasi		
3.	RPJMD Tahun 2016-2021	90,13%	61,19%	67,65%
4.	RPJMD Tahun 2021-2026	95,98%	76,47%	61,70%
Rata-Rata		93,05%	69,13%	64,67%

Tahapan Penyusunan RPJPD





BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adanya norma tersebut menegaskan secara eksplisit bahwa dokumen pentahapan perencanaan pembangunan daerah diwajibkan adanya keseragaman dengan pentahapan dokumen perencanaan pembangunan nasional. Ini bertujuan agar muncul sinkronisasi antardokumen perencanaan pembangunan sehingga dapat menghasilkan tujuan yang sama.

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang berlaku secara nasional adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025. Dokumen RPJPN tersebut menjadi pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah pada rentang waktu dan periode yang sama. Namun demikian, dokumen tersebut telah mendekati waktu selesai dan berakhir pada tahun 2025. Sebagai konsekuensinya, seluruh dokumen perencanaan pembangunan memerlukan pembaruan untuk rentang waktu dua puluh tahun yang akan datang untuk periode tahun 2025 - 2045. Ini berlaku untuk level nasional maupun daerah sehingga RPJPN dan setiap RPJPD yang berpedoman pada RPJPN wajib dilakukan pembaruan dengan mengkontekstualisasikannya ke dalam kondisi wilayah saat ini dan proyeksinya di masa yang akan datang.

RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro dalam jangka waktu dua puluh tahun dan memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang kemudian digunakan





sebagai acuan oleh Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi dan program yang dituangkan dalam penyusunan RPJMD periode lima tahunan. RPJMD kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun. Dokumen RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama pemerintah daerah setiap tahunnya. Dokumen KUA dan PPAS digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan dan membiayai rencana kerja yang telah disusun sesuai dengan target yang ditetapkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa kurun waktu RPJPN sesuai dengan kurun waktu RPJPD. Dengan melihat bahwa periodisasi RPJPN Tahun 2005 - 2025 akan selesai pada tahun 2025, maka selanjutnya disusun dokumen baru RPJPN Tahun 2025 - 2045 yang menjadi pedoman bagi RPJPD Tahun 2025 - 2045 di seluruh wilayah provinsi atau kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut mengamanatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada level provinsi untuk melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD Provinsi. Hal tersebut dipertegas dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ Tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah menindaklanjuti penerbitan Surat Edaran tersebut dengan menyusun Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025. Kesimpulan secara umum, aspek-aspek RPJPD Tahun 2005-2025 telah dilaksanakan dengan capaian yang berbeda-beda. Aspek kesejahteraan menjadi salah satu aspek dengan capaian kinerja tertinggi, dengan rata-



rata sebesar 93,05%. Aspek pelayanan umum sendiri memiliki capaian kinerja rata-rata sebesar 69,13%. Sementara itu, aspek daya saing menjadi aspek dengan capaian kinerja terendah dengan nilai rata-rata sebesar 64,67%. Secara rinci, capaian kinerja per tahapan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada tabel berikut.

Tabel I.1.1 Capaian Kinerja Per Tahapan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025

No.	Tahapan RPJPD	Capaian Kinerja		
		Kesejahteraan Masyarakat	Pelayanan Umum	Daya Saing
1	RPJMD Tahun 2006-2011	Tidak Dievaluasi		
2	RPJMD Tahun 2011-2016	Tidak Dievaluasi		
3	RPJMD Tahun 2016-2021	90,13%	61,19%	67,65%
4	RPJMD Tahun 2021-2026	95,98%	76,47%	61,70%
Rata-Rata		93,05%	69,13%	64,67%

Sumber: Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Catatan pertama berkaitan dengan aspek pelayanan umum bahwa diperlukan adanya peningkatan kualitas pelayanan dasar sehingga masyarakat dapat memperoleh hak atas pelayanan yang dibutuhkan. Pada aspek kesejahteraan masyarakat, diperlukan adanya pemantapan kemandirian dan ketahanan ekonomi secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian. Catatan terakhir terkait dengan aspek daya saing bahwa diperlukan adanya perhatian dan fokus pada sektor pendukung daya saing daerah, seperti sektor ekonomi, tata ruang wilayah, pendidikan, dan kesehatan.

Lebih lanjut, dengan diterbitkannya Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024, telah diatur bahwa tahap penyusunan RPJPD selepas evaluasi dan penyusunan ranwal berdasarkan Pasal 16 adalah sebagai berikut: (1) persiapan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045; (2) penyusunan rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045; (3) Konsultasi rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045; (4) penyusunan rancangan RPJPD Tahun 2025-2045; (5) Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045; (6) perumusan rancangan akhir RPJPD Tahun 2025-2045; (7) Reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap rancangan akhir RPJPD Tahun 2025-2045; (8) Penyampaian Ranperda tentang

RPJPD Tahun 2025-2045 kepada DPRD; (9) Pembahasan Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045; (10) Evaluasi Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045; (11) Penetapan Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045. Dokumen ini disusun sebagai bagian penyusunan rancangan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2025-2045.

I.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

- 1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

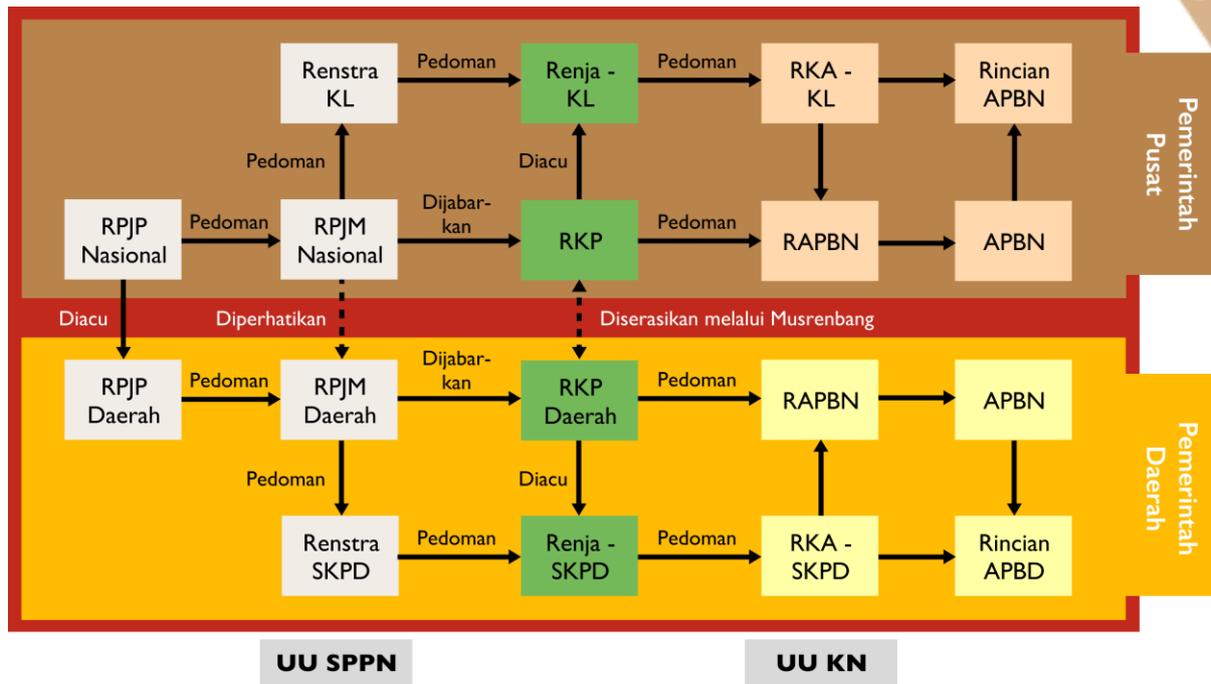


- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 13) Surat Edaran Mendagri No. 600.2.1/1570/SJ Tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- 14) Surat Edaran Mendagri Nomor 100.4.4/110/Sj Tahun 2023 tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD dan RPJMD) Dengan RTRW;
- 15) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- 16) Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045;
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035; dan
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

I.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai acuan pembangunan memiliki keterkaitan erat dengan dokumen-dokumen perencanaan lain, mulai dari Rencana Pembangunan. Hubungan antara RPJPD dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada alur perencanaan dan penganggaran sebagai berikut.





Gambar I.3.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran

I.3.1 Keterkaitan Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah senantiasa berpedoman pada visi, misi, tujuan, target, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJP Nasional, termasuk juga penentuan periode waktu dan langkah-langkah pembangunan dalam interval lima tahun. Terdapat tiga jenis transformasi yang menjadi sorotan utama dalam RPJPN Tahun 2025 - 2045 yang menjadi landasan penting bagi setiap penyusunan RPJPD. Tiga transformasi tersebut adalah tranformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Ketiga jenis tranformasi tersebut wajib diturunkan pentahapannya hingga pada level dokumen perencanaan di bawah RPJP, baik di nasional maupun daerah.

I.3.2 Keterkaitan Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah memiliki posisi sebagai landasan utama bagi perumusan visi, misi, dan program calon Kepala Daerah. Dokumen berikut juga menjadi acuan bagi Kepala Daerah terpilih dalam melakukan penyusunan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah juga menjadi payung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin perwujudan pelaksanaan otonomi daerah yang konkret, dinamis, selaras, dan bertanggung jawab.

I.3.3 Keterkaitan Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah

RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah berperan sebagai acuan dasar bagi perencanaan arah kebijakan pembangunan yang akan dijalankan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, baik wilayah daratan, lautan, dan udara. Sebagai acuan dasar perencanaan, RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah memiliki keterkaitan erat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah. Dokumen RTRW yang memuat perencanaan tata letak, pemanfaatan, dan pengendalian ruang wilayah disusun berdasarkan perencanaan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan melalui RPJPD.

I.3.4 Keterkaitan Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah

Mandat pembangunan RPJPN yang telah diregionalisasikan melalui RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah harus dapat diimplementasikan pada tataran Kabupaten/Kota. Untuk itu, RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah digunakan sebagai acuan dasar bagi penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota harus mengintegrasikan visi, misi, tujuan, target capaian, arah kebijakan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah.

I.4 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyusunan Rancangan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 bermaksud untuk menyiapkan dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2025-2045 yang menjabarkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok



pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

b. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah menyusun Rancangan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045.

I.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan RPJPD 2025-2045 Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada Rancangan Pedoman Penyusunan RPJMD 2025-2045 yang tersusun dari enam (6) bab utama yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menguraikan kondisi eksisting daerah yang memuat kondisi geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, pelayanan umum, dan evaluasi hasil RPJPD 2005-2025. Bab ini juga menjelaskan proyeksi demografi, proyeksi kebutuhan sarana prasarana, dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menjelaskan masalah dan isu strategis di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan hasil analisis data. Analisis permasalahan dan identifikasi isu-isu strategis ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang relevan dan efektif sesuai dengan konteks daerahnya.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Menjelaskan visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah selama 20 tahun kedepan.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Merinci arah kebijakan berupa tahapan pembangunan per lima tahun dalam rangka mewujudkan visi Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2045.

BAB VI PENUTUP



Bagian ini membahas seputar kaidah pelaksanaan maupun kaidah pembiayaan pembangunan sebagai tindak lanjut setelah rancangan disepakati



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



BAB



GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

GENERAL OVERVIEW OF REGIONAL CONDITIONS

Puncak Tertinggi
Gunung Sambang (1160 mdpl)

Kalimantan Barat

Kalimantan Timur

**KALIMANTAN
TENGAH**

ASPEK GEOGRAFIS



Administrasi

1 Kota, 13 Kabupaten



Luas Wilayah

153.443,9 km²



Sungai

11 Besar, 33 Anak



Suhu (2022)

Maks 35,2°C, Min 19,8°C



Curah Hujan

3259,1 mm



Hari Hujan

240 Hari



**Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (2022) 76,62**



**Indeks Risiko Bencana
(2022) 123,56**

Kalimantan Selatan

ASPEK DEMOGRAFIS



**Laju Pertumbuhan
Penduduk 1,44%**

ASPEK DAYA SAING DAERAH



**Indeks Pembangunan
Manusia (2022) 71,63**

ASPEK PELAYANAN UMUM



**Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja 67,23**



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Analisis aspek geografi dan demografi dapat memberikan gambaran dan hasil evaluasi terhadap kondisi geografis dan kependudukan di suatu wilayah. Aspek geografi meliputi pembahasan peran strategis wilayah, potensi sumber daya alam, kualitas lingkungan hidup, dan wilayah rawan bencana.

II.1.1 ASPEK GEOGRAFI

LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI

Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota, 136 kecamatan, 139 kelurahan dan 1.432 desa. Ibu kota provinsi yaitu Kota Palangkaraya yang secara geografis berada di titik sentral Provinsi Kalimantan Tengah. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 153.443,9 km² berdasarkan Kepmendagri 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. Kabupaten Murung Raya memiliki luas wilayah terbesar yaitu 23.573,3 km², sedangkan luas wilayah terkecil yaitu Kota Palangkaraya dengan luas 2.848,7 km². Berikut rincian nama kabupaten/kota beserta luas wilayah masing-masing beserta peta batas administrasi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

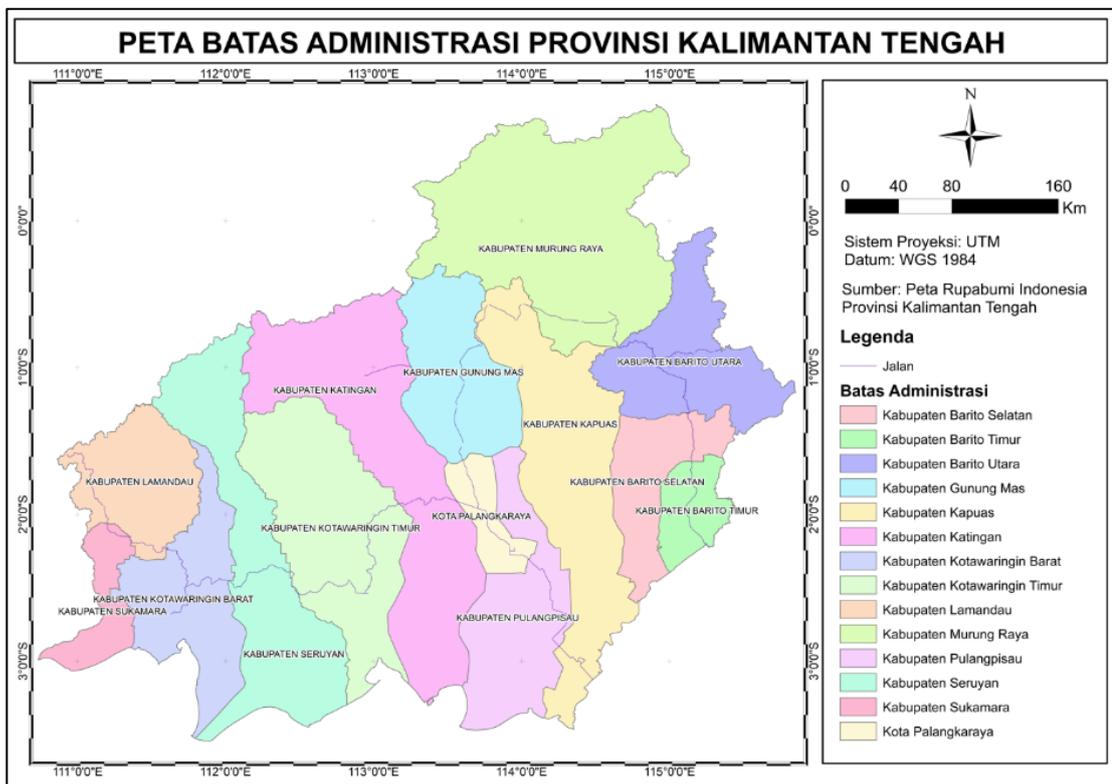
Tabel II.1.1 Luas Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kabupaten/Kota	Luas daratan (km ²)	Persentase terhadap luas provinsi
1	Kotawaringin Barat	9.480,3	6,18
2	Kotawaringin Timur	15.543,8	10,13
3	Kapuas	17.033,6	11,1
4	Barito Selatan	6.267,1	4,08
5	Barito Utara	9.984,8	6,51
6	Sukamara	3.311,2	2,16
7	Lamandau	7.632,4	4,97



No	Kabupaten/Kota	Luas daratan (km ²)	Persentase terhadap luas provinsi
8	Seruyan	15.215,2	9,92
9	Katingan	20.382,3	13,28
10	Pulang Pisau	9.650,9	6,29
11	Gunung Mas	9.305,8	6,06
12	Barito Timur	3.212,5	2,09
13	Murung Raya	23.575,3	15,36
14	Kota Palangkaraya	2.848,7	1,86
Kalimantan Tengah		153.443,90	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2023 (diolah)



Gambar II.1.1 Peta Batas Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah

LETAK DAN KONDISI GEOGRAFIS

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas di Indonesia dengan luas 153.443,9 km². Provinsi Kalimantan Tengah terletak diantara 0°45' Lintang Utara hingga 3°30' Lintang Selatan dan 110°45' Bujur Timur hingga 115°51' Bujur Timur.



Secara geografis, provinsi ini berbatasan langsung dengan perairan yaitu Laut Jawa. Batas wilayah lainnya sebagai berikut.

1. Batas Utara: Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur;
2. Batas Timur: Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan;
3. Batas Selatan: Laut Jawa; dan
4. Batas Barat: Kalimantan Barat.

Kondisi fisik Provinsi Kalimantan Tengah dapat dibagi menjadi tiga kawasan, yaitu bagian selatan, bagian tengah, dan bagian utara. Bagian selatan berupa daerah pantai dan rawa-rawa dengan ketinggian 0-50 mdpl. Bagian tengah berupa daerah perbukitan dengan ketinggian 50-150 mdpl. Bagian utara berupa daerah perbukitan dan pegunungan. Wilayah bagian tengah hingga utara yang bertopologi dataran tinggi memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai daerah perkebunan.

Provinsi Kalimantan Tengah terletak di lokasi yang cukup stabil karena berada di tengah lempeng tektonik sehingga disebut sebagai daerah yang paling terhindar dari bencana tektonik seperti gempa bumi dan tsunami. Provinsi ini juga merupakan salah satu provinsi dengan hutan terluas di Indonesia yang mencapai 15 juta hektar. Kondisi ini menjadikan Kalimantan memiliki biodiversitas hayati yang banyak, termasuk keberadaan hewan endemik yang hidup di Taman Nasional Tanjung Puting. Hutan juga memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat setempat. Keberagaman kondisi alam Kalimantan Tengah memiliki potensi pengembangan ekonomi seperti potensi wisata alam, potensi perkebunan, dan sebagainya. Saat ini, diantara pemanfaatan sebagai wisata alam seperti Taman Nasional Tanjung Puting, Gosong Senggora, Pantai Ujung Pandaran, dan Sebangau.

KONDISI TOPOGRAFI WILAYAH

Berdasarkan kondisi bentang alam, topografi Provinsi Kalimantan Tengah terbagi kedalam tiga satuan fisiografis, yaitu pegunungan, dataran dan rawa. Wilayah bagian utara terdiri dari rangkaian pegunungan. Titik tertinggi terletak di Gunung





Batu Sambang yang mencapai 1.660 meter dpl. Wilayah bagian tengah mulai dijumpai perbukitan dengan topografi landai. Semakin ke arah selatan, kemiringan lahan semakin datar. Wilayah bagian selatan terdiri dari dataran rendah, rawa, dan paya-paya.

KONDISI GEOLOGI

Struktur geologi Provinsi Kalimantan Tengah tidak terpisahkan dari struktur geologi Kalimantan secara umum. Struktur geologi secara regional berupa patahan/sesar (*fault*), yaitu struktur yang terbentuk karena pergerakan lempeng di zona patahan. Sesar terdiri dari sesar normal dan sesar naik. Pada bagian tengah-utara, struktur geologi berupa patahan, lipatan, dan kekar. Pada bagian selatan-barat daya, struktur geologi relatif stabil. Pembentukan sesar, lipatan dan kekar berhubungan dengan aktivitas tektonik pada Zaman Tersier. Struktur batuan di Kalimantan Tengah tersusun dari batuan berumur tua ke muda sebagai berikut:

1. Batuan Malihan, batuan berumur Paleozoikum-Mesozoikum yang terdiri dari filit, sikis, genes, kuarsit, dan kristalin.
2. Batuan Beku, batuan berumur Perm-Trias yang terdiri dari granit, granodiorit, diorit, tonalit, gabro, dan monzolit.
3. Batuan Sedimen, terdiri dari sedimen klastik.
4. Batuan Vulkanik, terdiri dari breksi, aliran lava, batupasir tufaan, dan intrusi-intrusi kecil andesit basaltis.
5. Alluvial, endapan berumur Pleistosen-Resen yang terdiri dari pasir, lempung, gambut, dan lumpur.

KONDISI HIDROLOGI

Provinsi Kalimantan Tengah dialiri sebelas sungai yang berhulu di wilayah bagian utara. Anak-anak sungai di bagian hulu berpola dendritik dengan kemiringan yang tinggi. Sungai-sungai utama memiliki kemiringan rendah hingga ke wilayah tengah. Pada wilayah tengah terdapat rawa gambut dan pada bagian hilir terdapat rawa pasang surut. Total terdapat 11 sungai besar dan 33 sungai kecil atau anak sungai. Berikut rincian nama sungai di Provinsi Kalimantan Tengah.



Tabel II.1.2 Nama-Nama Sungai menurut Panjang, Kedalaman, dan Lebar di Provinsi Kalimantan Tengah

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar (m)	Kedalaman (m)
1	Sungai Jelai	200	150	8
2	Sungai Arut	250	100	4
3	Sungai Lamandau	300	150	6
4	Sungai Kumai	175	250	6 - 9
5	Sungai Seruyan	350	250	5
6	Sungai Mentaya	400	350	6
7	Sungai Katingan	650	250	3 - 6
8	Sungai Sebangau	200	100	5
9	Sungai Kahayan	600	450	7
10	Sungai Kapuas	600	450	6
11	Sungai Barito	900	350 - 500	6 - 14

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2023 (diolah)

KONDISI KLIMATOLOGI

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki iklim Tipe A, yaitu iklim tropis yang lembab dan panas. Pengukuran iklim dilakukan pada beberapa titik, seperti Pangkalan Bun, Sampit, Buntok, dan Muara Teweh. Suhu udara maksimum pada tahun 2022 mencapai 35,2°C sedangkan suhu udara minimum mencapai 19,8°C. Jumlah curah hujan sebesar 3.259,1 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 240 hari.

LINGKUNGAN HIDUP

Lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai suatu entitas spasial yang mencakup energi, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan tindakannya, yang saling mempengaruhi alam, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sejalan dengan pelaksanaan berbagai proyek strategis di Provinsi Kalimantan Tengah, di mana program dan kegiatan pembangunan membutuhkan suplai sumber daya alam yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kondisi alam dan kehidupan seperti peningkatan polusi dan degradasi kualitas lingkungan. Kondisi buruk tersebut berpotensi mengancam daya dukung, kapasitas tahanan, dan produktivitas lingkungan hidup, yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap masyarakat dan program-program pembangunan. Oleh karena itu, menjaga dan mengelola lingkungan hidup dengan baik demi sangat diperlukan guna keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan secara kompleks dan menyeluruh.



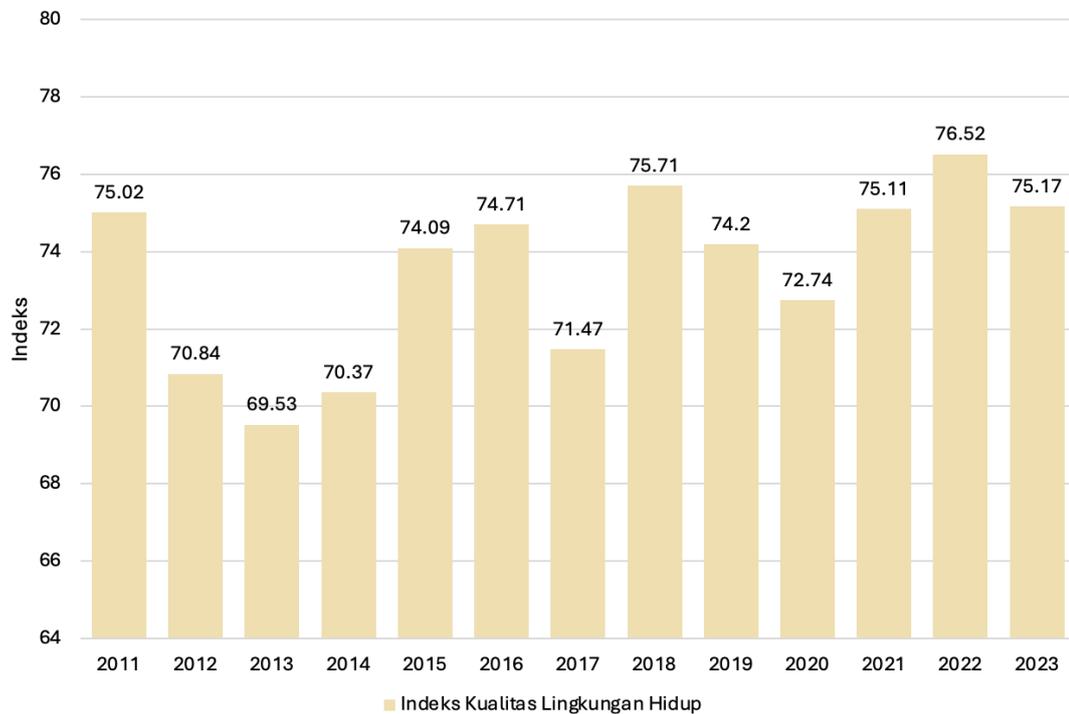
Pengukuran kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Tinggi rendahnya nilai IKLH mampu mencerminkan sejauh mana upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup, baik di wilayah provinsi maupun nasional. IKLH mencakup penilaian kondisi kualitas air (dikenal sebagai Indeks Kualitas Air atau IKA), kondisi kualitas udara (dikenal sebagai Indeks Kualitas Udara atau IKU), serta kondisi tutupan lahan (dikenal sebagai Indeks Kualitas Tutupan Lahan), dan kondisi kualitas air laut (IKAL). IKLH berfungsi sebagai ukuran performa pengelolaan lingkungan hidup dan menggambarkan secara substansial terkait kualitas lingkungan hidup suatu daerah. IKLH menjadi sumber data dan informasi penting dalam rangka merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH bukan semata-mata memberikan peringkat kualitas lingkungan hidup, tetapi juga dapat dijadikan sebagai indikasi adanya upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 mengenai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, terdapat tiga indikator utama sebagai komponen untuk menghitung IKLH, yaitu indikator kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Indikator kualitas air dihitung berdasarkan berbagai parameter, yakni Derajat Keasaman (pH), Kadar Oksigen Terlarut (DO), Kebutuhan Oksigen Biologi (BOD), Kebutuhan Oksigen Kimia (COD), Total Padatan Tersuspensi (TSS), Kadar Nitrat (NO₃-N), Total Fosfat (T-Phosphat), dan Kandungan Fecal Coliform (Fecal Coli). Indikator kualitas udara dihitung berdasarkan parameter NO₂, SO₂, dan PM_{2,5} yang diambil dari berbagai lokasi seperti area perkantoran, industri, permukiman, dan transportasi. Sementara itu, komponen indikator kualitas tutupan lahan dihitung berdasarkan perhitungan luas tutupan lahan, tutupan vegetasi non-hutan termasuk semak belukar, ruang terbuka hijau, area rehabilitasi hutan dan lahan dalam wilayah yang diamati. Kemudian komponen IKAL, yakni TSS, DO (oksigen terlarut), minyak dan lemak, amonia total, dan fosfat (sebagai orto fosfat).

Sebelum tahun 2020, metode perhitungan IKLH menggunakan 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Mulai tahun 2020, terdapat penambahan indikator dan

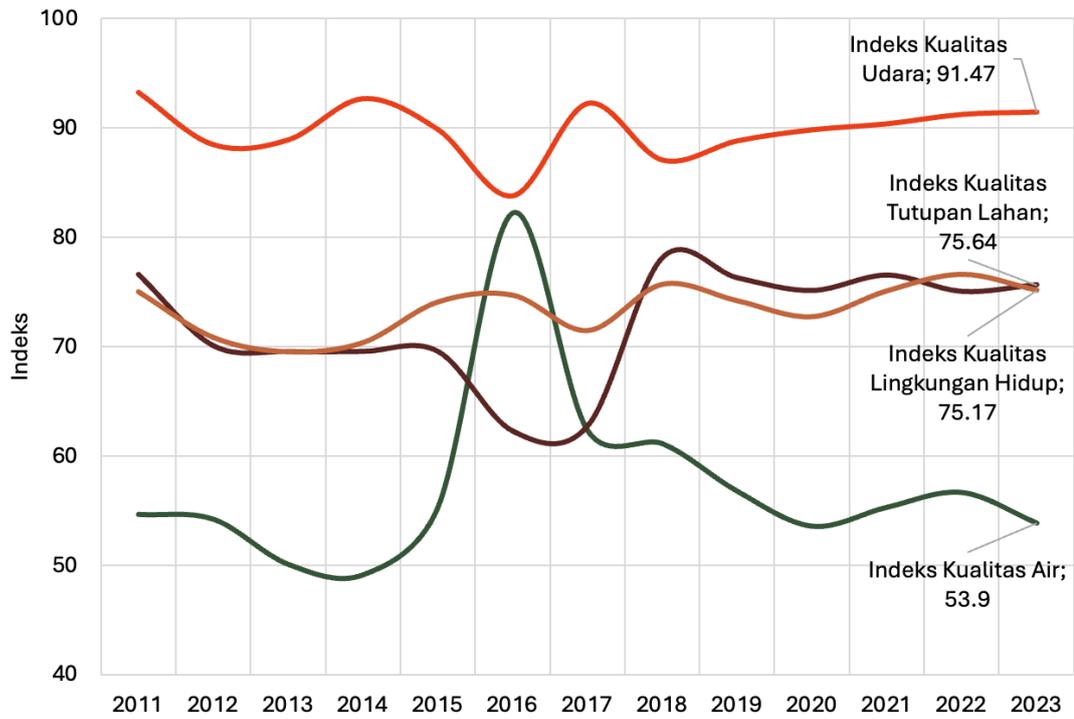


perubahan rumus IKLH. Indikator yang digunakan untuk menghitung nilai IKLH terbaru adalah Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu dari 2011 hingga 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar II.1.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2020

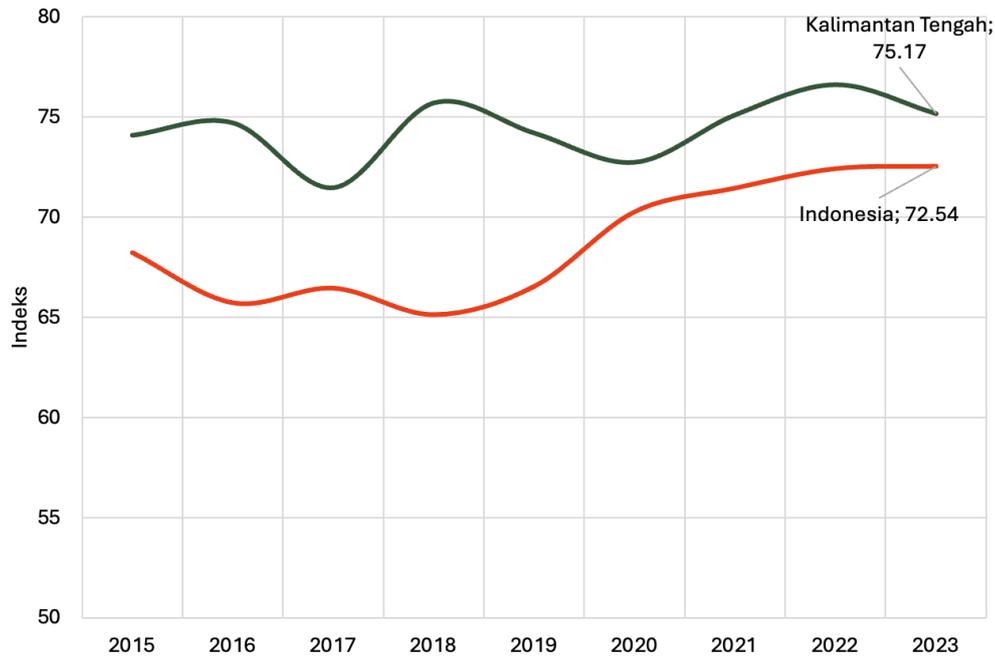
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Tengah terus mengalami penurunan sejak Tahun 2018. Pada tahun 2018 IKLH sebesar 75,71 sedangkan pada Tahun 2020 sebesar 72,74. Penyumbang turunnya IKLH adalah dari rendahnya nilai Indeks Kualitas Air (IKA) yang semakin menurun akibat meningkatnya pencemaran sungai. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dari tahun ke tahun juga mengalami penurunan akibat deforestasi dan alih fungsi kawasan, sehingga berdampak terhadap perubahan tutupan lahan. Gambar II.1.3 di bawah menunjukkan pergerakan nilai IKA, IKU, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, dan IKLH selama periode 2011–2022.



Gambar II.1.4 Perbandingan Nilai IKA, IKU, IKTL, dan IKLH Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022

Adapun berikut merupakan perbandingan Nilai IKLH Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nasional tahun 2016-2020. Selama periode lima tahun tersebut nilai IKLH Kalimantan Tengah secara konsisten berada di atas nilai IKLH nasional.





Gambar II.1.5 Perbandingan Nilai IKLH Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nasional Tahun 2016-2020

KETAHANAN DAERAH

Indeks Ketahanan Daerah merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di suatu wilayah. Indeks Ketahanan daerah dinilai melalui survei ketahanan daerah dengan 7 fokus prioritas penilaian yang terdiri dari perkuatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, pengembangan sistem pemulihan bencana.

Tabel II.1.3 Hasil Kajian Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2026

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Ketahanan Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,80	0,43	Sedang
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,60		

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Ketahanan Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik	0,45		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,27		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,52		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,42		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,24		

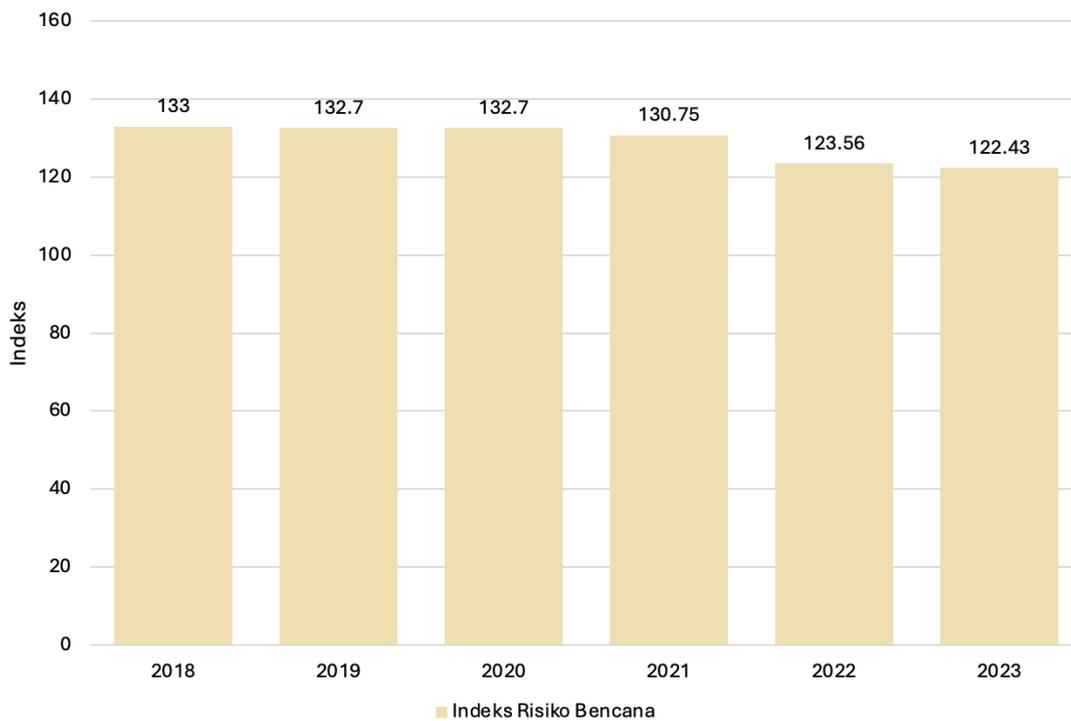
Sumber: Diolah dari BNPB

Berdasarkan hasil penilaian pada tabel di atas, nilai Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah 0,43 dan masuk ke dalam kategori sedang. Nilai tertinggi dari fokus prioritas penilaian adalah perkuatan kebijakan dan kelembagaan dengan nilai indeks 0,8. Meskipun begitu masih terdapat dua penilaian yang cukup rendah dan terpaut selisih yang cukup jauh dari fokus prioritas penilaian lainnya, yaitu penanganan tematik kawasan rawan bencana dengan nilai 0,27 dan pengembangan sistem pemulihan bencana dengan nilai 0,24. Maka dari itu, diperlukan peningkatan kapasitas pada penanganan tematik kawasan rawan bencana dan pengembangan sistem pemulihan bencana untuk meningkatkan nilai indeks ketahanan daerah.

WILAYAH RAWAN BENCANA

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan hasil perhitungan yang digunakan untuk menilai kerawanan multi ancaman bencana suatu wilayah. Nilai IRB Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 sebesar 123,56 atau kategori sedang. Menurut BNPB (2022), ancaman bencana yang terdapat di wilayah ini meliputi gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstrem atau abrasi, kebakaran hutan dan lahan, serta cuaca ekstrem. Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki nilai IRB kategori sedang, kecuali Kabupaten Katingan yang memiliki nilai IRB kategori tinggi. Diantara ancaman

bencana yang tergolong tinggi di Kabupaten Katingan yaitu banjir, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan, dan cuaca ekstrem.



Gambar II.1.6 Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalteng Tahun 2018-2023

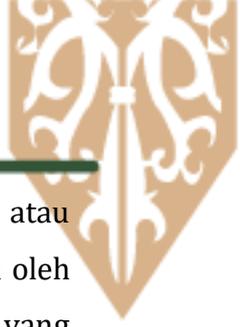
Sumber: Diolah dari BNPB

Masing-masing jenis ancaman bencana yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki karakteristik dan pola yang spesifik. Rincian karakteristik umum potensi bencana di Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut.

- **Kebakaran hutan dan lahan**

Kebakaran hutan dan lahan terjadi hampir setiap tahun saat musim kemarau. Karhutla disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor iklim, kondisi lahan yang sebagian besar gambut, serta pembersihan lahan. Kebakaran ini berdampak pada terancamnya kesehatan masyarakat, terganggunya aktivitas transportasi karena kabut asap yang menghalangi jarak pandang, dan semakin langkanya biodiversitas hayati. Potensi ancaman bencana kebakaran terdapat di semua kabupaten/kota di Kalimantan Tengah.

- **Banjir**



Ancaman banjir di Kalimantan Tengah terdiri dari ancaman banjir bandang atau banjir kiriman dan banjir rob. Fenomena banjir bandang terjadi disebabkan oleh tingginya intensitas curah hujan sehingga air sungai meluap dalam durasi yang relatif lama. Posibilitas terjadinya banjir bandang juga dipengaruhi oleh pola sungai di Kalimantan Tengah yang berjenis dendritik. Pola dendritik memiliki karakteristik berupa tingkat risiko banjir yang tinggi apabila terjadi hutan merata di seluruh daerah aliran sungai. Fenomena banjir rob disebabkan oleh naiknya permukaan air sungai atau air di pesisir yang dipengaruhi oleh pasang laut. Seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah memiliki potensi bahaya banjir yang tinggi kecuali Kabupaten Barito Timur dengan klasifikasi kelas sedang.

- **Tanah longsor**

Ancaman tanah longsor umumnya terdapat di wilayah dengan lereng-lereng terjal, topografi berbukit, pegunungan, dan wilayah hulu DAS. Tanah longsor biasanya terjadi saat musim hujan dengan intensitas tinggi dan durasi yang lama. Sebagian besar kabupaten di Kalimantan Tengah memiliki tingkat potensi bahaya rendah dan sedang kecuali Kabupaten Murung Raya yang memiliki klasifikasi kelas potensi bahaya longsor tinggi.

- **Kekeringan**

Kekeringan terjadi saat musim kemarau terutama di wilayah dataran tinggi, perbukitan, pegunungan, dan daerah non pasang surut. Wilayah Kalimantan Tengah bagian selatan memiliki potensi bencana kekeringan yang rendah karena wilayahnya relatif basah sehingga kebutuhan air tetap bisa tercukupi. Kabupaten yang memiliki potensi bencana kekeringan tinggi adalah Kabupaten Sukamara.

- **Cuaca ekstrem**

Cuaca ekstrem yang mengancam Kalimantan Tengah yaitu angin puting beliung, yang terjadi saat musim peralihan atau pancaroba, baik musim hujan ke kemarau atau musim kemarau ke hujan. Wilayah yang memiliki tingkat risiko tinggi terletak di bagian selatan dan tengah.

- **Gelombang ekstrem/abrasi**

Gelombang ekstrem ditimbulkan oleh siklon tropis yang mengakibatkan peningkatan gelombang laut. Peningkatan tersebut menyebabkan abrasi pantai.



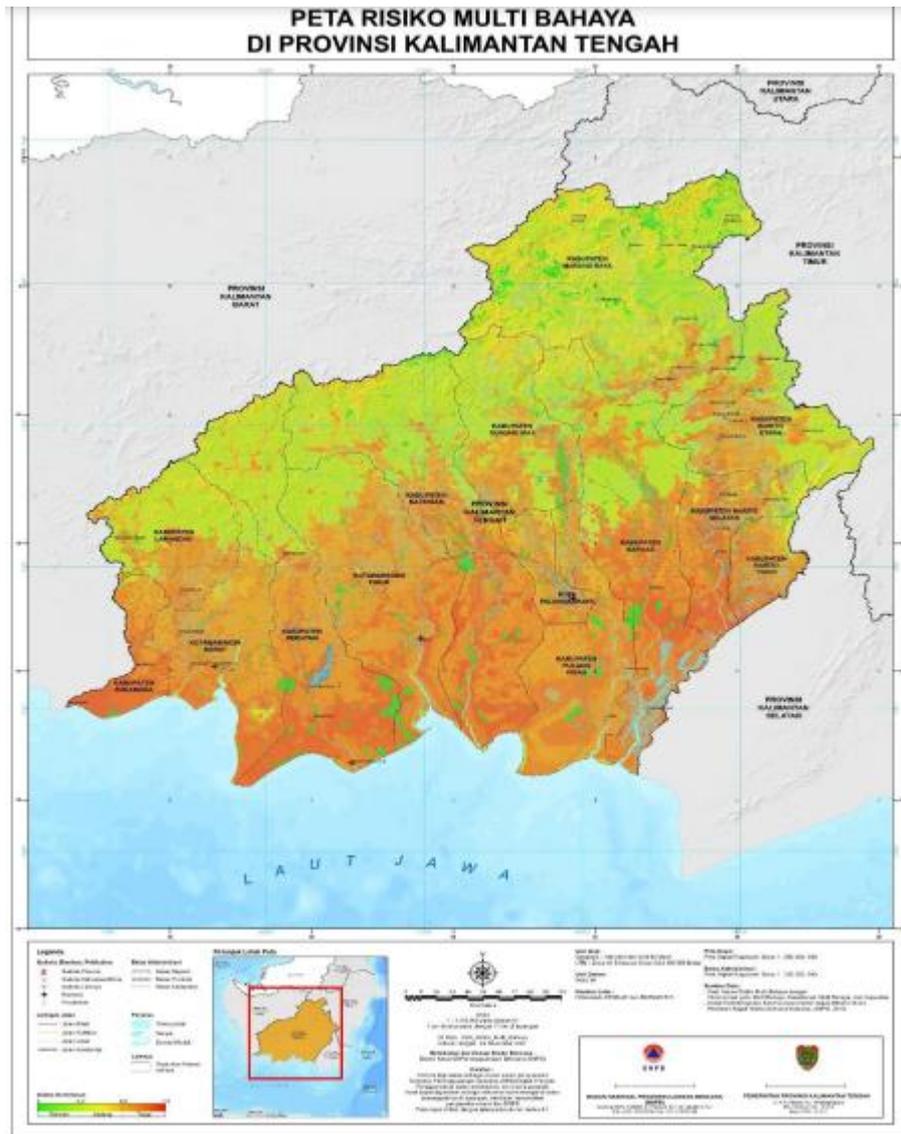


Abrasi pantai apabila terjadi secara intens akan berpengaruh terhadap berubahnya garis pantai yang menjadi maju dan/atau mundur yang akan menimbulkan masalah lainnya seperti masalah kepemilikan hak tanah, kerusakan bangunan, luas lahan tambak yang berkurang, dan sebagainya. Kabupaten yang memiliki potensi ancaman ini terletak pada wilayah bagian selatan Kalimantan Tengah.

- **Gempa bumi**

Potensi ancaman bencana gempa bumi di Kalimantan Tengah tergolong dalam klasifikasi kelas rendah. Hal ini disebabkan karena Kalimantan Tengah tidak terletak di zona pertemuan lempeng sehingga apabila terjadi pertemuan lempeng maka getaran yang dirasakan sangat kecil.





Gambar II.1.7 Peta Risiko Multi Bahaya Kalimantan Tengah
Sumber: Dokumen KRB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2026

Adapun di atas tersaji peta risiko multi bahaya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kajian dari BNPB. Dapat dicermati bahwa sebagian besar provinsi Kalimantan Tengah memiliki risiko multi bahaya yang tinggi. Khususnya daerah yang banyak dihuni oleh penduduk. Hal ini perlu menjadi perhatian bahwa aktivitas ekonomi penduduk dapat sewaktu-waktu terancam oleh bahaya bencana. Oleh karena itu, perlu perhatian agar infrastruktur pelayanan publik seperti sekolah, pasar, dan fasilitas kesehatan juga segala aktivitas masyarakat dapat memenuhi kaidah-kaidah standar mitigasi bencana. Sehingga dapat meminimalisir potensi kerugian baik jiwa maupun finansial.



POTENSI SUMBER DAYA ALAM

Kalimantan Tengah memiliki sumber energi yang besar, baik energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Potensi sumber daya tidak terbarukan seperti batu bara dan gas alam. Potensi sumber daya terbarukan seperti energi surya, air, angin, biomassa dan biogas. Potensi energi terbarukan yang besar di Kalimantan Tengah perlu dikembangkan dan direalisasikan terutama untuk sebagai alternatif dari sumber daya tidak terbarukan sebagai pembangkit listrik.

Wisata alam yang tersebar diseluruh kabupaten/kota menjadi salah satu keunggulan dan penggerak ekonomi di Kalimantan Tengah. Pengembangan pariwisata secara partisipatif mampu mendayagunakan masyarakat lokal, diantaranya dengan mengadakan pembinaan, menciptakan masyarakat yang sadar wisata, mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjaga alam dan melestarikan budaya adat-istiadat.

II.1.2 ASPEK DEMOGRAFI

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 mencapai 2.741.000 jiwa yang terdiri atas 1.420.800 jiwa penduduk laki-laki dan 1.320.200 jiwa penduduk perempuan. Secara umum, laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah cenderung mengalami sedikit peningkatan. Tercatat pada tahun 2011 laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 1,28% dari tahun sebelumnya, sedangkan laju pertumbuhan penduduk tahun 2022 mencapai 1,44%. Meskipun demikian, pada rentang tahun 2011 hingga 2022 terjadi beberapa fluktuasi laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan nilai mencapai 4,42%. Sementara itu, laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 dengan nilai sebesar -1,65%. Fluktuasi pertumbuhan penduduk tersebut disebabkan oleh beberapa faktor demografi, seperti kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Secara detail, jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan laju pertumbuhan penduduk disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)
-------	------------------------	------------------	------------------	----------------------



2011	2.249.146	1.173.070	1.076.076	1,28
2012	2.283.687	1.191.086	1.092.601	1,54
2013	2.384.700	1.243.800	1.140.900	4,42
2014	2.439.858	1.273.302	1.166.556	2,31
2015	2.495.035	1.302.796	1.192.239	2,26
2016	2.550.192	1.332.274	1.217.918	2,21
2017	2.605.274	1.361.715	1.243.559	2,16
2018	2.660.200	1.391.000	1.269.200	2,11
2019	2.714.900	1.420.300	1.294.600	2,05
2020	2.670.000	1.385.900	1.284.100	-1,65
2021	2.702.400	1.401.600	1.300.800	1,21
2022	2.741.000	1.420.800	1.320.200	1,44

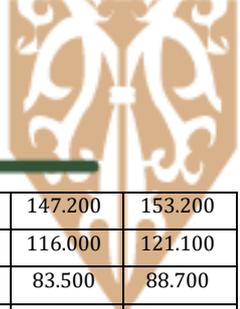
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

KOMPOSISI DAN JUMLAH PENDUDUK

Selain ditinjau berdasarkan jenis kelamin, kondisi demografi di Provinsi Kalimantan Tengah dapat ditinjau berdasarkan komposisi umur penduduk. Jumlah penduduk pada kelompok umur 0 – 4 mencapai 221.900 jiwa pada tahun 2022. Nilai tersebut mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan data tahun 2020 yang mencapai 220.400 jiwa dan tahun 2021 yang mencapai 220.800 jiwa. Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) pada tahun 2021 mencapai 1.903.400 jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 1.936.100 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk lanjut usia (65+ tahun) pada tahun 2022 mencapai 134.200 jiwa. Jumlah penduduk lanjut usia tersebut mengalami kenaikan sekitar dua kali lipat apabila dibandingkan jumlah penduduk lanjut usia pada tahun 2011 sebesar 65.267 jiwa. Secara rinci, komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.1.5 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kelompok Umur Tahun 2011-2022

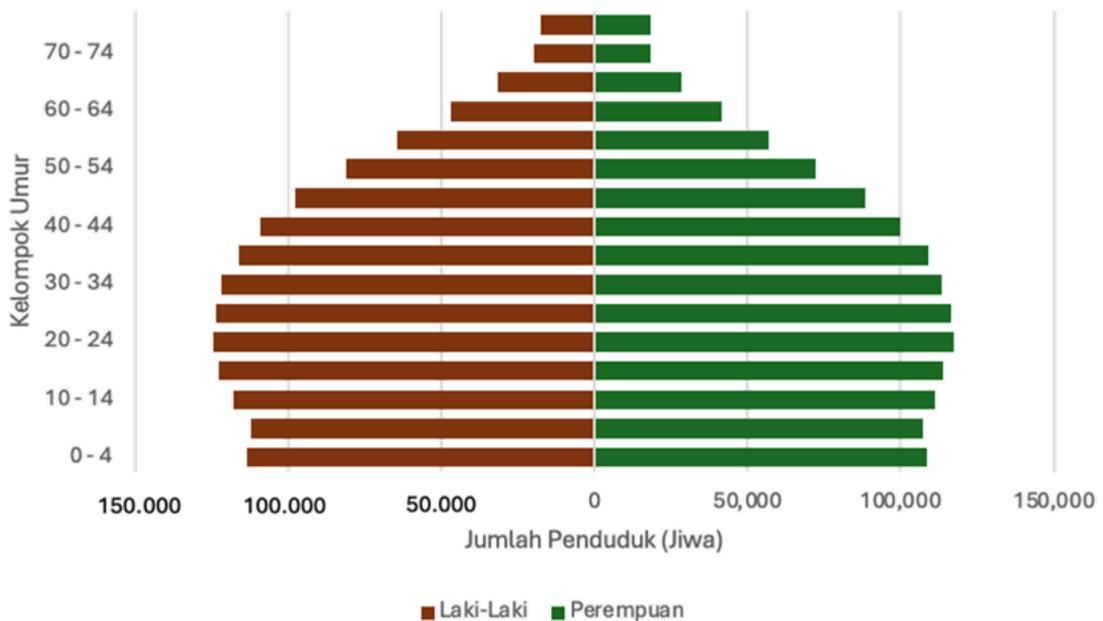
Kelompok Umur	Tahun											
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0 - 4	236.698	240.333	244.500	247.029	250.685	252.035	253.192	254.300	254.900	220.400	220.800	221.900
5 - 9	242.939	246.669	232.600	234.705	235.056	237.277	239.490	242.000	244.100	221.500	219.800	219.500
10 - 14	216.303	219.397	222.100	224.294	227.268	229.271	231.695	234.300	236.200	234.600	232.000	229.300
15 - 19	201.388	204.529	218.100	219.092	220.281	222.595	224.219	226.000	228.100	237.900	236.700	236.300
20 - 24	211.259	214.567	220.900	222.452	223.214	224.219	225.429	226.700	227.500	240.500	241.200	241.700
25 - 29	231.725	235.345	222.600	225.353	228.209	230.628	232.892	235.400	236.900	236.400	237.800	240.000
30 - 34	208.788	212.016	220.100	224.124	227.570	231.169	234.275	236.900	239.600	232.200	233.600	235.100
35 - 39	183.807	186.650	206.300	213.134	218.071	222.178	226.618	230.900	235.100	218.000	221.100	224.900
40 - 44	149.109	151.405	171.000	178.901	188.226	197.389	205.720	213.200	220.400	202.400	205.700	209.100
45 - 49	116.127	117.913	135.200	142.539	150.057	157.866	165.839	173.600	181.900	175.500	180.600	186.000



50 - 54	87.903	89.254	102.200	108.103	114.446	120.737	127.408	134.200	141.700	141.600	147.200	153.200
55 - 59	57.301	58.184	72.200	77.287	82.319	87.773	93.187	98.500	104.400	111.100	116.000	121.100
60 - 64	40.532	41.155	47.000	50.324	54.043	58.039	62.453	67.000	71.900	78.600	83.500	88.700
65+	65.267	66.270	69.900	72.521	75.590	79.016	82.857	87.200	92.200	119.300	126.400	134.200
Jumlah	2.249.146	2.283.687	2.384.700	2.439.858	2.495.035	2.550.192	2.605.274	2.660.200	2.714.900	2.670.000	2.702.400	2.741.000

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

Data komposisi penduduk juga dapat direpresentasikan dalam bentuk piramida penduduk. Sebagai contoh, data komposisi penduduk tahun 2022 yang disajikan pada gambar berikut menggambarkan jenis piramida penduduk stasioner awal. Jenis piramida tersebut ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang masif, angka kelahiran yang mulai stabil, dan angka harapan hidup yang mulai membaik.



Gambar II.1.8 Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

Komposisi penduduk dapat pula direpresentasikan melalui rasio jenis kelamin. Berdasarkan rasio jenis kelamin, komposisi penduduk Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2011-2022 masih didominasi oleh penduduk laki-laki. Pada tahun 2011, rasio jenis kelamin Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 109,01. Angka tersebut menandakan bahwa dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 109 penduduk laki-laki. Sementara itu, rasio jenis kelamin Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 mencapai 107,62. Angka tersebut menandakan bahwa dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat



107 hingga 108 penduduk laki-laki. Rincian rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.1.6 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022

Tahun	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
2011	1.173.070	1.076.076	109,01
2012	1.191.086	1.092.601	109,01
2013	1.243.800	1.140.900	109,02
2014	1.273.302	1.166.556	109,15
2015	1.302.796	1.192.239	109,27
2016	1.332.274	1.217.918	109,39
2017	1.361.715	1.243.559	109,50
2018	1.391.000	1.269.200	109,60
2019	1.420.300	1.294.600	109,71
2020	1.385.900	1.284.100	107,93
2021	1.401.600	1.300.800	107,75
2022	1.420.800	1.320.200	107,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

DISTRIBUSI DAN KEPADATAN PENDUDUK

Berdasarkan distribusi penduduk, dapat dilihat bahwa penduduk Provinsi Kalimantan Tengah secara umum terkonsentrasi pada empat daerah dengan persentase penduduk diatas 10%. Adapun keempat daerah tersebut meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kota Palangkaraya, dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi kabupaten dengan persentase penduduk tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 dengan nilai 15,91%. Sementara itu, Kabupaten Sukamara menjadi kabupaten dengan persentase penduduk terendah dengan nilai 2,44% dari total penduduk Provinsi Kalimantan Tengah. Secara rinci, distribusi penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.1.7 Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Proporsi Penduduk (%)
Kotawaringin Barat	274.900	10,03
Kotawaringin Timur	436.100	15,91
Kapuas	423.200	15,44

Barito Selatan	132.000	4,82
Barito Utara	160.200	5,84
Sukamara	66.800	2,44
Lamandau	104.400	3,81
Seruyan	166.100	6,06
Katingan	164.000	5,98
Pulang Pisau	136.200	4,97
Gunung Mas	142.300	5,19
Barito Timur	115.400	4,21
Murung Raya	113.500	4,14
Palangkaraya	305.900	11,16
Kalimantan Tengah	2.741.000	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

Berdasarkan kepadatan penduduk, dapat dilihat bahwa Kota Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dengan daerah lain. Kepadatan penduduk Kota Palangkaraya pada tahun 2011 mencapai 78,8 jiwa/km². Nilai tersebut semakin meningkat setiap tahunnya, hingga pada tahun 2022 mencapai 107,3 jiwa/km². Kepadatan penduduk di Kota Palangkaraya terjadi karena luas wilayah kota tersebut hanya sebesar 2.848,7 km², sedangkan jumlah penduduk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi sebaliknya terjadi di Kabupaten Murung Raya yang memiliki kepadatan penduduk terendah di Provinsi Kalimantan Tengah. Memiliki luas wilayah sebesar 23.575,3 km², kepadatan penduduk di Kabupaten Murung Raya hanya sebesar 4,18 jiwa/km² pada tahun 2011 dan 4,81 jiwa/km² pada tahun 2022. Hal ini terjadi karena kondisi Kabupaten Murung Raya yang didominasi oleh tutupan lahan berupa hutan. Secara detail, kepadatan penduduk tiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.1.8 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk											
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kotawaringin Barat	9.480,30	25,29	25,86	27,56	28,44	29,34	30,24	31,15	32,08	33,01	28,52	28,74	29,00
Kotawaringin Timur	15.543,80	24,48	24,82	26,10	26,77	27,42	28,07	28,70	29,36	30,00	27,59	27,81	28,06
Kapuas	17.033,60	19,68	19,92	20,05	20,25	20,43	20,61	20,77	20,92	21,07	24,10	24,43	24,85
Barito Selatan	6.267,10	20,14	20,15	20,62	20,84	21,06	21,27	21,47	21,66	21,83	20,93	21,00	21,06

Barito Utara	9.984,80	12,38	12,40	12,56	12,67	12,77	12,86	12,95	13,02	13,09	15,50	15,74	16,04
Sukamara	3.311,20	13,80	14,22	15,43	16,06	16,71	17,37	18,05	18,74	19,43	19,17	19,60	20,17
Lamandau	7.632,40	8,42	8,60	9,13	9,41	9,69	9,98	10,26	10,55	10,83	12,79	13,17	13,68
Seruyan	15.215,20	9,35	9,66	10,55	11,02	11,49	11,98	12,49	13,00	13,53	10,71	10,80	10,92
Katingan	20.382,30	7,30	7,37	7,61	7,73	7,86	7,99	8,11	8,23	8,34	7,96	8,00	8,05
Pulang Pisau	9.650,90	12,65	12,69	12,77	12,85	12,94	13,00	13,07	13,12	13,17	13,94	14,02	14,11
Gunung Mas	9.305,80	10,60	10,76	11,28	11,55	11,81	12,09	12,36	12,62	12,89	14,55	14,87	15,29
Barito Timur	3.212,50	30,82	31,46	33,41	34,38	35,39	36,40	37,43	38,46	39,49	35,25	35,55	35,92
Murung Raya	23.575,30	4,18	4,25	4,46	4,57	4,68	4,79	4,90	5,01	5,12	4,73	4,77	4,81
Palangkaraya	2.848,70	78,87	80,60	85,81	88,50	91,22	93,99	96,77	99,56	102,39	103,01	104,96	107,38
Kalimantan Tengah	153.443,9	14,66	14,88	15,54	15,90	16,26	16,62	16,98	17,34	17,69	17,40	17,61	17,86

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

II.2 ASPEK KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN BUDAYA

Analisis aspek kesejahteraan sosial dan budaya masyarakat dapat memberikan gambaran dan hasil evaluasi terhadap kondisi sosial ekonomi kemasyarakatan di suatu wilayah. Aspek kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah dirincikan berdasarkan beberapa fokus pembahasan, antara lain fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, serta fokus seni budaya dan olahraga.

II.2.1 KESEJAHTERAAN EKONOMI

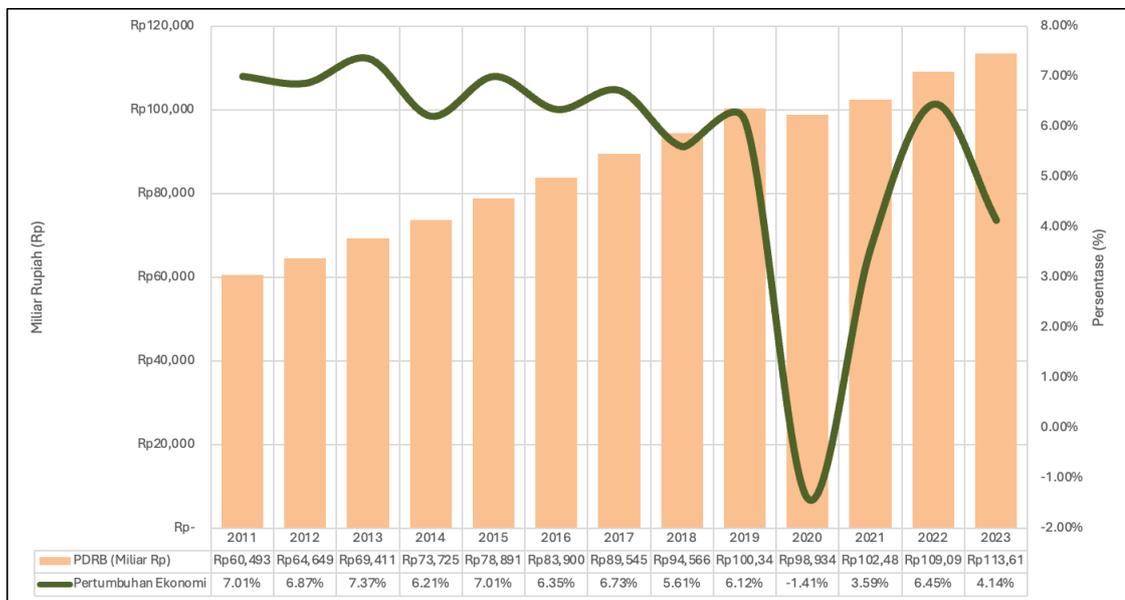
Aspek kesejahteraan ekonomi menitikberatkan pada indikator-indikator yang merepresentasikan kondisi ekonomi dan kemiskinan di suatu wilayah. Indikator yang dapat digunakan yakni pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, laju inflasi, kemiskinan, dan rasio gini.

PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian di suatu wilayah. Hal ini ditunjukkan oleh kondisi perekonomian di wilayah tersebut yang diindikasikan oleh peningkatan pendapatan. Adapun perhitungan laju pertumbuhan ekonomi diperoleh dari persentase pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu wilayah. Menurut Badan Pusat Statistik, PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang timbul dari produksi seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah pada periode tertentu. PDRB juga dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian atau unit ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu.



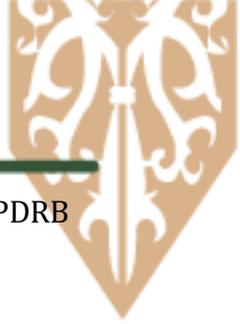
Perhitungan PDRB dibedakan menjadi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB dihitung dengan harga tahun berjalan yang digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Di sisi lain, PDRB ADHK dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, yakni tahun 2010 guna mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil yang tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi. Oleh sebab itu, laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan data PDRB ADHK dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Gambar II.2.1 di bawah menunjukkan nilai PDRB ADHK Provinsi Kalimantan Tengah selama 10 tahun (2012–2022) disertai dengan laju pertumbuhan ekonominya.



Gambar II.2.2 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 - 2023

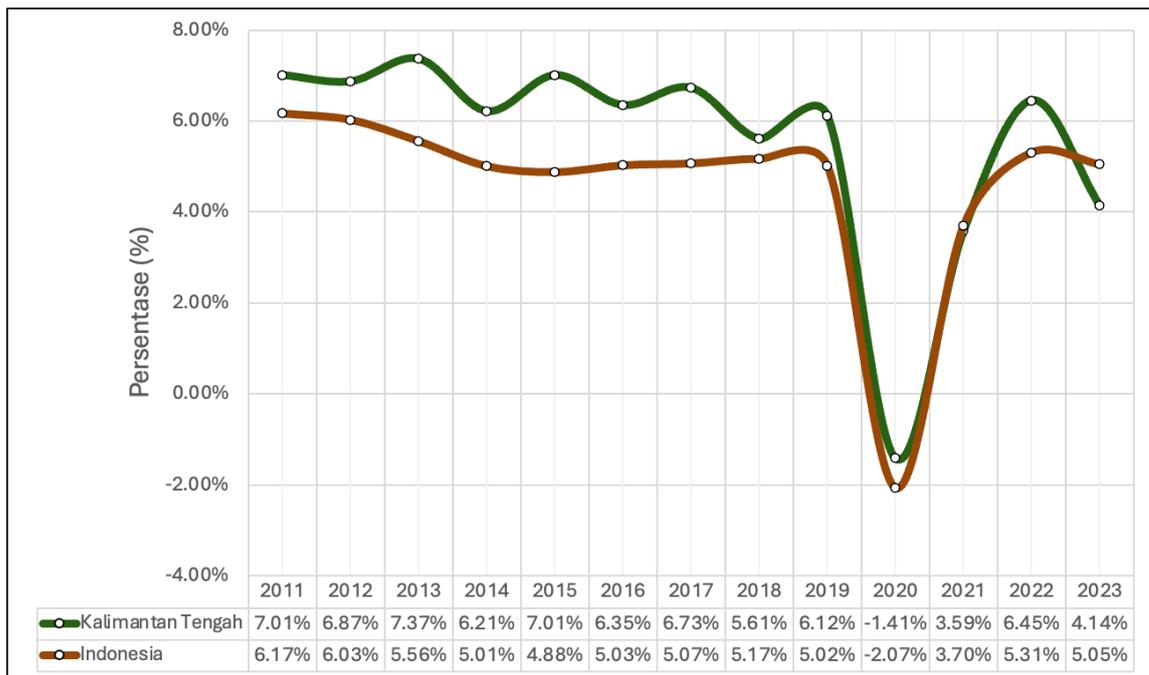
Berdasarkan data Kalimantan Tengah pada tahun 2012–2022, diketahui bahwa terjadi tren peningkatan nilai PDRB ADHK selama periode 10 tahun disertai dengan fluktuasi kecil berupa penurunan pada tahun 2020. Pada awal periode, PDRB ADHK menunjukkan nilai sebesar Rp64.649,2 miliar yang kemudian meningkat secara stabil hingga tahun 2019. Penurunan yang terjadi di tahun 2020 merupakan dampak dari melemahnya aktivitas ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Masa Normal Baru di tahun 2021–2022 menunjukkan adanya upaya adaptasi





untuk memulihkan kondisi ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai PDRB ADHK.

Ditinjau dari laju pertumbuhannya, terjadi fluktuasi selama periode 2012–2019 di antara rentang 6 hingga 7 persen dengan adanya penurunan hingga angka 5,61 persen di tahun 2018. Pandemi Covid-19 di tahun 2020 menyebabkan penurunan signifikan hingga mencapai angka negatif sebesar -1,41 persen. Pemulihan ekonomi di tahun 2021 kemudian mampu mengembalikan laju pertumbuhan hingga ke angka 3,59 persen dan mencapai 6,45 persen pada tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan nasional seperti pada Gambar II.2.3 di bawah terlihat bahwa laju pertumbuhan Kalimantan Tengah sebagian besar selalu lebih tinggi dibandingkan dengan laju nasional selama 10 tahun, kecuali pada tahun 2021 ketika masa adaptasi dan pemulihan ekonomi ketika pandemi. Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah lebih fluktuatif jika disandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional.



Gambar II.2.4 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2012-2022





STRUKTUR EKONOMI

Struktur perekonomian suatu wilayah dipengaruhi oleh beragam kegiatan perekonomian yang dilaksanakan pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat. Selain itu, potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia juga menjadi faktor yang mempengaruhi struktur perekonomian daerah. Indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral, yakni dilihat dari distribusi peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Tingkat kontribusi terhadap pembentukan PDRB dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor. Berdasarkan analisis data tersebut akan terlihat sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan atau sektor andalan di suatu wilayah. Persentase kontribusi PDRB menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonominya.

Ada tidaknya dominasi transformasi/perubahan struktur ekonomi juga dapat dianalisis dengan pengelompokan tujuh belas lapangan usaha menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

A. Lapangan Usaha Primer

Lapangan usaha primer adalah lapangan usaha yang tidak mengolah bahan baku, melainkan hanya mendayagunakan sumber daya alam seperti tanah maupun segala yang terkandung di dalamnya. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian.

B. Lapangan Usaha Sekunder

Lapangan usaha sekunder adalah lapangan usaha yang mengolah bahan baku baik dari lapangan usaha primer maupun lapangan usaha sekunder itu sendiri, menjadi barang lain yang memiliki nilai tambah. Lapangan usaha ini meliputi

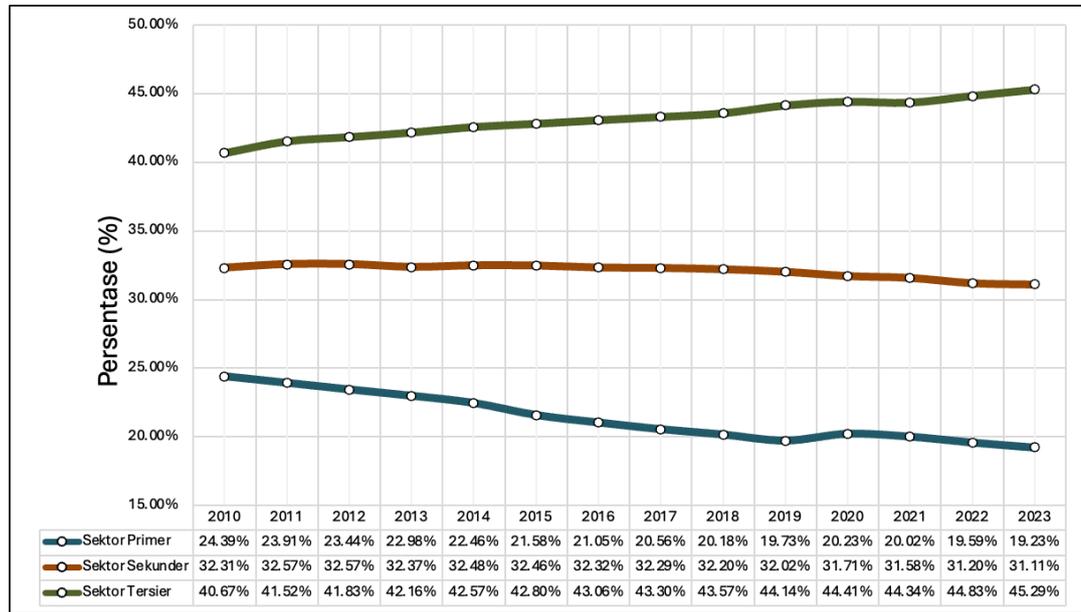




lapangan usaha industri pengolahan; lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, lapangan usaha pengadaan air; serta lapangan usaha konstruksi.

C. Lapangan Usaha Tersier

Lapangan usaha tersier adalah lapangan usaha yang produksinya bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk jasa. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; lapangan usaha transportasi dan pergudangan; lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum; lapangan usaha informasi dan komunikasi; lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi; lapangan usaha real estat; lapangan usaha jasa perusahaan; lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; lapangan usaha jasa pendidikan; lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta lapangan usaha jasa lainnya.



Gambar II.2.5 Perbandingan Struktur Ekonomi Berdasarkan Kelompok Lapangan Usaha di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2022

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa struktur ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah didominasi oleh lapangan usaha sekunder di awal periode. Pada tahun 2014 terjadi pergeseran dominasi oleh lapangan usaha tersier hingga tahun 2021. Pada akhir periode diketahui bahwa lapangan usaha sekunder mendominasi struktur ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah.



Sementara itu, rincian struktur ekonomi berdasarkan jenis lapangan usaha dapat dilihat pada tabel 2.2.1

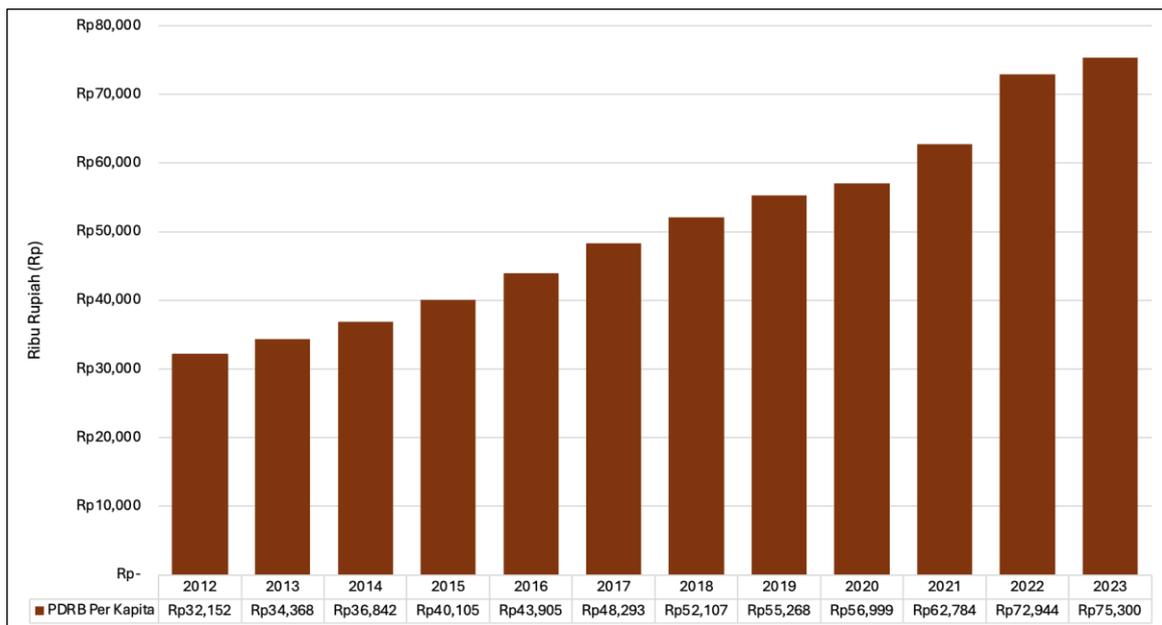
Tabel II.2.1 Proporsi Per Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 - 2023

	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing	13.45%	13.28%	13.18%	13.04%	12.84%	12.69%	12.54%	12.37%	12.85%	12.63%	12.26%	11.82%
B	Pertambangan dan Pengalihan/ Mining and Quarrying	9.99%	9.70%	9.28%	8.54%	8.21%	7.87%	7.64%	7.36%	7.37%	7.39%	7.33%	7.40%
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	21.97%	21.72%	21.65%	21.54%	21.38%	21.22%	21.04%	20.79%	20.61%	20.55%	20.47%	20.39%
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	1.09%	1.09%	1.10%	1.06%	1.06%	1.02%	1.03%	1.02%	1.01%	1.03%	1.05%	1.04%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water supply,	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%
F	Konstruksi/ Construction	9.42%	9.47%	9.65%	9.79%	9.80%	9.97%	10.05%	10.12%	10.00%	9.91%	9.60%	9.59%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	13.82%	13.72%	13.75%	13.44%	13.31%	13.23%	13.21%	13.15%	12.92%	13.04%	13.07%	13.04%
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	3.68%	3.73%	3.82%	3.88%	3.97%	4.10%	4.18%	4.23%	3.67%	3.65%	4.16%	4.51%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service	2.95%	2.99%	3.01%	2.99%	3.00%	3.01%	3.02%	3.04%	2.79%	2.79%	2.97%	3.11%
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	4.09%	4.28%	4.49%	4.70%	4.87%	5.08%	5.17%	5.38%	6.08%	6.26%	6.41%	6.56%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	3.64%	3.75%	3.73%	3.87%	4.01%	4.02%	3.99%	4.05%	4.27%	4.18%	4.04%	4.03%
L	Real Estat/ Real Estate Activities	2.97%	2.99%	2.99%	2.97%	2.96%	2.92%	2.87%	2.89%	3.02%	3.00%	2.90%	2.80%
M,N	Jasa Perusahaan/ Business Activities	1.51%	1.54%	1.61%	1.65%	1.69%	1.74%	1.80%	1.89%	1.82%	1.77%	1.83%	1.89%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ Public	3.65%	3.55%	3.46%	3.45%	3.39%	3.29%	3.35%	3.34%	3.41%	3.28%	3.19%	3.08%
P	Jasa Pendidikan/ Education	3.01%	3.07%	3.08%	3.15%	3.11%	3.07%	3.08%	3.12%	3.27%	3.15%	3.01%	2.92%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and	1.01%	1.04%	1.07%	1.09%	1.09%	1.10%	1.13%	1.16%	1.33%	1.41%	1.38%	1.37%

	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Social Work Activities												
R,S, T,U	Jasa lainnya/ Other Services Activities	1.50%	1.51%	1.57%	1.61%	1.66%	1.72%	1.78%	1.87%	1.83%	1.81%	1.88%	1.97%

PDRB PER KAPITA

Kesejahteraan masyarakat secara ekonomi juga dapat digambarkan dengan pendapatan per kapita. Ketika pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah semakin tinggi, maka tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut dapat dikatakan semakin baik. Perhitungan pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita merupakan besaran kasar yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di wilayah tersebut. Dari gambar 2.2.6 dapat diketahui bahwa PDRB per kapita di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan dalam 10 tahun terakhir.



Gambar II.2.6 Nilai PDRB per Kapita Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2022

LAJU INFLASI

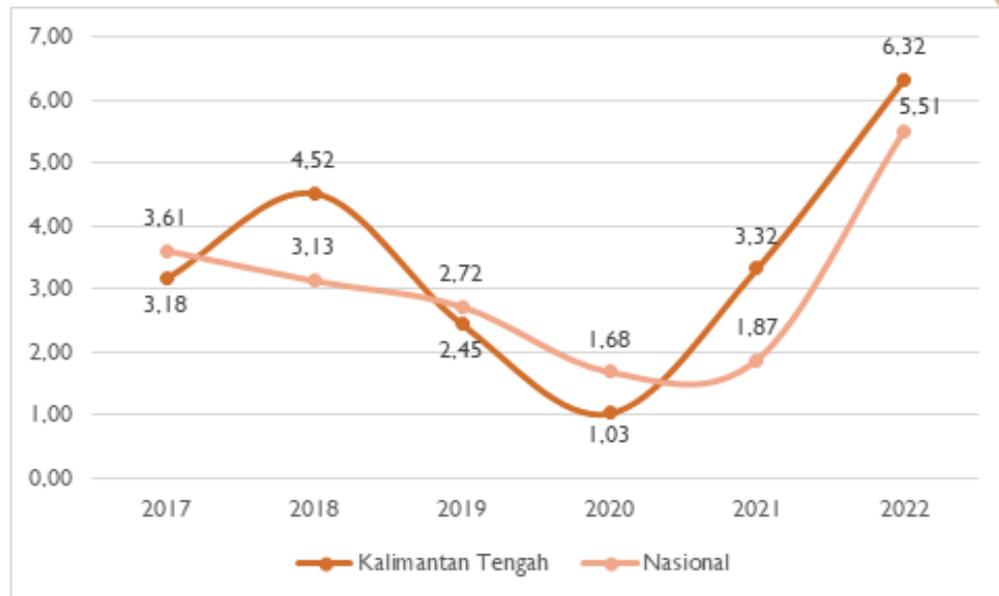
Terdapat keterkaitan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketika inflasi terlalu rendah atau terjadi deflasi, maka akan menekan pertumbuhan ekonomi.



Sedangkan ketika inflasi terlalu tinggi, maka daya beli masyarakat akan turun dan mengakibatkan roda perekonomian tidak berjalan. Oleh sebab itu inflasi menjadi salah satu indikator makro yang diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa atau turunnya daya jual mata uang suatu negara secara terus menerus. Timbulnya inflasi disebabkan adanya tekanan dari sisi penawaran (*cost push inflation*), permintaan (*demand pull inflation*), dan ekspektasi inflasi. Terjadinya *demand pull inflation* disebabkan oleh tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya, atau dengan kata lain permintaan total lebih besar daripada kapasitas perekonomian. Sementara ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya, yang mana ekspektasi inflasi dapat cenderung bersifat adaptif atau *forward looking*.

Tingkat keparahan inflasi dapat dibagi menjadi 4 tingkatan yaitu inflasi ringan dengan laju inflasi kurang dari 10 persen per tahun, inflasi sedang saat laju inflasi antara 10–30 persen per tahun, inflasi berat yakni pada kisaran 30-100 persen per tahun, dan inflasi sangat berat/hiperinflasi saat laju inflasi lebih dari 100 persen per tahun. Berdasarkan data pada Gambar 2.2.5 diketahui bahwa inflasi di Kalimantan Tengah sangat fluktuatif. Adapun perubahannya masih tergolong ringan dengan laju kurang dari 10 persen per tahun.

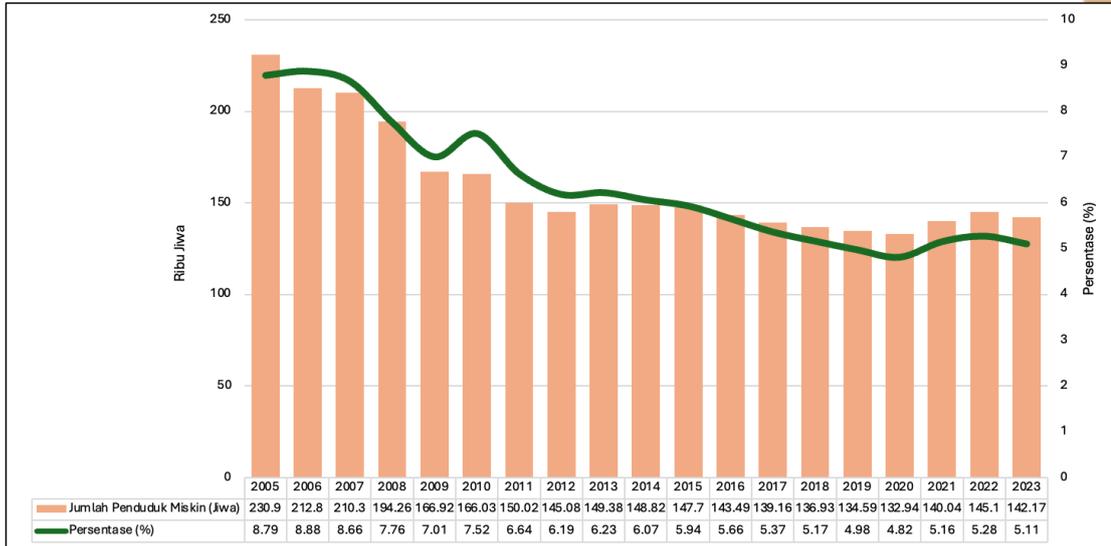




Gambar II.2.10 Perbandingan Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022

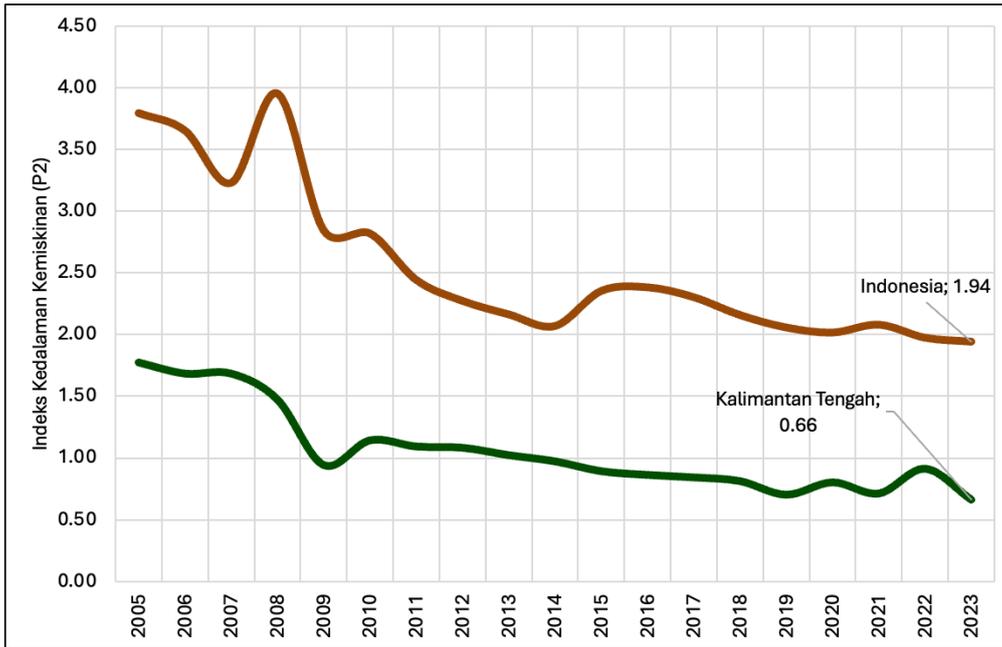
KEMISKINAN

Kondisi kemiskinan dapat dilihat dari perubahan jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Selama dua tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di Kalimantan Tengah. Pada tahun 2019, persentase penduduk miskin sebesar 4,82%, kemudian meningkat menjadi 5,16% pada tahun 2020 dan bertambah menjadi 5,28% pada tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Pulau Kalimantan, persentase penduduk miskin di Kalteng memang lebih rendah. Akan tetapi, selisih keduanya tidak berbeda jauh, hanya sekitar 0,65%. Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin Kalimantan sebesar 5,93%. Berikut rincian lebih lanjut mengenai kondisi kemiskinan di Kalteng.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Apabila melihat nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1), juga terjadi fluktuasi dalam empat tahun terakhir dan meningkat menjadi 0,91 pada tahun 2022. Semakin tinggi indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan semakin jauh rata-rata penghasilan masyarakat miskin terhadap garis kemiskinan. Dengan kata lain, kondisi kemiskinan semakin dalam atau parah. Apabila dibandingkan, indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah telah berada di bawah rata-rata nasional.

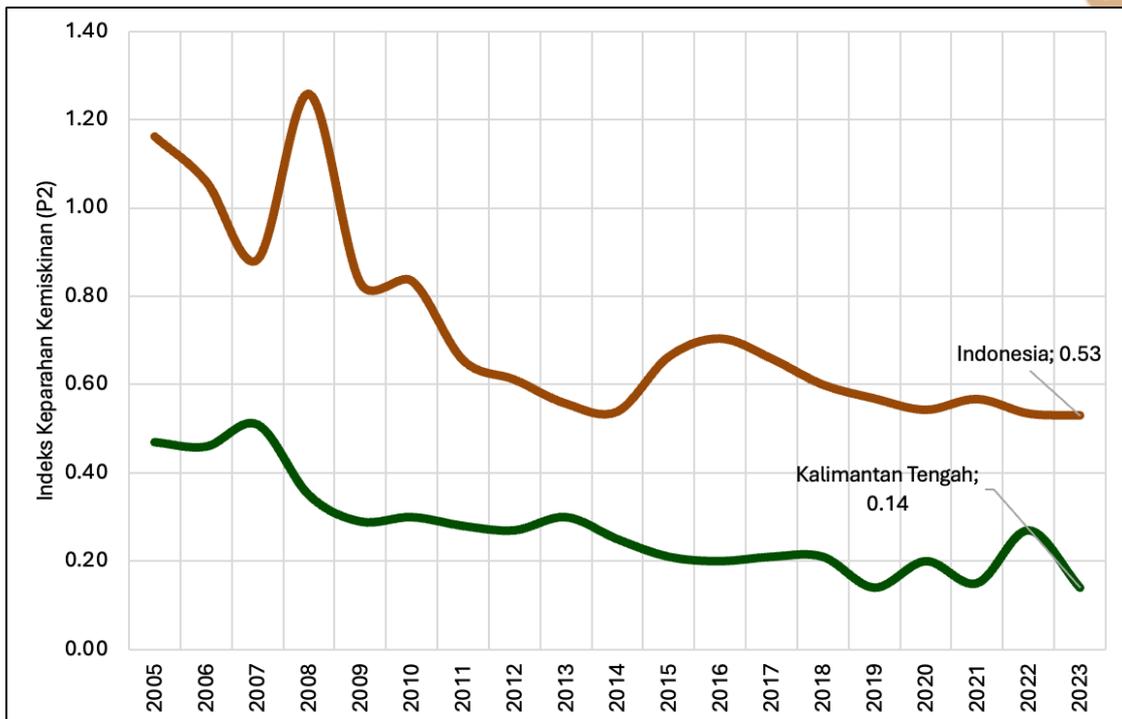


Gambar

II.2.11 Indeks Kedalaman Kemiskinan

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

Apabila melihat indeks keparahan kemiskinan (P2), juga terjadi fluktuasi dan cenderung meningkat. Pada tahun 2022 indeks keparahan kemiskinan menunjukkan angka sebesar 0,27 sementara pada tahun 2021 sebesar 0,18. Peningkatan ini mengindikasikan terjadi ketimpangan pengeluaran atau belanja diantara penduduk miskin yang semakin besar.



Gambar II.2.12 Indeks Keparahan Kemiskinan

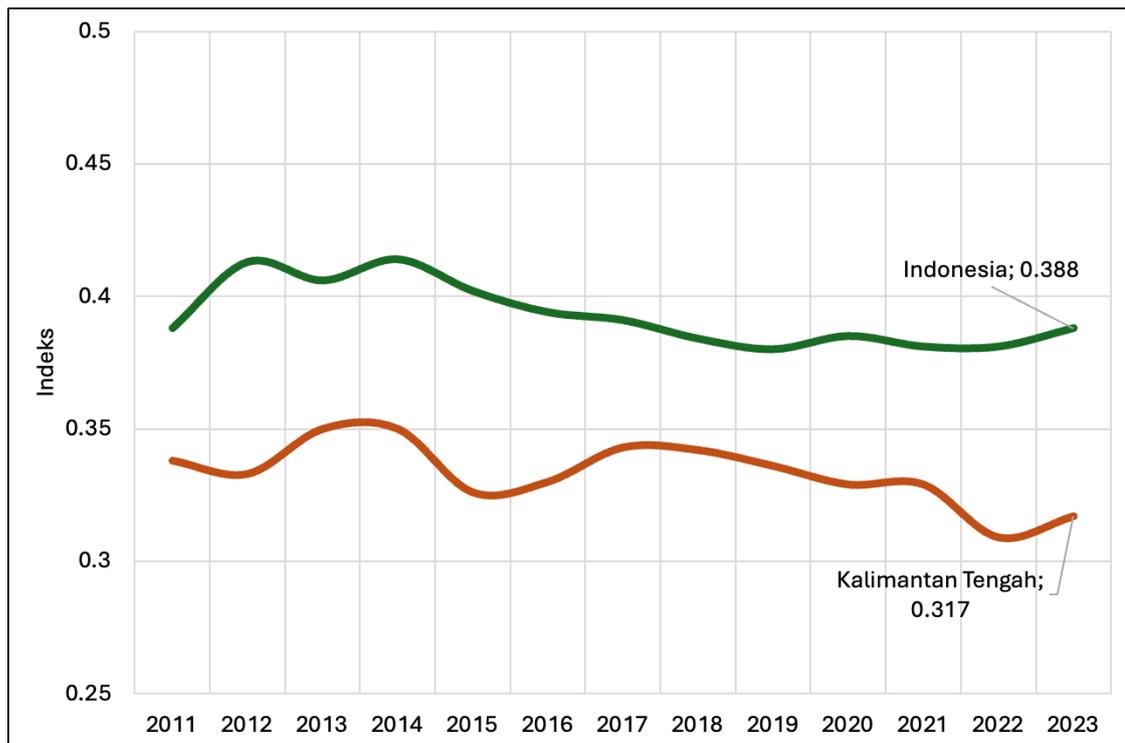
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

Masalah kemiskinan masih menjadi tugas untuk pemerintah daerah karena melalui kemiskinan bisa muncul permasalahan lainnya. Selain memberikan bantuan, pengentasan masalah kemiskinan pada kelompok tertentu bisa diperkuat dengan memberdayakan masyarakat agar mandiri secara ekonomi dan berkelanjutan.

RASIO GINI

Selain pendapatan per kapita, indeks gini juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Indeks gini merupakan indeks yang mengukur tingkat pemerataan melalui pendekatan koefisien gini dimana koefisien tersebut dianalisis menggunakan Kurva Lorenz. Kurva Lorenz adalah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pendapatan dengan distribusi kumulatif penduduk. Nilai rasio indeks gini berkisar antara 0 dan 1, saat nilai rasio gini mendekati 0, maka kesenjangan distribusi pendapatan dianggap rendah. Sebaliknya, saat rasio gini mendekati angka 1, maka kesenjangan distribusi pendapatan makin tinggi. Kategori indeks gini terbagi menjadi tiga yaitu rasio gini lebih dari 0,5 menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat

ketidakmerataan tinggi, rasio gini antara 0,3–0,5 mengartikan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan sedang, dan rasio kurang dari 0,3 menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan rendah. Berdasarkan data yang ditampilkan pada gambar 2.2.10, dapat diketahui bahwa nilai indeks gini Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2011-2022 berada pada rentang 0,3-0,5 sehingga termasuk dalam distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan sedang dan masih berada di bawah indeks gini nasional.



Gambar II.2.13 Kurva Perbandingan Rasio Indeks Gini di Provinsi Kalimantan Tengah dan Rata-Rata Nasional Tahun 2011-2022

II.2.1.1 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) mengacu pada tingkat pertumbuhan PDRB suatu daerah dalam periode tertentu. LPE menjadi suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam suatu periode waktu. LPE dihitung sebagai persentase perubahan PDRB dari satu tahun ke tahun berikutnya dengan adanya pertumbuhan ekonomi positif yang akan menunjukkan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Beberapa faktor yang memengaruhi LPE meliputi investasi, konsumsi, ekspor-impor, dan produktivitas



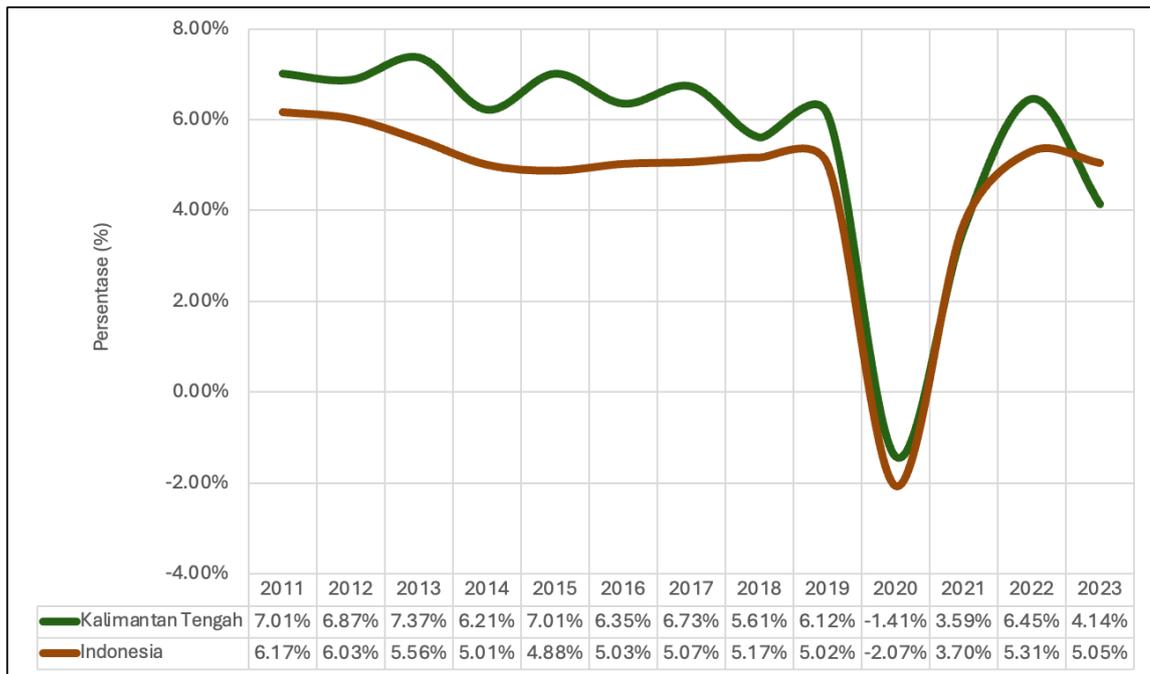
tenaga kerja. Investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, stabilitas politik, kebijakan ekonomi yang baik, dan lingkungan usaha yang kondusif juga berperan penting dalam LPE.

Dampak LPE terhadap pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Tengah signifikan untuk menentukan arah pembangunan. Apabila LPE tinggi, maka Kalimantan Tengah dapat mengalami peningkatan pendapatan per kapita, penurunan tingkat pengangguran, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini bisa memacu pembangunan infrastruktur dan industri, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan dapat memiliki dampak negatif seperti degradasi lingkungan dan ketidaksetaraan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengelola pertumbuhan ekonomi dengan bijak, memperhatikan aspek-aspek sosial dan lingkungan, serta mengupayakan inklusi ekonomi agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Selain itu, perlu mempertimbangkan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu agar dapat mencapai pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Grafik di bawah menunjukkan LPE Provinsi Kalimantan Tengah sejak 2011 hingga triwulan IV tahun 2022. Terdapat tiga lapangan usaha yang mengalami kontraksi. Kontraksi terbesar terjadi pada kategori Jasa Lainnya sebesar 4,36 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 12,20 persen yang diikuti dengan Konstruksi sebesar 11,56 persen. Sementara itu, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh 8,12 persen dan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi di Ekonomi Kalimantan Tengah. Selain itu, LPE Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu tahun 2015- 2019 mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami perlambatan. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2018 ke tahun 2019, namun LPE Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 lebih kecil sebesar 0,85 persen bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2015 yang mencapai 7,01 persen. Tidak hanya itu, kondisi LPE pada tahun 2022 sebesar 5,7 merupakan penurunan dari LPE di tahun sebelumnya sebesar 1,91 dan bernilai lebih rendah



dibanding pada kondisinya di tahun 2011. Adanya tren penurunan dan pelambatan laju pertumbuhan di Kalimantan Tengah selama 11 tahun perlu menjadi perhatian khusus untuk pembangunan daerah. Selain Provinsi Kalimantan Tengah yang mengalami perlambatan LPE, beberapa kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Tengah juga pada tahun 2019 Laju Pertumbuhan Ekonominya mengalami penurunan, diantaranya Kotawaringin Barat, Barito Selatan, Barito Utara, Sukamara, Seruyan, Katingan, Barito Timur dan Kota Palangkaraya. Secara detail, fluktuasi LPE Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada gambar berikut.



Gambar II.2.14 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2023

II.2.2 KESEJAHTERAAN SOSIAL BUDAYA

Fokus kesejahteraan sosial budaya menitikberatkan pada indikator-indikator yang merepresentasikan kondisi sosial, pendidikan, dan ketenagakerjaan di suatu wilayah. Indikator yang dapat digunakan yakni kemampuan literasi dan numerasi, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Kelulusan, Angka Harapan Lama Sekolah, Standar Kompetensi Pendidik, Usia Harapan Hidup, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.



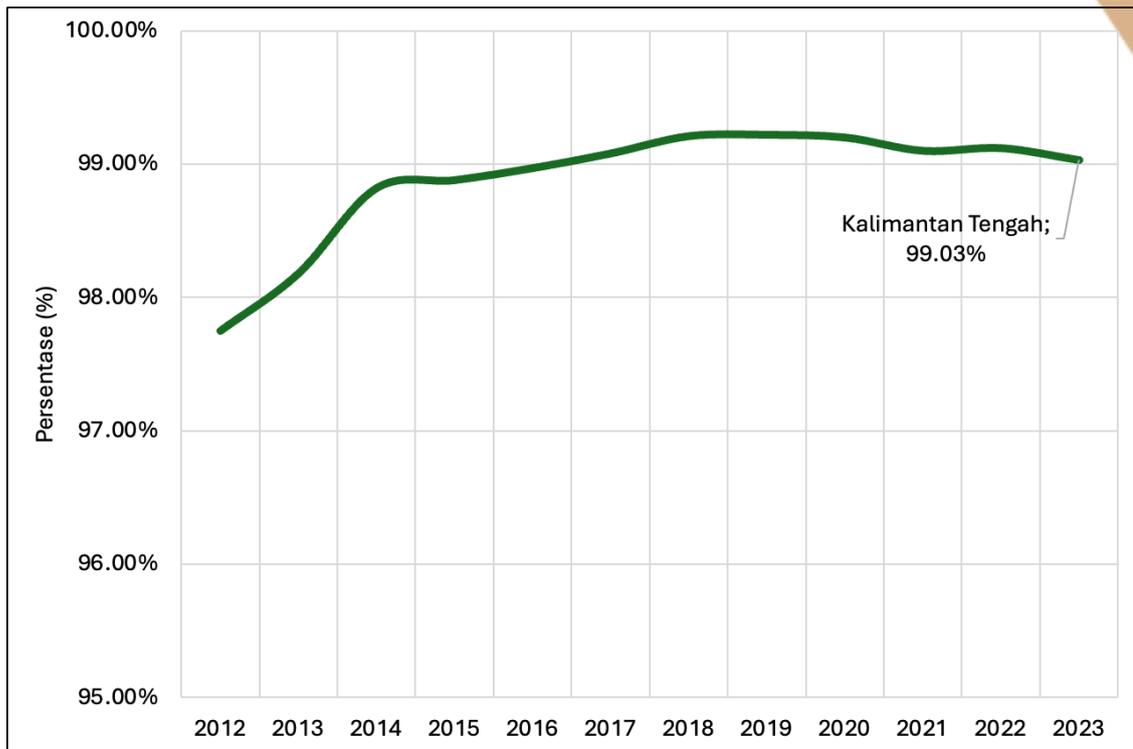
KEMAMPUAN LITERASI DAN NUMERASI

Kemampuan literasi dan numerasi adalah kecakapan terkait penggunaan angka dan simbol dalam matematika dasar dalam memecahkan masalah praktis di kehidupan sehari-hari. Penilaian kemampuan literasi dan numerasi menggunakan indikator rata-rata kemampuan berdasarkan asesmen nasional.

ANGKA MELEK HURUF

Angka Melek Huruf merupakan indikator yang menggambarkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis. Kondisi Angka Melek Huruf di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum mengalami kenaikan dari tahun 2012 hingga 2022. Data tahun 2012 menunjukkan bahwa Angka Melek Huruf di Provinsi Kalimantan Tengah berada di angka 97,75%. Nilai ini semakin meningkat per tahunnya, hingga berada pada titik tertinggi sebesar 99,22% pada tahun 2019. Namun, data tahun 2020 dan 2021 menunjukkan adanya sedikit penurunan Angka Melek Huruf, dimana pada tahun 2020 sebesar 99,20% dan tahun 2021 sebesar 99,10%. Meskipun demikian, Angka Melek Huruf kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 hingga menjadi 99,12%. Tren perubahan Angka Melek Huruf dapat dilihat pada gambar berikut.



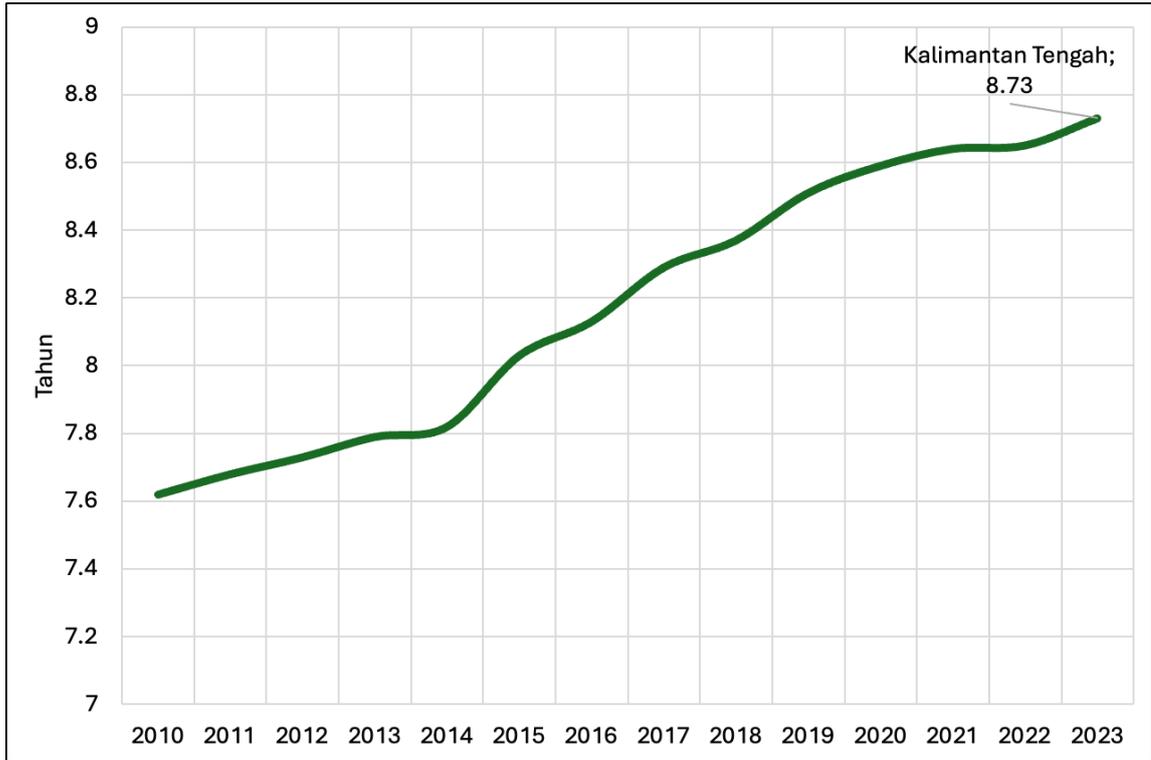
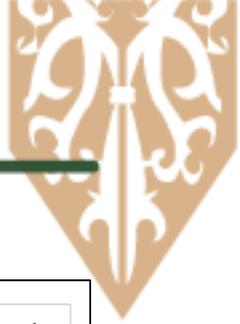


Gambar II.2.15 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Rata-rata Lama Sekolah merupakan gambaran atas rata-rata jumlah tahun yang telah ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh seluruh jenjang pendidikan formal, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga tingkat pendidikan terakhir. Kondisi rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan selama periode tahun 2011 hingga 2022. Data tahun 2011 menunjukkan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 7,62 tahun. Nilai tersebut mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu, hingga pada tahun 2022 nilai rata-rata lama sekolah mencapai 8,68 tahun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas mampu menyelesaikan pendidikan hingga semester 2 kelas 3 SMP. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah masih memerlukan dorongan agar dapat menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Secara detail, tren peningkatan Rata-rata Lama Sekolah disajikan pada gambar berikut.



Gambar II.2.16 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
KALIMANTAN TENGAH	7,62	7,68	7,73	7,79	7,82	8,03	8,13	8,29	8,37	8,51	8,59	8,64	8,65	8,73
Kotawaringin Barat	7,48	7,48	7,49	7,58	7,82	8,01	8,05	8,35	8,36	8,41	8,42	8,53	8,54	8,66
Kotawaringin Timur	7,29	7,39	7,48	7,59	7,69	7,7	7,88	7,89	7,9	8,12	8,13	8,15	8,16	8,17
Kapuas	6,75	6,79	6,82	6,84	6,94	6,94	7,09	7,5	7,51	7,52	7,59	7,6	7,64	7,84
Barito Selatan	7,71	7,8	8,01	8,16	8,27	8,59	8,6	8,67	8,69	8,71	8,82	8,95	9,01	9,13
Barito Utara	7,43	7,55	7,74	7,97	8	8,33	8,34	8,35	8,59	8,6	8,71	8,85	8,9	8,91
Sukamara	6,62	6,67	7,04	7,21	7,3	7,81	7,82	7,83	7,84	7,91	8,01	8,09	8,1	8,17
Lamandau	6,92	7,21	7,38	7,55	7,67	7,68	7,79	7,94	7,95	8,38	8,42	8,43	8,53	8,67
Seruyan	6,66	6,76	6,76	6,9	7,03	7,45	7,49	7,75	7,76	7,93	7,94	7,96	7,99	8
Katingan	7,66	8,13	8,15	8,17	8,23	8,62	8,63	8,64	8,65	8,66	8,67	8,68	8,78	8,85
Pulang Pisau	7,18	7,2	7,29	7,55	7,58	7,59	7,66	7,67	7,7	8,08	8,18	8,19	8,26	8,27
Gunung Mas	8,57	8,57	8,65	8,73	8,74	8,93	8,94	8,96	8,97	9,03	9,14	9,18	9,24	9,25
Barito Timur	8,31	8,43	8,75	8,98	9,01	9,02	9,03	9,04	9,05	9,2	9,21	9,23	9,32	9,45
Murung Raya	7,06	7,09	7,12	7,15	7,18	7,36	7,37	7,38	7,45	7,46	7,54	7,61	7,66	7,81
Kota Palangka Raya	10,13	10,27	10,48	10,69	10,73	10,74	11,02	11,03	11,42	11,51	11,52	11,53	11,55	11,65
INDONESIA	7,46	7,52	7,59	7,61	7,73	7,84	7,95	8,1	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69	8,77

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.





Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah indikator yang menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Indikator ini digunakan untuk mengetahui kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Semakin tinggi angka RLS, semakin lama atau tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh, yang mengindikasikan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang lebih baik.

Berdasarkan data RLS yang disajikan, Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan perkembangan positif dalam capaian pendidikan penduduknya. Pada tahun 2010, RLS Kalimantan Tengah tercatat sebesar 7,62 tahun, yang kemudian meningkat secara konsisten hingga mencapai 8,73 tahun pada 2023. Peningkatan sebesar 1,11 tahun selama periode 13 tahun ini menggambarkan adanya kemajuan yang signifikan dalam akses dan partisipasi pendidikan di provinsi tersebut.

Capaian RLS Kalimantan Tengah pada tahun 2023 sebesar 8,73 tahun menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di provinsi ini telah menempuh pendidikan formal setara dengan kelas 2 SMP atau hampir 9 tahun. Angka ini sedikit di bawah rata-rata nasional yang tercatat 8,77 tahun, mengindikasikan bahwa Kalimantan Tengah memiliki performa yang relatif baik dalam konteks nasional. Namun, perlu dicatat bahwa masih ada ruang untuk peningkatan menuju pencapaian wajib belajar 12 tahun.

Meskipun tren positif terlihat di tingkat provinsi, data juga mengungkapkan adanya kesenjangan yang signifikan antar kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Kota Palangka Raya, sebagai ibukota provinsi, mencatatkan RLS tertinggi dengan 11,65 tahun pada 2023, setara dengan pendidikan hingga kelas 2 SMA. Di sisi lain, Kabupaten Murung Raya memiliki RLS terendah dengan 7,81 tahun, yang berarti rata-rata penduduknya baru menyelesaikan pendidikan setara dengan kelas 1 SMP. Disparitas ini menunjukkan adanya ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di berbagai wilayah provinsi yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan pendidikan ke depan.

Untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan capaian pendidikan secara merata, diperlukan koordinasi yang erat antar pemerintah daerah dengan kewenangan berbeda dalam pengelolaan pendidikan. Strategi komprehensif perlu





dirumuskan, meliputi pemerataan akses, peningkatan kualitas pengajaran, modernisasi infrastruktur, dan penguatan pendidikan vokasi. Dengan implementasi strategi yang tepat dan koordinasi yang efektif, Kalimantan Tengah diharapkan dapat terus meningkatkan RLS-nya, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan.

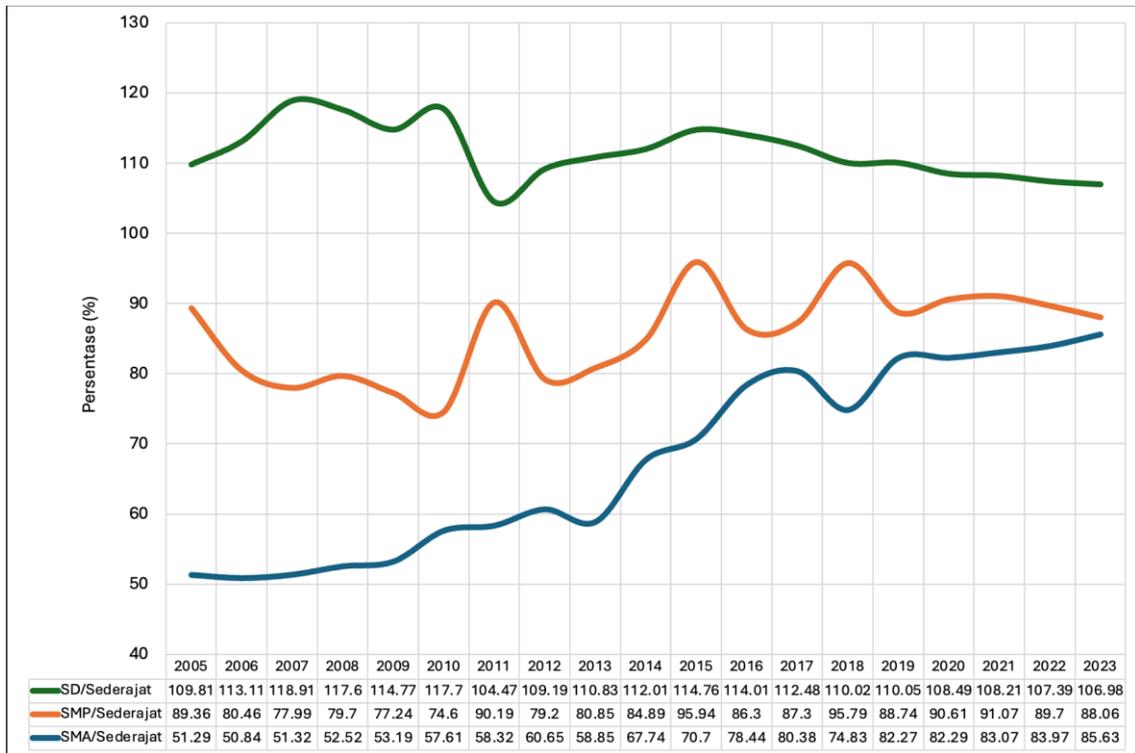
Tata kelola pendidikan yang baik, didukung oleh sistem informasi manajemen yang terintegrasi dan efisiensi anggaran, akan menjadi kunci keberhasilan. Program akselerasi pendidikan di kabupaten tertinggal perlu dijalankan untuk mengurangi kesenjangan. Dalam hal ini, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat diperlukan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan menghindari tumpang tindih program. Terakhir, implementasi sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif diperlukan untuk memastikan efektivitas program-program yang dijalankan. Dengan koordinasi antar tingkat pemerintahan, Kalimantan Tengah diharapkan dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah secara signifikan, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan.

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH

Angka Partisipasi Sekolah merupakan indikator dasar yang menggambarkan akses penduduk terhadap layanan pendidikan, terutama bagi penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah terdiri atas dua jenis, yakni Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK merupakan persentase siswa yang sedang bersekolah pada jenjang tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya, tanpa mempertimbangkan faktor usia. Nilai APK Provinsi Kalimantan Tengah untuk jenjang SD/ sederajat pada tahun 2011 mencapai 104,47% dan mengalami peningkatan hingga mencapai 114,76% pada tahun 2015. Namun, nilai tersebut kemudian mengalami penurunan hingga pada tahun 2022 menjadi 107,39%. Sementara itu, nilai APK untuk jenjang SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat cenderung mengalami fluktuasi. Nilai APK Provinsi Kalimantan Tengah untuk jenjang SMP/ sederajat pada tahun 2011 mencapai 90,19% dan mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi hanya



sebesar 79,2%. Nilai tersebut mengalami fluktuasi tiap tahunnya, hingga pada tahun 2022 nilai APK jenjang SMP/ sederajat menjadi 89,7%. Nilai APK untuk jenjang SMA/ sederajat pada tahun 2011 sebesar 58,32% dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 60,65%. Penurunan nilai APK untuk jenjang SMA/ sederajat terjadi pada tahun 2013 dan 2018. Nilai APK jenjang SMA/ sederajat pada tahun 2022 sebesar 83,97%. Secara lengkap, nilai APK jenjang SD/ sederajat hingga SMA/ sederajat disajikan pada gambar berikut.

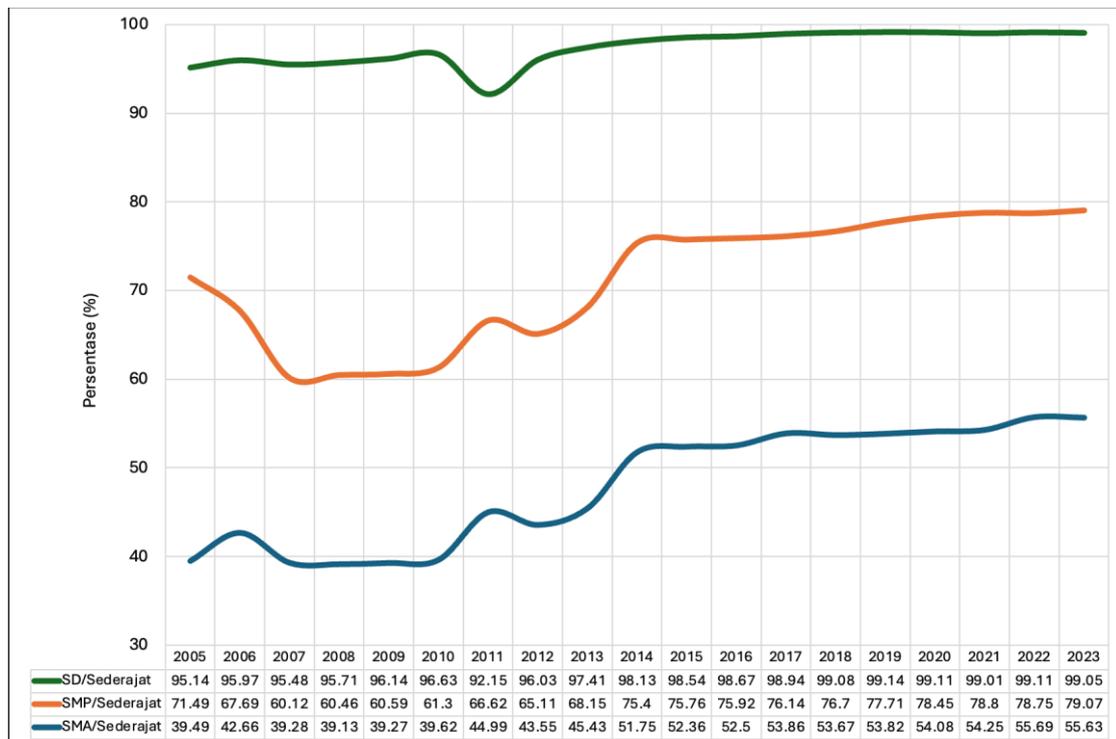


Gambar II.2.17 Angka Partisipasi Kasar Penduduk Usia Sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase siswa yang sedang bersekolah pada jenjang tertentu dengan usia yang sesuai terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya. Secara umum, APM di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Nilai APM jenjang SD/ sederajat di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2011 mencapai 92,15%. Data tahun 2022 menunjukkan APM jenjang SD/ sederajat mengalami peningkatan menjadi 99,11%. Nilai APM jenjang SMP/ sederajat pada tahun 2011 sebesar 75,76% dan mengalami peningkatan menjadi 78,75% pada tahun 2022. Fenomena yang sama juga terjadi pada nilai

APM jenjang SMA/ sederajat yang mengalami peningkatan dari 44,99% pada tahun 2011 menjadi 55,69% pada tahun 2022. Nilai APM yang belum mencapai 100% menandakan bahwa masih ada penduduk yang menyekolahkan anaknya tidak sesuai dengan usianya. Sementara itu, nilai APM yang semakin berkurang setiap jenjangnya menandakan masih terdapat penduduk usia sekolah yang memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih lanjut. Secara detail, nilai APM di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.



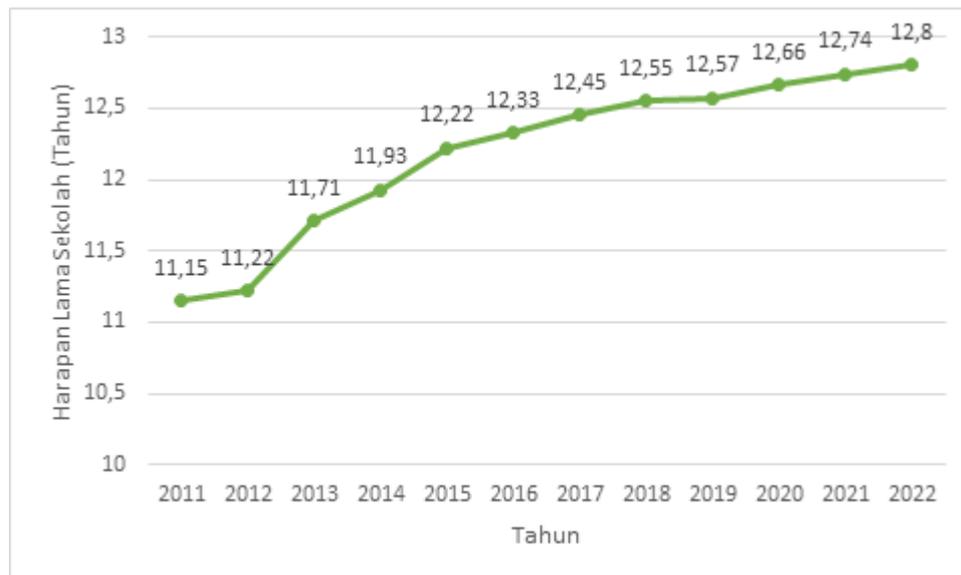
Gambar II.2.18 Angka Partisipasi Murni Penduduk Usia Sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan jumlah tahun yang diharapkan dapat ditempuh oleh penduduk usia 7 tahun ke atas dengan asumsi bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa HLS di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2011 ke tahun 2022 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Data tahun 2011 menunjukkan angka HLS mencapai

11,15 tahun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2011 penduduk usia 7 tahun diharapkan mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas 2 SMA/ sederajat. Sementara itu, data tahun 2022 menunjukkan angka HLS mencapai 12,8 tahun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2022 penduduk usia 7 tahun diharapkan mampu menyelesaikan pendidikan hingga lulus pendidikan jenjang SMA/ sederajat dan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Angka HLS Provinsi Kalimantan Tengah secara lengkap disajikan pada gambar berikut.



Gambar II.2.19 Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 7 Tahun ke Atas di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

STANDAR KOMPETENSI PENDIDIK

Salah satu komponen integral dalam penilaian keberhasilan seseorang dalam pekerjaan adalah kompetensi, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Melalui identifikasi kompetensi pendidik, diharapkan keberhasilan guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar dapat diukur dengan lebih valid. Kompetensi pendidik dapat diukur dengan dua indikator, yakni persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D-IV dan persentase guru yang tersertifikasi.

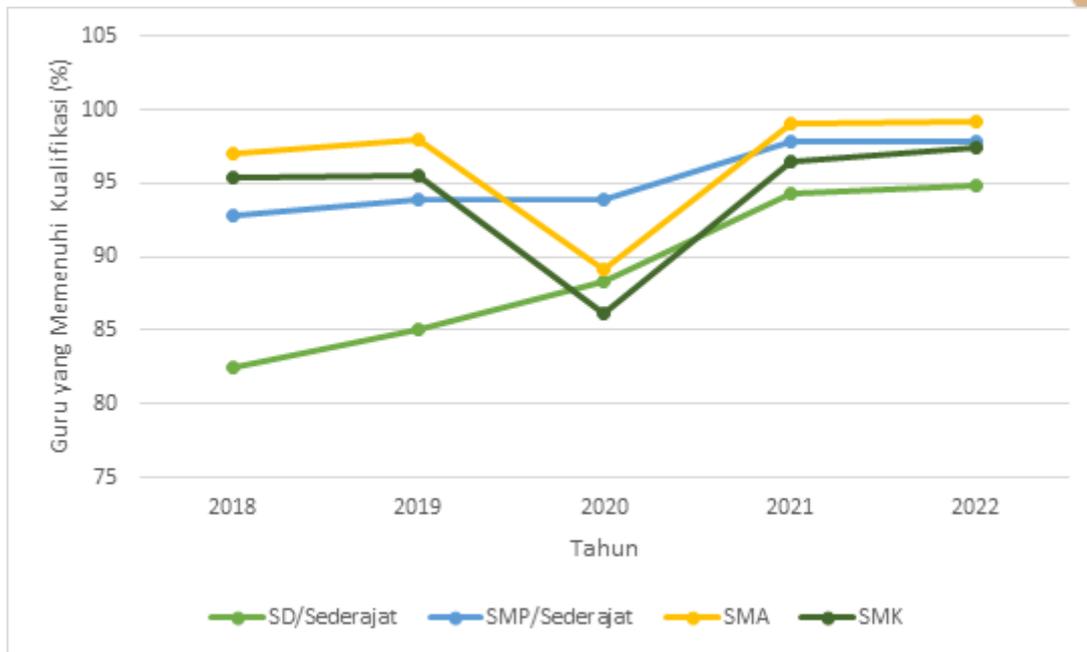
Persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D-IV di Provinsi Kalimantan Tengah pada jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat selama periode



2018-2022 cenderung mengalami peningkatan. Untuk jenjang SD/ sederajat, persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D-IV pada tahun 2018 mencapai 82,5%. Nilai tersebut meningkat menjadi 94,78% pada tahun 2022. Persentase guru pada jenjang SMP/ sederajat dengan kualifikasi pendidikan S1/D-IV adalah sebesar 92,82% pada tahun 2018, dan meningkat menjadi 97,76% pada tahun 2022.

Sementara itu, persentase guru untuk jenjang SMA dan SMK mengalami fluktuasi. Persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D-IV untuk kedua jenjang tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 97,03% untuk SMA dan 95,4% untuk SMK menjadi 98,02% untuk SMA dan 95,56% untuk SMK. Namun, persentase guru pada kedua jenjang tersebut mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020, yakni menjadi 89,14% untuk SMA dan 86,11% untuk SMK. Nilai persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D-IV kembali mengalami peningkatan pasca tahun 2020, dengan nilai 99,15% untuk SMA dan 97,37% untuk SMK pada tahun 2022. Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 disebabkan salah satunya oleh banyaknya jumlah guru yang purna tugas pada tahun tersebut yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah guru baru. Secara rinci, nilai persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D-IV disajikan pada gambar berikut.





Gambar II.2.20 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 – 2022.

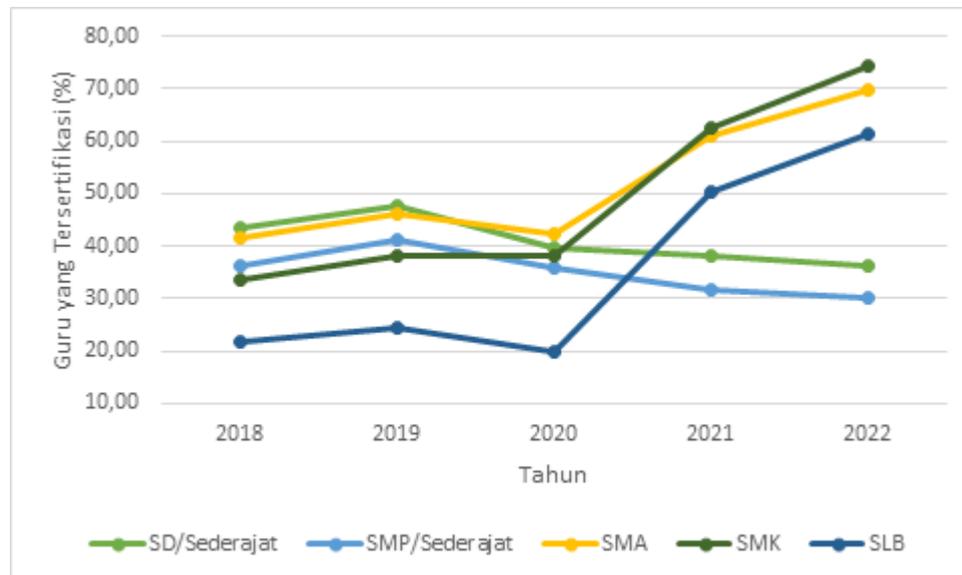
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

Indikator kedua yang dapat digunakan untuk mengukur standar kompetensi pendidik adalah persentase guru yang tersertifikasi. Sertifikasi yang diberikan terhadap guru merupakan sebuah bentuk pengakuan bagi para guru yang telah memenuhi standar kelayakan dalam kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan data yang tersedia dari tahun 2018-2022, persentase guru yang tersertifikasi cenderung mengalami fluktuasi.

Persentase guru pada jenjang SD/ sederajat yang tersertifikasi tahun 2018 adalah sebesar 43,30%. Nilai tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi sebesar 47,80%. Namun, pada tiga tahun berikutnya, Persentase guru yang tersertifikasi pada jenjang SD/ sederajat mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hingga mencapai 36,30% pada tahun 2022. Fenomena serupa juga terjadi pada guru jenjang SMP/ sederajat, dengan persentase tahun 2018 sebesar 36,40% dan tahun 2022 sebesar 30,00%.

Meskipun juga mengalami fluktuasi, persentase guru pada jenjang SMA, SMK, maupun SLB secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2022. Persentase guru jenjang SMA yang tersertifikasi pada tahun 2018 sebesar 41,50% dan mengalami peningkatan menjadi 69,85% pada tahun 2022. Persentase

guru jenjang SMK yang tersertifikasi adalah sebesar 33,50% pada tahun 2018, dan mengalami peningkatan menjadi 74,21% pada tahun 2022. Sementara itu, persentase guru jenjang SLB yang tersertifikasi adalah sebesar 21,80% pada tahun 2018, dan meningkat menjadi 61,22% pada tahun 2022. Detail perubahan persentase guru yang tersertifikasi dapat dilihat pada gambar berikut.

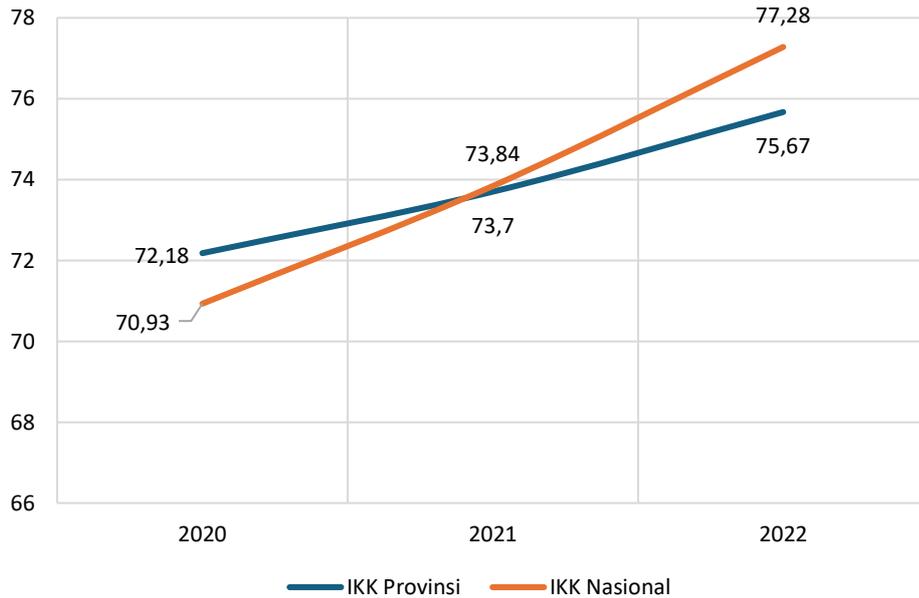
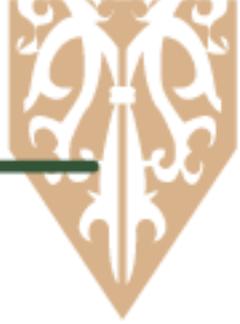


Gambar II.2.21 Persentase Guru yang Tersertifikasi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 - 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

KELUARGA

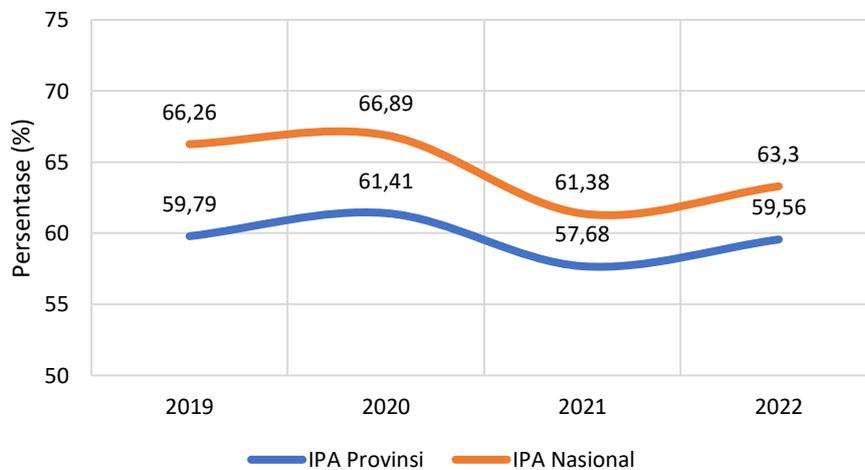
Keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat. Pembangunan keluarga di Indonesia diukur dengan beberapa indikator salah satunya adalah Indeks Kualitas Keluarga (IKK). IKK menunjukkan keberhasilan pembangunan keluarga dalam mewujudkan perlindungan anak dan kesetaraan gender. IKK diukur menggunakan dimensi kualitas legalitas-struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial-psikologi, dan kualitas ketahanan sosial-budaya. IKK Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2022, IKK Provinsi Kalimantan Tengah meningkat 3,4 menjadi 75,67. Nilai tersebut berada di bawah nilai IKK nasional, yaitu 77,28.



Gambar II.2.22 Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah
 Sumber: Kementerian P3A, 2023

PERLINDUNGAN ANAK

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan untuk mengukur capaian perlindungan anak di Indonesia. Semakin tinggi nilai IPA, maka semakin baik kondisi daerah dalam melakukan perlindungan terhadap anak. IPA menggunakan indikator hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus dalam penilaiannya.



Gambar II.2.23 Indeks Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Tengah



IPA Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi dengan tren menurun. Hal tersebut sejalan dengan tren IPA nasional pada periode yang sama. Pada tahun 2020, IPA meningkat 1,62 dari tahun 2019. Pada tahun 2022, IPA Provinsi Kalimantan Tengah meningkat kembali setelah turun pada tahun sebelumnya walaupun belum melampaui capaian IPA tahun 2019.

GENDER

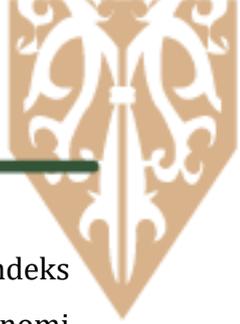
Pengukuran pemberdayaan perempuan di suatu wilayah menggunakan indeks pembangunan gender (IPG), indeks ketimpangan gender (IKG), dan indeks pemberdayaan gender (IDG). Pada tahun 2019-2023 IPG, mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 dan 2021, IPG menurun dari tahun 2019. Sementara, pada tahun 2022-2023, IPG meningkat melebihi kondisi awal pada tahun 2019. IPG pada tahun 2023 adalah 89,49.

Indeks ketimpangan gender (IKG) menunjukkan kesenjangan gender pada tiga dimensi, yaitu kesehatan, pemberdayaan, dan tenaga kerja. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin tinggi ketimpangan antargender pada ketiga dimensi tersebut. Selama tahun 2019-2023, IKG mengalami fluktuasi dengan tren menurun. Akan tetapi, pada tahun 2020 dan 2023, terjadi peningkatan IKG dari tahun sebelumnya. IKG pada tahun 2023 adalah 0,541 yang sama dengan IKG pada tahun 2019.

Sementara, indeks pemberdayaan gender (IDG) menunjukkan partisipasi atau peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan secara terus-menerus pada tahun 2020-2022. IDG Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 adalah 82, turun 1,2 poin dari tahun 2019.

Tabel II.2.2 Indikator Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2022

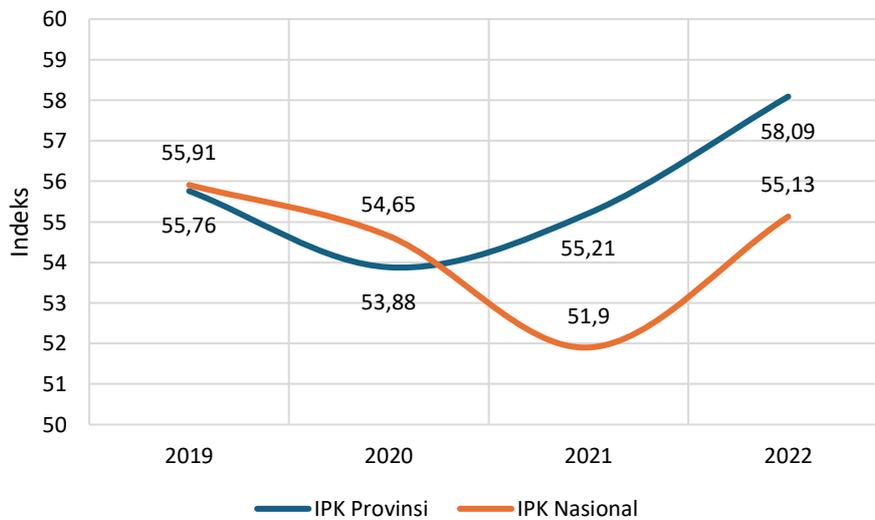
Indikator	2019	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,09	89,03	88,79	89,2
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,541	0,547	0,537	0,526
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	83,2	82,41	82,08	82



KEBUDAYAAN

Pembangunan kebudayaan di Indonesia diukur menggunakan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). IPK memiliki tujuh dimensi, yaitu ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender.

IPK Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi dengan tren meningkat. IPK Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 mencapai 58,09, naik 2,33 poin dari tahun 2019. Pada tahun tersebut, capaian dimensi ekonomi budaya memiliki nilai terendah dibandingkan dimensi-dimensi lainnya. Selama tahun 2019-2022, IPK Provinsi Kalimantan Tengah lebih tinggi daripada IPK nasional, kecuali pada tahun 2019.



Gambar II.2.24 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019-2022

Sumber: Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek, 2023

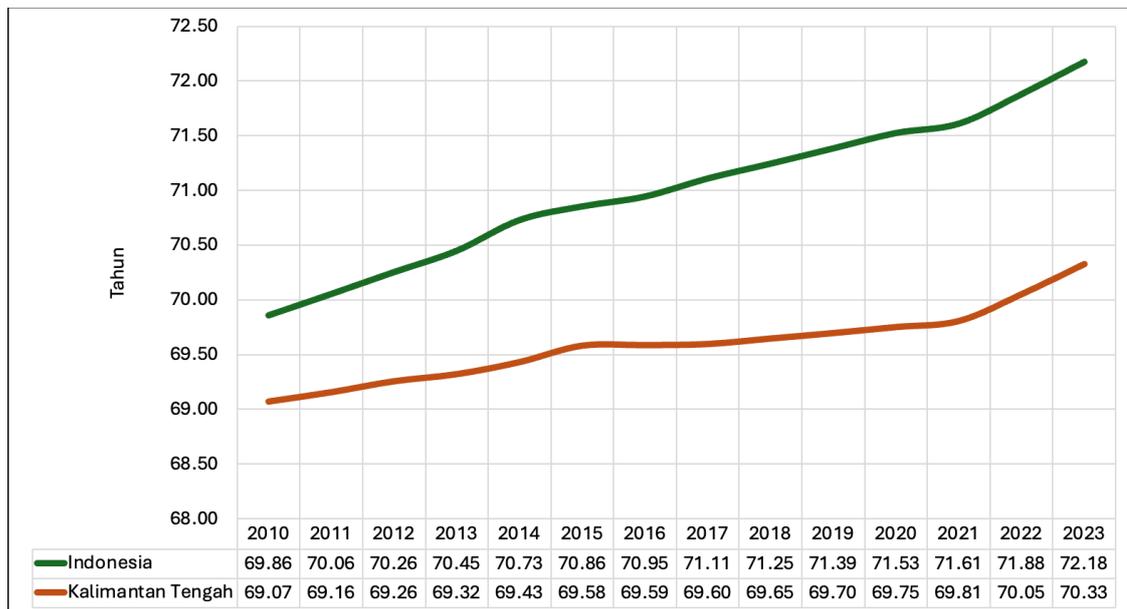
USIA HARAPAN HIDUP

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan sebuah indikator yang menunjukkan rata-rata usia yang mungkin dicapai oleh penduduk baru lahir di suatu wilayah. Data UHH di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum mengalami peningkatan sepanjang periode 2011 hingga 2022. UHH Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2011 mencapai 69,09 tahun, dan meningkat menjadi 70,04 tahun pada 2022. Peningkatan UHH ini dapat mengindikasikan adanya peningkatan dalam akses





layanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Meskipun demikian, nilai UHH Provinsi Kalimantan Tengah masih berada di bawah rata-rata UHH nasional. Rata-rata UHH nasional pada tahun 2011 telah mencapai 70,01 tahun dan pada tahun 2022 mencapai 71,85 tahun. Untuk itu, diperlukan upaya tambahan untuk memastikan penyediaan layanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat agar dapat melampaui rata-rata UHH nasional.



Gambar II.2.25 Usia Harapan Hidup Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2021
 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah indikator yang dapat menggambarkan keberhasilan suatu daerah dalam membangun kualitas hidup penduduk. Nilai IPM diperoleh dari empat indikator yang digunakan untuk mengukur IPM, yakni Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran per Kapita. Selama periode 2011-2022, nilai IPM beserta empat komponen indikatornya di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan tren peningkatan. Peningkatan nilai IPM menandakan keberhasilan program yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk selama beberapa tahun terakhir. Perkembangan indikator komponen IPM di Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada tabel berikut.





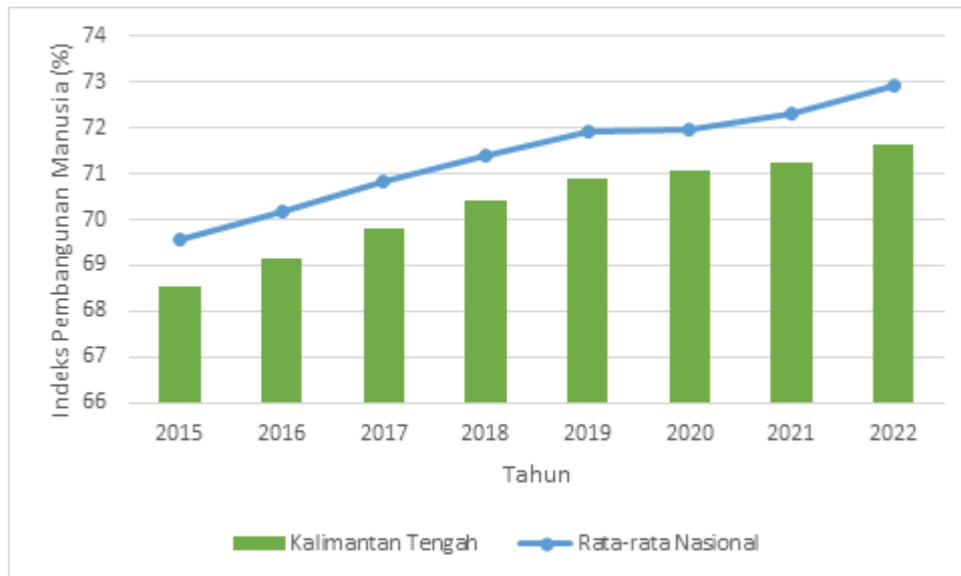
Tabel II.2.3 Indikator Komponen IPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022

No	Indikator IPM	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,09	69,18	69,29	69,39	69,54	69,57	69,59	69,64	69,69	69,74	69,79	70,04
2.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,15	11,22	11,71	11,93	12,22	12,33	12,45	12,55	12,57	12,66	12,74	12,8
3.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,62	7,68	7,73	7,79	7,82	8,03	8,13	8,29	8,37	8,51	8,59	8,68
4.	Pengeluaran per Kapita (Rp)	7.882.800,00	8.517.288,00	9.641.640,00	10.597.728,00	11.049.432,00	12.537.240,00						
5.	IPM	66,38	66,66	67,41	67,77	68,53	69,13	69,79	70,42	70,91	71,05	71,25	71,63

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

Nilai IPM Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2015-2022 masih berada di bawah nilai rata-rata IPM nasional. Nilai IPM Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015 sebesar 68,53%, sedangkan rata-rata IPM nasional pada tahun yang sama mencapai 69,55%. Kondisi ini tidak berubah jauh pada tahun 2022, dengan nilai IPM Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 71,63% dan rata-rata IPM nasional sebesar 72,91%. Fenomena ini mengindikasikan bahwa peningkatan IPM yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah masih perlu didorong agar dapat melampaui rata-rata nasional. Secara rinci, perbandingan IPM Provinsi Kalimantan Tengah terhadap rata-rata IPM nasional disajikan pada gambar berikut.



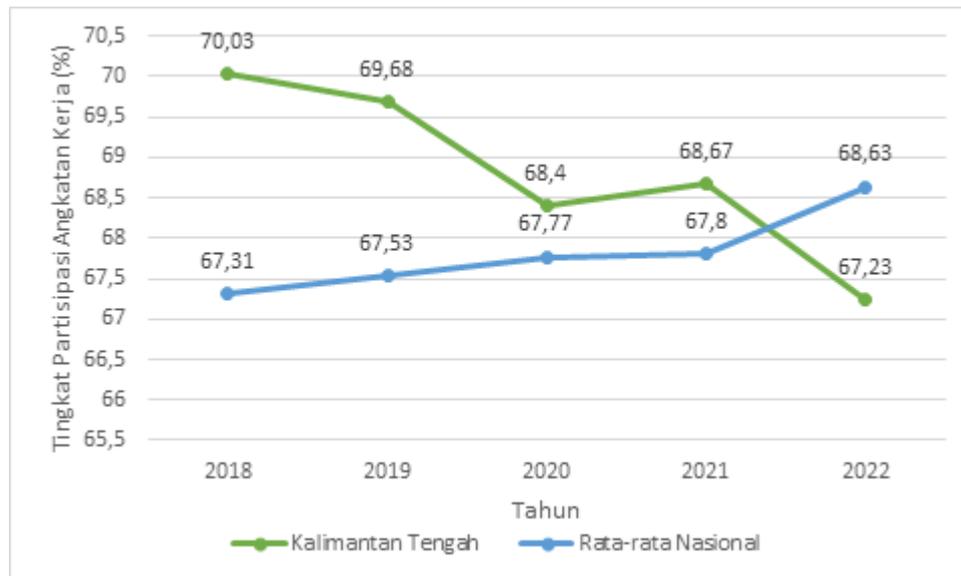


Gambar II.2.26 Perbandingan IPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Rata-rata IPM Nasional Tahun 2015-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan sebuah indikator yang menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif dalam sektor tenaga kerja, termasuk pula yang sedang bekerja dan mencari pekerjaan. Semakin tinggi nilai TPAK, maka semakin banyak angkatan kerja di suatu wilayah apabila dibandingkan terhadap jumlah penduduk usia kerja. Nilai TPAK Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2018-2022 cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan data tahun 2018, nilai TPAK Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 70,03%. Angka ini berada di atas rata-rata TPAK nasional, dengan nilai hanya sebesar 67,31%. Selama tiga tahun berikutnya, nilai TPAK Provinsi Kalimantan Tengah masih berada di atas rata-rata TPAK nasional. Kondisi ini mengalami perubahan pada tahun 2022, dimana nilai TPAK Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 67,23% dan rata-rata TPAK nasional berada pada angka 68,63%. Perubahan nilai TPAK Provinsi Kalimantan Tengah dan rata-rata TPAK nasional dapat dilihat pada gambar berikut.

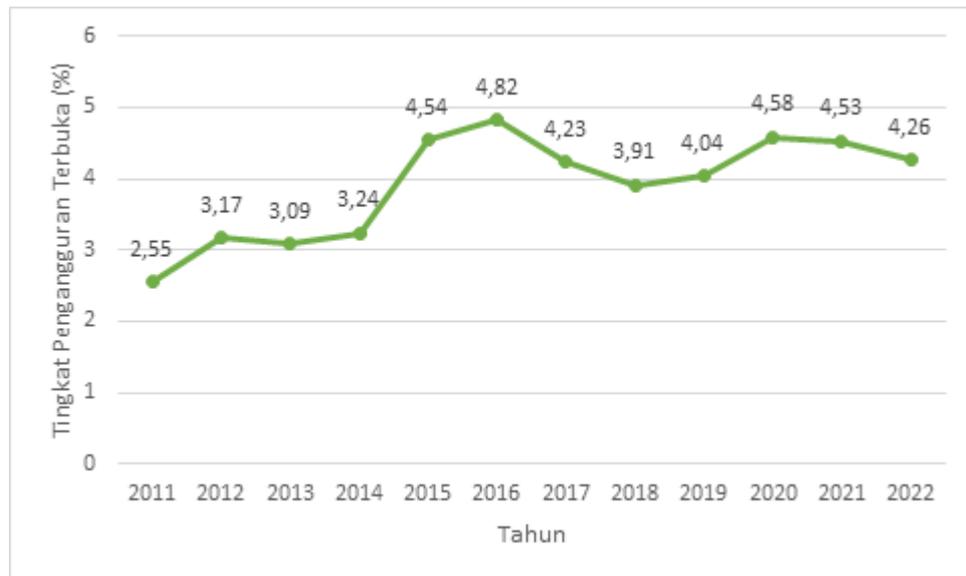


Gambar II.2.27 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Tengah dan Rata-rata Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan perbandingan antara jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja di suatu wilayah. Berdasarkan data yang ada, TPT di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum mengalami fluktuasi selama periode 2011 hingga 2022. TPT Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2011 sebesar 2,55%. Nilai tersebut mengalami peningkatan hingga mencapai puncaknya pada tahun 2016 dengan nilai sebesar 4,82%. Kemudian, nilai TPT mengalami penurunan hingga mencapai 3,91% pada tahun 2018. Peningkatan nilai TPT kembali terjadi pada periode dua tahun berikutnya hingga mencapai 4,58% pada tahun 2020. Pasca tahun 2020, nilai TPT berangsur mengalami penurunan, hingga pada tahun 2022 nilai TPT mencapai 4,26%. Fenomena peningkatan TPT menandakan bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia belum mampu menyerap semua penduduk angkatan kerja. Detail lengkap fluktuasi nilai TPT di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar II.2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan suatu sasaran pembangunan yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2015. Merupakan skema pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui implementasi TPB, diharapkan pada tahun 2030 penduduk akan merasakan peningkatan kualitas hidup dan lingkungan sekitar. Terdapat 17 tujuan yang diakomodasi ke dalam TPB, meliputi:

1. Mengatasi berbagai bentuk kemiskinan;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi, serta mendukung pertanian berkelanjutan;
3. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bagi semua usia;
4. Menjamin pendidikan yang inklusif, adil, dan kesempatan belajar sepanjang hayat;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan;
6. Memastikan akses air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan;

7. Menyediakan energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan;
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pekerjaan yang layak, dan kesempatan kerja;
9. Membangun infrastruktur tangguh, industri berkelanjutan, dan inovasi;
10. Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan antara negara;
11. Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, dan berkelanjutan;
12. Mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
13. Mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Konservasi dan pemanfaatan laut dan sumber daya kelautan;
15. Pemulihan ekosistem darat dan pengelolaan hutan berkelanjutan;
16. Mendorong masyarakat yang damai, inklusif, dan institusi efektif; serta
17. Merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

TPB menjadi salah satu acuan yang dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan. Berdasarkan urusan dan kewenangannya, sebanyak 235 indikator TPB menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Namun, angka tersebut masih dapat disesuaikan dengan kekhususan indikator, kondisi geografis, dan ketentuan indikator pada dokumen perencanaan. Provinsi Kalimantan Tengah mengemban sebanyak 204 indikator yang menjadi kewenangannya. Rincian jumlah indikator berdasarkan tujuan TPB yang relevan di Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.2.4 Jumlah Indikator Berdasarkan Tujuan TPB yang Relevan di Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator
1.	Mengatasi berbagai bentuk kemiskinan	23
2.	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi, serta mendukung pertanian berkelanjutan	11
3.	Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bagi semua usia	33
4.	Menjamin pendidikan yang inklusif, adil, dan kesempatan belajar sepanjang hayat	10
5.	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan	15
6.	Memastikan akses air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan	19

7.	Menyediakan energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan	3
8.	Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pekerjaan yang layak, dan kesempatan kerja	19
9.	Membangun infrastruktur tangguh, industri berkelanjutan, dan inovasi	10
10.	Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan antara negara	5
11.	Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, dan berkelanjutan	10
12.	Mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan	3
13.	Mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	3
14.	Konservasi dan pemanfaatan laut dan sumber daya kelautan	5
15.	Pemulihan ekosistem darat dan pengelolaan hutan berkelanjutan	6
16.	Mendorong masyarakat yang damai, inklusif, dan institusi efektif	16
17.	Merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	13
Total		204

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Kalimantan Tengah

II.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Pemahaman yang kuat tentang daya saing daerah dan penerapan strategi yang efektif dalam setiap fokus ini dapat membantu daerah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan yang lebih tinggi bagi penduduknya. Daya saing daerah memang memiliki peran kunci dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Indikator yang terangkum dan dikelompokkan dalam aspek daya saing daerah dikelompokkan pada tiga (3) fokus besar yaitu: fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

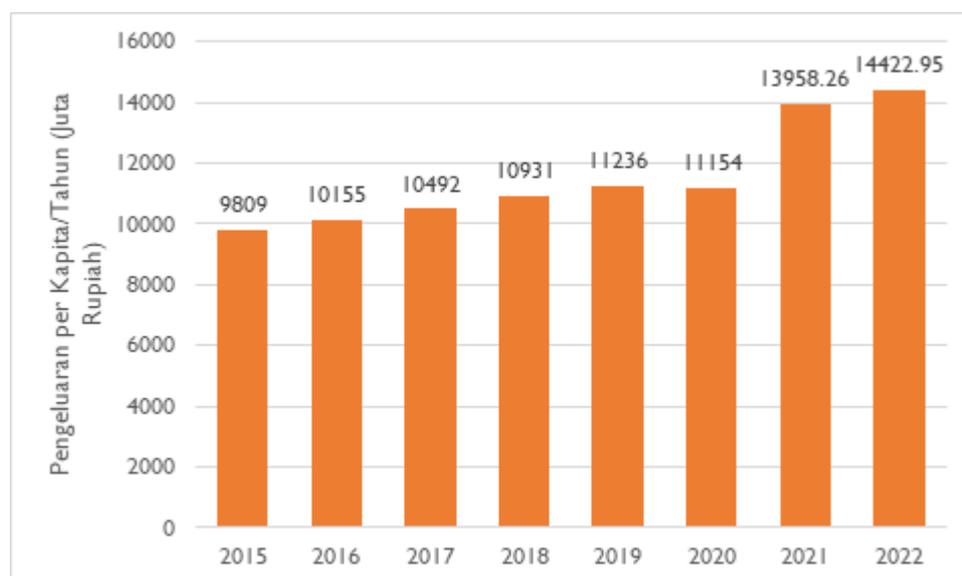
II.3.1 DAYA SAING EKONOMI DAERAH

Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita adalah salah satu indikator yang penting dalam mengukur perkembangan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Ini mengindikasikan seberapa besar rata-rata pengeluaran yang dapat diakses oleh setiap anggota rumah tangga dalam suatu wilayah dan dapat

memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Menurut Teori Hukum Engel, hubungan antara proporsi pengeluaran makanan dan non makanan dalam pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan masyarakat. Hukum Engel menyatakan bahwa ketika pendapatan rumah tangga meningkat, maka proporsi pengeluaran untuk makanan akan cenderung menurun sementara pengeluaran untuk non makanan (seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan rekreasi) akan cenderung meningkat.

Persentase pengeluaran makanan dan non makanan merupakan salah satu indikator dalam pemahaman kondisi kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun kesejahteraan masyarakat merupakan cerminan dari kondisi kemiskinan dan kemiskinan terjadi akibat tingkat pendapatan masih di bawah garis kemiskinan, apabila kebutuhan pokok (makanan) belum terpenuhi maka pengeluaran non makanan tidak dapat terjadi atau tidak ada peningkatan. Grafik di bawah merupakan rerata pengeluaran per kapita di Kalimantan Tengah selama periode 2015–2022 yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Selain peningkatan yang terjadi, terdapat penurunan pada tahun 2020 ketika Pandemi Covid-19.



Gambar II.3.1 Perkembangan Pengeluaran per Kapita per Tahun Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2022

Secara lebih rinci, Tabel 2.4.1 menunjukkan pengeluaran per kapita bulanan menurut kelompok makanan dan non makanan di Provinsi Kalimantan

Tengah selama tujuh tahun pada periode 2015–2021. Meskipun terjadi peningkatan nilai pengeluaran pada golongan makanan, namun tren sempat menunjukkan penurunan pada tahun 2017 hingga 2019 yang merupakan indikasi positif, akan tetapi terjadi peningkatan kembali pada dua tahun berikutnya hingga berkontribusi sebesar 51,09 persen pada total pengeluaran per kapita dalam sebulan di tahun 2021. Di sisi lain, pada golongan makanan terjadi peningkatan nilai pengeluaran diiringi dengan tren peningkatan persentase konsumsi juga. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan dan diversifikasi konsumsi.

Tabel II.3.1 Pengeluaran per Kapita Bulanan Menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2021

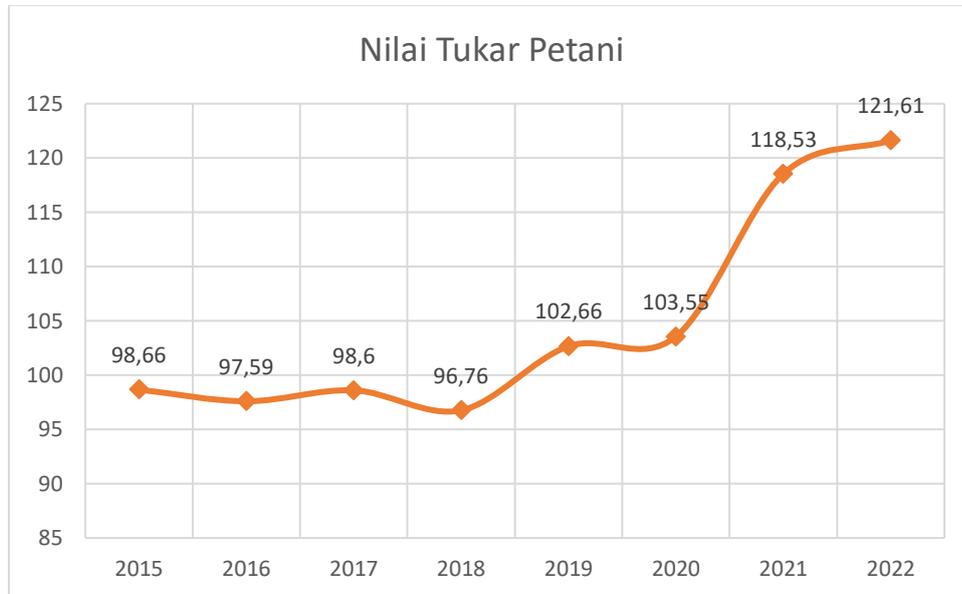
Golongan/Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Makanan	53,74%	52,29%	54,77%	51,66%	50,56%	50,7%	51,09%
	Rp494.858	Rp546.306	Rp621.622	Rp632.493	Rp650.759	Rp675.948	Rp713.145
Non Makanan	46,26%	47,71%	45,23%	48,34%	49,44%	49,3	48,91%
	Rp425.928	Rp498.464	Rp513.358	Rp591.814	Rp636.442	Rp657.370	Rp682.681

Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) diukur sebagai rasio antara harga yang diterima oleh petani (HT) dan harga yang dibayar oleh petani (HB). Jika NTP lebih dari 100 artinya petani mengalami surplus, hal ini berarti harga yang mereka terima untuk produk pertanian lebih besar dari kenaikan harga konsumsi. Sebaliknya, jika NTP kurang dari 100, maka petani mendapatkan harga yang lebih kecil dari kenaikan harga konsumsi, sehingga dapat mengakibatkan pendapatan petani yang lebih kecil dari pengeluaran mereka.

Perencanaan dan kebijakan pemerintah terkait dengan pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam NTP. Adapun grafik di bawah menunjukkan fluktuasi NTP di Kalimantan Tengah selama tujuh (7) tahun sejak 2015 hingga 2022. Pada tahun 2019, NTP Kalimantan Tengah mencapai angka 102,66 yang menandai capaian pertama untuk NTP di atas 100, hal ini berarti petani menerima harga produk yang lebih tinggi dibanding dengan kenaikan harga. Kenaikan NTP secara pesat terjadi dua tahun kemudian

di tahun 2021 dengan NTP yang mencapai 118,53 dan pada tahun 2022 menjadi 121,61. Adapun stabilitas dan kenaikan NTP harapannya akan didorong oleh hasil kinerja pengembangan *food estate* di Kalimantan Tengah.



Gambar II.3.2 Perkembangan Nilai Tukar Petani di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2021

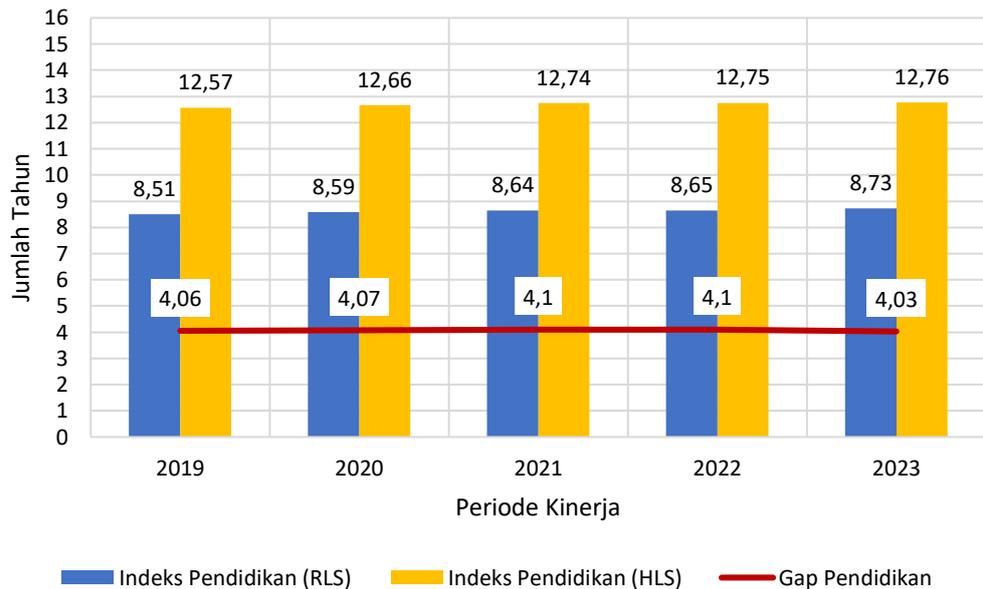
II.3.2 DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal utama dalam pembangunan suatu wilayah. Manusia berperan sebagai pelaku sekaligus sasaran dalam proses pembangunan. Pembangunan SDM diperlukan untuk meningkatkan kualitas, baik secara fisik, mental, maupun pengetahuan. Semakin tinggi kualitas SDM dapat berdampak positif dalam proses pembangunan sehingga meningkatkan laju pembangunan di suatu daerah. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bisa dilihat menggunakan indeks pembangunan manusia (IPM). Pengukuran IPM menggunakan tiga dimensi dasar, meliputi bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Nilai IPM Kalimantan Tengah menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, artinya kualitas SDM juga semakin baik. Akan tetapi, nilai ini masih dibawah nilai IPM nasional. Pada tahun 2022, IPM Kalimantan Tengah mencapai 71,63 sedangkan IPM nasional sebesar 72,91.

Indikator lainnya untuk melihat pembangunan SDM adalah tingkat ketergantungan penduduk. Melalui angka ketergantungan penduduk, dapat dilihat rasio penduduk non produktif yang ditanggung penduduk usia produktif.

Berdasarkan data dari BPS, angka ketergantungan di Kalimantan Tengah mengalami penurunan. Pada tahun 2010, angka ketergantungan sebesar 50,4; menurun menjadi 46,2 pada tahun 2015; dan menurun menjadi 43,3 pada tahun 2020. Diproyeksikan akan tetap menurun hingga mencapai 41,4 ditahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan semakin sedikitnya jumlah penduduk usia non produktif dan bertambahnya penduduk usia produktif. Pada tahun 2022, jumlah penduduk usia produktif sebesar 1.936.100 jiwa sedangkan jumlah penduduk non produktif sebesar 804.900. Jumlah produktif yang tinggi menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah mengalami bonus demografi. Bonus demografi akan berdampak positif dan optimal apabila dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, apabila bonus demografi tidak dikelola dengan baik, akan memunculkan masalah kependudukan kedepannya.

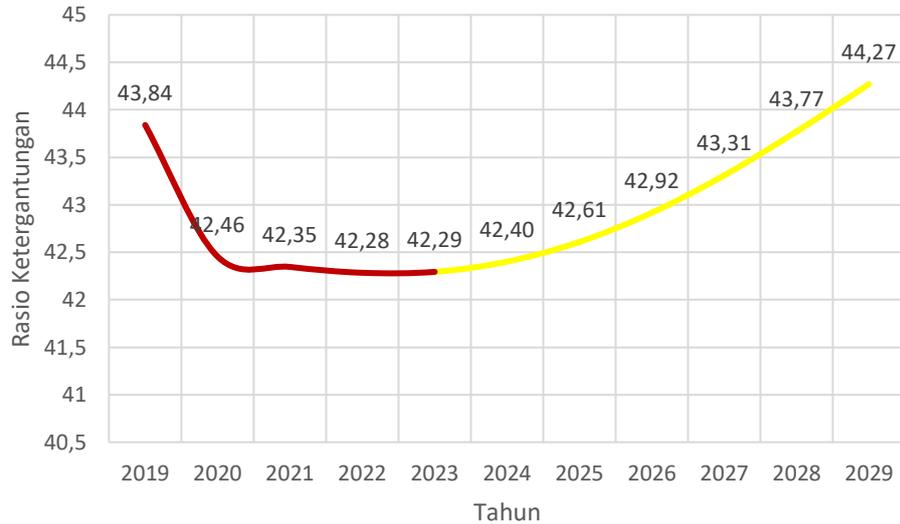
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal utama dalam pembangunan suatu wilayah. Manusia berperan sebagai pelaku sekaligus sasaran dalam proses pembangunan. Pembangunan SDM diperlukan untuk meningkatkan kualitas, baik secara fisik, mental, maupun pengetahuan. Semakin tinggi kualitas SDM dapat berdampak positif dalam proses pembangunan sehingga meningkatkan laju pembangunan di suatu daerah. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bisa dilihat menggunakan indeks pembangunan manusia (IPM). Pengukuran IPM menggunakan tiga dimensi dasar, meliputi bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Nilai IPM Kalimantan Tengah menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, artinya kualitas SDM juga semakin baik. Akan tetapi, nilai ini masih dibawah nilai IPM nasional. Pada tahun 2023, IPM Kalimantan Tengah mencapai 72,20 sedangkan IPM nasional sebesar 74,39.



Gambar II.3.3 Perbandingan kondisi Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2024 (diolah)

Lebih dalam dari aspek pendidikan dalam IPM dapat dicermati bahwa masih terdapat catatan penting terkait lama sekolah. Lama sekolah direpresentasikan antara rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Masih terdapat gap antara harapan lama sekolah dan kondisi riil yang dinyatakan dalam rata-rata lama sekolah. Gap ini mengindikasikan bahwa secara riil lama sekolah masih belum mendekati harapan lama sekolah. Kondisi ini dapat menjadi proksi adanya hambatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Angka yang relatif stagnan juga mengindikasikan belum terdapat perbaikan yang signifikan selama periode 5 tahun terakhir.



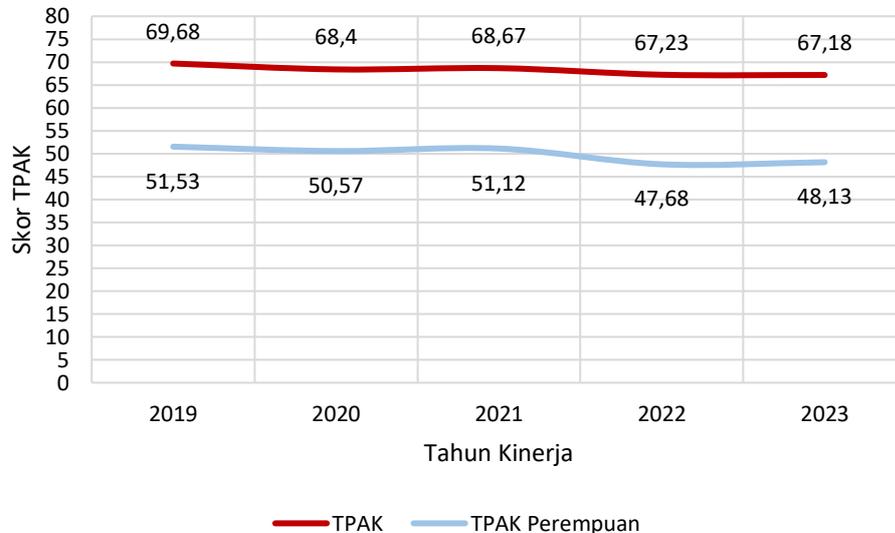
Gambar II.3.4 Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2023 dan Proyeksi Rasio Ketergantungan Tahun 2024-2029

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2024 (diolah)

Indikator lainnya untuk melihat pembangunan SDM adalah tingkat ketergantungan penduduk. Melalui angka ketergantungan penduduk, dapat dilihat rasio penduduk non produktif yang ditanggung penduduk usia produktif. Berdasarkan data dari BPS, angka ketergantungan di Kalimantan Tengah sempat mengalami penurunan. Pada tahun 2019, angka ketergantungan sebesar 43,84; menurun menjadi 42,28 pada tahun 2022. Penurunan ini mengindikasikan semakin sedikitnya jumlah penduduk usia non produktif dan bertambahnya penduduk usia produktif. Jumlah usia produktif yang tinggi menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah sedang mengalami bonus demografi. Bonus demografi akan berdampak positif dan optimal apabila dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, apabila bonus demografi tidak dikelola dengan baik, akan memunculkan masalah kependudukan kedepannya.

Pada periode ke depan diproyeksikan angka ketergantungan akan meningkat. Tren ini menjadi penanda awal titik balik di mana penduduk usia non produktif akan semakin besar. Hal ini menyebabkan meningkatnya angka ketergantungan akibat *aging population*. Diproyeksikan pada periode pembangunan 5 tahunan RPJPD antara 2035-2045 kondisi bonus demografi di

Kalimantan Tengah secara umum akan selesai. Oleh karena hal tersebut penting untuk Kalimantan Tengah memanfaatkan *window of opportunity* bonus demografi yang sedang dan akan terjadi pada periode RPJMD 2025-2029 saat ini.



Gambar II.3.5 TPAK dan TPAK Perempuan Provinsi Kalimantan Tengah 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2024 (diolah)

Selain aspek SDM dari hal pendidikan aspek yang lain adalah terkait ketenagakerjaan. Apabila dilihat dari kondisi ketenagakerjaan dapat dicermati bahwa kondisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Kalimantan Tengah periode 2019-2023 masih dalam rentang 66%-67%. Angka ini mengindikasikan kondisi relatif stagnan dari TPAK. Hal ini mengindikasikan masih belum optimalnya partisipasi dan serapan angkatan kerja dalam lapangan kerja. Hal ini patut diperhatikan sebagai upaya memanfaatkan *Window of Opportunity* bonus demografi.

Lebih lanjut apabila dilihat TPAK Perempuan Provinsi Kalimantan Tengah 2019-2023 angka TPAK Perempuan tahun akhir cenderung turun dibandingkan tahun awal. Hal ini patut menjadi catatan bahwa terdapat beberapa kemungkinan seperti lapangan kerja yang kerap kali diisi laki-laki atau lapangan kerja yang belum inklusif untuk mengakomodir tenaga kerja perempuan.



Gambar II.3.6 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2020-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2024 (diolah)

Apabila melihat dari dimensi literasi masyarakat dapat dicermati bahwa terdapat tren yang cukup baik di mana terjadi tren peningkatan dari skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Walaupun demikian, angka IPLM dari Provinsi Kalimantan Tengah masih berada di bawah skor nasional. Kondisi ini menunjukkan kinerja pembangunan literasi masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kondisi di atas rata-rata nasional. IPLM memiliki posisi strategis sebagai proksi dalam menilai kondisi pengembangan literasi masyarakat yang ke depannya dapat berpengaruh terhadap kondisi kualitas SDM di Kalimantan Tengah. IPLM juga menjadi proyeksi kinerja salah satu alternatif pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat membantu peningkatan skill maupun literasi masyarakat.

II.3.3 DAYA SAING FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR WILAYAH

Perencanaan pembangunan wilayah tidak lepas kaitannya dengan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang layak, memadai, dan berkelanjutan merupakan salah satu aspek mendasar dalam proses pembangunan. Kapasitas dan kualitas infrastruktur yang memadai akan

memudahkan mobilitas penduduk dan logistik (pergerakan barang) yang mampu membantu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi wilayah. Semakin baik kuantitas dan kualitas kondisi infrastruktur di wilayah tersebut maka potensi perkembangan wilayahnya semakin tinggi. Oleh karenanya, fokus fasilitas infrastruktur wilayah erat kaitannya dengan urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan permukiman, serta pertanahan dan aspek infrastruktur lainnya.

Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan sebagai fokus pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Tengah pada urusan pekerjaan umum adalah aspek konektivitas, layanan air minum, dan pemenuhan layanan irigasi. Infrastruktur jalan merupakan syarat utama dalam peningkatan konektivitas, namun berdasarkan data yang tersedia, persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi baik terhadap keseluruhan jalan (jalan dalam kondisi sedang, rusak ringan, dan rusak berat) selama enam tahun terakhir (2015-2020) justru menunjukkan trend penurunan, yakni dari 53,35% pada tahun 2015 menjadi 39,53% pada tahun 2020.

II.3.4 DAYA SAING IKLIM INVESTASI

Fokus ini membahas mengenai kondisi iklim investasi yang sesuai di suatu daerah. Dalam berinvestasi, tentu dibutuhkan iklim kondusif yang memberikan rasa aman dan nyaman untuk melangsungkan kegiatan ekonomi. Hal ini turut menjadi pertimbangan bagi para investor selain faktor lain seperti sarana dan prasarana wilayah. Untuk mengukur kondisi iklim investasi yang aman bisa menggunakan data kriminalitas dan demonstrasi yang terjadi di Kalimantan Tengah. Semakin tinggi angka kriminalitas atau jumlah kejahatan, menunjukkan semakin rendahnya rasa aman yang dirasakan masyarakat termasuk investor di wilayah tersebut. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah demo di Kalimantan Tengah bertambah pada tahun 2022, begitu pula dengan angka kejahatan yang meningkat di tahun 2020. Tidak ada data yang menyampaikan lebih rinci terkait jenis demonstrasi dan jenis kejadian kejahatan. Oleh karena itu, penting menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mengurangi angka kejahatan serta demonstrasi yang terjadi; serta menyediakan akses bagi masyarakat umum untuk mengetahui frekuensi kejahatan di Kalimantan Tengah.



II.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

Analisis aspek pelayanan umum dapat memberikan gambaran dan hasil evaluasi terhadap kualitas pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat di suatu wilayah. Aspek pelayanan umum di Provinsi Kalimantan Tengah dirincikan berdasarkan beberapa fokus pembahasan, antara lain fokus layanan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, fokus layanan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, fokus layanan urusan pemerintahan pilihan, serta fokus layanan fungsi penunjang dan administrasi pemerintahan.

II.4.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

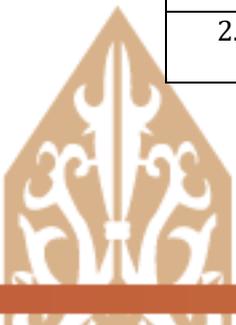
Fokus layanan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar menitikberatkan pada indikator-indikator yang merepresentasikan kondisi pelayanan dasar di suatu wilayah. Indikator yang dapat digunakan yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

PENDIDIKAN

Gambaran umum terkait kondisi layanan pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah dapat diamati dari beberapa indikator. Indikator tersebut yakni Angka Kesiapan Sekolah, Angka Melek Huruf, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar, Angka Putus Sekolah, dan Fasilitas Pendidikan. Secara lengkap, indikator kinerja bidang pendidikan disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.4.1 Kondisi Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Angka Kesiapan Sekolah	%	77,16	77,2	79,17	78,67	77,14
2.	Angka Melek Huruf	%	99,21	99,22	99,2	99,1	99,12



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
3.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,55	12,57	12,66	12,74	12,8
4.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,29	8,37	8,51	8,59	8,68
5.	Angka Partisipasi Murni						
	APM SD/ sederajat	%	99,08	99,14	99,11	99,01	99,11
	APM SMP/ sederajat	%	76,7	77,71	78,45	78,8	78,75
	APM SMA/ sederajat	%	53,67	53,82	54,08	54,25	55,69
6.	Angka Partisipasi Kasar						
	APK SD/ sederajat	%	110,02	110,05	108,49	108,21	107,39
	APK SMP/ sederajat	%	95,79	88,74	90,61	91,07	89,7
	APK SMA/ sederajat	%	74,83	82,27	82,29	83,07	83,97
7.	Angka Putus Sekolah						
	APS SD/ sederajat	%	0,25	0,12	0,28	0,15	0,2
	APS SMP/ sederajat	%	0,7	0,34	0,39	0,2	0,21
	APS SMA/ sederajat	%	1,32	0,57	0,45	0,22	0,22
8.	Fasilitas Pendidikan						
	Ruang kelas pendidikan SD/MI dalam kondisi bangunan baik dan rusak ringan	%	91,48	92,27	92,85	100	70,57
	Ruang kelas pendidikan SMP/MTS dalam kondisi bangunan baik dan rusak ringan	%	90,98	92,81	94,26	100	78,14
	Ruang kelas pendidikan SMA/SMK/ MA dalam kondisi bangunan baik dan rusak ringan	%	97,89	97,74	98,04	100	88,64

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah,
Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

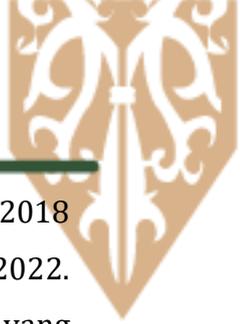


Indikator pertama yang menggambarkan kondisi pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Angka Kesiapan Sekolah (AKS). Indikator ini merepresentasikan yang digunakan untuk melihat kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar (SD/Sederajat). Kesiapan sekolah merupakan tahapan perkembangan di mana anak sudah memiliki kesiapan mengikuti perubahan/transisi kegiatan dari rumah ke sekolah, dan didukung oleh layanan pendidikan pra-sekolah (KB/TK/PAUD). Nilai AKS di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum mengalami peningkatan dan penurunan selama periode 2018-2022. Sebanyak 77,16% penduduk yang bersekolah di kelas 1 SD tercatat memiliki kesiapan sekolah pada tahun 2018. Nilai tersebut mengalami peningkatan sepanjang tahun 2019 dan 2020, hingga mencapai 79,17% pada tahun 2020. Namun, nilai AKS mengalami penurunan pada dua tahun berikutnya, sehingga nilainya menjadi 77,14% pada tahun 2022. Fenomena naik turunnya nilai AKS mencerminkan bahwa layanan pendidikan pra-sekolah masih perlu dioptimalkan untuk mendukung tingkat kesiapan sekolah bagi anak-anak yang akan memasuki jenjang SD/ sederajat.

Angka Melek Huruf (AMH) menjadi indikator kondisi pendidikan berikutnya. Indikator yang menggambarkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis. Kondisi AMH di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum mengalami fluktuasi minor selama periode 2018-2022. Data tahun 2018 menunjukkan bahwa AMH di Provinsi Kalimantan Tengah berada di angka 99,21%. Nilai ini mengalami peningkatan pada tahun berikutnya, sehingga nilai AMH menjadi sebesar 99,22% pada tahun 2019. Namun, data tahun 2020 dan 2021 menunjukkan adanya sedikit penurunan AMH, dimana pada tahun 2020 sebesar 99,20% dan tahun 2021 sebesar 99,10%. Meskipun demikian, AMH kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 hingga menjadi 99,12%.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase siswa yang sedang bersekolah pada jenjang tertentu dengan usia yang sesuai terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya. Secara umum, APM di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan. Nilai APM jenjang SD/ sederajat di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 mencapai 99,08%. Data tahun 2022 menunjukkan APM jenjang SD/ sederajat mengalami





peningkatan menjadi 99,11%. Nilai APM jenjang SMP/ sederajat pada tahun 2018 sebesar 76,70% dan mengalami peningkatan menjadi 78,75% pada tahun 2022. Fenomena yang sama juga terjadi pada nilai APM jenjang SMA/ sederajat yang mengalami peningkatan dari 53,67% pada tahun 2018 menjadi 55,69% pada tahun 2022. Nilai APM yang belum mencapai 100% menandakan bahwa masih ada penduduk yang menyekolahkan anaknya tidak sesuai dengan usianya. Sementara itu, nilai APM yang semakin berkurang setiap jenjangnya menandakan masih terdapat penduduk usia sekolah yang memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih lanjut.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase siswa yang sedang bersekolah pada jenjang tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya, tanpa mempertimbangkan faktor usia. Nilai APK Provinsi Kalimantan Tengah untuk jenjang SD/ sederajat pada tahun 2018 mencapai 110,02% dan mengalami penurunan hingga pada tahun 2022 menjadi 107,39%. Sementara itu, nilai APK untuk jenjang SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat cenderung mengalami fluktuasi. Nilai APK Provinsi Kalimantan Tengah untuk jenjang SMP/ sederajat pada tahun 2018 mencapai 95,79%. Nilai tersebut mengalami fluktuasi tiap tahunnya, hingga pada tahun 2022 nilai APK jenjang SMP/ sederajat menjadi 89,7%. Nilai APK untuk jenjang SMA/ sederajat pada tahun 2018 sebesar 74,63%. Nilai APK jenjang SMA/ sederajat juga mengalami fluktuasi, sehingga nilai APK jenjang SMA/ sederajat pada tahun 2022 menjadi sebesar 83,97%.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah yakni Angka Putus Sekolah (APS). Indikator ini merepresentasikan jumlah penduduk usia sekolah jenjang tertentu yang memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan yang ditempuh karena berbagai faktor. Nilai APS jenjang SD/ sederajat pada tahun 2018 sebesar 0,25%. Nilai tersebut kemudian mengalami fluktuasi dengan tren menurun, sehingga nilai APS jenjang SD/ sederajat pada tahun 2022 mencapai 0,20%. Fenomena serupa juga terjadi pada jenjang SMP/ sederajat, dengan nilai APS tahun 2018 sebesar 0,70% dan tahun 2022 sebesar 0,21%. Nilai APS pada kedua jenjang tersebut sempat mengalami kenaikan pada tahun 2020, yang disebabkan oleh adanya





pandemi Covid-19 dan memaksa pelajar untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring. Implementasi kegiatan belajar mengajar secara daring yang tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan sarana pembelajaran akan menyulitkan sebagian kalangan, sehingga memilih untuk putus sekolah. Nilai APS jenjang SMA/ sederajat memiliki tren penurunan selama periode 2018-2022. Sebanyak 1,32% penduduk usia SMA/ sederajat mengalami putus sekolah pada tahun 2018. Nilai tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2022 nilainya menjadi 0,22%.

Indikator terakhir yang dapat menggambarkan kondisi pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah kondisi bangunan ruang kelas pendidikan. Sebagai salah satu prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar, kondisi bangunan ruang kelas yang baik akan mendorong kekondusifan para siswa dalam melakukan pembelajaran. Secara umum, kondisi bangunan ruang kelas untuk jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat mengalami peningkatan selama periode 2018-2021. Bangunan ruang kelas jenjang SD/ sederajat dengan kondisi baik atau rusak ringan pada tahun 2018 sebesar 91,48%. Bangunan ruang kelas jenjang SMP/ sederajat dengan kondisi baik atau rusak ringan pada tahun 2018 sebesar 90,98%. Bangunan ruang kelas jenjang SMA/ sederajat dengan kondisi baik atau rusak ringan pada tahun 2018 sebesar 97,89%. Data tahun 2021 menunjukkan bahwa kondisi bangunan ruang kelas untuk jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat dengan kondisi baik atau rusak ringan telah mencapai 100%. Namun, berdasarkan audit terbaru melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, persentase bangunan ruang kelas dengan kondisi baik atau rusak ringan untuk semua jenjang mengalami penurunan cukup signifikan. Tercatat persentase bangunan ruang kelas dengan kondisi baik atau rusak ringan untuk jenjang SD/ sederajat sebesar 70,57%, untuk SMP/ sederajat sebesar 78,14%, dan untuk SMA/ sederajat sebesar 88,64%. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan, agar para siswa dapat melakukan kegiatan belajar mengajar di ruang kelas dengan nyaman dan kondusif.



KESEHATAN

Kesehatan merupakan salah satu hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Kondisi kesehatan yang baik dapat menjadi landasan untuk menjalani kehidupan dengan layak. Meskipun pemenuhan kebutuhan terhadap kesehatan merupakan tanggung jawab setiap warganegara, pemerintah memiliki kewajiban dalam menjamin setiap warganegara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Hasil analisis terhadap pelayanan wajib di bidang kesehatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.4.2 Kondisi Kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,64	69,69	69,74	69,79	70,04
2.	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 lahir hidup	7,6	6,2	6,6	9,2	8,6
3.	Angka Kematian Balita	Per 1.000 lahir hidup	8,3	6,6	7	9,8	9
4.	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 lahir hidup	165	166	140	212	148
5.	Stunting	%	34,04	32,30	16,70	15,2	13
6.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	84,73	84,49	80,36	88,14	88,45
7.	Persentase ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah	%	80,12	82,59	79,27	79,28	49,52
8.	Cakupan pemberian ASI eksklusif pada anak usia <6 bulan	%	44,11	50,48	52,98	55,98	55,26
9.	Angka Pengobatan Lengkap TBC	%	TAD	84	55,4	79	81
10.	Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk	%	TAD	60	0,7	7	31,5
11.	Persentase anak usia 1	%	TAD	64,79	65,52	66,58	67,72

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
	tahun yang diimunisasi campak						
12.	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	Rasio	1 : 102.316	1 : 104.418	1 : 102.692	1 : 100.081	1 : 97.896
13.	Rasio dokter per 100.000 penduduk	Rasio	29,9	31,5	35,1	45,4	38,2
14.	Rasio dokter gigi per 75.000 penduduk	Rasio	0,3	0,3	0,38	0,41	0,41
15.	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	Rasio	238,3	193,0	197,6	202,4	149,2

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah,
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan sebuah indikator yang menunjukkan rata-rata usia yang mungkin dicapai oleh penduduk baru lahir di suatu wilayah. Data UHH di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum mengalami peningkatan sepanjang periode 2018 hingga 2022. UHH Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 mencapai 69,64 tahun, dan meningkat menjadi 70,04 tahun pada 2022. Peningkatan UHH ini dapat mengindikasikan adanya peningkatan dalam akses layanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Meskipun demikian, nilai UHH Provinsi Kalimantan Tengah masih berada di bawah rata-rata UHH nasional. Rata-rata UHH nasional pada tahun 2011 telah mencapai 70,01 tahun dan pada tahun 2022 mencapai 71,85 tahun. Untuk itu, diperlukan upaya tambahan untuk memastikan penyediaan layanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat agar dapat melampaui rata-rata UHH nasional.

Indikator layanan bidang kesehatan selanjutnya adalah Angka Kematian Bayi (AKB). Sesuai dengan target yang ditetapkan melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tujuan 3 Target 2, yang ingin mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah dengan menurunkan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Kondisi AKB di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2018-2020 mengalami fluktuasi. Nilai AKB pada tahun 2018



sebesar 7,6 bayi meninggal dari setiap 1.000 kelahiran hidup. Nilai tersebut mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi sebesar 6,2 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Akibat pandemi Covid-19 yang mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan di semua fasilitas pelayanan kesehatan yang berdampak derajat kesehatan masyarakat, nilai AKB mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 6,6 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2022, nilai AKB di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 8,6 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Apabila dibandingkan dengan target TPB, nilai AKB telah jauh berada di bawah target yang ditetapkan.

Fenomena serupa dengan AKB juga terjadi pada indikator Angka Kematian Balita (AKABA). AKABA menggambarkan jumlah balita yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup. Indikator ini berkaitan langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. AKABA kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk. Kondisi AKABA di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2018-2020 mengalami fluktuasi. Nilai AKABA pada tahun 2018 sebesar 8,3 balita meninggal dari setiap 1.000 kelahiran hidup. Nilai tersebut mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi sebesar 6,6 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Akibat pandemi Covid-19 yang mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan di semua fasilitas pelayanan kesehatan yang berdampak derajat kesehatan masyarakat, nilai AKABA mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 7 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Nilai AKABA pada tahun 2022 tercatat sebesar 9 bayi per 1.000 kelahiran hidup.

Indikator berikutnya yang menggambarkan kondisi kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Angka Kematian Ibu (AKI). AKI merupakan sebuah indikator yang merepresentasikan derajat kesehatan perempuan. Kematian ibu yang dimaksud adalah kematian seorang ibu yang disebabkan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan setiap 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa nilai AKI selama periode 2018-2020 cenderung mengalami penurunan. Nilai AKI pada tahun 2018 sebesar 165





kematian ibu setiap 100.000 kelahiran hidup. Nilai tersebut sedikit meningkat pada tahun 2019 menjadi 166 kematian ibu setiap 100.000 kelahiran hidup, dan kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 140 kematian ibu setiap 100.000 kelahiran hidup. Nilai AKI kembali mengalami lonjakan pada tahun 2021 hingga menjadi 212 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, sebelum akhirnya mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 menjadi 148 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada TPB Tujuan 3 Target 1, nilai AKI Provinsi Kalimantan Tengah masih berada di atas target tersebut, yakni di bawah 70 kematian ibu setiap 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator kesehatan makro yang menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat secara global. Penurunan AKI menunjukkan bahwa adanya peningkatan derajat kesehatan perempuan di kalangan masyarakat.

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh multifaktorial dan bersifat antargenerasi. Secara umum, permasalahan *stunting* di Provinsi Kalimantan Tengah cenderung menurun selama periode 2018-2020. Data tahun 2018 menunjukkan prevalensi *stunting* sebesar 34,04%. Nilai tersebut menurun menjadi 32,30% pada tahun 2019 dan 16,70% pada tahun 2020. Sebagai catatan, untuk data tahun 2020 diambil dari aplikasi EPPBGM dengan tingkat keterisian sebesar 59,9%. Nilai prevalensi *stunting* yang masih cukup tinggi perlu menjadi perhatian pemerintah, karena permasalahan gizi dapat menyebabkan terhambatnya tumbuh kembang anak.

Pengentasan *stunting* menjadi program penting untuk mewujudkan SDM yang berkualitas. Seiring dengan dicanangkannya komitmen pengentasan *stunting* di level pemerintah pusat, maka pemerintah daerah perlu mengawal untuk pencapaiannya di tingkat daerah. Pekerjaan rumah mengenai *stunting* perlu jadi perhatian khususnya di daerah-daerah yang menjadi kantong-kantong terjadinya *stunting* di Kalimantan Tengah.

Dua indikator berikutnya berkaitan dengan ibu hamil, yakni cakupan kunjungan Ibu hamil K4 dan persentase ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 menggambarkan persentase ibu hamil





yang melakukan paling sedikit empat kali kunjungan selama masa kehamilan kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi. Melalui analisis cakupan kunjungan ibu hamil K4 diharapkan dapat mengetahui gambaran tingkat perlindungan ibu hamil di suatu wilayah dan kemampuan manajemen program kesehatan ibu dan anak (KIA). Berdasarkan data yang tersedia, diketahui cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi tiap tahun. Sebanyak 84,73% ibu hamil melakukan kunjungan K4 pada tahun 2018. Nilai tersebut kemudian anjlok pada tahun 2020 menjadi 80,36% akibat pandemi Covid-19. Periode tahun 2021 dan 2022 menunjukkan adanya peningkatan kembali cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Provinsi Kalimantan Tengah, hingga mencapai 88,45% pada tahun 2022.

Persentase ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah menggambarkan upaya layanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil untuk mencegah terjadinya anemia atau kekurangan darah. Anemia pada ibu hamil akan berdampak terhadap tidak optimalnya pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan serta berpotensi menimbulkan komplikasi kehamilan dan persalinan, bahkan menyebabkan kematian ibu dan anak. Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa ibu hamil memerlukan setidaknya 90 tablet tambah darah untuk dikonsumsi selama masa kehamilan. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa persentase ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2018-2022 cenderung menurun. Sebanyak 80,12% ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah pada tahun 2018. Nilai tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi sebesar 82,59%. Namun, pasca pandemi Covid-19, persentase ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah mengalami penurunan drastis, hingga puncaknya pada tahun 2022 hanya sebanyak 49,52% ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah. Penurunan signifikan ini perlu menjadi perhatian serius, karena anemia pada ibu hamil memiliki dampak yang signifikan bagi ibu dan anak yang dikandung.

Indikator berikutnya yang dapat menggambarkan kondisi pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah cakupan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif pada anak usia <6 bulan. Pemberian ASI eksklusif menjadi penting dalam proses tumbuh kembang anak, karena ASI yang diberikan secara eksklusif





selama 6 bulan pertama kehidupan dapat mencukupi kebutuhan nutrisi bayi untuk tumbuh dan berkembang. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa cakupan pemberian ASI eksklusif pada anak usia <6 bulan di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan selama periode 2018-2022. Sebanyak 44,11% ibu memberikan ASI eksklusif kepada anak sampai usia 6 bulan pada tahun 2018. Nilai tersebut mengalami peningkatan tiap tahunnya, hingga mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan persentase sebesar 55,98%. Namun, persentase tersebut mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi sebesar 55,26%. Persentase pemberian ASI eksklusif pada anak usia <6 bulan ini cenderung masih rendah, sehingga diperlukan upaya preemtif dan penyuluhan bagi ibu hamil dan melahirkan terhadap pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi anak usia <6 bulan.

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Salah satu kegiatan Pengendalian Penyakit TB Paru yang sarasannya pada penderita adalah pemberian pengobatan lengkap TB bagi pasien. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa pemberian pengobatan lengkap TB bagi pasien mengalami fluktuasi selama periode 2019-2022. Sebanyak 84,00% pasien menerima pemberian pengobatan lengkap TB pada tahun 2019. Akibat pandemi, pemberian pengobatan lengkap TB mengalami penurunan hingga menjadi 55,40%. Pemberian pengobatan lengkap TB pasca pandemi kembali mengalami peningkatan, sehingga pada tahun 2022 persentasenya menjadi 81,00%.

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang ditularkan oleh gigitan nyamuk berjenis *Aedes aegypti*. Penyakit ini masih menjadi salah satu isu kesehatan masyarakat di Indonesia. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan kejadian DBD adalah angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk. Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena penyakit DBD. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa angka kesakitan DBD mengalami fluktuasi yang berkorelasi dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa dari 100.000 penduduk terdapat 60 orang yang mengeluhkan mengalami DBD. Hal ini berkorelasi dengan





fakta bahwa Provinsi Kalimantan Tengah mengalami KLB DBD pada tahun tersebut. Angka kesakitan DBD menurun drastis pada dua tahun berikutnya, dengan nilai sebesar 0,7 dari 100.000 penduduk pada tahun 2020 dan 7 per 100.000 penduduk pada tahun 2021. Adapun angka kesakitan DBD pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 31,5 per 100.000 penduduk. Angka kesakitan DBD yang mengalami fluktuasi menandakan bahwa potensi terjadinya KLB DBD masih sangat besar, sehingga memerlukan upaya preventif dan kesiapsiagaan untuk menangani kejadian tersebut.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi layanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak. Campak merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh virus yang termasuk dalam genus *Morbillivirus* dari keluarga *Paramyxoviridae* dan sering menyerang anak-anak. Apabila tidak ditangani serius, campak akan menyebabkan munculnya komplikasi penyakit seperti pneumonia, kerusakan pada mata, dan gangguan sistem pencernaan. Salah satu bentuk pencegahan penyakit campak adalah dengan pemberian imunisasi campak. Imunisasi campak diberikan pertama kali pada saat anak berusia 9 bulan. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami tren peningkatan. Data tahun 2019 menunjukkan sebanyak 64,79% anak usia 1 tahun telah menerima imunisasi campak. Nilai tersebut mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2022 mencapai 67,72%. Mengingat persentase tersebut masih jauh dari 100%, pemerintah perlu mendorong masyarakat untuk mengikuti imunisasi campak agar mampu menjamin kesehatan anak.

Selain memperhatikan kondisi pelayanan kesehatan, kondisi sarana dan prasarana kesehatan juga perlu untuk dianalisis. Terdapat setidaknya empat indikator yang menggambarkan kondisi sarana dan prasarana kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah, yakni rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per 100.000 penduduk, rasio dokter gigi per 75.000 penduduk, dan rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk. Rasio rumah sakit per satuan penduduk menggambarkan jumlah beban layanan yang ditanggung oleh rumah sakit. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui rasio rumah sakit per satuan penduduk





mengalami fluktuasi. Jumlah rumah sakit yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 sebesar 26 unit. Masing-masing unit rumah sakit tersebut rata-rata melayani sebanyak 102.316 penduduk. Nilai tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2019 dengan adanya peningkatan jumlah penduduk tanpa diiringi penambahan jumlah rumah sakit, dengan rasio sebanyak 1:104.418. Adanya penurunan jumlah penduduk pada tahun 2020 menyebabkan rasio rumah sakit per satuan penduduk mengalami penurunan menjadi 1:102.692. Rasio rumah sakit per satuan penduduk kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022 dengan adanya penambahan jumlah rumah sakit yang tersedia, dengan nilai 1:100.081 pada tahun 2021 dan 1:97.896 pada tahun 2022. Penurunan beban layanan rumah sakit diharapkan mampu mendorong optimalisasi pelayanan rumah sakit.

Rasio dokter per 100.000 penduduk menggambarkan beban yang dimiliki oleh seorang dokter untuk melayani penduduk. Secara umum, terjadi penurunan beban layanan dokter yang ditandai dengan peningkatan rasio dokter per 100.000 penduduk. Data tahun 2018 menunjukkan bahwa tiap 100.000 penduduk dilayani oleh 29 hingga 30 dokter, dengan rasio sebesar 29,88. Beban dokter mengalami penurunan, sehingga rasio dokter per 100.000 penduduk menjadi 45,44 pada tahun 2021, yang diartikan tiap 100.000 penduduk dilayani oleh 45 dokter. Namun, beban dokter kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 dengan rasio 38,23 atau tiap 100.000 penduduk dilayani oleh 38 dokter. Rasio dokter per 100.000 penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah jauh di bawah rasio ideal yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO), yakni 100 dokter untuk tiap 100.000 penduduk.

Rasio dokter gigi per 75.000 penduduk menggambarkan beban kerja seorang dokter gigi untuk melayani penduduk. Secara umum, terjadi penurunan beban layanan dokter gigi yang ditandai dengan peningkatan rasio dokter gigi per 75.000 penduduk. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa rasio dokter gigi per 75.000 penduduk pada tahun 2018 sebesar 3,02. Angka tersebut menandakan bahwa tiap 75.000 penduduk dilayani oleh sekitar 3 dokter gigi. Nilai tersebut mengalami peningkatan setiap tahun, hingga pada tahun 2022 rasio dokter gigi per 75.000 penduduk sebesar 4,08 atau tiap 75.000 penduduk dilayani





oleh 4 dokter gigi. Rasio dokter gigi terhadap penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah jauh di bawah rasio ideal WHO, yakni 1 dokter hanya melayani 2.000 penduduk. Beban layanan dokter gigi yang terlampaui tinggi dikhawatirkan akan mengurangi kualitas layanan yang diberikan.

Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk menggambarkan beban kerja seorang tenaga kesehatan untuk melayani penduduk. Secara umum, rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi. Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk pada tahun 2018 sebesar 238,31, atau tiap tenaga kesehatan melayani 238 penduduk. Rasio tersebut mengalami penurunan pada tahun 2019 hingga menjadi 193,01 sebelum akhirnya mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan 2021. Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk pada tahun 2021 sebesar 202,43 atau tiap tenaga kesehatan melayani sekitar 202 penduduk. Sementara itu, rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 149,22. Apabila dibandingkan dengan rasio ideal tenaga kesehatan per satuan penduduk yang ditetapkan WHO, yakni 2,5 tenaga kesehatan per 1.000 penduduk atau 1 tenaga kesehatan per 400 penduduk, maka rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah sudah berada pada kondisi ideal.

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

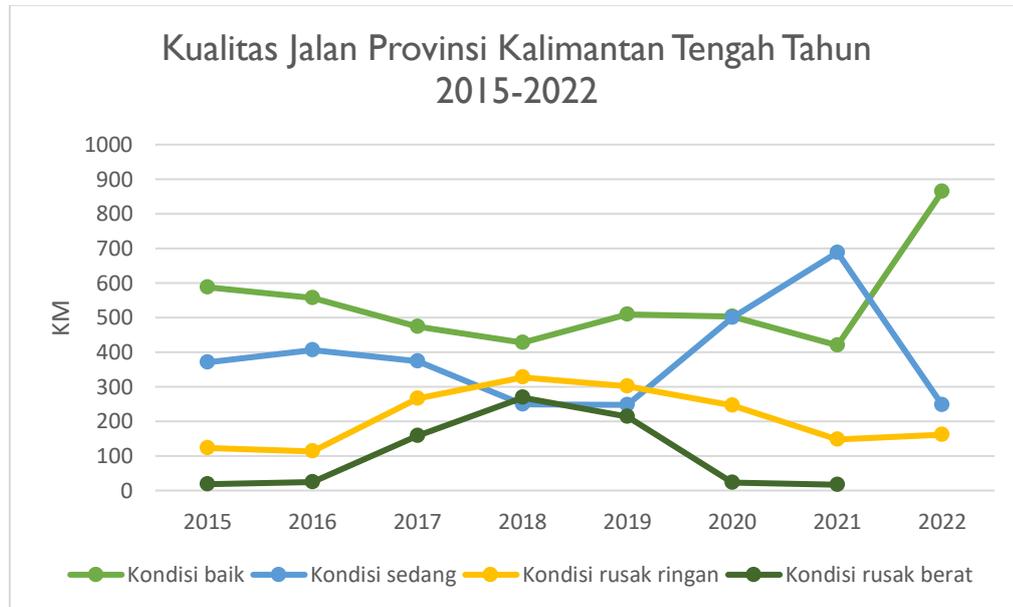
Infrastruktur yang layak, memadai, dan berkelanjutan merupakan salah satu aspek mendasar dalam suatu proses pembangunan, selain itu kapasitas dan kualitas infrastruktur yang memadai akan memudahkan mobilitas penduduk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Bina Marga

Jalan dan jembatan merupakan prasarana mutlak untuk mempermudah mobilitas penduduk dan pergerakan logistik barang. Jalan dan jembatan merupakan prasarana utama yang mampu menembus keterisolasian wilayah sehingga wilayah satu dengan yang lain dapat terkoneksi membentuk suatu jaringan struktur ruang yang mampu mempercepat kegiatan dan laju ekonomi suatu wilayah. Penyelenggaraan dan pemeliharaan jalan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi yang mengacu pada peraturan



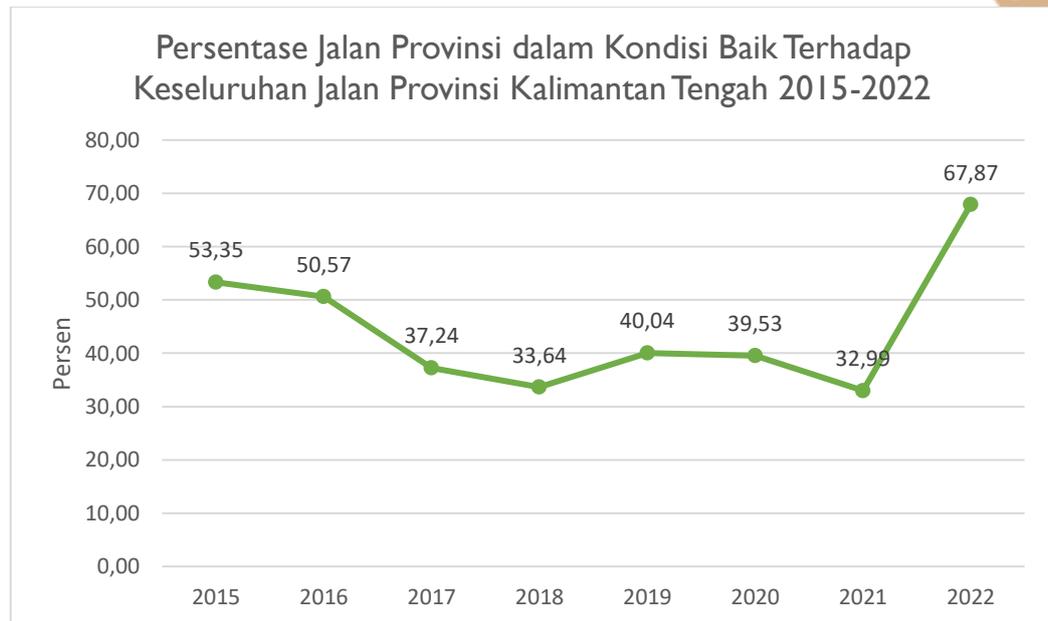
tentang pengelolaan keuangan daerah. Panjang jalan provinsi menurut kualitas kondisi jalan di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar II.4.1 Kualitas Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (diolah)

Total keseluruhan panjang jalan provinsi provinsi pada tahun 2022 adalah 1.272,06 km di mana dalam empat tahun terakhir sudah menunjukkan tren kenaikan total jalan provinsi dalam kondisi baik. Total jalan provinsi dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat dalam tiga tahun terakhir juga telah mengalami tren penyusutan sehingga infrastruktur jalan kewenangan provinsi di Kalimantan Tengah tergolong baik dan berpotensi positif terhadap perencanaan pembangunan. Namun, perlu digarisbawahi bahwa persentase jalan provinsi dalam kondisi baik terhadap keseluruhan jalan (jalan dalam kondisi sedang, rusak ringan, dan rusak berat) selama lima tahun terakhir masih berada di bawah 50% yakni 37,24% pada tahun 2017 dan menjadi 32,99% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 tercatat kondisi jalan provinsi dalam kondisi baik mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 67,87%.



Gambar II.4.2 Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik Terhadap Keseluruhan Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (diolah)

Cipta Karya

Akses terhadap air minum layak merupakan sarana dasar yang tidak kalah penting dari aspek pelayanan umum wajib lainnya. Provinsi Kalimantan Tengah selama delapan tahun terakhir (2014-2022) mengalami tren peningkatan yang konsisten terkait rumah tangga yang memiliki akses air minum layak yang mengindikasikan adanya pembangunan yang positif terhadap aspek layanan air minum. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak mengalami peningkatan dari 56,02% pada tahun 2014 meningkat menjadi 77,01% persen tahun 2022. Namun, meskipun mengalami tren peningkatan yang konsisten pada tiap tahunnya, ternyata capaian angka akses air minum layak Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 masih jauh di bawah capaian nasional. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dalam skala nasional tahun 2022 adalah sejumlah 91,05%. Bahkan secara nasional, Kalimantan Tengah masih menduduki urutan ke-31 dari 34 provinsi di Indonesia.

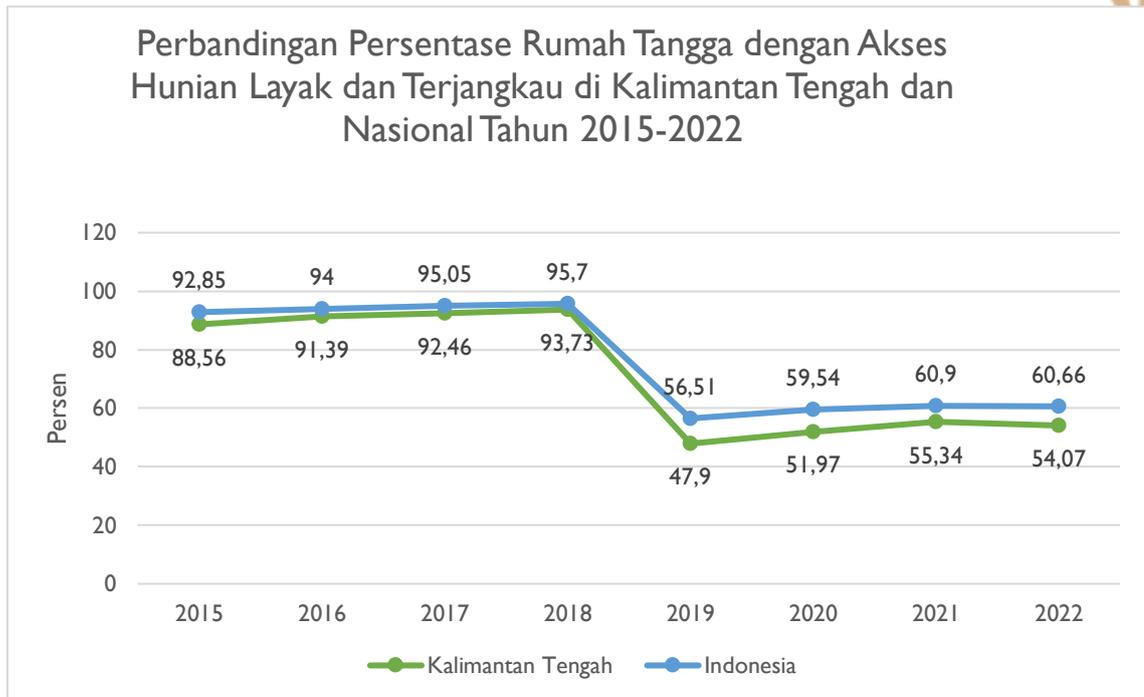


Gambar II.4.3 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

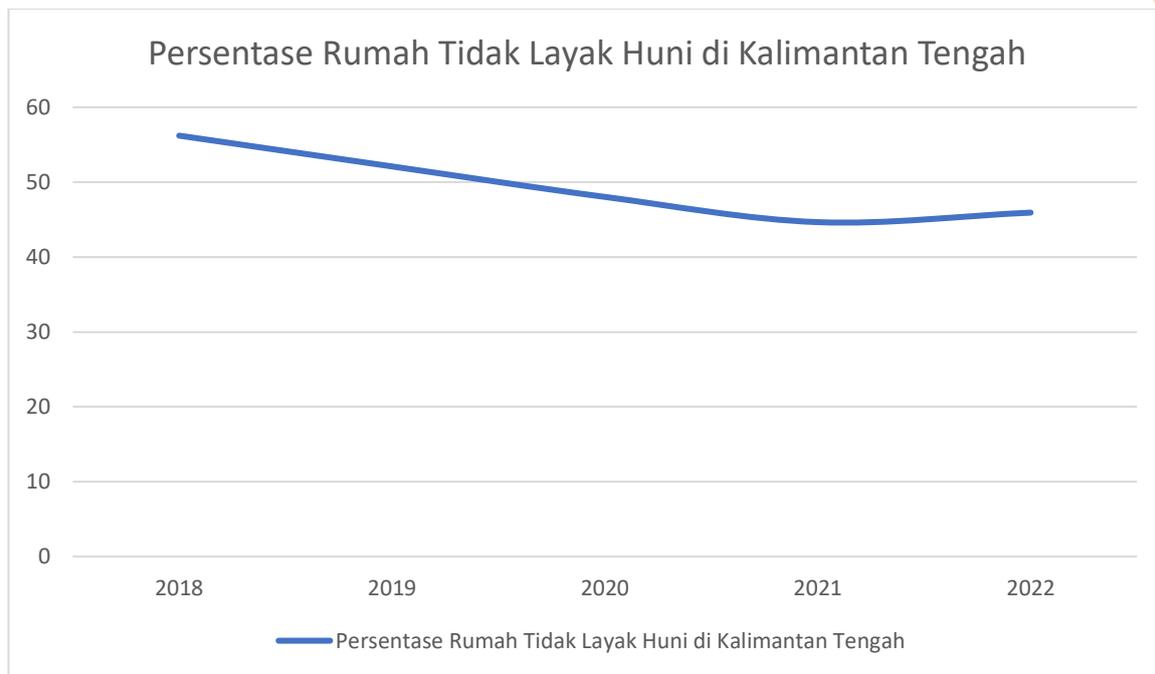
Berdasarkan data yang di olah dari BPS, Susenas tahun 2020, jumlah RLH di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 366.112 Unit (51,97%) yang mengindikasikan masih rendahnya Persentase Rumah Layak Huni (RLH). Data tersebut dihitung berdasarkan 4 indikator yakni ketahanan bangunan, luasan bangunan, akses air minum dan akses sanitasi. Persentase RLH ini didapat berdasarkan rumus jumlah RLH dibagi jumlah rumah tangga dikali 100%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau di Indonesia tahun 2022 sebesar 60,66%. Oleh karenanya capaian RLH di Provinsi Kalimantan Tengah selama 6 tahun terakhir (2017-2022) masih berada di bawah capaian nasional.



Gambar II.4.4 Perbandingan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau di Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015-2022

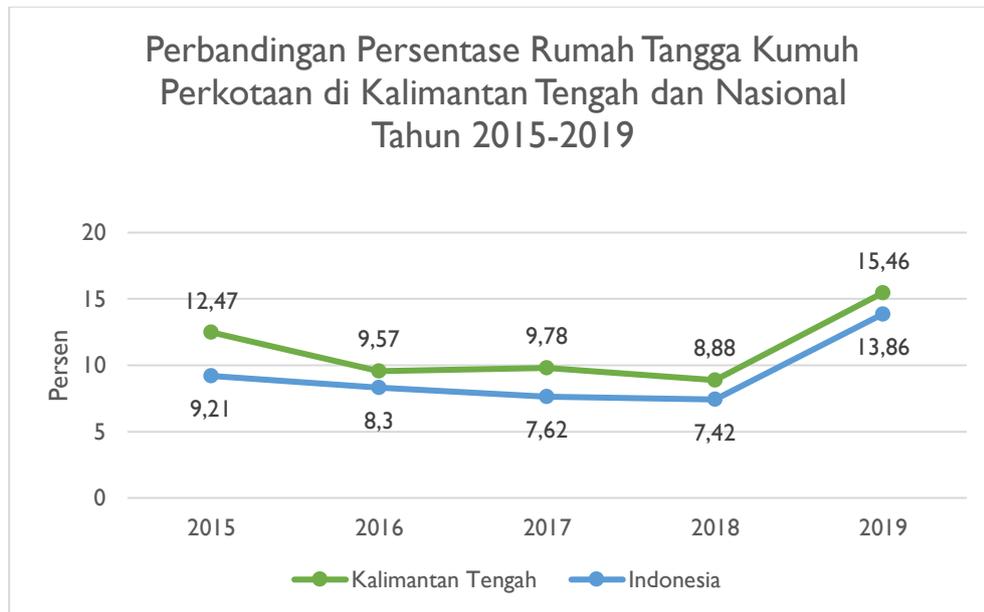
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan data pada gambar di bawah ini, diketahui bahwa persentase Rumah Tidak Layak Huni di Kalimantan Tengah cukup fluktuatif. Jumlah RTLH di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan dari tahun 2018-2021 dan mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2022. Jumlah RTLH di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri mencapai 325.892 unit (45,93%) pada tahun 2022 dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 312.409 unit (44,66). Namun, secara keseluruhan jumlah RTLH di Provinsi Kalimantan mengalami penurunan dari tahun 2018.



Gambar II.4.5 Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022

Permukiman kumuh merupakan permukiman yang tumbuh secara spontan di suatu wilayah khususnya di wilayah perkotaan dalam lingkungan yang kurang sehat dan kurang didukung oleh Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) yang memadai seperti jalan lingkungan, drainase, air minum, sanitasi, dan jalan akses darurat. Persentase rumah tangga kumuh di kawasan perkotaan memiliki trend cenderung meningkat mencapai 15,46% di tahun 2019. Berdasarkan data dari BPS Nasional, tingkat persentase rumah tangga kumuh kawasan perkotaan Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) masih berada di atas persentase nasional yang mengindikasikan bahwa luasan kawasan kumuh di area perkotaan di Provinsi Kalimantan Tengah harus menjadi salah satu fokus pembangunan agar pertumbuhan kawasan kumuh cenderung menurun.



Gambar II.4.6 Perbandingan Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan di Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

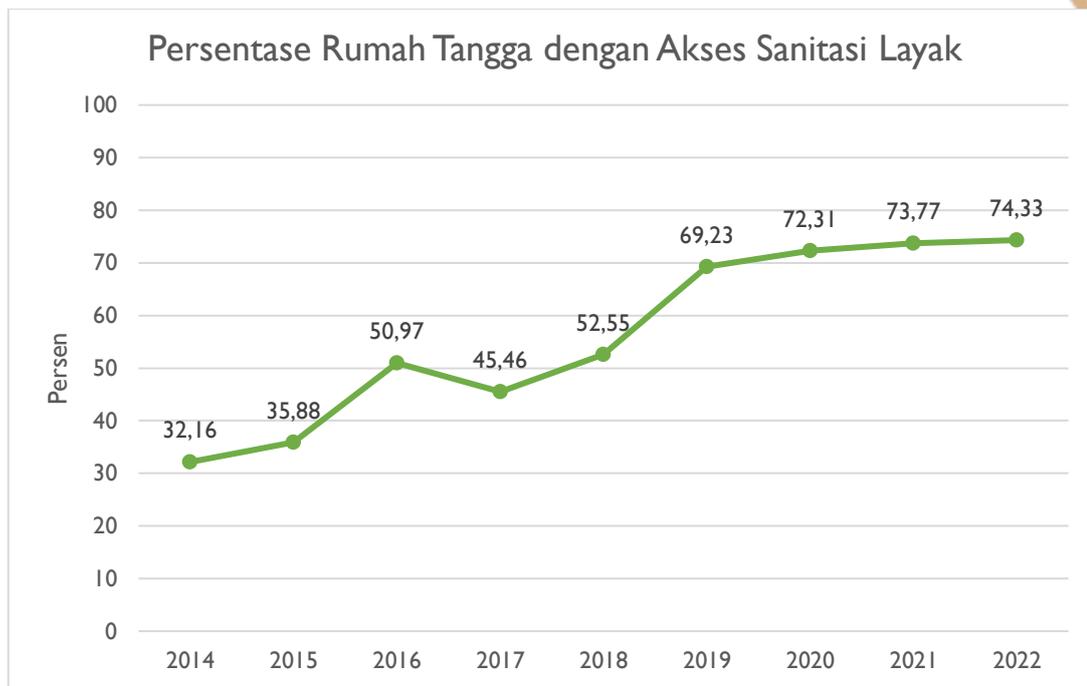
Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, terlihat bahwa hingga tahun 2022, tingkat kesesuaian pembangunan dalam pemanfaatan ruang (RTRW) mencapai 90,00%. Angka ini terus mengalami peningkatan stabil di enam tahun terakhir, meningkat secara konsisten dari 85% di tahun 2017 menjadi 90% di tahun 2022. Oleh karenanya, kondisi ini mengindikasikan bahwa penggunaan ruang di Provinsi Kalimantan Tengah masih tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga penggunaan ruang masih sesuai pada kapasitas dan daya dukung yang tersedia. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah dan masyarakat berhasil mengimplementasikan aturan yang terkandung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan berhasil mengendalikan tata ruang. Nilai kesesuaian ruang ini merupakan hasil dari kombinasi dari keterwujudan dan keselarasan dalam pemanfaatan ruang, yang pada dasarnya terdiri dari aspek struktur dan pola ruang.



Gambar II.4.7 Ketaatan Terhadap RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2022

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (diolah)

Berkaitan dengan akses sanitasi layak di kawasan permukiman, persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak cenderung memiliki trend naik/meningkat. Provinsi Kalimantan Tengah selama lima tahun terakhir (2017-2022) mengalami peningkatan tren terkait rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak. Konsep sanitasi layak sejak tahun 2018 mengalami perubahan yang mengedepankan aspek dasar kelayakan prasarana dasar kesehatan yaitu memiliki fasilitas BAB sendiri/bersama, kloset leher angka dan TPAT tangka septik/IPAL. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak mengalami peningkatan dari 50,97% pada tahun 2017 meningkat menjadi 74,33% persen tahun 2022. Namun, capaian angka akses sanitasi layak Kalimantan Tengah tahun 2022 ternyata masih jauh di batas nasional. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dalam skala nasional tahun 2022 adalah sejumlah 80,92%. Bahkan Kalimantan Tengah menduduki urutan ke-29 dari 34 provinsi di Indonesia.



Gambar II.4.8 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2022
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

KETENTERAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bidang ini membahas permasalahan yang menyangkut ketertiban umum serta upaya perlindungan yang dilakukan kepada masyarakat. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah kejahatan yang dilaporkan, dengan total terdapat 2.629 kasus. Semakin banyak kejahatan yang terjadi menimbulkan rasa tidak aman dan cemas bagi masyarakat. Penyelesaian kejahatan belum mencapai 100% dan juga menurun daripada tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, persentase penyelesaian kejahatan mencapai 87,19% sementara pada tahun 2020 menurun menjadi 78,89%. Angka ini menjadi perhatian bagi pemerintah agar dapat menyelesaikan kejahatan yang dilaporkan, serta memberikan hukuman yang setimpal pada pelaku kejahatan.

Penurunan kualitas ketenteraman dan ketertiban umum juga dilihat dari berkurangnya jumlah Linmas atau petugas perlindungan masyarakat. Linmas berperan dalam memelihara kondisi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat serta turut terlibat dalam penanganan bencana. Selain itu, terjadi peningkatan jumlah demo pada tahun 2022. Demo terjadi karena belum terselesaikannya

permasalahan antara masyarakat dengan pemerintah; belum terakomodirnya hak-hak politik masyarakat; serta sebagai media penyampaian tuntutan atas kekurangan dalam kinerja pemerintah yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Tabel II.4.3 Capaian Indikator Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kejahatan yang dilaporkan	5.699	2.444	2.629	TAD	TAD
Rasio penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk	138	94	62	TAD	TAD
Persentase penyelesaian kejahatan	72,19	87,19	78,89	TAD	TAD
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	TAD	TAD	267:598	270:619	274:621
Jumlah Linmas	49.101	56.032	55.648	58.856	52.032
Cakupan patroli petugas Satpol PP	TAD	20	20	25	30
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	13062	15212	14858	15904	14122
Jumlah Demo	TAD	5	5	7	10
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	71,27	81,16	74,91	73,17	79,3

Sumber: Badan Pusat Statistik, Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

SOSIAL

Penanganan urusan sosial berhubungan dengan terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Amanat ini sesuai disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai situasi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara sehingga dapat menjalani kehidupan dengan layak dan mampu mengembangkan diri serta menjalankan peran sosialnya. Ada 20 jenis PMKS yang ditangani oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu korban bencana alam, korban bencana sosial, gembel dan pengemis (gepeng), penderita HIV/AIDS, pecandu narkoba, fakir miskin, anak terlantar, anak korban kekerasan di lingkungan rumah tangga, anak korban kekerasan di lingkungan masyarakat, anak korban kekerasan seksual, lansia terlantar,

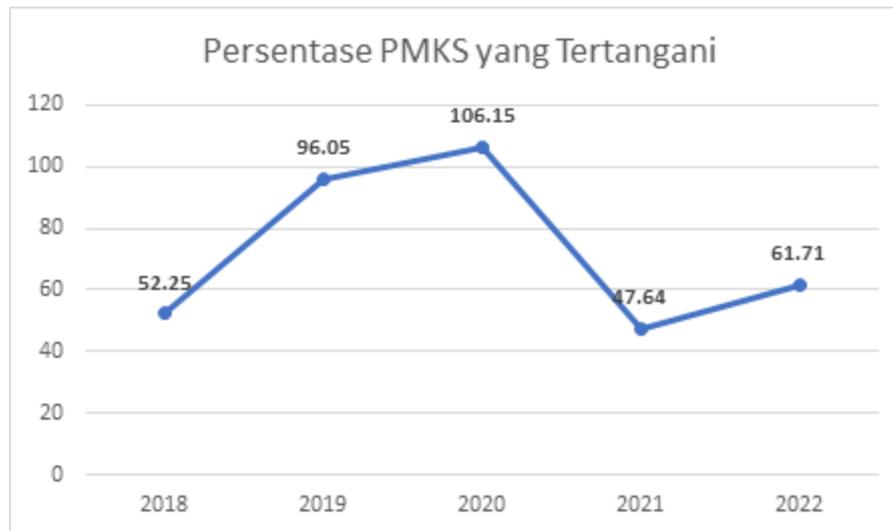
komunitas adat terpencil, penyandang tuna netra, penyandang tuna wicara-rungu, penyandang tuna daksa, penyandang tuna grahita, penyandang cacat fisik, tuna susila, bekas narapidana, dan korban penyalahgunaan NAPZA.

Tabel II.4.4 Capaian Indikator Bidang Sosial

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	144.777	167.607	226.903	226.518	420.553
Persentase PMKS yang tertangani	52,25	96,05	106,15	47,64	61,71
Rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan	100	100	100	100	100
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	52,25	96,05	106,15	47,64	61,71

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, Dokumen RPJMD Kalimantan Tengah

Jumlah PMKS di Provinsi Kalimantan Tengah berfluktuasi setiap tahunnya. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah 420.553 PMKS, sementara pada tahun 2021 berjumlah 226.518 PMKS. Akan tetapi, dari keseluruhan PMKS tersebut, belum sepenuhnya tertangani oleh pemerintah. Persentase PMKS yang tertangani juga cenderung meningkat kecuali pada tahun 2021 yang menurun menjadi 47,64%. Kemudian pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 61,71%. Grafik persentase PMKS yang tertangani dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar II.4.9 Persentase PMKS yang Tertangani

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah juga menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjabarkan target pada masing-masing jenis pelayanan SPM bidang sosial. Terdapat lima jenis pelayanan SPM bidang sosial, yaitu:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandang dan pengemis di dalam panti
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Diantara pengukuran pemberdayaan perempuan adalah menggunakan indeks ketimpangan gender (IKG), indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG). Indeks ketimpangan gender menunjukkan kesenjangan gender pada tiga dimensi, yaitu kesehatan, pemberdayaan, dan tenaga kerja. Angka IKG semakin bagus apabila nilainya semakin menurun, yang artinya ketimpangan semakin rendah. Angka IKG Kalimantan Tengah mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022. Idealnya semakin tinggi nilai IPG dan IDG

maka semakin rendah nilai IKG. Kondisi di Kalimantan Tengah sudah sejalan, yakni nilai IKG menurun dan nilai IPG meningkat. Akan tetapi berlawanan dengan nilai IDG yang mengalami penurunan pada tahun 2022. Nilai IDG menunjukkan partisipasi atau peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Penurunan nilai IDG dipengaruhi oleh menurunnya keterlibatan perempuan di parlemen pada tahun 2020 dan mengalami stagnasi hingga tahun 2022, menurunnya keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan pada tahun 2022, dan terjadi stagnasi persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta dan lembaga pemerintah pada tahun 2019 dan 2020. Selanjutnya, terdapat pula Indeks Perlindungan Anak (IPA) sebagai pengukuran perlindungan anak. Pada tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah nilai IPA adalah sebesar 61,83. Nilai tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang hanya sebesar 57,68.

Tabel II.4.5 Capaian Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,499	0,488	0,472	0,465	0,459
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,13	89,09	89,03	88,79	89,2
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,03	83,2	82,41	82,08	81,98
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	TAD	59,79	61,41	57,68	61,83
Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	140	127	151	290	396
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani	100	100	100	TAD	TAD
Keterlibatan perempuan di parlemen	24,44	35,56	33,33	33,33	33,33
Keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan	44,24	45,35	46,12	47,36	43,8
Partisipasi angkatan kerja perempuan	49,19	56,6	57,6	TAD	TAD

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	7,58	6,34	6,34	TAD	TAD
Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	94,51	80,85	80,85	TAD	TAD

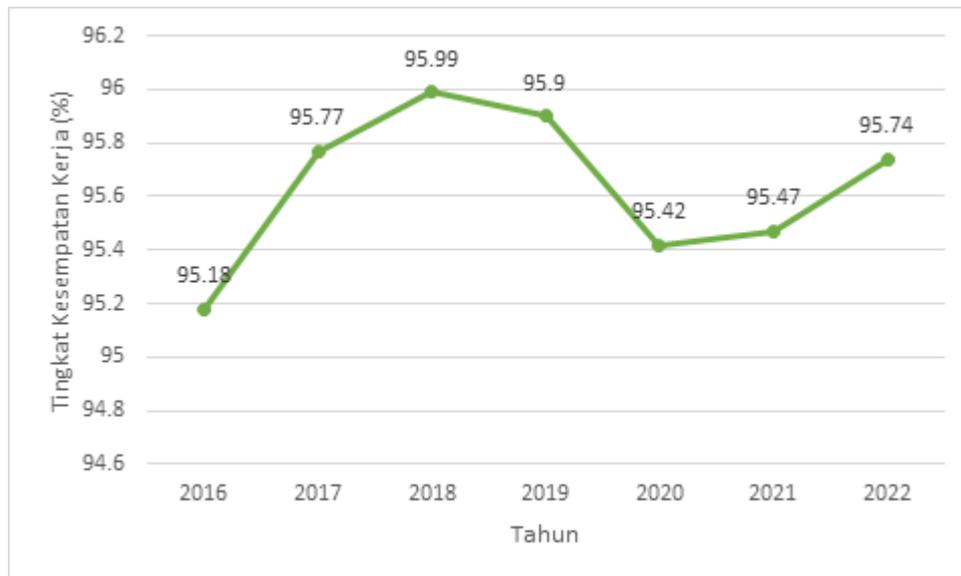
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Dokumen RPJMD Kalimantan Tengah, Dokumen RKPD Kalimantan Tengah (diolah)

II.4.2 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Fokus layanan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar menitikberatkan pada indikator-indikator yang merepresentasikan kondisi pelayanan umum non-dasar di suatu wilayah. Indikator yang dapat digunakan yakni ketenagakerjaan, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan.

TENAGA KERJA

Isu utama yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan adalah kesempatan kerja bagi angkatan kerja, jumlah pengangguran, dan penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Kesempatan kerja menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh pencari kerja. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa nilai Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi selama periode 2016-2022. TKK pada tahun 2016 tercatat sebesar 95,18%. Nilai tersebut mengalami sedikit peningkatan, hingga pada tahun 2018 mencapai 95,99%. Selama dua tahun berikutnya, nilai TKK mengalami penurunan menjadi 95,42% pada tahun 2020. Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 salah satunya disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pasca pandemi Covid-19, nilai TKK berangsur-angsur mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2022 mencapai 95,74%. Secara detail, fluktuasi nilai TKK Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada gambar berikut.



Gambar II.4.10 Tingkat Kesempatan Kerja di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (diolah)

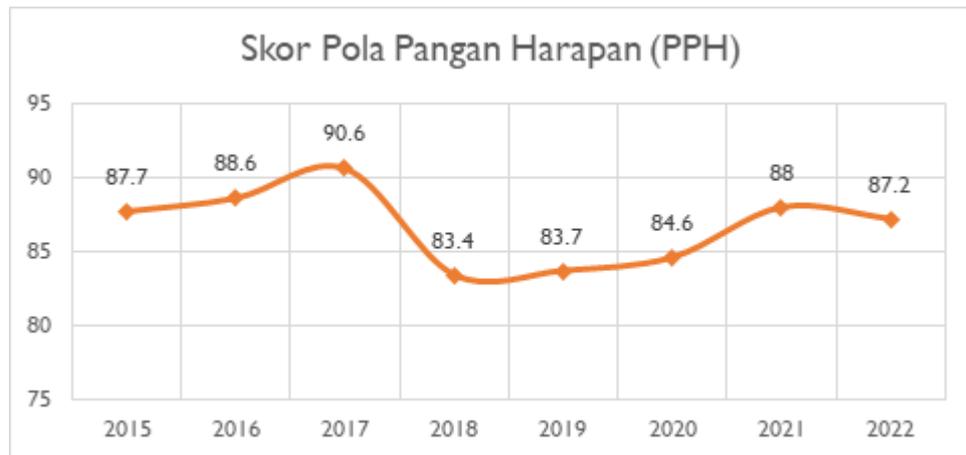
Jumlah pengangguran dapat dianalisis menggunakan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan perbandingan antara jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja di suatu wilayah. Berdasarkan data yang ada, TPT di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum mengalami fluktuasi selama periode 2011 hingga 2022. TPT Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2011 sebesar 2,55%. Nilai tersebut mengalami peningkatan hingga mencapai puncaknya pada tahun 2016 dengan nilai sebesar 4,82%. Kemudian, nilai TPT mengalami penurunan hingga mencapai 3,91% pada tahun 2018. Peningkatan nilai TPT kembali terjadi pada periode dua tahun berikutnya hingga mencapai 4,58% pada tahun 2020. Pasca tahun 2020, nilai TPT berangsur mengalami penurunan, hingga pada tahun 2022 nilai TPT mencapai 4,26%. Fenomena peningkatan TPT menandakan bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia belum mampu menyerap semua penduduk angkatan kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan sebuah indikator yang menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif dalam sektor tenaga kerja, termasuk pula yang sedang bekerja dan mencari pekerjaan. Semakin tinggi nilai TPAK, maka semakin banyak angkatan kerja di suatu wilayah apabila dibandingkan terhadap jumlah penduduk usia kerja. Nilai TPAK Provinsi

Kalimantan Tengah selama periode 2018-2022 cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan data tahun 2018, nilai TPAK Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 70,03%. Angka ini berada di atas rata-rata TPAK nasional, dengan nilai hanya sebesar 67,31%. Selama tiga tahun berikutnya, nilai TPAK Provinsi Kalimantan Tengah masih berada di atas rata-rata TPAK nasional. Kondisi ini mengalami perubahan pada tahun 2022, dimana nilai TPAK Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 67,23% dan rata-rata TPAK nasional berada pada angka 68,63%.

PANGAN

Kebijakan pangan dan keberhasilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyediakan dan mengelola keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat menunjukkan komitmen Kalimantan Tengah dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mencakup ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Kalimantan Tengah yang masih terus berfluktuasi selama periode 2015-2022 menunjukkan perlunya peningkatan ketersediaan konsumsi pangan penduduk. PPH adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama, dan peningkatan skor PPH menunjukkan adanya peningkatan dalam keanekaragaman konsumsi pangan yang mencakup berbagai jenis makanan yang diperlukan untuk memastikan gizi yang seimbang. Ketersediaan dan keragaman konsumsi pangan sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, mencegah defisiensi gizi, dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Hal ini juga merupakan aspek penting dalam mencapai tujuan pangan berkelanjutan dan mengurangi masalah kelaparan dan malnutrisi. Belum stabilnya peningkatan skor PPH mengindikasikan perlunya komitmen pemerintah provinsi terhadap pemenuhan pangan disertai diversifikasinya. Menurut RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2021-2026, konsumsi beras masih tinggi di masyarakat yang mengindikasikan adanya ketergantungan pada satu jenis sumber pangan dasar. Hal ini perlu menjadi pertimbangan diversifikasi pangan pada periode jangka panjang selanjutnya. Dinamika skor PPH disajikan pada gambar berikut



Gambar II.4.11 Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2022

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

PERTANAHAN

Berdasarkan amanat dari Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang bersifat wajib sebagai kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah provinsi memiliki 9 kewenangan dalam urusan bidang pertanahan, yakni izin lokasi, pengadaan tanah bagi kepentingan umum, sengketa tanah garapan, Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, Subyek dan obyek redistribusi tanah, tanah ulayat, tanah kosong, izin membuka tanah, dan penggunaan tanah. Sembilan kewenangan dalam urusan bidang pertanahan dijelaskan sebagai berikut:

1. Izin Lokasi

Berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa Izin Lokasi digantikan menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang berfungsi sebagai salah satu perizinan dasar menggantikan izin lokasi dan berbagai Izin Pemanfaatan Ruang (IPR). KKPR terdiri atas KKPR untuk kegiatan berusaha, KKPR untuk kegiatan non-berusaha, dan KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. Namun, dalam hal izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang lainnya yang diterbitkan lebih dahulu sebelum ditetapkannya peraturan hukum ini, maka izin lokasi dan atau IPR lainnya dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis. Izin lokasi merupakan izin yang diberikan oleh

pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota kepada pelaku usaha/perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatan lainnya. Setiap pelaku usaha/perusahaan yang telah memperoleh persetujuan/izin prinsip penanaman modal wajib memperoleh izin lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal. Ketentuan mengenai objek dan subjek KKPR, tata cara pemberian dan jangka waktu hak dan kewajiban pemegang KKPR, dan pemantauan dan evaluasi diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Tabel II.4.6 Data Izin Lokasi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2020

No	Jenis Perizinan	Luas (Ha)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Hak Guna Usaha	1.093.605,1	1.104.305,82	1.115.111,25	1.126.022,4	1.137.040,33	1.173.419,82
2	Perkembangan Perizinan (arahan lokasi, izin lokasi dan izin usaha perkebunan dan status kawasan (pelepasan kawasan hutan) serta hak kepemilikan atas tanah (hak guna usaha) perkebunan besar)	2.942.325,86	2.969.047,29	2.996.011,39	3.023.220,38	3.050.676,47	3.390.764,78

Sumber: Disperkimtan Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

2. Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan definisi pengadaan tanah adalah kegiatan

menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak atau merupakan perbuatan hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum yang semula ada antara pemegang hak dan tanahnya dibutuhkan dengan pemberian imbalan dalam bentuk uang, fasilitas atau lainnya melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara pemilik tanah dan pihak yang memerlukan. Proses pelepasan hak atas kepemilikan orang atas tanah dan/atau benda-benda di atasnya yang dilakukan melalui skema atau proses penyelenggaraan tahapannya.

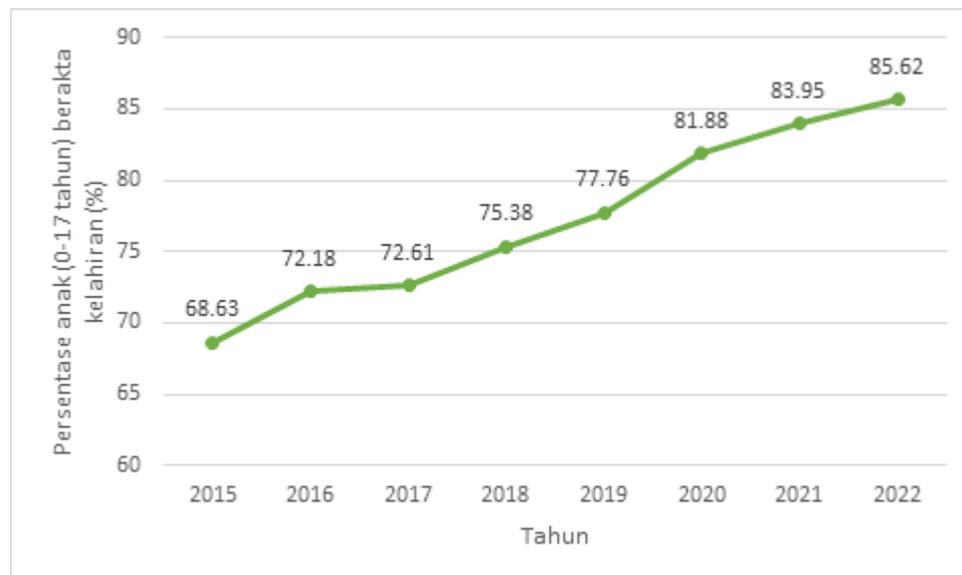
3. Sengketa Tanah Garapan

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menggantikan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, pada pasal 1 disebutkan bahwa sengketa pertanahan yang selanjutnya disebut sengketa didefinisikan sebagai perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 110-2111 tanggal 28 September 2003 disebutkan bahwa tanah garapan merupakan sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan atau tanpa persetujuan tertulis dalam jangka waktu tertentu. Dapat disimpulkan bahwa sengketa tanah garapan adalah pertikaian ataupun perbedaan kepentingan dari dua pihak atau lebih atas tanah garapan. Sengketa tanah garapan dapat muncul akibat pengaduan masyarakat maupun inventarisasi Pemerintah Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan penyelesaiannya melalui mediasi berdasarkan prinsip musyawarah mufakat tanpa harus dilanjutkan sampai ke lembaga pengadilan.

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan

pembangunan sektor lain. Indikator pertama yang dapat menggambarkan capaian kinerja administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran. Berdasarkan data yang tersedia, persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran mengalami peningkatan sepanjang periode 2015-2022. Tercatat hanya sebanyak 68,63% anak usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran. Nilai tersebut kemudian mengalami peningkatan tiap tahunnya, sehingga pada tahun 2022 nilai persentase indikator tersebut mencapai 85,62%. Akta kelahiran menjadi penting bagi seseorang, mengingat dokumen tersebut diperlukan sebagai syarat untuk memperoleh pelayanan umum. Anak yang tidak memiliki akta kelahiran, secara *de jure* dapat dianggap tidak ada.



Gambar II.4.12 Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Berakta Kelahiran Tahun 2015-2022

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah

Indikator berikutnya yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil adalah rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Indikator ini menjelaskan mengenai jumlah penduduk wajib KTP (mulai usia 17 tahun 1 hari) yang telah memiliki KTP. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa rasio kepemilikan KTP di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan. Data tahun 2020 menunjukkan sebanyak 71,97% penduduk wajib KTP telah memiliki KTP. Rendahnya rasio kepemilikan KTP pada tahun ini disebabkan oleh adanya pengurangan kapasitas layanan administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil sebagai dampak pandemi Covid-19. Selanjutnya, data tahun 2021 dan 2022 memiliki capaian yang lebih baik, dengan nilai masing-masing berada di atas 97% sebagai hasil dari pemulihan layanan pasca pandemi Covid-19. Secara detail, perkembangan rasio kepemilikan KTP dan NIK disajikan pada gambar berikut.



Gambar II.4.13. Rasio Kepemilikan KTP

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pemberdayaan masyarakat dan desa bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran. Untuk mengukur status kemajuan dan kemandirian desa digunakan Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa (kemendesa.go.id). Berdasarkan gambar II.4.14 dapat dilihat bahwa Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan nilai Indeks Desa Membangun setiap tahunnya. Pada tahun 2022, nilai IDM mencapai 0,678 atau diklasifikasikan kedalam desa berkembang. Pada tahun 2019, Provinsi Kalimantan Tengah masih tergolong dalam desa tertinggal yang kemudian mulai bergeser menjadi desa berkembang pada tahun 2020.



Gambar II.4.15 Grafik Indeks Desa Membangun Tahun 2018-2022

Sumber: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (diolah)

Selain menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM), pembangunan masyarakat dan desa dapat dilihat menggunakan indikator pada Tabel 2.3.7. Data tahun 2020 hingga 2022 belum tersedia, sehingga pada gambaran ini hanya kondisi sampai tahun 2019. Pada tahun 2019 terjadi beberapa penurunan persentase, yaitu pada lembaga desa yang dibina, pelayanan sosial dasar masyarakat, serta pembentukan kelembagaan posyantek. Penurunan pada indikator tersebut berpengaruh terhadap proses pembangunan desa yang digerakkan oleh lembaga desa, inovasi teknologi tepat guna, serta menurunnya pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial masyarakat. Untuk mencapai optimalisasi pembangunan masyarakat dan desa, perlu meningkatkan capaian persentase indikator berikut hingga sampai kondisi 100%.

Tabel II.4.7. Kinerja Indikator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	45,43	46,25	46,82	59	TAD

Persentase lembaga desa yang dibina dalam upaya pembangunan desa	5,44	8,16	8,53	6,3	TAD
Persentase tingkat perkembangan desa	24,68	25,12	25,33	64	TAD
Persentase peningkatan dan pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa	2,9	2,92	2,92	2	TAD
Persentase jumlah lembaga ekonomi dan unit usaha masyarakat yang terbentuk	16,85	30,53	32,86	42	TAD
Persentase jumlah masyarakat miskin yang dibina dalam usaha meningkatkan ekonomi keluarga	0,01	0,02	0,03	0,06	TAD
Persentase Kelembagaan Posyantek yang terbentuk	13,75	21,48	26	20	TAD

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, (diolah)

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pengendalian jumlah penduduk dilakukan melalui program Keluarga Berencana. Keberhasilan program KB dapat dilihat melalui berbagai indikator, seperti rasio akseptor KB, cakupan peserta KB aktif, dan cakupan peserta unmeet need. Rasio akseptor KB menunjukkan tingkat partisipasi program Keluarga Berencana (KB) oleh masyarakat. Semakin tinggi nilai rasio menunjukkan bahwa semakin banyak pasangan usia subur yang mengikuti program KB. Rasio akseptor KB di Provinsi Kalimantan Tengah cenderung pada nilai stagnan. Pada tahun 2017, rasio akseptor KB sebesar 79,2 yang kemudian menurun menjadi 79,15 pada tahun 2018. Kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 79,85 dan stagnan pada angka yang sama pada tahun 2020.

Tabel II.4.8 Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017-2022

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata jumlah anak per keluarga	0,58	0,66	2,24	2,24		
Rasio akseptor KB	79,2	79,15	79,85	79,85	-	-
Cakupan peserta KB aktif	67,21	65,56	65,06	65,97	63,13	62,84
Cakupan Unmet Need KB	6,3	-	-	-	12,4	11,8

Angka kelahiran remaja (15-19 tahun) per 1000 perempuan (ASFR 15-19)	83	-	-	63,13	36,2	36,2
Rata-rata usia kawin pertama wanita	-	-	-	-	19,7	19,7
Persentase penduduk umur 15-19 tahun berstatus kawin/ pernah kawin	-	-	-	-	62,82	60,89

Sumber: DP3APPKB Kalimantan Tengah

Unmet Need merupakan kebutuhan KB yang belum terpenuhi yang dilihat dari persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi tetapi tidak memakai alat kontrasepsi. Pada tahun 2017, nilai *unmet need* di Kalimantan Tengah sebesar 6,3. Data tidak tersedia pada tahun 2018-2020. Akan tetapi, pada tahun 2021 jumlah *unmet need* meningkat cukup besar menjadi 12,4. Semakin tinggi angka *unmet need* maka diperlukan penguatan program keluarga berencana. Pada tahun 2022, nilai *unmet need* mulai menurun menjadi 11,8 yang artinya semakin meningkat jumlah keluarga yang mampu mengakses alat kontrasepsi.

PERHUBUNGAN

Sistem transportasi (darat, sungai/laut, dan udara) serta lalu lintas merupakan unsur penting dan krusial dalam mendukung keberhasilan progres pembangunan, terutama dalam mengaplikasikan kegiatan ekonomi masyarakat dan evolusi wilayah Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, urusan perhubungan erat kaitannya dalam tugas menyelenggarakan layanan angkutan umum, layanan pengujian kendaraan bermotor dan layanan kelancaran lalu lintas. Akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah sangat didukung dengan pembangunan di sektor perhubungan. Salah satu faktor penting dalam pengembangan suatu wilayah dan mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain yaitu pembangunan infrastruktur jaringan transportasi.

Aksesibilitas antar wilayah dalam keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi kuat kaitannya dalam pemerataan pembangunan wilayah. Untuk mengatasi kesenjangan jarak antara tempat asal dan tujuan diperlukan sarana dan prasarana sistem transportasi melalui jasa angkutan untuk memenuhi kebutuhan

perangkutan. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan dimaksudkan untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan, sehingga diharapkan dapat meminimalisasi resiko yang diakibatkan dalam berlalu lintas.

Berdasarkan data pada grafik dibawah ini, diketahui bahwa dalam 5 tahun terakhir jumlah arus penumpang angkutan umum memiliki tren yang fluktuatif. Pandemi Covid-19 turut memengaruhi tren penurunan jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 2020. Pada tahun-tahun berikutnya tren menunjukkan adanya kenaikan jumlah arus penumpang seiring dengan pelonggaran pembatasan perjalanan oleh pemerintah.

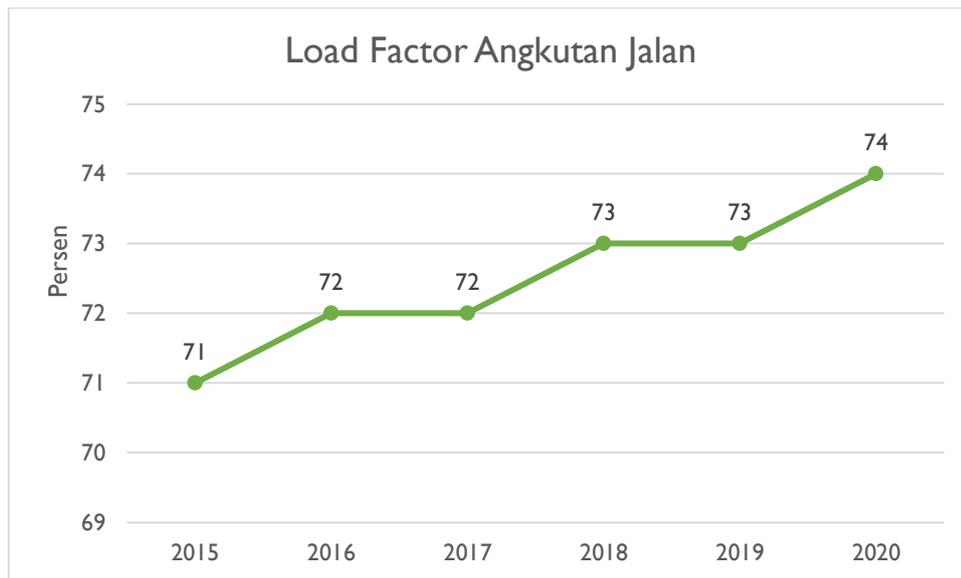


Gambar II.4.16 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Perhubungan (diolah)

Berbicara mengenai urusan perhubungan, tentu tidak akan lepas kaitannya dengan mobilisasi orang dan barang (logistik). Lebih lanjut mengenai mobilisasi orang di dalam suatu wilayah dapat dijelaskan dengan indikator *load factor*. Menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat (2002), *load factor* merupakan perbandingan antara kapasitas terjual dengan kapasitas tersedia untuk satu perjalanan yang biasa dinyatakan dalam persen (%). Load factor angkutan umum

disetiap rutenya berkisar mulai dari 30% sampai 100%. *Load factor* angkutan jalan dari tahun 2015-2020 memiliki tren meningkat, dari angka 71% di tahun 2015 meningkat menjadi 74% di tahun 2020. Namun, perlu menjadi catatan bahwa belum terdapat data lebih lanjut mengenai variasi kendaraan pada angka ini, apakah didominasi oleh angkutan umum atau kendaraan pribadi. Tren yang meningkat pada lima tahun terakhir ini tentu menjadi kesempatan bagus untuk Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengembangkan pergerakan orang dan barang di wilayahnya untuk menunjang pertumbuhan ekonomi wilayah.



Gambar II.4.17 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Perhubungan (diolah)

Banyaknya sungai yang melewati wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi potensi pengembangan wilayah dalam urusan perhubungan. Pembangunan pelabuhan laut menjadi salah satu fokus pembangunan urusan perhubungan di Provinsi Kalimantan Tengah.

A. Pelabuhan Laut

Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) dan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki pelabuhan laut sebagai sarana jasa perdagangan serta angkutan penumpang dan barang (ekspor, impor, maupun

lokal) yang terdiri dari pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, pelabuhan pengumpan lokal, pelabuhan baru, dan pelabuhan perikanan.

a) Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpul adalah:

1. Pelabuhan Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur (diusulkan menjadi Pelabuhan Utama di Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur)
2. Pelabuhan Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Pelabuhan Sukamara di Kabupaten Sukamara;
4. Pelabuhan Teluk Segintung di Kabupaten Seruyan;
5. Pelabuhan Batanjung di Kabupaten Kapuas;
6. Pelabuhan Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau;
7. Pelabuhan PT. Bina Cahaya Timur di Kabupaten Barito Selatan; dan
8. Pelabuhan PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur Perkasa di Kabupaten Barito Timur.

b) Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpan regional adalah:

1. Pelabuhan Pegatan Mendawai di Kabupaten Katingan;
2. Pelabuhan Kuala Pembuang di kabupaten Seruyan.

c) Pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpan lokal adalah

:

1. Pelabuhan Kereng Bangkirai di kota Palangkaraya;
2. Pelabuhan Pangkalan Bun di kabupaten Kotawaringin Barat;



3. Pelabuhan Samuda di kabupaten Kotawaringin Timur; dan

4. Pelabuhan Kuala Jelai di kabupaten Sukamara;

5. Pelabuhan Rangka Ilung di Kabupaten Barito Selatan

d) Rencana Pengembangan Pelabuhan Baru adalah :

1. Pelabuhan Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat;

2. Pelabuhan Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur;

3. Pelabuhan Pulau Damar di Kabupaten Katingan;

4. Pelabuhan Tanjung Perawan di Kabupaten Pulang Pisau.

e) Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan sebagai pangkalan pendaratan ikan (PPI) adalah:

1. PPI Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau;

2. PPI Batanjung di Kabupaten Kapuas;

3. PPI Kuala Jelai di Kabupaten Sukamara;

4. PPI Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan;

5. PPI Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat;

6. PPI Selat Jeruju Pagatan di Kabupaten Katingan; dan

7. PPI Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Selain berbagai pelabuhan yang disebutkan di atas, Kalimantan Tengah juga memiliki alur pelayaran internasional dan nasional. Alur pelayaran internasional dan nasional yang ada di Kalimantan Tengah meliputi:

a) Alur pelayaran Internasional: Sampit – luar negeri.

b) Alur pelayaran Nasional: Sampit – Semarang; Sampit – Surabaya; Sampit-Jakarta; Kumai - Semarang; Kumai – Surabaya; Kumai – Jakarta; Pangkalan





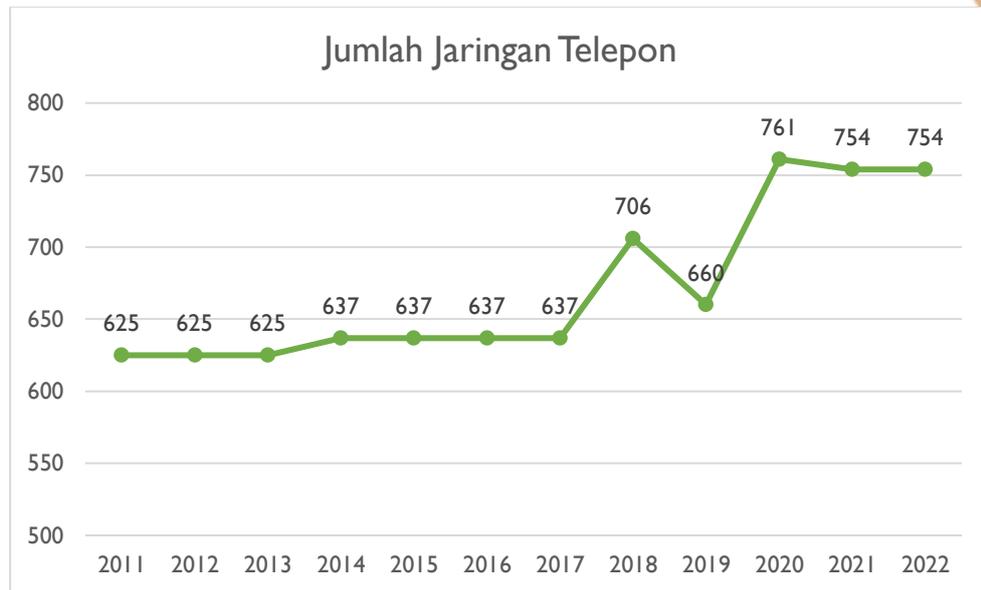
Bun – Semarang; Pangkalan Bun – Surabaya; Pangkalan Bun - Jakarta; Sukamara – Semarang, Sukamara – Surabaya; Sukamara – Jakarta; Teluk Segintung – Semarang; Teluk Segintung – Surabaya; Teluk Segintung – Jakarta; Batanjung – Semarang; Batanjung – Surabaya; Batanjung – Jakarta; Pulang Pisau – Semarang; Pulang Pisau – Surabaya; dan Pulang Pisau – Jakarta.

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 pembagian urusan bidang komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah yaitu pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan tengah, serta pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan cepatnya persebaran informasi, maka kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur telekomunikasi juga semakin tinggi. Terlebih kemampuan masyarakat dalam menggunakan dan menguasai teknologi komunikasi dan informatika terus meningkat sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab sebagai regulator dan pelaku dalam pembangunan yang mengatur dan mengendalikan infrastruktur komunikasi dan informasi. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 1517 desa/kelurahan yang tersebar di 14 kabupaten/kota, diketahui sejumlah 1228 desa/kelurahan sudah terlayani layanan telekomunikasi pada tahun 2022. Sisanya yakni sejumlah 343 desa/kelurahan belum terlayani layanan telekomunikasi atau termasuk dalam area *blankspot*.

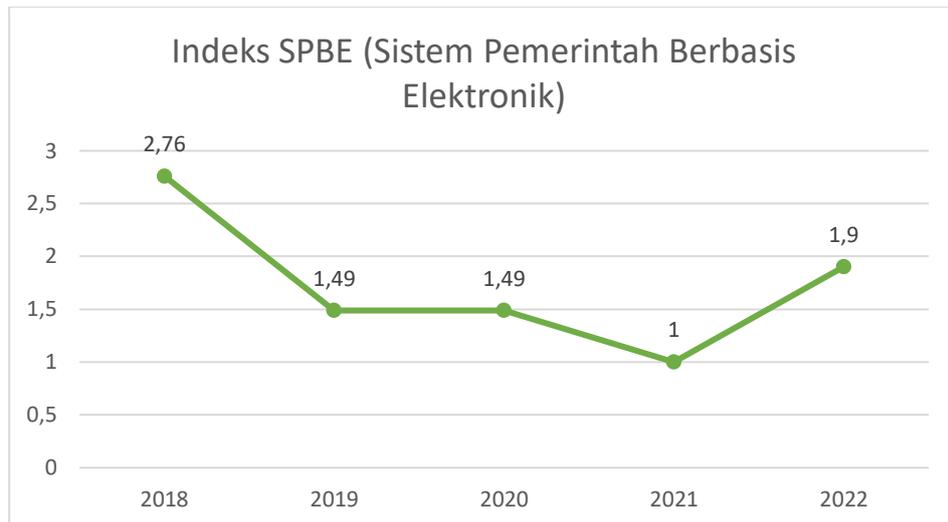




Gambar II.4.18 Jumlah Jaringan Telepon Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2022

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi (diolah)

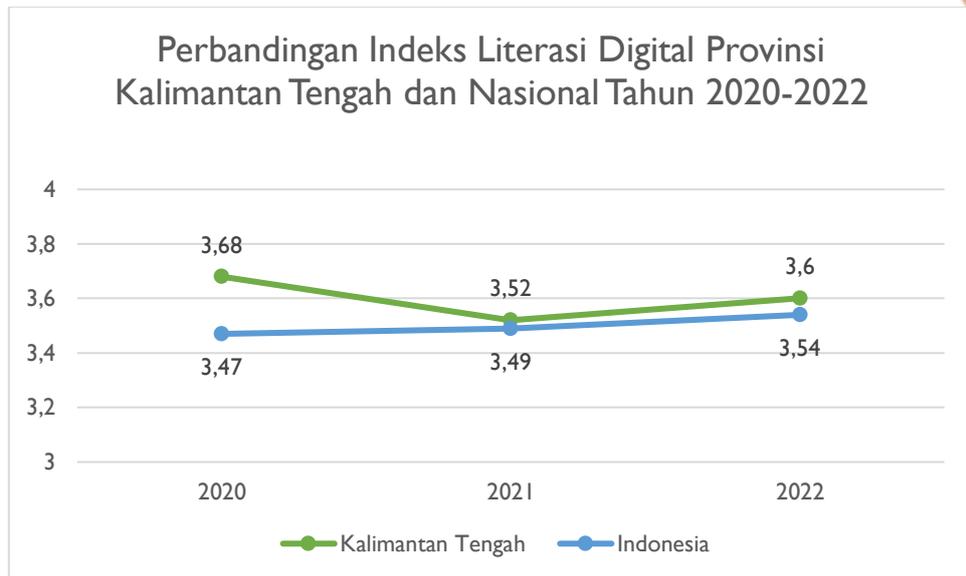
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Indeks tingkat kematangan SPBE didefinisikan sebagai suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah meraih skor indeks SPBE 2,76 (kategori baik) pada tahun 2018 yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Nilai indeks predikat dengan rincian skor: Kurang (<1,8); Cukup (1,8 - 2,6); Baik (2,6 - 3,5); Sangat Baik (3,5 - 4,2); dan Memuaskan (4,2 - 5,0). Namun, dalam empat tahun terakhir angkut tersebut justru mengalami penurunan yang berakhir pada 1,9 pada tahun 2022.



Gambar II.4.19 Indeks SPBE Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi (diolah)

Salah satu indikator penting lainnya dalam perencanaan pembangunan di dalam urusan komunikasi dan informasi adalah Indeks Literasi Digital. Pengukuran literasi digital dilakukan dengan menghitung sub indikator di bawahnya yang terdiri dari 4 kategori sub-indeks. Keempat kategori sub-indeks tersebut yaitu informasi dan literasi data, komunikasi dan kolaborasi, keamanan, dan kemampuan teknologi. Masing-masing sub-indeks ini selanjutnya diukur dari 7 aspek yang bersifat lebih mikro yang telah disepakati secara nasional. Pilar tersebut digunakan untuk mengukur pengetahuan tentang kemampuan menggunakan teknologi, pengetahuan tentang keamanan pribadi, kemampuan berpikir kritis, pengetahuan keamanan perangkat, informasi dan literasi data, kemampuan berkomunikasi, serta etika dalam menggunakan teknologi. Skor Indeks Literasi Digital berkisar 1-5. Semakin besar skor, semakin tinggi literasi digital suatu wilayah. Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan dalam tiga tahun terakhir sudah berada di atas rata-rata Indeks Literasi Digital Nasional, terakhir pada tahun 2022 Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Tengah mencapai angka 3,6.



Gambar II.4.20 Perbandingan Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi (diolah)

KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dan memiliki landasan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi dan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Sementara itu, usaha Mikro adalah usaha produktif yang bisa dimiliki perseorangan maupun badan usaha, dengan kekayaan paling banyak 50 juta dan omzet usaha mikro paling banyak 300 juta setahun dengan fasilitas minim dan terbatasnya jumlah karyawan.

PENANAMAN MODAL

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk meninjau tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah adalah investasi atau penanaman modal. Hal tersebut disebabkan oleh dampak yang ditimbulkan dari kehadiran investasi, yakni peningkatan ketersediaan lapangan kerja dan optimalisasi sarana produksi untuk menghasilkan luaran dan nilai tambah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.



KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Pembangunan dibidang olahraga bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas manusia dibidang kesehatan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan olahraga menggunakan *Sport Development Index* (SDI). Pengukuran SDI menggunakan sembilan dimensi dasar, yaitu sumber daya manusia olahraga, ruang terbuka, literasi fisik, kebugaran, perkembangan personal, kesehatan, ekonomi, performa, dan partisipasi (kemenpora.go.id). Pengukuran SDI mulai dilakukan pada tahun 2021. Nilai SDI Kalimantan Tengah pada tahun 2021 sebesar 44% dan menurun menjadi 32,4% pada tahun 2022. Untuk meningkatkan SDI bisa dilakukan melalui intervensi kebijakan dan pengadaan program yang mendukung partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.

Tabel II.4.9 Capaian Indikator Bidang Olahraga

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah organisasi kepemudaan	62	66	66	66	66	66
Jumlah kegiatan kepemudaan	35	13	11	12	8	32
Jumlah organisasi olahraga	42	42	42	42	36	36
Jumlah klub olahraga	46	46	46	46	46	46
Jumlah lapangan olahraga	289	1214	1214	1214	3070	3070
Jumlah gedung olahraga	16	16	16	16	16	16
<i>Sport Development Index</i>	-	-	-	-	44%	32,4%

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

STATISTIK

Urusan pemerintahan daerah bidang statistik diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Urusan statistik daerah difokuskan kepada data statistik sektoral yang berperan penting dalam tahap penyusunan perencanaan pembangunan daerah.





PERSANDIAN

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang persandian bertujuan untuk memastikan keamanan arus informasi yang dimiliki oleh daerah. Informasi menjadi suatu aset berharga bagi daerah karena karakteristiknya, meliputi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi.

KEBUDAYAAN

Pembangunan kebudayaan suatu daerah diukur menggunakan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Nilai IPK diukur menggunakan tujuh dimensi yaitu dimensi ekonomi budaya, dimensi pendidikan, dimensi ketahanan sosia budaya, dimensi warisan budaya, dimensi ekspresi budaya, dimensi budaya literasi, dan dimensi kesetaraan gender. Pada tahun 2021, nilai IPK Kalimantan Tengah berada diatas nilai IPK nasional. Nilai IPK Kalimantan Tengah sebesar 55,21 sementara nilai IPK nasional sebesar 51,90. Secara tren, IPK Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi, yang mana menurun pada tahun 2020 menjadi 53,88 dan kembali meningkat pada tahun 2021. Untuk meningkatkan nilai IPK maka perlu diperhatikan seluruh dimensi yang digunakan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan seperti meningkatkan pertunjukan seni (dimensi ekonomi budaya), meningkatkan partisipasi gotong royong (dimensi ketahanan sosial budaya), meningkatkan akses pendidikan penyandang disabilitas (dimensi pendidikan), penetapan warisan budaya (dimensi warisan budaya), dan meningkatkan kunjungan perpustakaan atau taman baca (dimensi budaya literasi). Perkembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan disajikan pada gambar berikut.

Tahun	Indonesia	Kalimantan Tengah
2018	53,74	52,28
2019	55,91	55,76
2020	54,65	53,88
2021	51,9	55,21
2022	55,13	58,09

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (diolah)



Festival seni budaya merupakan salah satu kegiatan yang diprioritaskan dalam rangka meningkatkan pembangunan kebudayaan. Jumlah penyelenggaraan festival sempat menurun pada tahun 2020 yang dipengaruhi oleh *refocusing* anggaran sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Kegiatan lainnya yaitu pemeliharaan cagar budaya yang dilakukan secara kolektif dengan melibatkan masyarakat lokal, tokoh masyarakat dan instansi terkait seperti Balai Pelestarian Cagar Budaya. Selain indikator tersebut, berikut disajikan indikator lain yang digunakan untuk menilai pembangunan kebudayaan.

Tabel II.4.10 Capaian Indikator Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2023

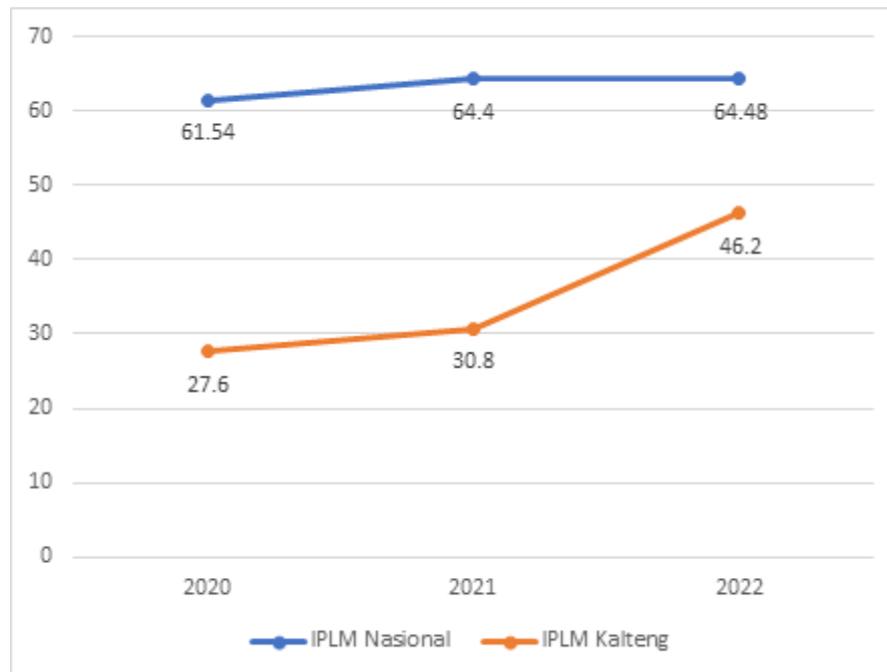
Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah grup kesenian	246	315	315	315	315	492	492
Jumlah penyelenggaraan festival dan kegiatan seni budaya	1	2	15	TAD/0 Kegiatan (Covid 19)	TAD/0 Kegiatan (Covid 19)	20	35
Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	757	761	758	758	327	327	451
Jumlah koleksi benda museum yang terpelihara	300	300	115	328	400	650	600
Jumlah cagar budaya yang terpelihara	TAD/0 Kegiatan	TAD/0 Kegiatan	1	TAD/0 Kegiatan (Covid 19)	3	4	6
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	TAD/0 Kegiatan	TAD/0 Kegiatan	TAD/0 Kegiatan	TAD/0 Kegiatan	37	37	37

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

PERPUSTAKAAN

Pembangunan dalam penyelenggaraan urusan bidang perpustakaan dilakukan untuk mewujudkan peran perpustakaan sebagai penyedia informasi

dalam rangka meningkatkan kebiasaan membaca masyarakat, meningkatkan pelayanan berbasis IT, dan meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat. Salah satu indikator yang digunakan yaitu Indeks Pembangunan Literasi Membaca (IPLM), yaitu kajian yang digunakan untuk mengetahui tingkat pembangunan literasi masyarakat. Nilai IPLM Kalimantan Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 nilai IPLM sebesar 27,6. Kemudian meningkat menjadi 30,8 pada tahun 2021 dan 46,2 pada tahun 2022. Walaupun menunjukkan tren meningkat, nilai IPLM Kalimantan Tengah masih berada dibawah nilai IPLM nasional. Berikut grafik perbandingan IPLM Kalimantan Tengah dan IPLM nasional.



Gambar II.4.21 Grafik IPLM Nasional dan Kalimantan Tengah Tahun 2020-2022

Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (diolah)

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kalimantan Tengah mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 yang hanya berjumlah 11.215 pengunjung. Penurunan jumlah ini dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 sehingga membatasi ruang gerak masyarakat ke ruang publik. Peningkatan juga dilihat dari semakin tingginya cakupan pelayanan perpustakaan sesuai standar minimal dan bertambahnya jumlah koleksi buku di perpustakaan.



Tabel II.4.11 Capaian Indikator Urusan Perpustakaan

Keterangan	2019	2020	2021	2022
Jumlah pengunjung perpustakaan	22.150	11.215	20.556	26.675
Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan	28	35	37,4	42,19
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	33	33	30	28
Jumlah anggota perpustakaan	4179	2174	TAD	TAD
Jumlah koleksi buku perpustakaan	3.022	31.195	30.000	32.000
Jumlah buku yang dibaca di perpustakaan	88.223	39.916	TAD	TAD

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

KEARSIPAN

Urusan kearsipan digunakan sebagai bahan untuk akuntabilitas kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Capaian indikator urusan kearsipan cenderung stagnan seperti pada indikator jumlah SOPD yang menerapkan kearsipan secara baku dan persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku.

Tabel II.4.12 Capaian Indikator Urusan Kearsipan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah SOPD menerapkan kearsipan secara baku sesuai dengan standar kearsipan	46	46	46	-	-
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	60	65	85	85	85
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	11	13	14	19	15
Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN)	43,7	35,11	42,35	41,2	21,29

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)





II.4.3 FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN

Berdasarkan kondisi geografis, terdapat tujuh (7) kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki atau berbatasan dengan wilayah laut. Ketujuh daerah tersebut meliputi Kabupaten Sukamara, Kotawaringin Barat, Seruyan, Kotawaringin Timur, Katingin, Pulang Pisau, dan Kabupaten Kapuas. Besarnya sumber daya kemaritiman di wilayah Kalimantan Tengah sayangnya masih dihadapkan pada tingginya eksploitasi yang menyebabkan degradasi lingkungan. Adapun aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan tidak hanya berada di laut, namun di hulu sungai, seperti pertambangan, perkebunan, pertanian, permukiman, dan deforestasi hutan yang kemudian berdampak pada hilir sungai. Ditinjau dari potensi perikanannya, Tabel berikut menunjukkan jumlah produksi perikanan (ton/tahun), baik perikanan tangkap maupun budidaya, selama periode enam tahun (2016–2021).

Tabel II.4.13 Jumlah Produksi Perikanan Berdasarkan Jenis Budidaya Tahun 2016–2021

Jenis Budidaya	Jumlah Produksi (Ton)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tangkap	151.276,5	113.194,52	132.483,99	150.437,93	153.426,16	151.510,52
Budidaya	77.724,54	94.346,27	98.151,88	101.857,32	116.729,4	120.935,64

Produksi perikanan tangkap mencakup volume (ton) dari perikanan tangkap di laut dan perikanan tangkap di perairan umum daratan. Selama tujuh tahun terjadi fluktuasi volume tangkapan yang mana jumlah tangkapan pada 2017 hingga 2019 belum dapat melebihi tangkapan di tahun 2016. Di sisi lain, peningkatan terus terjadi selama tujuh tahun pada produksi perikanan budidaya hingga mencapai 120.935,64 ton di tahun 2021. Jumlah ini menunjukkan peningkatan volume hingga 43.211,1 ton dibandingkan dengan tahun 2016. Peningkatan positif tersebut dapat mengindikasikan keberhasilan program dan fasilitasi produksi sektor perikanan serta peningkatan kualitas SDM dalam mengelola budidaya perikanan.



PARIWISATA

Pembangunan pariwisata dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, menghasilkan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan sektor ini akan mempromosikan budaya, seni, dan warisan alam Kalimantan Tengah, meningkatkan pemahaman akan keanekaragaman lingkungan, serta memperkuat kesadaran lingkungan. Selain itu, pembangunan pariwisata dapat mendukung infrastruktur dan fasilitas publik yang lebih baik, seperti jalan, bandara, dan sanitasi yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara umum. Pengembangan pariwisata juga membuka peluang investasi dan kemitraan antara sektor publik dan swasta, menciptakan dampak positif dalam diversifikasi ekonomi dan pertumbuhan sektor lainnya. Namun, pembangunan pariwisata harus diimbangi dengan keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan yang bijaksana untuk melindungi sumber daya alam dan budaya. Dengan demikian, sektor pariwisata dapat menjadi pilar penting dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup penduduk Kalimantan Tengah dalam jangka panjang.

Salah satu destinasi wisata andalan Kalimantan Tengah ialah Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan yang menjadi kawasan perlindungan flora dan fauna, khususnya orang utan. Destinasi ini umumnya menarik lebih banyak turis mancanegara dibanding turis lokal, terutama pada pertengahan tahun hingga akhir tahun. Sebagai penunjang pariwisata diadakanlah pameran tahunan sebagai media bagi setiap daerah di Kalimantan Tengah untuk mempromosikan potensi wisata yang dimiliki. Berikut merupakan jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi Kalimantan Tengah selama empat tahun.

Tabel II.4.14 Jumlah Total Kunjungan Wisatawan di Kalimantan Tengah Tahun 2019–2022

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Wisatawan Nusantara	952.389	1.495.009	783.100	589.098	1.667.830	1.786.610

Jumlah Wisatawan Mancanegara	38.610	61.479	2.365	579	21.932	17.134
Jumlah Wisatawan	990.999	1.556.488	785.465	589.677	1.689.762	1.803.744

PERTANIAN

Pertanian dan perkebunan di Kalimantan Tengah berperan sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah. Pembangunan pertanian dan perkebunan juga berkontribusi pada ketahanan pangan daerah, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memastikan pasokan makanan yang stabil untuk penduduk. Selain itu, sektor ini membantu dalam diversifikasi ekonomi, dengan menghasilkan komoditas pertanian seperti kelapa sawit, karet, dan hasil pertanian lainnya. Momentum tersebut membuka peluang untuk investasi dan kemitraan antara sektor publik dan swasta, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan pertanian yang berkelanjutan juga mendukung pelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem, serta menghindari kerusakan lingkungan yang dapat berdampak jangka panjang.

Tabel II.4.15 Luas Panen Setiap Komoditas

Luas Panen	2019	2020
Padi	146.145,00	143.275
Jagung	19.631,00	26.893
Kedelai	88	94
Kacang Tanah	213	265
Kacang Hijau	16	23
Ubi Kayu	2.889	2.277
Ubi Jalar	488	512

Sumber: BPS (Diolah)

Berdasarkan data atas enam komoditas pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui bahwa komoditas dengan luas panen terbesar ialah padi. Adapun selama dua tahun antara 2019 dan 2020, terdapat penurunan luas panen komoditas padi dan ubi kayu disertai dengan peningkatan luas panen pada lima

komoditas lainnya. Selain itu, penurunan padi dan ubi kayu juga terjadi dalam aspek produksi seperti tercantum pada tabel di bawah, diikuti oleh penurunan pada komoditas kacang tanah dan ubi jalar. Kedua data tersebut kemudian berpengaruh pada nilai produktivitas setiap komoditas mengacu pada Tabel 2.3.16.

Tabel II.4.16 Nilai Produktivitas Setiap Komoditas

Produksi	2019	2020
Padi	443.561	403.023
Jagung	99206	129843
Kedelai	132	146
Kacang Tanah	268	240
Kacang Hijau	7	23
Ubi Kayu	76205	62.333
Ubi Jalar	6182	5893

Sumber: BPS (Diolah)

Ditinjau dari data produktivitas pertanian pada tabel di bawah, terdapat peningkatan produktivitas pada komoditas padi, kedelai, kacang hijau, dan ubi kayu. Peningkatan tertinggi ada pada komoditas ubi kayu sebesar 10,02 kuintal per hektar. Adapun penurunan produktivitas tertinggi terjadi pada komoditas ubi jalar dengan penurunan sebesar 11,46 kuintal per hektar. Adanya peningkatan produktivitas komoditas selain padi mengindikasikan peningkatan variasi sumber pangan daerah, namun terjadinya penurunan pada komoditas tertentu perlu menjadi perhatian untuk dilihat penyebabnya dan memetakan pengembangan ke depan dengan berbasis pada data *series* yang lebih panjang.

Tabel II.4.17 Produktivitas Pertanian

Produktivitas	2019	2020
Padi	30,35	33,58
Jagung	50,54	48,28
Kedelai	14,99	15,65
Kacang Tanah	12,59	9,05
Kacang Hijau	4,63	10,04
Ubi Kayu	263,77	273,79
Ubi Jalar	126,6	115,14

Sumber: BPS (Diolah)

Provinsi Kalimantan Tengah diarahkan menjadi lumbung pangan melalui pengembangan *food estate*. Secara lebih khusus, data mengenai komoditas padi selama periode 2019–2022 menunjukkan peningkatan produktivitas meski cenderung berfluktuasi. Diperlukan komitmen pemerintah provinsi dan pusat dalam mewujudkan keberlanjutan pangan di Kalimantan Tengah yang tidak hanya untuk padi, namun juga sumber pangan lain sebagai upaya diversifikasi pangan.

Padi	2019	2020	2021	2022
Luas Panen	146145,00	143275	125870,1	109756,2
Produksi	443.561	403.023	381.190	353.865
Produktivitas	30,35	33,58	30,28	32,24

Sumber: BPS (Diolah)

PERDAGANGAN

Perdagangan memainkan peran sentral dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Pertumbuhan sektor perdagangan meningkatkan konektivitas antar daerah, menghadirkan peluang bisnis baru, dan memperluas pasar bagi produk-produk lokal. Dampak tersebut berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah dan mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, pembangunan sektor perdagangan memungkinkan akses lebih baik terhadap barang dan jasa, memfasilitasi investasi, serta mendukung pengembangan infrastruktur logistik yang lebih baik, sehingga dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas ekonomi dan daya saing daerah.

Kesiapan dalam perdagangan ditandai dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana berpengaruh pada kelancaran dan distribusi barang yang kemudian memengaruhi harga barang. Berdasarkan tabel di bawah, terdapat fluktuasi dengan tren penurunan pada jumlah pasar rakyat. Pasar rakyat yang mulanya berjumlah 410 di tahun 2016 kemudian turun menjadi 406 pada tahun 2022 meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2017 hingga 2019. Adapun pasar modern mengalami perkembangan jumlah secara umum dari 120 unit pada tahun 2016 kemudian menjadi 335 unit pada tahun 2022. Ditinjau dari rata-rata laju perubahannya, diperkirakan pasar modern dapat bertambah hingga lebih 1030 unit pada tahun 2045 dan pasar rakyat hanya bertambah sampai 500 unit. Transisi preferensi masyarakat selama periode

2016–2022 yang memengaruhi jumlah kedua jenis pasar di atas dapat menjadi dasar pertimbangan regulasi terkait pemasaran, logistik barang, dan pemberdayaan.

Tabel II.4.18 Jumlah Pasar

No.	Jenis Pasar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pasar Rakyat	410	421	429	507	507	419	426
2	Pasar Modern	120	202	219	183	183	331	480
Jumlah		530	623	648	690	690	741	906

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Di sisi lain, terkait dengan aktivitas ekspor di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat peningkatan jumlah eksportir dari 24 eksportir di tahun 2018 menjadi 39 eksportir di tahun 2022. Akan tetapi, terjadi penurunan pada jumlah SKA atau Surat Keterangan Asal. SKA sendiri juga disebut sebagai *Certificate of Origin* (COO) yang merupakan sertifikasi asal barang yang menunjukkan bukti bahwa suatu barang atau komoditas yang diekspor memang berasal dari daerah atau negara pengekspor. Selain itu, terjadi peningkatan FOB dalam kurun waktu lima tahun selama periode 2018 hingga 2022. FOB atau *Free On Board* adalah harga barang yang digunakan sebagai dasar pembebasan atau *de minis value*, apabila suatu barang bernilai kurang dari batas pembebasan maka tidak dikenakan pungutan bea masuk dan pajak impor.

Tabel II.4.19 Aktivitas Ekspor di Kalimantan Tengah

No.	Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Eksportir	24	24	30	24	39
2	SKA	795	643	878	815	218
3	FOB (USD)	248.753.095	2.244.156.025	1.039.841.228	631.939.889,8	807.242.196,5

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Di Provinsi Kalimantan Tengah, yang memiliki potensi sumber daya alam yang kaya, sektor perdagangan memainkan peran kunci dalam mengirimkan komoditas pertanian dan perkebunan ke pasar nasional dan internasional. Hal ini membantu diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. Namun, pembangunan sektor perdagangan harus diimbangi dengan



regulasi yang efisien dan perlindungan terhadap lingkungan. Pengelolaan yang bijaksana diperlukan untuk menghindari eksploitasi berlebihan sumber daya alam dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

PERINDUSTRIAN

Industri merupakan pilar penting dalam memicu transformasi ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Adapun melalui pengembangan industri lokal, maka daerah dapat mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dan perkebunan yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Langkah tersebut juga dapat menghasilkan diversifikasi ekonomi, meningkatkan ketahanan ekonomi, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Tidak hanya itu, perindustrian mendukung pengembangan infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, dan inovasi teknologi, sehingga memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan berpartisipasi dalam ekonomi yang lebih maju. Industri yang berkembang kemudian mampu menciptakan pasar untuk produk-produk lokal dan meningkatkan nilai tambah pada sumber daya alam yang ada. Pada pelaksanaan pengembangannya, penting memerhatikan pengelolaan yang berkelanjutan disertai pemantauan yang ketat sesuai dengan regulasi berlaku guna menghindari dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Tabel 2.3.21 menunjukkan jumlah industri besar dan tenaga kerja di bidang industri besar selama periode 2017 hingga 2022. Berdasarkan data tersebut, terjadi peningkatan jumlah industri dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 2045 sebanyak 185 industri besar. Akan tetapi, peningkatan tersebut tidak sejalan dengan adanya penurunan jumlah tenaga kerja di bidang industri besar yang mengalami penurunan. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa tenaga kerja yang terserap dalam sektor industri bukan merupakan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Apabila terjadi hal demikian, maka diperlukan intervensi regulasi yang dapat mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat lokal untuk membersamai pertumbuhan pada sektor industri dan manufaktur sebagai industri pengolahan yang nantinya berimplikasi pada peningkatan nilai ekonomi provinsi.





Tabel II.4.20 Jumlah Industri Besar Beserta Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Industri	115	102	102	141	142	148
Jumlah Tenaga Kerja	41.851	20.380	20.380	20.824	39.315	24.469

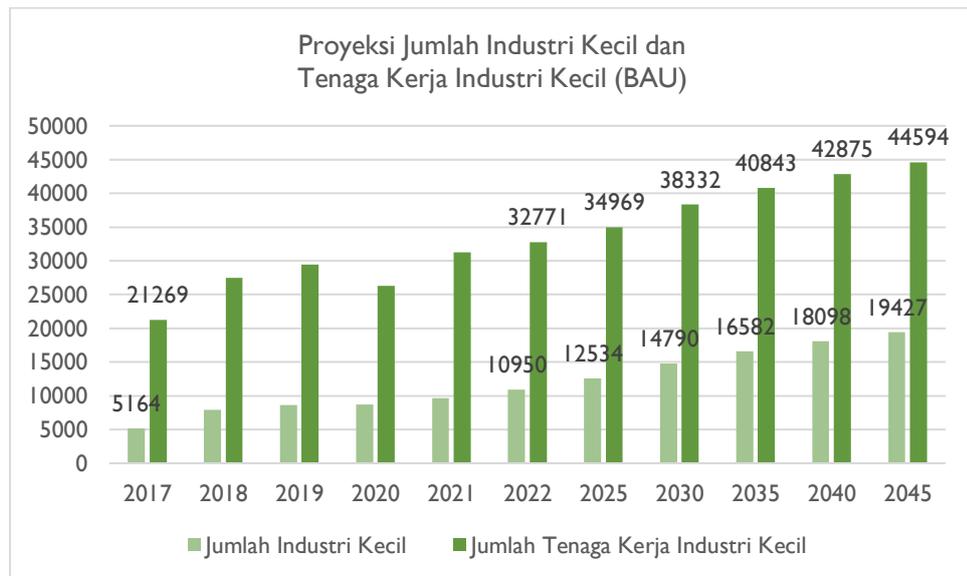
Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Di sisi lain, industri kecil di Kalimantan Tengah mengalami perkembangan positif, baik dari jumlah industri maupun tenaga kerja yang diserap. Tabel 2.3.22 di bawah menunjukkan perkembangan angka keduanya selama periode tahun 2017 hingga 2021. Adapun Gambar. di bawah menunjukkan grafik proyeksi (BAU) dari jumlah industri kecil beserta tenaga kerja industri kecil. Dari grafik tersebut diketahui bahwa peningkatan akan terus terjadi secara stabil pada sektor industri kecil.

Tabel II.4.21 Jumlah Industri Kecil beserta Tenaga Kerja Industri Kecil

	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Industri	5164	7953	8633	8724	9653
Jumlah Tenaga Kerja	21269	27516	29410	26289	31255

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian



Gambar II.4.22. Grafik Proyeksi Jumlah Industri Kecil dan Tenaga Kerja Industri Kecil

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Diolah)

Pengembangan industri kecil dapat menciptakan lapangan kerja, menekan angka pengangguran, dan meningkatkan pendapatan per kapita. Perekonomian



daerah pun dapat berkembang disertai dengan diversifikasi ekonomi yang dapat meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap fluktuasi pasar global. Investasi dalam infrastruktur dan akses pasar yang lebih baik juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta adanya peningkatan pendapatan daerah dari pajak bisa membantu pembiayaan pembangunan lanjutan. Perlu menjadi catatan bahwa pengawasan lingkungan harus tetap diutamakan dan penyerapan tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas disertai dengan peningkatan kualitas SDM.

TRANSMIGRASI

Indikator pada bidang transmigrasi berikut merujuk pada dokumen RPJMD Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Terdapat penurunan jumlah bidang lahan transmigrasi yang mendapat sertifikat pada tahun 2019. Pada tahun 2018 sebanyak 609 lahan tersertifikasi, dan bertambah 750 pada tahun 2019. Akan tetapi, jumlah ini belum bisa digunakan untuk menghitung ketercapaian penerbitan sertifikat lahan karena belum ditemukan data jumlah lahan transmigrasi keseluruhan (sudah dan belum mendapatkan sertifikat). Pengukuran perkembangan kawasan transmigrasi menggunakan Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang menunjukkan peningkatan mulai tahun 2020 hingga 2022. Nilai indeks pada tahun 2020 sebesar 22,7, kemudian meningkat menjadi 39,6 pada tahun 2021 dan mencapai 41,18 pada tahun 2022. Angka ini masih bisa ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan Arah Pembangunan Wilayah RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat proyek prioritas revitalisasi kawasan transmigrasi yang salah satunya berlokasi di Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya di Kabupaten Lamandau. Pengembangan kawasan ini memiliki fungsi sebagai kawasan permukiman dan pengembangan pangan dalam bentuk food estate. Diperlukan data lebih rinci untuk mengetahui keberhasilan proyek revitalisasi kawasan transmigrasi ini.

Tabel II.4.22. Capaian Indikator Bidang Transmigrasi

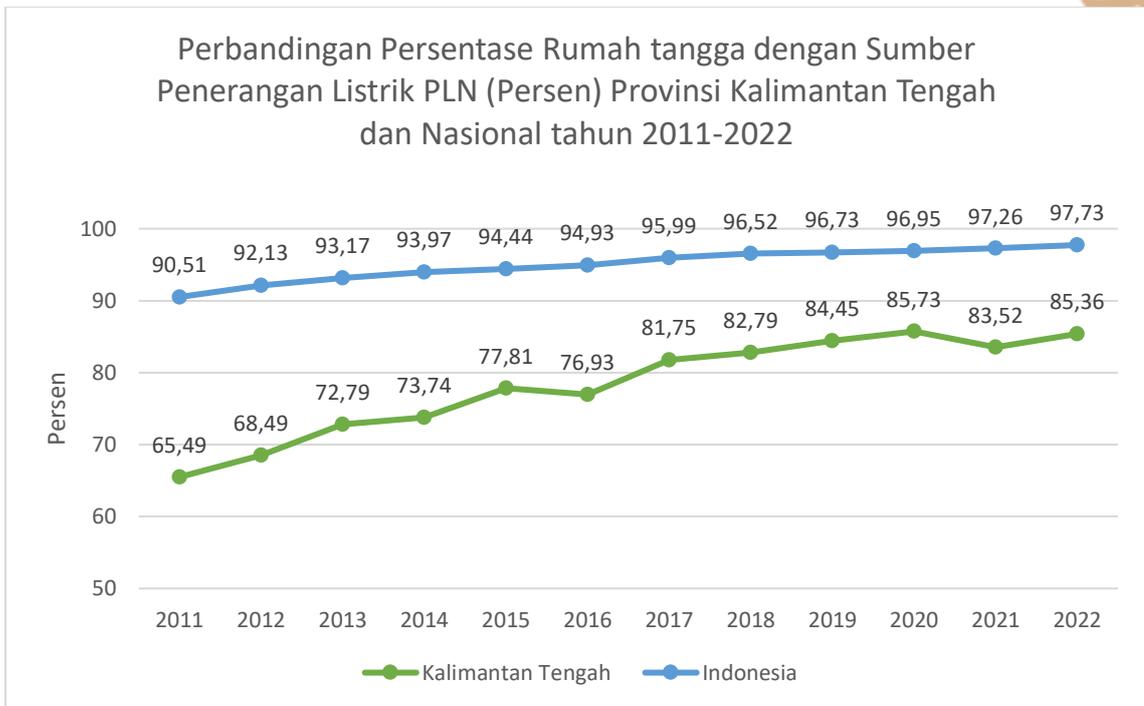
Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah bidang lahan transmigrasi yang mendapat sertifikat	1360	609	750	TAD	TAD	TAD

Jumlah satuan permukiman baru dan pemenuhan daya tampung	0	25	143	TAD	TAD	TAD
Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang berakhir masa pembinaan	4	4	0	TAD	TAD	TAD
Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional	TAD	TAD	20,8	22,7	39,6	41,18

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalteng (Diolah)

ENERGI

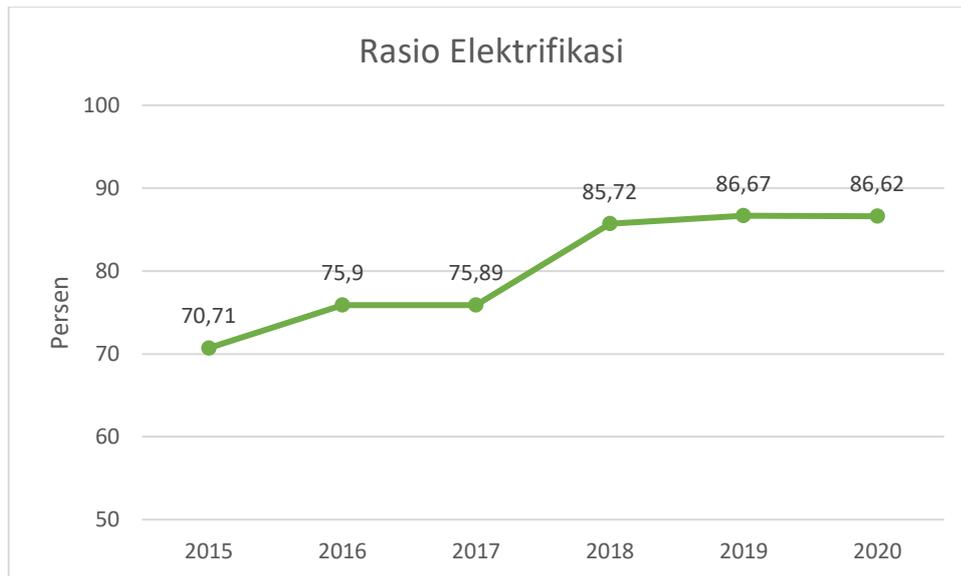
Persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN di Provinsi Kalimantan Tengah selama sebelas tahun terakhir (2011-2022) terus mengalami peningkatan tetapi masih di bawah garis nasional. Tercatat pada tahun 2011 persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN di Provinsi Kalimantan Tengah adalah 65,49% dan terus meningkat menjadi 85,36% di tahun 2022. Namun, perlu menjadi catatan bahwa meskipun sudah mencapai angka 85,36%, rata-rata nasional sudah mencapai 97,73% sehingga masih jauh di bawah rata-rata nasional, bahkan berada pada urutan ke 34 dari 36 provinsi di Indonesia.



Gambar II.4.23 Grafik Perbandingan Persentase Rumah tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN (Persen) Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2012-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Rasio elektrifikasi (RE) merupakan perbandingan jumlah pengguna (rumah tangga) yang memiliki sumber penerangan listrik baik listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan seluruh jumlah rumah tangga yang ada. Rasio Elektrifikasi tahun 2015 sebesar 70,71% dan tahun 2020 Rasio Elektrifikasi sebesar 86,69%. Peningkatan Rasio Elektrifikasi sebesar 15,69% pada lima tahun terakhir.



Gambar II.4.24 Grafik Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

II.4.4 FOKUS LAYANAN FUNGSI PENUNJANG DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PERUMUSAN KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN DAERAH

Bidang urusan ini membahas tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan monitoring bertujuan untuk menjaga agar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan rencana, menemukan kesalahan sedini mungkin dalam pelaksanaan rencana, serta melakukan penyesuaian implementasi kebijakan dengan melihat kondisi lapangan. Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan termasuk untuk mengukur output atau hasil, dampak kebijakan, serta penyimpangan yang terjadi. Terkait urusan ini belum tersedia data yang dapat diakses.

PENGAWASAN

Fungsi pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan yang dilakukan terhadap urusan pemerintahan daerah dijalankan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Tingkat leveling APIP Inspektorat Provinsi Kalteng menunjukkan level yang stabil pada tahun 2020 dan 2021, yaitu pada level 3. Tingkat leveling APIP ini masih bisa ditingkatkan hingga mencapai nilai maksimal, yaitu level 5. Opini hasil pemeriksaan eksternal terhadap urusan pemerintahan daerah juga sudah baik, yaitu opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian. Penurunan terjadi pada persentase tindak lanjut hasil pengawasan selesai BPK/RI, Itjen Kemendagri/teknis lainnya, dan inspektorat. Kinerja pemerintah juga dapat diukur dengan menggunakan Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks ini menilai sejauh mana pemerintah menjalankan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dari KKN, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pengukuran indeks ini menggunakan indikator indeks perilaku anti korupsi, nilai SAKIP, opini BPK, indeks kelembagaan, indeks SPBE, indeks profesionalisme ASN, dan indeks pelayanan publik. Kalimantan Tengah terus mengalami peningkatan nilai indeks reformasi birokrasi setiap tahunnya walaupun peningkatan tersebut cukup kecil.

Tabel II.4.23 Capaian Indikator Bidang Pengawasan

Indikator	2018	2019	2020	2021
Tingkat Leveling APIP Inspektorat Provinsi Kalteng	Level 1	Level 2	Level 3	Level 3
Opini Hasil Pemeriksaan Eksternal	WTP	WTP	WTP	WTP
Tingkat Maturitas SPIP Provinsi Kalteng	TAD	Level 3	Level 3	Level 3
Persentase tindak lanjut hasil pengawasan selesai:				
- BPK RI	84,14	78,49	88	50
- ITJEN Kemendagri/teknis lainnya	87,7	52,24	90	50
- Inspektorat	89,49	90,8	93	70
Persentase penurunan nilai kerugian daerah sesuai hasil pemeriksaan	22,97	52,78	10	50
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Provinsi (SAKIP) Kalimantan Tengah	62,86	63,05	62,05	62,44



Indikator	2018	2019	2020	2021
Persentase perangkat daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP minimal "B"	TAD	TAD	TAD	50
Persentase SKPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP	44	58	60	TAD
Indeks Reformasi Birokrasi	59,28	59,59	TAD	59,73

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalteng (diolah)

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Proses perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk menentukan arah kebijakan suatu daerah di masa depan. Perencanaan ini melibatkan berbagai pihak sehingga dapat mengakomodir kebutuhan yang dapat dipenuhi kedepannya. Pengukuran pelaksanaan perencanaan pembangunan menggunakan indikator-indikator seperti kesesuaian antar dokumen perencanaan, persentase ketercapaian target indikator RPJMD, serta jumlah perangkat daerah yang telah berhasil mencapai target. Berdasarkan data pada tabel di bawah ini, diketahui bahwa beberapa indikator seperti kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD serta Renja PD dengan Renstra PD mengalami penurunan pada tahun 2020. Artinya terdapat peningkatan ketidaksesuaian antar dokumen perencanaan tersebut. Selain itu juga terjadi penurunan ketercapaian target indikator RPJMD. Penurunan-penurunan ini menjadi masalah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, karena berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.

Tabel II.4.24. Capaian Indikator Bidang Perencanaan

Indikator	2017	2018	2019	2020
Persentase keterkaitan arah kebijakan dan prioritas RKPD tahun n+1 (2020) dengan arah kebijakan dan prioritas RPJMD tahun 2016-2021	100	89,74	96,67	78,28



Indikator	2017	2018	2019	2020
Persentase keterkaitan arah kebijakan dan prioritas RKPD tahun n+1 (2020) dengan arah kebijakan dan prioritas RKP tahun n+1 (2020)	100	100	100	100
Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	89,7	86,24	95,7	92,83
Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD	86,1	80,94	94,29	66,38
Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD	91,2	94,78	95,86	95,86
Jumlah PD yang target keberhasilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 95% (fisik)	36	36	37	38
Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target	51	45,7	47,45	36,52

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalteng (diolah)

KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kepegawaian

Kinerja bidang kepegawaian dapat ditinjau berdasarkan beberapa indikator, yakni jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), persentase PNS yang melanjutkan pendidikan formal, serta jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu. Indikator jumlah PNS menggambarkan kondisi kepegawaian di Provinsi Kalimantan Tengah. Persentase PNS yang melanjutkan pendidikan formal menggambarkan jumlah PNS yang mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan lanjut. Sementara itu, jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu dapat menggambarkan upaya pembinaan dan penegakan disiplin terhadap para aparatur sipil yang melakukan pelanggaran. Secara rinci, kondisi kepegawaian di Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.4.25 Kondisi Indikator Bidang Kepegawaian Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2016-2022

No.	Indikator	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah PNS Prov. Kalteng	4.915	10.382	10.019	10.059	9.653	9.596	9.271
2.	Persentase PNS yang melanjutkan Pendidikan Formal	1,02%	0,96%	1,49%	1,25%	0,88%	0,82%	1,24%
3.	Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu	76	18	28	14	28	TAD	TAD

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalteng

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui jumlah PNS pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi. Jumlah PNS pada tahun 2016 sebesar 4.915 pegawai. Nilai tersebut meningkat pada tahun 2017 menjadi 10.382 pegawai. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2019 menjadi 10.059 pegawai. Peningkatan yang terjadi dapat disebabkan oleh dua faktor, yakni pengadaan seleksi CPNS dan pendataan jumlah pegawai yang diperbaharui. Sementara itu, penurunan jumlah PNS terjadi pada tahun 2018, 2020, 2021, dan 2022. Penurunan yang terjadi umumnya disebabkan oleh keberadaan PNS yang memasuki masa purnatugas, mutasi keluar, maupun kematian.

Indikator kedua yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja bidang kepegawaian adalah persentase PNS yang melanjutkan pendidikan formal. Salah satu upaya untuk mendorong peningkatan kapasitas PNS adalah dengan menyediakan jalur tugas belajar dan izin belajar. Tugas belajar merupakan penugasan kedinasan yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal dengan biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah, sedangkan izin belajar merupakan pemberian izin yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal dengan pembiayaan mandiri. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa persentase PNS yang mengikuti program tugas belajar dan izin belajar di Provinsi Kalimantan Tengah masih sangat rendah. Nilai tertinggi persentase PNS yang melanjutkan pendidikan formal berada pada tahun 2018,



yakni sebesar 1,49% dari total PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu, persentase terendah PNS yang melanjutkan pendidikan formal terjadi pada tahun 2021 dengan nilai sebesar 0,82%. Persentase PNS yang melanjutkan pendidikan formal di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum masih sangat rendah. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian bagi perangkat daerah yang mengurus kepegawaian, mengingat pendidikan lanjut dapat menunjang karier PNS dengan meningkatkan pola pikir, perilaku, dan kemampuan yang sesuai dengan pendidikan yang ditempuh.

Indikator berikutnya yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja bidang kepegawaian adalah jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu. Sebagai abdi negara, seorang PNS terikat terhadap kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi. PNS harus menjaga ucapan, tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan, baik di dalam jam kerja maupun di luar jam kerja. Berdasarkan data yang tersedia, secara umum jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu mengalami penurunan. Tahun 2016 menjadi tahun dengan jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu tertinggi, yakni sebanyak 76 kasus. Nilai tersebut mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2019 dengan jumlah kasus secara berturut-turut 18 kasus dan 14 kasus. Namun, pada tahun 2018 dan 2020 jumlah kasus pelanggaran disiplin yang ditangani secara tepat waktu mengalami peningkatan, hingga mencapai masing-masing sejumlah 28 kasus. Penurunan jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin secara tepat waktu dapat dimaknai bahwa jumlah kasus pelanggaran disiplin yang terjadi pada tataran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan, sehingga penanganan kasus pelanggaran disiplin juga mengalami penurunan.

Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja bidang pendidikan dan pelatihan (diklat) dapat ditinjau berdasarkan beberapa indikator, yakni persentase peserta diklat prajabatan yang lulus dengan predikat memuaskan, persentase peserta diklat kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan, persentase peserta diklat teknis yang lulus *post test*, dan persentase peserta diklat fungsional yang lulus *post test*. Secara rinci,



kondisi indikator bidang diklat di Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.4.26 Capaian Indikator Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2015-2020

No.	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase peserta diklat prajabatan yang lulus dengan predikat memuaskan	92,94	92,98	0	96	99	0
2.	Persentase peserta diklat kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan	98,75	85,34	56,81	88	100	0
3.	Persentase peserta diklat teknis yang lulus <i>post test</i>	100	88,34	126,67	99	79	68,6
4.	Persentase peserta diklat fungsional yang lulus <i>post test</i>	100	0	31,75	98	72	113,27

Sumber: Badan Pengembangan SDM Kalteng

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa secara umum tingkat kelulusan diklat di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi. Terkait peserta diklat prajabatan, persentase kelulusan dengan predikat memuaskan telah berada di atas 90%. Nilai tertinggi persentase kelulusan diklat prajabatan dengan predikat memuaskan terjadi pada tahun 2019 dengan nilai mencapai 99%, sedangkan nilai terendah terjadi pada tahun 2015 dengan persentase sebesar 92,94%. Diklat prajabatan tidak dilaksanakan pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19.



Kemudian, persentase peserta diklat kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan mengalami tren penurunan selama periode 2015-2017 dan mengalami peningkatan pada periode 2018-2019. Sebanyak 98,75% peserta diklat kepemimpinan pada tahun 2015 berhasil lulus dengan predikat memuaskan. Persentase tersebut mengalami penurunan, hingga pada tahun 2017 mencapai titik terendah sebesar 56,81%. Penurunan ini dapat disebabkan oleh kurikulum diklat kepemimpinan yang dianggap terlalu sulit, sehingga perlu adanya perbaikan. Pasca tahun 2017, persentase peserta diklat kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan kembali mengalami peningkatan. Sebanyak 88% peserta diklat kepemimpinan pada tahun 2018 berhasil lulus dengan predikat memuaskan. Sementara itu, pada tahun 2019 seluruh peserta berhasil lulus dengan predikat memuaskan.

Fluktuasi juga terjadi pada indikator persentase peserta diklat teknis yang lulus *post test* dan persentase peserta diklat fungsional yang lulus *post test*. Diklat teknis merupakan pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagai PNS, sedangkan diklat fungsional merupakan pendidikan dan pelatihan untuk mencapai persyaratan kompetensi jenjang jabatan fungsional.

Persentase peserta diklat teknis yang lulus *post test* pada tahun 2015 mencapai 100%. Nilai tersebut mengalami penurunan pada tahun 2016 hingga mencapai 88,34%, sebelum akhirnya mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017 hingga mencapai 126,67%. Namun, persentase peserta diklat teknis yang lulus *post test* kembali mengalami penurunan, hingga pada tahun 2020 nilainya mencapai 68,6%. Persentase peserta diklat fungsional yang lulus *post test* pada tahun 2015 mencapai 100%. Terjadi penurunan persentase peserta diklat fungsional yang lulus *post test* pada tahun 2017, yakni hanya sebesar 31,75%. Peningkatan terjadi pada tahun 2018, dengan persentase kelulusan peserta diklat fungsional mencapai 98%. Meskipun mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 hingga mencapai 72%, persentase kelulusan *post test* peserta diklat fungsional meningkat pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 113,27%.





PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Salah satu elemen penting untuk memastikan kualitas kebijakan yang disusun dalam sebuah perencanaan pembangunan adalah keberadaan hasil penelitian dan pengembangan yang mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis di suatu wilayah kajian. Melalui penyediaan masukan dan rekomendasi dari sebuah hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan, diharapkan proses pengambilan kebijakan strategis dapat dilakukan dengan lebih baik dan memiliki landasan yang lebih kuat. Kinerja pada unsur penelitian dan pengembangan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ditunjukkan dengan indikator persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah.

Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa selama periode tahun 2017-2022, persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah mencapai 100% pada empat tahun, yakni tahun 2017, 2018, 2021, dan 2022. Beberapa kajian yang dilakukan selama periode tersebut diantaranya adalah kajian aspek teknis dan sosial ekonomi program *food estate* di Provinsi Kalimantan Tengah, kajian optimalisasi fiskal daerah dan potensi penerimaan dan penggunaannya, kajian pemetaan kluster potensi pariwisata, kajian pengembangan UMKM, dan kajian lingkungan hidup strategis. Sementara itu, pada tahun 2019 dan 2020 tidak ada kegiatan kajian atau penelitian yang berjalan di Provinsi Kalimantan Tengah. Secara rinci, persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.4.27 Capaian Indikator Bidang Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2022

No	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022



1.	Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah	100	100	0	0	100	100
----	---	-----	-----	---	---	-----	-----

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, Renja Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)

KEUANGAN

Penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari tiga indikator utama, yakni Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Daerah, Persentase Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap APBD, dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah. Selama periode 2015-2022, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berhasil mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP). Opini tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh BPK, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

SILPA merupakan indikator yang menggambarkan sejumlah dana yang tidak digunakan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan masyarakat pada tahun tersebut. SILPA dapat digunakan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pembiayaan daerah. Berdasarkan data yang tersedia pada periode 2015-2022, persentase SILPA terhadap APBD Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi. Nilai terendah SILPA terjadi pada tahun 2016 dengan nilai sebesar 1,33% dari APBD tahun berjalan, sedangkan nilai tertinggi SILPA terjadi pada tahun 2018 dengan nilai mencapai 18,19%. Persentase SILPA yang masih tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah dapat mengindikasikan realisasi penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah, terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang belum optimal.

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan masing-masing daerah yang diperoleh melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Indeks ini menjadi penting untuk diperhatikan, karena dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penetapan kebijakan keuangan daerah. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui IKFD di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum mengalami fluktuasi selama periode 2015-2022. Nilai IKFD pada tahun 2015 adalah sebesar 1,35. Nilai tersebut kemudian mengalami penurunan signifikan, hingga pada tahun 2019 nilainya menjadi 0,437. Meskipun mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 0,776, nilai IKFD kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 hingga nilainya menjadi 0,392. Nilai IKFD mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2022 hingga menjadi 2,314. Semakin tinggi nilai IKFD, maka kemampuan suatu daerah dalam menjalankan program-program pelayanan wajib menggunakan anggaran yang tersedia akan semakin baik. Secara rinci, perkembangan ketiga indikator tersebut selama periode 2015-2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.4.28 Capaian Indikator Bidang Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2022

No.	Indikator	Tahun							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Persentase SILPA terhadap APBD	6,88%	1,33%	11,71%	18,19%	18,15%	14,17%	6,89%	18,13%
3.	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	1,35	1,17	0,61	0,464	0,437	0,776	0,392	2,314

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah

II.5 EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025

Hasil evaluasi RPJPD Kalimantan Tengah 2005-2025 menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan terlaksana dengan baik. Evaluasi RPJPD dilakukan melalui evaluasi terhadap hasil RPJMD. Evaluasi RPJMD tidak dilakukan pada periode RPJMD ke-

1 dan ke-2, serta terlaksana pada periode ke-3 dan ke-4. Capaian kinerja aspek kesejahteraan masyarakat memperoleh predikat "sangat tinggi", dengan rata-rata capaian 90,13% pada tahun 2016-2021 dan mencapai 95,98% pada tahun 2021-2026. Aspek pelayanan umum juga mengalami peningkatan, dengan nilai rata-rata capaian 61,19% menjadi 76,47% (kategori tinggi) pada tahun 2021-2026. Akan tetapi, capaian pada aspek daya saing menunjukkan penurunan dengan rata-rata capaian 61,70% (predikat rendah) pada tahun 2021-2026, sementara periode sebelumnya memperoleh nilai 67,65% (predikat sedang).

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, beberapa rekomendasi tindak lanjut untuk perencanaan berikutnya diantaranya yaitu memperhatikan fokus pada sektor pendukung daya saing daerah, yaitu pada sektor ekonomi, tata ruang wilayah, pendidikan, dan kesehatan. Peningkatan daya saing tidak hanya secara materil atau fisik, tetapi juga kualitas manusia yang semakin meningkat. Selain itu, dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan harus memuat indikator yang terukur sehingga dapat diketahui ketercapaian program pembangunan jangka panjang.

II.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

II.6.1 PROYEKSI DEMOGRAFI TAHUN 2020-2045

Perencanaan pembangunan harus disusun berdasarkan data dan informasi terkini yang bersifat kompleks dan dinamis. Salah satu data dasar dan krusial yang digunakan sebagai pertimbangan perencanaan pembangunan adalah data demografi. Hal ini erat kaitannya dengan fakta bahwa manusia merupakan subjek sekaligus objek dalam pembangunan. Oleh karenanya, data dan informasi demografi, seperti jumlah penduduk dan data turunannya, harus dijadikan sebagai acuan penting dalam perencanaan pembangunan karena mampu memberikan gambaran terkait kondisi pembangunan yang telah dijalankan. Selain itu, data dan informasi demografi juga menjadi dasar untuk mengevaluasi kemajuan pembangunan yang telah terjadi dan merumuskan kebijakan pembangunan di masa depan. Selain data jumlah penduduk, penting juga untuk memperhitungkan faktor-faktor demografis lainnya seperti distribusi usia penduduk, angka ketergantungan, *sex ratio*, dan kepadatan penduduk. Data-data ini sangat berperan dalam merancang perencanaan pembangunan yang presisi dan sesuai dengan potensi perkembangan wilayah. Data-data tersebut selanjutnya dapat dikembangkan melalui

perhitungan proyeksi penduduk hingga 20 tahun mendatang sebagai dasar pertimbangan perencanaan jangka panjang, menengah, maupun tahunan.

Tabel II.6.1 Proyeksi Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kelompok Umur, 2020-2045 (ribu jiwa)

Umur	2020	2025	2030	2035	2040	2045
0—4	219,76	253,54	249,47	242,16	235,05	231,54
5—9	220,88	218,97	252,68	248,67	241,43	234,38
10—14	234,02	219,40	217,53	251,03	247,07	239,90
15—19	237,28	231,90	217,45	215,61	248,83	244,93
20—24	239,82	237,57	232,23	217,78	215,96	249,24
25—29	235,73	242,56	240,33	234,96	220,38	218,56
30—34	231,56	236,01	242,88	240,67	235,33	220,75
35—39	217,32	228,98	233,44	240,29	238,14	232,90
40—44	201,82	214,01	225,55	230,00	236,83	234,77
45—49	175,01	197,17	209,18	220,55	225,01	231,78
50—54	141,26	169,01	190,55	202,33	213,50	217,96
55—59	110,77	134,41	161,04	181,79	193,32	204,23
60—64	78,40	103,34	125,66	150,89	170,73	181,92
65—69	53,15	70,68	93,48	114,06	137,53	156,08
70—74	33,73	44,89	60,08	79,94	98,21	119,11
75+	31,98	42,56	57,59	78,64	107,61	140,33
Total	2662,45	2844,99	3009,13	3149,37	3264,93	3358,38

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020 adalah sebesar 2,66 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut diperkirakan akan terus bertambah hingga 20 tahun ke depan. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk berbasis skenario tren pada tabel di atas diperkirakan jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah pada akhir periode RPJPD (2045) mencapai angka 3,36 juta jiwa yang berarti selama 20 tahun ke depan Provinsi Kalimantan Tengah akan mengalami penambahan penduduk sebesar 0,7 juta jiwa.

Tabel II.6.2 Ringkasan Kondisi Demografi Hasil Proyeksi Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2045

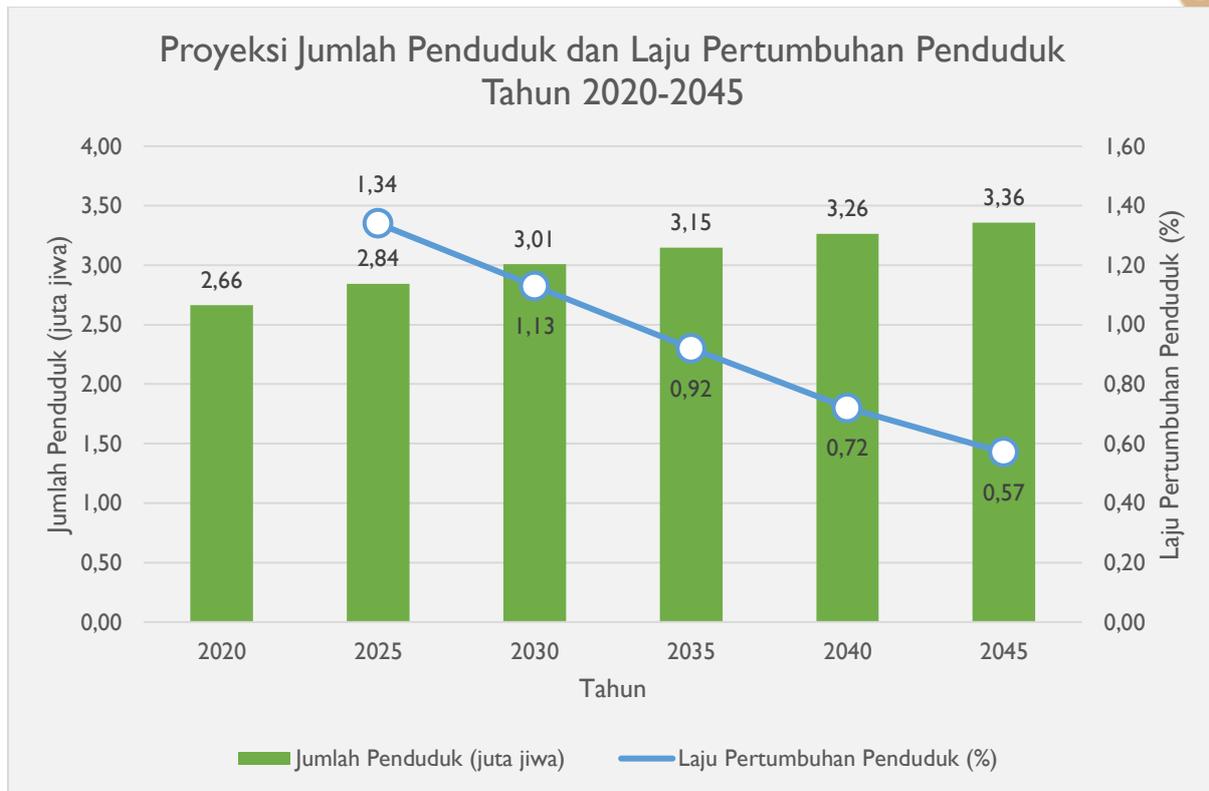
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Penduduk						
Laki-Laki (ribu jiwa)	1381,81	1467,14	1541,43	1602,31	1649,89	1685,90

Perempuan (ribu jiwa)	1280,64	1377,85	1467,70	1547,06	1615,04	1672,48
Total (ribu jiwa)	2662,45	2844,99	3009,13	3149,37	3264,93	3358,38
Rasio Jenis Kelamin (%)	107,9	106,5	105,0	103,6	102,2	100,8
Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)	17,34	18,53	19,60	20,51	21,26	21,87
Komposisi Penduduk (%)						
0 — 14 Tahun	25,34	24,32	23,92	23,56	22,16	21,02
15 — 64 Tahun	70,2	70,12	69,07	67,79	67,32	66,61
65+ Tahun	4,46	5,56	7,02	8,66	10,52	12,37
Angka Ketergantungan (%)	42,45	42,61	44,80	47,53	48,54	50,13

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

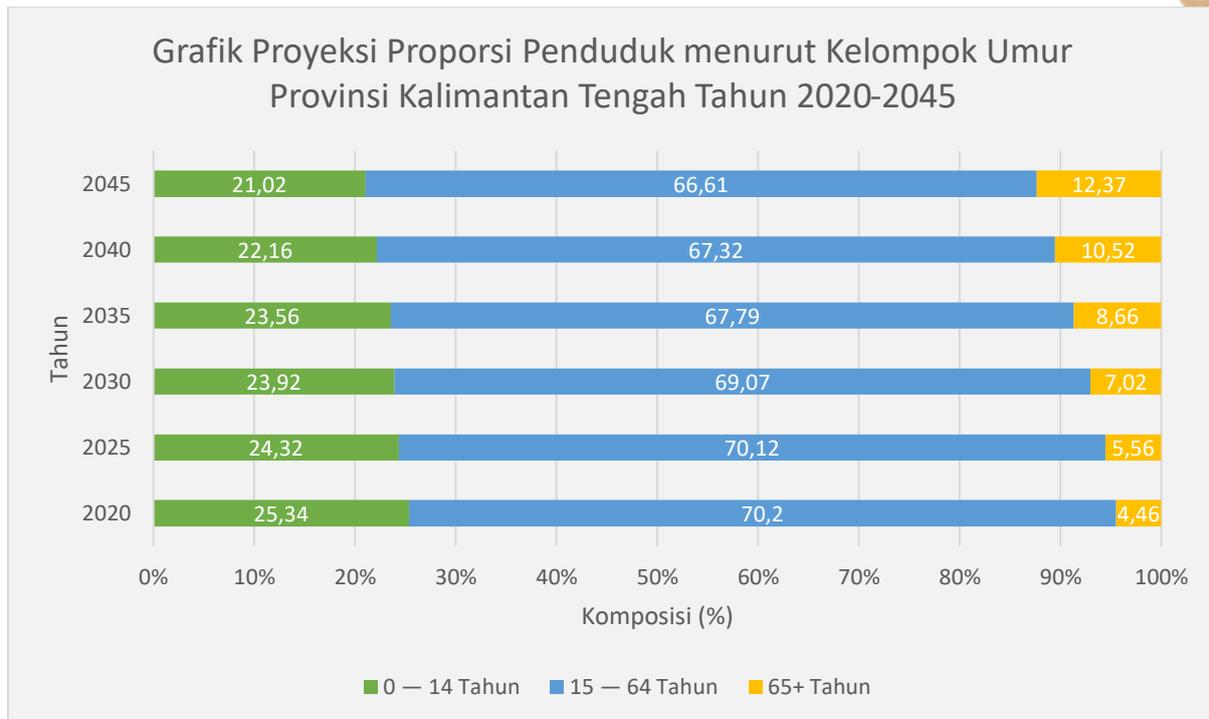
Berdasarkan tabel ringkasan kondisi demografi hasil proyeksi penduduk Provinsi Kalimantan Tengah jumlah penduduk Kalimantan Tengah pada tahun 2045 diperkirakan mencapai 3,36 juta jiwa terdiri atas 1,69 juta jiwa penduduk laki-laki dan 1.67 juta jiwa perempuan. Kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah terus meningkat akibat dari terus bertambahnya angka kelahiran dan migrasi masuk serta terbatasnya ruang wilayah. Pada tahun 2045, diproyeksikan kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 22,52 jiwa per km².

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020 adalah sebesar 2,66 juta jiwa. Jumlah penduduk diperkirakan bertambah sebanyak 0,7 juta jiwa, sehingga menjadi sebanyak 3,36 juta jiwa pada tahun 2045. Meskipun jumlah penduduknya terus bertambah, tetapi laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah terus melemah. Adapun rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2020-2045 sebesar 0,93% per tahunnya.



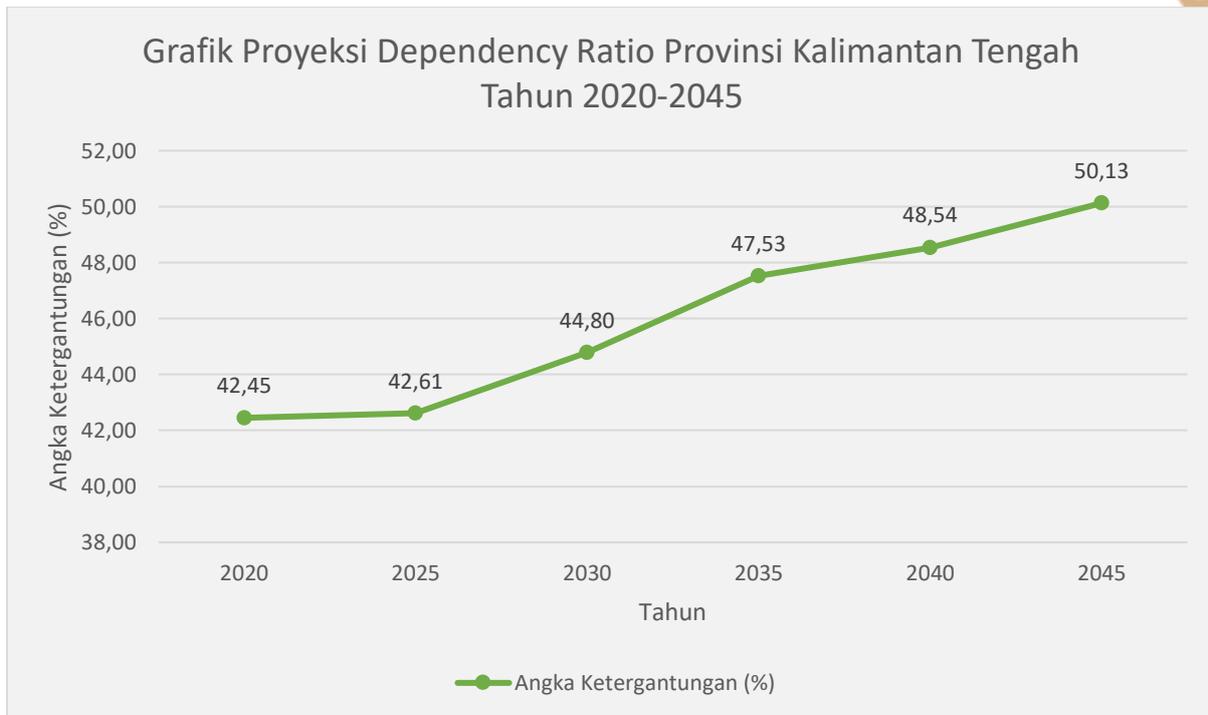
Gambar II.6.1 Grafik Proyeksi Proporsi dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2045

Proporsi penduduk usia 0-14 tahun di Provinsi Kalimantan Tengah diproyeksikan menurun dari 25,34% pada tahun 2020, menjadi 21,02% pada tahun 2045. Tren penurunan juga terdapat pada proporsi penduduk usia 15-64 tahun dari 70,20% menjadi 66,61% pada periode waktu yang sama. Di sisi lain, terdapat peningkatan proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas, yang sebelumnya sebesar 4,46% menjadi 12,37%. Hal ini mengindikasikan bahwa persentase penduduk usia produktif diprediksi menurun sebanyak 3,59% dari 70,2% menjadi 66,61% dan penduduk usia non produktif bertambah sebanyak 3,59% dari 29,80% menjadi 33,39%.



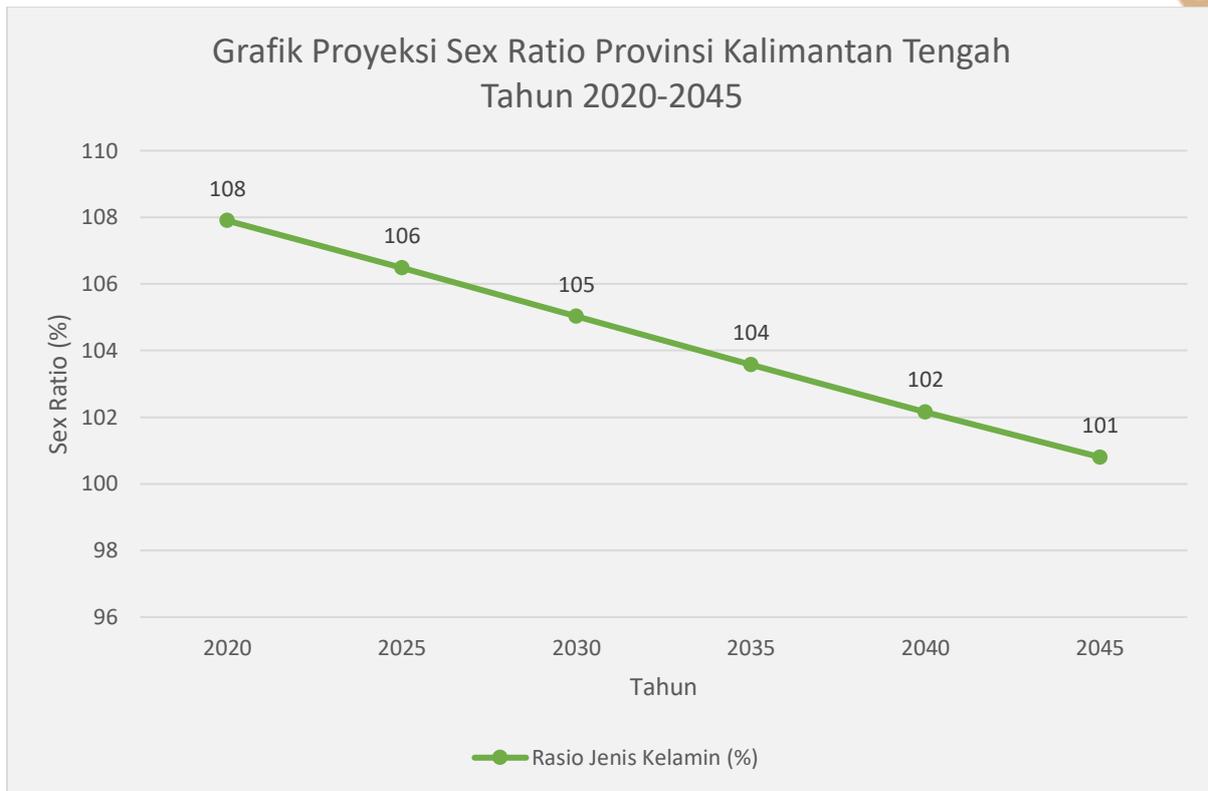
Gambar II.6.2 Grafik Proyeksi Proporsi Penduduk menurut Kelompok Umur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2045

Rasio ketergantungan penduduk Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020 adalah 42,45% dan diproyeksikan meningkat menjadi 50,13% pada tahun 2045. Hal ini berarti pada tahun 2045 diprediksi setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 50 penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Secara sederhana 2 penduduk produktif memiliki tanggungan 1 penduduk non produktif. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan mengimplikasikan beban yang semakin berat terhadap penduduk usia produktif karena semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Kondisi tersebut menjadi catatan khusus terhadap arah pembangunan agar penduduk usia produktif mampu memanfaatkan momentum peluang berkontribusi pada pembangunan dan tingginya penduduk usia nonproduktif dapat diakomodir oleh program-program pembangunan.



Gambar II.6.3 Grafik Proyeksi *Dependency Ratio* Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2045

Pada tahun 2045, rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 100,8. Artinya, terdapat sekitar 100-101 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin semakin menurun pada periode 2020-2045 yang menunjukkan bahwa penambahan jumlah penduduk perempuan melebihi penambahan jumlah penduduk laki-laki.



Gambar II.6.4 Proyeksi *Sex Ratio* Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2045

Demografi Kewilayahan

Perencanaan pembangunan wilayah membutuhkan teknik-teknik tertentu dalam mencapai visi misi pembangunan wilayah setempat, salah satunya adalah teknik regionalisasi atau pembagian wilayah ke dalam kluster-kluster pembangunan. Pembagian kluster pembangunan didasarkan pada kedekatan geografis (jarak fisik) wilayah dan pengembangan sistem perkotaan di Provinsi Kalimantan Tengah. Pembagian kluster pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah. Klasifikasi kluster pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah terbagi menjadi enam kluster, yaitu Kluster Pangkalan Bun (Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau); Kluster Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan), Kluster Palangkaraya (Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas); Kluster Kuala Kapuas (Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau); Kluster Buntok (Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur); dan Kluster Muara Teweh (Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara).

Berikut merupakan tabel proyeksi penduduk tahun 2025-2045 berdasarkan kluster perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah:

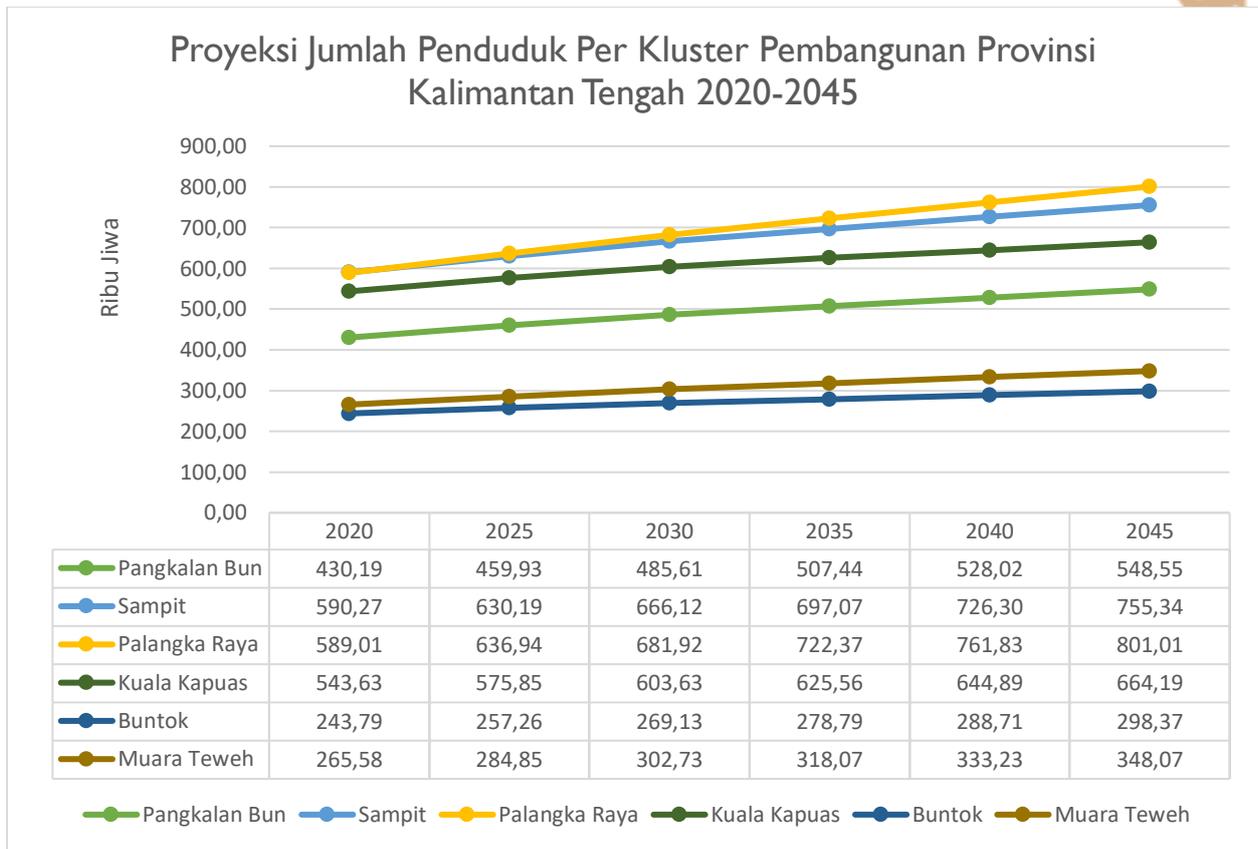
Tabel II.6.3 Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2045 Berdasarkan Kluster Perencanaan Pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah

Kluster Pembangunan	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Pangkalan Bun						
Laki-Laki (ribu jiwa)	225,35	239,41	251,11	260,63	269,45	278,23
Perempuan (ribu jiwa)	204,84	220,52	234,50	246,81	258,57	270,32
Total (ribu jiwa)	430,19	459,93	485,61	507,44	528,02	548,55
Sex Ratio (%)	110,01	108,57	107,08	105,60	104,21	102,93
Komposisi Penduduk (%)						
0 — 14	25,54	24,66	23,78	22,35	21,69	20,91
15 — 64	70,54	70,38	69,78	69,48	68,52	67,81
65+	3,93	4,96	6,44	8,17	9,79	11,28
Dependency Ratio (%)	41,77	42,09	43,31	43,93	45,95	47,48
Sampit						
Laki-Laki (ribu jiwa)	308,04	327,07	343,71	357,52	370,12	382,70
Perempuan (ribu jiwa)	282,23	303,12	322,41	339,55	356,18	372,64
Total (ribu jiwa)	590,27	630,19	666,12	697,07	726,30	755,34
Sex Ratio (%)	109,15	107,90	106,61	105,29	103,92	102,70
Komposisi Penduduk (%)						
0 — 14	25,89	24,26	23,49	23,06	23,00	22,99
15 — 64	70,55	71,07	70,46	69,21	67,63	66,11
65+	3,57	4,63	6,06	7,73	9,38	10,91
Dependency Ratio (%)	41,75	40,65	41,93	44,49	47,88	51,27
Palangkaraya						
Laki-Laki (ribu jiwa)	303,98	325,41	344,94	361,83	377,94	393,95
Perempuan (ribu jiwa)	285,03	311,53	336,98	360,54	383,89	407,06
Total (ribu jiwa)	589,01	636,94	681,92	722,37	761,83	801,01
Sex Ratio (%)	106,65	104,46	102,36	100,36	98,45	96,78
Komposisi Penduduk (%)						
0 — 14	26,71	25,59	25,01	24,51	24,23	23,94
15 — 64	69,02	69,22	68,50	67,57	66,44	65,47
65+	4,27	5,19	6,49	7,92	9,32	10,59
Dependency Ratio (%)	44,89	44,46	45,98	48,00	50,50	52,75
Kuala Kapuas						
Laki-Laki (ribu jiwa)	281,49	296,64	309,27	318,72	326,75	334,77
Perempuan (ribu jiwa)	262,14	279,21	294,36	306,84	318,14	329,42
Total (ribu jiwa)	543,63	575,85	603,63	625,56	644,89	664,19
Sex Ratio (%)	107,38	106,24	105,07	103,87	102,71	101,63
Komposisi Penduduk (%)						
0 — 14	24,54	23,79	23,53	23,51	23,43	23,32
15 — 64	69,66	69,38	68,31	66,84	65,56	64,42
65+	5,81	6,84	8,17	9,66	11,02	12,28
Dependency Ratio (%)	43,56	44,14	46,41	49,61	52,54	55,25
Buntok						

Kluster Pembangunan	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki (ribu jiwa)	124,94	131,33	136,76	140,95	144,66	148,36
Perempuan (ribu jiwa)	118,85	125,93	132,37	137,84	144,04	150,01
Total (ribu jiwa)	243,79	257,26	269,13	278,79	288,71	298,37
Sex Ratio (%)	105,12	104,29	103,32	102,26	100,43	98,91
Komposisi Penduduk (%)						
0 — 14	23,97	22,93	22,85	22,47	21,83	21,15
15 — 64	70,78	70,54	69,04	67,57	66,39	65,36
65+	5,26	6,54	8,13	9,97	11,78	13,50
Dependency Ratio (%)	41,29	41,77	44,86	48,01	50,63	53,01
Muara Teweh						
Laki-Laki (ribu jiwa)	138,03	147,29	155,66	162,59	168,92	175,21
Perempuan (ribu jiwa)	127,55	137,56	147,07	155,48	164,31	172,85
Total (ribu jiwa)	265,58	284,85	302,73	318,07	333,23	348,07
Sex Ratio (%)	108,22	107,07	105,84	104,57	102,81	101,36
Komposisi Penduduk (%)						
0 — 14	26,34	25,03	24,81	24,66	24,31	23,98
15 — 64	69,73	70,00	68,87	67,55	66,45	65,46
65+	3,93	4,98	6,33	7,80	9,25	10,57
Dependency Ratio (%)	43,41	42,86	45,21	48,05	50,50	52,77

Sumber: diolah dari data BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel di atas memuat informasi proyeksi penduduk tahun 2025-2045 berdasarkan kluster perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah yang berisikan data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, sex ratio, persentase penduduk berdasarkan komposisi kelompok umur, dan dependency ratio. Kluster dengan jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2020 adalah Kluster Sampit sejumlah 590,27 ribu jiwa dan diikuti oleh Kluster Palangkaraya dengan jumlah penduduk sebesar 589,01 ribu jiwa pada tahun 2020.

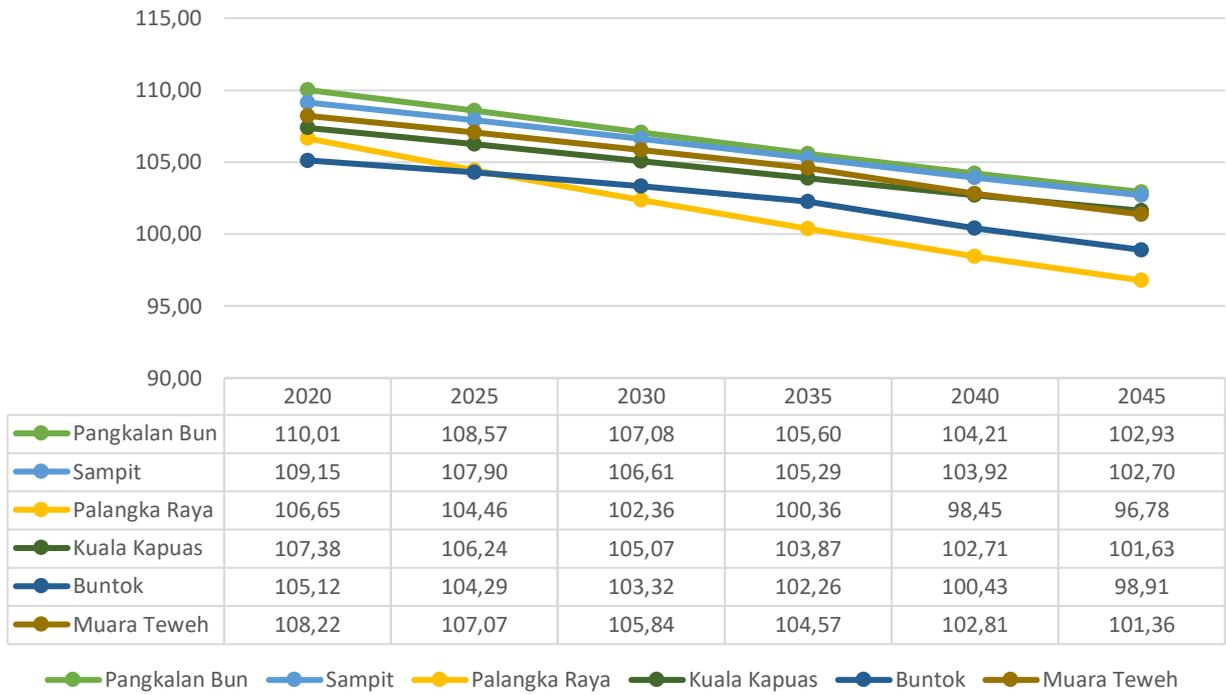


Gambar II.6.5 Proyeksi Jumlah Penduduk Per Kluster Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2045

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Sex ratio pada masing-masing kluster cenderung memiliki kesamaan pola yakni tren yang semakin menurun. Hal ini berarti bahwa pertambahan jumlah penduduk perempuan dalam dua puluh tahun mendatang akan lebih masif daripada pertambahan jumlah penduduk laki-laki. Khususnya pada kluster pembangunan Palangkaraya yang mengalami tren pola penurunan yang paling tajam dibandingkan dengan kluster pembangunan lainnya, yakni dari 106,65 pada tahun 2020 diprediksi turun menjadi 96,78 pada tahun 2045.

Grafik Proyeksi Sex Ratio Per Kluster Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2045

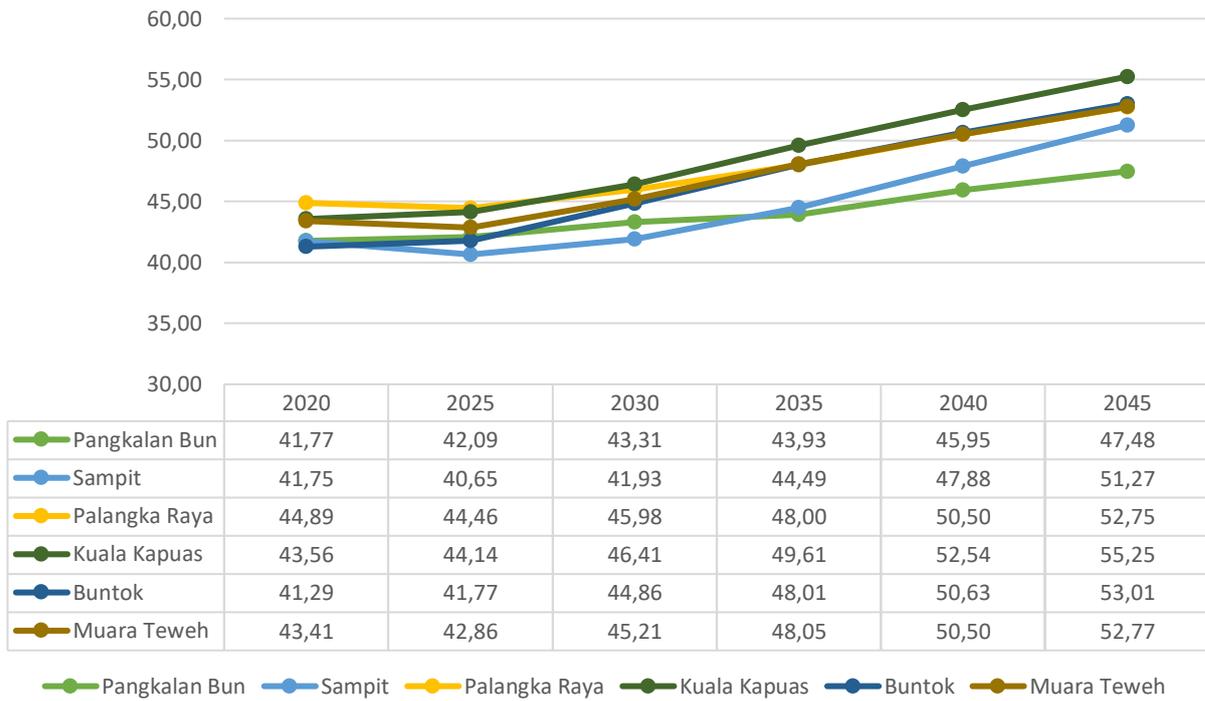


Gambar II.6.6 Proyeksi Sex Ratio Per Kluster Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2045

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Dependency ratio pada masing-masing kluster cenderung memiliki kesamaan pola yakni tren yang semakin meningkat. Hal ini berarti bahwa kecenderungan pertumbuhan penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) juga semakin meningkat pada 20 tahun mendatang. *Dependency ratio* pada 2045 pada masing-masing kluster pembangunan diprediksi mencapai range 47,48 hingga 55,25 yang bermakna setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 47 sampai 55 penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Prediksi peningkatan *dependency ratio* dengan pola yang peningkatannya paling tajam berada di kluster pembangunan Sampit yang mengalami tren pola peningkatan mulai dari 41,75 pada tahun 2020 diprediksi naik menjadi 51,27 pada tahun 2045. Prediksi peningkatan *dependency ratio* dengan pola peningkatan yang paling landai berada di kluster pembangunan Pangkalan Bun yang mengalami tren pola peningkatan mulai dari 41,77 pada tahun 2020 diprediksi naik menjadi 47,48 pada tahun 2045

Grafik Proyeksi Dependency Ratio Per Kluster Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2045



Gambar II.6.7 Proyeksi *Dependency Ratio* Per Kluster Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2045

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

II.6.2 KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA DASAR

Kebutuhan sarana dan prasarana dasar digunakan dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan kewilayahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang merata dan berkeadilan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, proyeksi sarana dan prasarana juga digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi lebih baik. Pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dengan melihat proyeksi jumlah penduduk dan kriteria cakupan pelayanan berdasarkan Standar Nasional Indonesia.

Tabel II.6.4 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2020-2045

Jumlah Penduduk (ribu jiwa)			2022 (eksisting)	2025	2030	2035	2040	2045
			2.741,00	2.844,99	3.009,13	3.149,37	3.264,93	3.358,38
Kebutuhan Dasar	Kebutuhan Dasar Sarana	Satuan	2022 (eksisting)	2025	2030	2035	2040	2045
			Rumah/tempat tinggal	Kebutuhan Rumah	Unit	548.200	569.000	601.828
Air	Kebutuhan Air Bersih	Ribu Liter/hari	164.460	170.699	180.548	188.962	195.896	201.503
	Air Minum	Ribu Liter/Hari	5.482	5.690	6.018	6.299	6.530	6.717
Listrik	Konsumsi listrik per kapita	kWh	722	830	1.000	1.500	1.950	2.225
Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah Rumah Tangga	Ton/hari	1.919	1.992	2.106	2.205	2.286	2.351
	Tempat Pembuangan Sampah Terpadu	Unit	10	14	14	14	14	14
Fasilitas Kesehatan	Rumah Sakit	Unit	23*	38	40	42	44	45
	Puskesmas Pembantu	Unit	1056*	95	100	105	109	112
	Puskesmas	Unit	203*	24	25	26	27	28
	Apotek/Rumah Obat	Unit	93	96	100	105	110	115
Fasilitas Pendidikan	TK	Unit	1.922	2.276	2.407	2.519	2.612	2.687
	SD/MI	Unit	3.506	1.778	1.881	1.968	2.041	2.099
	SMP/MTs	Unit	1.031	593	627	656	680	700
	SMA/MA/SMK	Unit	473	593	627	656	680	700

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

*data tahun 2021

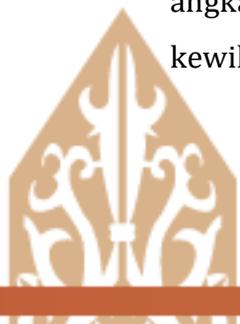
Kebutuhan rumah layak huni di Provinsi Kalimantan Tengah cenderung mengalami peningkatan pada tiap periode tahunnya. Perhitungan proyeksi kebutuhan rumah menggunakan perhitungan Standar Nasional Indonesia dengan pendekatan kebutuhan kavling minimum di mana 1 keluarga diasumsikan memiliki 5 anggota keluarga dengan kebutuhan luas minimum 100m². Kebutuhan rumah layak huni di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2045 adalah 671.676 unit rumah.



Kebutuhan dasar air bersih dihitung menggunakan perbandingan proyeksi jumlah penduduk yang semakin meningkat dengan kebutuhan air bersih manusia dalam satu hari, yaitu sebanyak 60 liter/orang/hari. Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan air semakin meningkat mencapai 201.503 ribu liter/hari. Oleh karenanya penting bagi pemerintah daerah provinsi untuk penyediaan sarana prasarana air bersih.

Berkaitan dengan fasilitas persampahan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 sudah memiliki 11 tempat pembuangan akhir berstatus A yang sudah sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia. Namun, masih perlu dilakukan peningkatan sistem pengelolaan persampahan khususnya pengelolaan persampahan perkotaan agar tidak menimbulkan permasalahan baru seperti meningkatnya luas kawasan kumuh di perkotaan dan timbulan sampah tidak terolah.

Guna memenuhi kebutuhan dasar berupa kesehatan terdapat sarana dasar kesehatan berupa puskesmas, puskesmas pembantu, apotek/rumah obat, dan rumah sakit. Provinsi Kalimantan Tengah sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia pada beberapa kebutuhan sarana kesehatan hingga tahun 2045, seperti pada sarana puskesmas utama dan puskesmas pembantu. Namun, perlu menjadi catatan bahwa terdapat beberapa sarana dasar kesehatan yang jumlah eksistingnya jauh melampaui jumlah proyeksi 20 tahun mendatang, seperti pada puskesmas pembantu. Pada proyeksi puskesmas pembantu dengan jumlah eksisting tahun 2022 sejumlah 1.056 unit sedangkan hasil proyeksi kebutuhan puskesmas pembantu pada tahun 2045 adalah 112 unit. Puskesmas pembantu (pustu) merupakan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang membantu kegiatan puskesmas di sebagian dari wilayah kerja. Pada beberapa daerah balai pengobatan telah berubah fungsi menjadi pustu walaupun papan nama masih tertulis balai pengobatan. Oleh karenanya untuk sarana-sarana tersebut Provinsi Kalimantan Tengah kedepannya harus melakukan peninjauan ulang terkait efektifitas dan efisiensi serta melakukan peningkatan kualitas pelayanan pada masing-masing sarana fasilitas kesehatan. Namun, perlu dipahami bahwa SNI dari kebutuhan minimum disusun dengan asumsi kebutuhan perkotaan. Tentunya kebutuhan tersebut tidak bisa dimaknai sebagai sebuah jumlah paling ideal. Jumlah yang tertera sesuai proyeksi adalah angka standar minimum tentunya jumlah ideal perlu menyesuaikan konteks kewilayahan dan kebutuhan masyarakat.

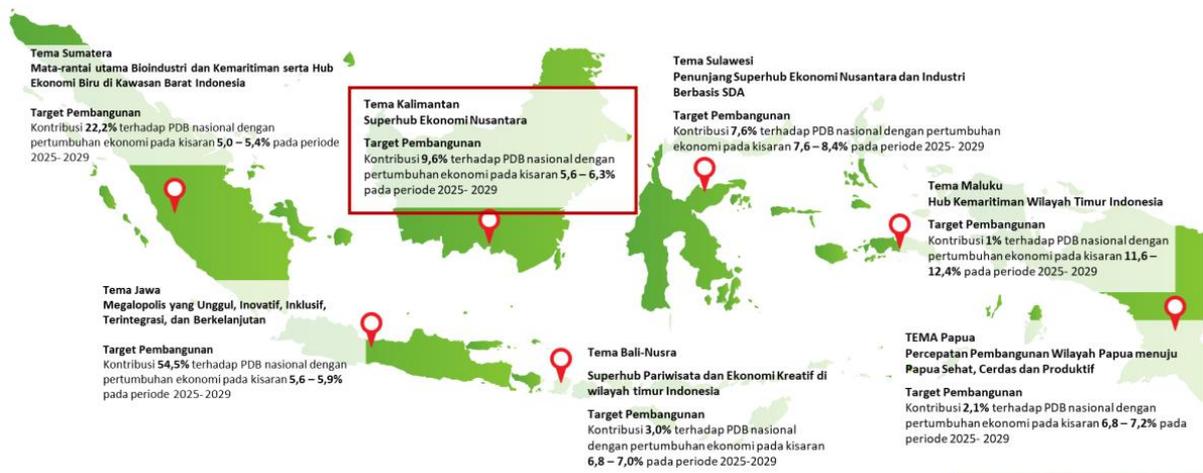


Selain sarana kebutuhan dasar dalam bidang kesehatan, terdapat sarana kebutuhan dasar yang tidak kalah pentingnya yakni sarana kesehatan dasar berupa pemenuhan kebutuhan pendidikan. Beberapa sarana dasar terkait kebutuhan pendidikan diantaranya adalah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah. Kebutuhan terkait SD/MI Provinsi Kalimantan Tengah sudah sesuai memenuhi SNI hingga tahun 2045 yang sekaligus menjadi temuan menarik karena jumlah eksisting pada tahun 2022 sejumlah 3.506 unit sedangkan data proyeksi kebutuhan SD/MI pada tahun 2045 sejumlah 2.099 unit. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akan ada lebih dari 1000 SD/MI yang dipertanyakan fungsional, efektifitas, dan efisiensinya selama beroperasi. Namun, perlu menjadi catatan juga terkait kondisi fisik geografi dan jarak fisik di Provinsi Kalimantan Tengah karena banyaknya jumlah SD/MI eksisting ini tidak terlepas dari kondisi fisik geografi, jarak fisik, dan sarana penunjang fisik lainnya.

II.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

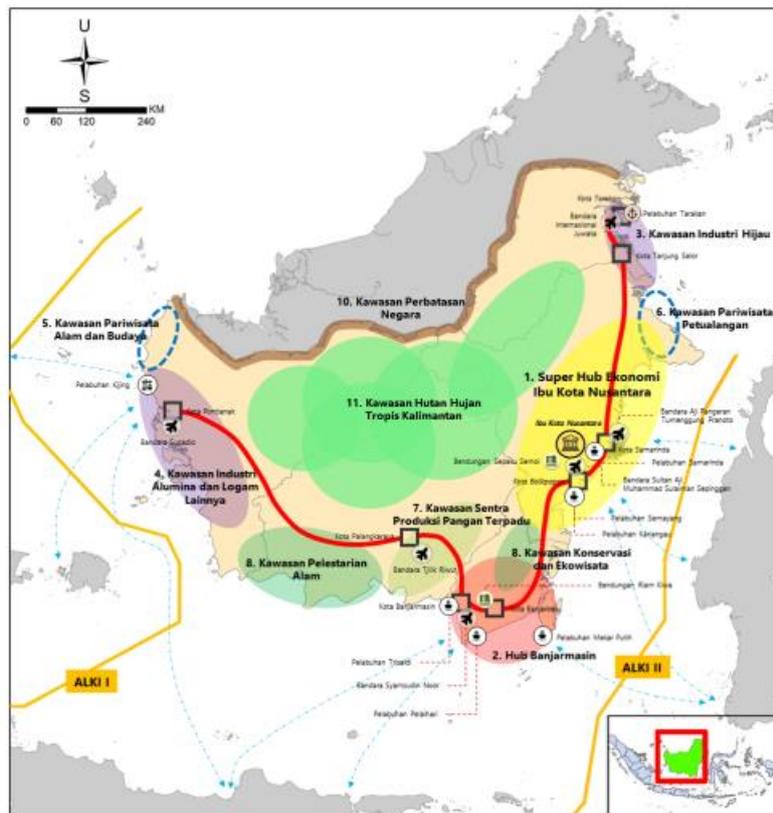
II.7.1 ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN RPJPN 2025-2045

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bagian pengembangan regional Pulau Kalimantan dalam Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN 2025-2045. Adapun regional Pulau Kalimantan dalam RPJPN 2025-2045 termasuk dalam Kawasan Timur Indonesia (KTI) bersama dengan regional Pulau Bali-Nusra dan Sulampua. Hal ini berkonsekuensi bahwa Kalimantan Tengah memiliki kewajiban untuk menjawab amanah pembangunan regional sebagai proses cascading RPJPN ke RPJPD Provinsi.



Gambar II.7.1 Tema Pembangunan Regional

Secara tematik regional Pulau Kalimantan memiliki tema sebagai Superhub Ekonomi Nusantara. Hal ini terkait dengan pengembangan IKN sebagai hub ekonomi baru di Pulau Kalimantan. IKN direncanakan menjadi trigger pengembangan perekonomian Kalimantan. Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dalam regional ini perlu menjawab amanah tema pembangunan Kalimantan Tengah. Secara lebih mendetail arah pembangunan kewilayahan dari regional Pulau Kalimantan tertampil dalam peta berikut.



Gambar II.7.2 Arah Pembangunan Pulau Kalimantan

Peta di atas menyajikan secara spasial arah kebijakan kewilayahan dalam regional Pulau Kalimantan. Pembangunan IKN berpotensi mewujudkan aglomerasi perekonomian dan pembangunan baru di Pulau ini. Kalimantan Tengah dalam peta tersebut memiliki dua peran utama yakni sebagai sentra produksi pangan terpadu dan juga kawasan pelestarian alam. Dua hal ini menjadikan Kalteng memiliki posisi maupun peran strategis yang penting bagi pengembangan Nusantara.

Kalimantan Tengah memiliki peran penyedia pangan bagi regional Kalimantan menjadikan peran strategis untuk menyediakan, mengolah, dan mendistribusikan

pangan di seluruh Kalimantan ada pada tanggung jawab Kalimantan Tengah. Selain itu, peran untuk pelestarian alam menjadikan Kalteng memiliki posisi strategis dalam perwujudan pembangunan berkelanjutan serta komitmen pembangunan rendah karbon dan berprinsip hijau yang sedang dan akan terus digaungkan di era ke depan di mana isu lingkungan menjadi isu strategis di tiap forum-forum antarnegara. Tidak menutup kemungkinan pula pelestarian lingkungan ini tidak hanya dilihat sebagai penghambat upaya pembangunan melainkan perlu dilihat peluang 'hijaunya'. Kalimantan Tengah dapat turut andil dalam skema perdagangan karbon maupun berbagai green funding lainnya untuk dapat menjaga kelestarian alamnya dan memacu perekonomiannya, Dengan kata lain, peran Kalteng ke depan dalam pembangunan Kalimantan akan menjadi strategis sebagai *safe guard* pembangunan.

II.7.2 INDIKASI KINERJA RTRW

Sinkronisasi, integrasi, sinergi, dan harmonisasi/penyelarasan antara RTRW dengan RPJPD harus dilakukan. Sehingga penting untuk mencermati dokumen RTRW yang berlaku di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai acuan untuk penyusunan RPJPD. Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023-2043. RTRW Provinsi Kalimantan Tengah 2023-2043 memiliki tujuan penataan ruang wilayah guna mewujudkan pembangunan daerah.

Tabel II.7.1 Strategi Penataan Ruang RTRW Kalteng 2023-2043

Kebijakan	Strategi Penataan Ruang
Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara PKN, PKW, dan PKL b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada c. mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif serta berdaya dukung terhadap pengembangan potensi provinsi
Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan prasarana transportasi dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi antarmoda baik darat, laut maupun udara b. mendorong pengembangan prasarana utama untuk menjangkau kawasan-kawasan terpencil c. meningkatkan pengembangan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan sistem penyediaan tenaga listrik ke seluruh pusat kegiatan dan kawasan permukiman d. meningkatkan pengembangan akses telekomunikasi ke seluruh pusat kegiatan dan kawasan permukiman

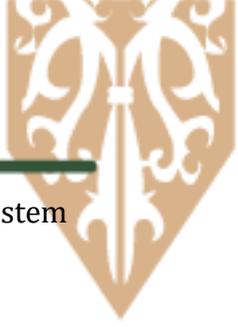
Kebijakan	Strategi Penataan Ruang
	<ul style="list-style-type: none"> e. mengembangkan jaringan prasarana air bersih untuk kawasan permukiman; f. mengembangkan sistem prasarana persampahan pada kawasan perkotaan.
<p>Perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri dalam rangka mendukung pengembangan pertanian</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan kawasan yang memiliki potensi agribisnis dan agroindustri b. mengembangkan jaringan prasarana jalan dan moda transportasi lainnya yang mendukung pengembangan kawasan agribisnis dan agroindustri serata minapolitan atau sentra produksi perikanan c. mengembangkan sarana pengolahan hasil pertanian d. meningkatkan jaringan prasarana air bersih pada kawasan agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan e. meningkatkan jaringan prasarana energi untuk mendukung kawasan agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan f. mengembangkan jaringan distribusi pemasaran hasil agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan g. mengembangkan pelabuhan laut yang menunjang distribusi hasil pertanian h. mengembangkan kawasan andalan laut serta kawasan pantai yang berpotensi untuk pengembangan perikanan tambak sebagai sentra produksi perikanan
<p>Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan kawasan pertanian dalam rangka mendukung lumbung pangan b. menetapkan kawasan yang berpotensi sebagai lumbung pangan c. mengembangkan jaringan prasarana jalan dan moda transportasi lainnya yang mendukung pengembangan kawasan lumbung pangan d. mengembangkan sarana pengolahan hasil pertanian e. mengalokasikan ruang untuk pengembangan gudang/depo pangan f. meningkatkan jaringan prasarana pengairan pada kawasan pertanian g. mengembangkan jaringan distribusi pemasaran hasil pertanian
<p>Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan kawasan pembangkit listrik untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energi b. meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energi c. menetapkan lokasi pembangkit listrik pada kawasan yang sesuai dengan potensi energi yang ada dan tidak berada pada kawasan rawan bencana dan konservasi d. merencanakan dan menetapkan jalur transmisi dan distribusi dari pusat pembangkit listrik ke pengguna e. mengembangkan jaringan prasarana yang mendukung pengembangan kawasan pembangkit listrik.
<p>Pencegahan dampak negatif kegiatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi wilayah



Kebijakan	Strategi Penataan Ruang
<p>ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi</p>	<ul style="list-style-type: none"> b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertanian dan energi c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menetralsir, menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan terhambatnya perwujudan pembangunan yang berkelanjutan e. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya antisipatif adaptasi bencana di kawasan rawan bencana alam.
<p>Pengembangan potensi berkembang melalui penetapan kawasan strategis provinsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan lokasi-lokasi kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, dan teknologi b. meningkatkan prasarana dan sarana pada kawasan strategis provinsi c. meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi budaya pada kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan budaya d. menumbuhkembangkan nilai budaya lokal yang luhur dalam kehidupan masyarakat melalui pelestarian budaya loka; e. melestarikan seni dan budaya Dayak seperti musik, tarian, lagu, upacara adat, seni kerajinan dan olahraga tradisonal f. menetapkan kawasan strategis provinsi yang berfungsi lindung g. menegaskan dan merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang mengalami penurunan kualitas lingkungan h. mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan.
<p>Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan c. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif didalam dan sekitar Kawasan d. memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

Dokumen RTRW Kalimantan Tengah meliputi rencana struktur ruang yang mengatur tentang sistem pusat permukiman (sistem perkotaan dan pedesaan) yang meliputi pengembangan PKN di Palangkaraya; pengembangan dan peningkatan PKW di Perkotaan Sampit, Kuala Kapuas, Pangkalan Bun, Muara Teweh, dan Buntok; serta pengembangan PKL. Struktur ruang juga meliputi rencana mendorong perwujudan





sistem transportasi provinsi, pemanfaatan sumber daya air, dan perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Sedangkan rencana pola ruang mengatur tentang kawasan lindung dan kawasan budidaya di Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun upaya yang dilakukan dalam perwujudan kawasan lindung adalah dengan rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan lindung, pengembangan pengelolaan kawasan konservasi, rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS). Sedangkan, untuk perwujudan pengembangan kawasan budi daya adalah dengan pengembangan Kawasan Andalan Sektor Kehutanan, sektor pertanian dan perkebunan, sektor perikanan dan kelautan, sektor ekonomi perdagangan dan jasa,

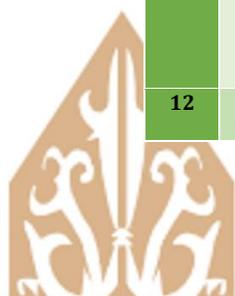
bagian terakhir adalah perwujudan pengembangan kawasan strategis provinsi. Adapun sasaran utama dari pengembangan kawasan strategis adalah dengan rehabilitasi dan mengembangkan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut pandang pertahanan keamanan, pertumbuhan ekonomi, fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, dan sosial budaya. Secara lebih mendetail sasaran utama dan pembagian kewilayahan terdapat pada tabel berikut.





Tabel II.7.2 Sasaran Program RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035

NO	SASARAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2025)	III (2025-2030)	IV (2030-2035)
A Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)								
A1 PKN Palangkaraya								
1	Pembangunan Prasarana Air Baku yang mendukung fungsi Palangkaraya sebagai PKN	Palangkaraya	APBN &/ APBD	Dinas PU	V	V		
2	Peningkatan Bandara Cilik Riwut sebagai bandara pengumpul skala tersier	Palangkaraya	APBN &/ APB	Dis Hub, Dis	V	V		
3	Pembangunan Jalan Lingkar Luar Kota Palangkaraya	Palangkaraya	APBN &/ APBD	Dinas PU	V	V		
4	Pembangunan Terminal Tipe A sebagai simpul jaringan jalan lintas Kalimantan posos selatan	Palangkaraya	APBN &/ APBD	Dis Hub	V			
5	Membangun kawasan industri dan jasa (perdagangan) yang mendorong sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional yang berorientasi pada upaya mendorong perkembangan sektor produksi wilayah seperti perkebunan kelapa sawit, karet, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, agroindustri, pertambangan.	Palangkaraya	APBN &/APBDS &/wasta &/ BLN	Dis Perindag, Dis Tanak	V	V	V	
6	Membangun pusat promosi investasi nasional.	Palangkaraya	APBN &/ APBD &/ Swasta	Dis PU, BPMD	V			
8	Memantapkan peran Palangkaraya sebagai pusat koleksi dan distribusi bagian tengah Kalimantan menuju pasar nasional dan internasional.	Palangkaraya	APBN &/ APBD	Dis Perindag, Dis PU, Dis Bun, Dis Tanak, Dis Hub	V	V	V	
9	Membangun jaringan prasarana dan sarana berbasis sungai (waterfront city).	Palangkaraya	APBN &/ APBDS &/ wasta	Dis PU, PDAM, Dis Budpar	V	V	V	
10	Peningkatan fungsi jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKN Palangkaraya dengan PKL Kuala Kurun dan PKL Buntok-Muara Teweh-Puruk Cahu.	Palangkaraya	APBN &/ APBD	Dis PU	V	V		
11	Membangun stasiun kelas besar sebagai simpul jaringan jalur kereta api yang terhubung dengan Bandar Udara Cilik Riwut untuk mengembangkan PKN Banjarmasin, PKW Kapuas, Pulang Pisau, Buntok, Muara Teweh, Pangkalan Bun, Sampit, PKL Kuala Kurun, dan Kasongan.	Palangkaraya	APBN &/ APBDS &/ wasta &/ BLN	Dis Hub	V	V	V	V
12	Pemantapan fungsi konservasi TN Sebangau, CA Bukit Tangkiling, Tahura Arboretum Nyaru Menteng.	Palangkaraya	APBN &/ APBD	Dis PU, Dis Hut	V	V		



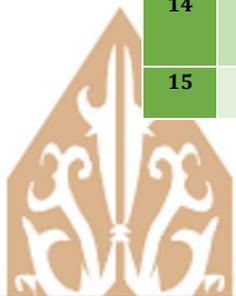


NO	SASARAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2025)	III (2025-2030)	IV (2030-2035)
13	Pembangunan sistem mitigasi bencana banjir	Palangkaraya	APBN &/ APBD	Badan Penanggulangan Bencana, BMKG	V	V		
14	Pembangunan Jaringan Drainase Primer dan Saluran tertutup untuk utilitas dalam Kota Palangkaraya	Palangkaraya	APBN &/ APBD	Dis PU	V			
15	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih yang bersumber dari jaringan air baku WS Kahayan	Palangkaraya	APBN &/ APBD	Dis PU	V	V		
16	Pembangunan PLTU Palangkaraya untuk melayani sistem perkotaan dan kawasan yang berada di sekitar PKN Palangkaraya yang terintegrasi dengan sistem transmisi tenaga listrik Kalimantan Tengah.	Prov.Kalteng	APBN &/ APBD	PT.PLN (Persero), Distamben	V	V		
17	Membangun jaringan telekomunikasi terestrial dengan pelayanan internasional dan nasional	Palangkaraya	APBN &/ APBD	TELKOM, Dis	V	V		
20	Pengembangan Palangkaraya sebagai pusat pendidikan dan pusat penelitian dan pengembangan lahan gambut bertaraf internasional	Palangkaraya	APBN &/ APBD	Dinas Pendidikan	V	V		
25	Pengembangan Palangkaraya sebagai salah satu simpul wisata dari PKW Sampit, Pangkalan Bun, Kapuas, Pulang Pisau, Buntok, Muara Teweh dan PKL Gunung Mas.	Palangkaraya	APBN &/ APBD	Dis Parw, Dis PU	V	V	V	
26	Menyiapkan, membangun prasarana dan sarana dasar air minum, penyehatan lingkungan permukiman penataan bangunan dan lingkungan, perumahan dan permukiman.	Palangkaraya	APBN &/ APBD Swasta	Dis PU, Dis Kes	V	V		
B. Pengembangan dan Peningkatan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)								
B1 PKW Sampit								
1	Membangun jaringan prasarana dan sarana berbasis sungai (waterfront city).	Kotawaringin Timur	APBN &/ APBD Swasta	Dis PU, PDAM, Dis Budpar	V	V		
2	Mengembangkan agroindustri perkebunan terutama komoditas kelapa sawit, kelapa dalam, dan karet sebagai pendorong pertumbuhan wilayah dengan memanfaatkan keberadaan PKW Pangkalan Bun PKL Seruyan dan Kasongan.	Kotawaringin Timur	APBN &/ APBD Swasta	Dis Bun, BLH	V	V	V	V
3	Mengembangkan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan perikanan tangkap sebagai pendorong pertumbuhan wilayah dengan memanfaatkan keberadaan PKW Pangkalan Bun, PKL Seruyan dan Kasongan	Kotawaringin Timur	APBN &/ APBD Swasta	Dis Tanak, BLH, Dis Perikanan, DKP	V	V	V	V





NO	SASARAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2025)	III (2025-2030)	IV (2030-2035)
4	Mengembangkan pertambangan (batuan beku, bijih besi, kaolin, batubara, zircon) sebagai pendorong pertumbuhan wilayah dengan memanfaatkan keberadaan PKW Pangkalan Bun PKL Seruyan dan Kasongan	Kotawaringin Timur	APBN &/ APBD Swasta	Dis Tamben, BLH	V	V	V	V
5	Meningkatkan aksesibilitas melalui peningkatan jaringan jalan arteri primer (Trans Kalimantan poros selatan) serta pembangunan jalan dari dan ke sentra produksi di PKW Sampit dan sekitarnya.	Kotawaringin Timur	APBN &/ APBD	Dis PU	V	V		
6	Membangun stasiun kelas menengah sebagai simpul jaringan jalur kereta api (Tumbang Samba – Pelantaran – Sampit – Bagendang – Ujung Pandaran – Kuala Pembuang Kuala Kurun - Tumbang Samba - Sampit - Bagendang - Kuala Pembuang - Teluk Segintung) untuk mengembangkan PKW Pangkalan Bun PKL Seruyan dan Kasongan.	Kotawaringin Timur	APBN &/ APBD Swasta	Dis Hub, Dis PU	V	V	V	V
7	Meningkatkan kapasitas, kualitas, dan keterpaduan pelayanan sistem infrastruktur perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, limbah, drainase, RTH) berskala regional.	Kotawaringin Timur	APBN &/ APBD Swasta	Dis PU, Dis Tata Kota	V	V		
8	Pembangunan PLTU Sampit untuk melayani sistem perkotaan dan kawasan yang berada di sekitar PKW Sampit yang terintegrasi dengan sistem transmisi tenaga listrik Kalimantan Tengah.	Kotawaringin Timur	APBN &/ APBD Swasta	PT.PLN(Persero) / Distamben	V	V		
9	Pembangunan Gardu Induk Sampit	Kotawaringin Timur	APBN &/ APBD	PT.PLN(Persero) / Distamben	V			
10	Menyiapkan dan menetapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) untuk setiap alokasi ruang.	Kotawaringin Timur	APBN &/ APBD	Dis PU	V			
11	Menyiapkan, membangun prasarana dan sarana dasar air minum, penyehatan lingkungan permukiman,	Kotawaringin Timur	APBN &/ APBD	Dis PU, Dis Kes, BLH	V	V		
12	Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan perkotaan.	Kotawaringin Timur	APBN &/ APBD Swasta	Dis PU, Dis Kes	V	V		
13	Pengembangan Bandara H. Asan sebagai pendukung fungsi PKW Sampit, PKW Pangkalan Bun dan PKL Kasongan dan Seruyan	Kotawaringin Timur	APBN &/ APBD	Dishub, Dis	V	V	V	
14	Pengembangan pendidikan sebagai pendukung fungsi PKW Sampit dan mendorong pengembangan PKW Pangkalan Bun, PKL Kasongan dan Seruyan.	Kotawaringin Timur	APBN &/ APBD	Dinas	V	V		
15	Pengembangan terminal tipe B sebagai simpul jalan arteri primer jalan trans Kalimantan poros selatan	Kotawaringin Timur	APBN &/ APBD	Dis Hub.	V	V		



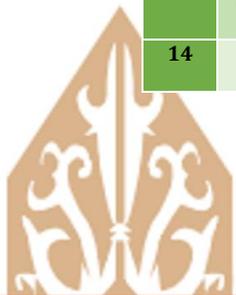


NO	SASARAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2025)	III (2025-2030)	IV (2030-2035)
16	Pembangunan terminal barang sebagai simpul jalan arteri primer jalan trans Kalimantan poros selatan	Kotawaringin Timur	APBN &/ APBD	Dis Hub.	V	V		
17	Meningkatkan kualitas pelayanan jasa keuangan dan pemerintahan yang mendukung kegiatan ekspor-impor.	Kotawaringin Timur	APBN &/ APBD Swasta	Perbankan	V	V		
18	Pemantapan dan pengembangan kawasan konservasi dan lindung.	Kotawaringin Timur	APBN &/ APBD &/ swasta &/ BLN	Dinas Kehutanan	V	V		
19	Pengembangan potensi wisata alam dan wisata laut	Kotawaringin Timur	APBN &/ APBD &/ swasta &/ BLN	Dis PU, Dishut, Dis	V	V	V	
20	Pembangunan sistem mitigasi bencana alam terutama banjir dan kebakaran lahan dan hutan	Kotawaringin Timur	APBDP, APBD	Badan Penanggulangan	V	V		
21	Peningkatan Pelabuhan Sampit dan Bagendang	Kotawaringin Timur	APBN &/ APBD &/ swasta	Dishub, Dis	V	V		
22	Pembangunan Pelabuhan baru di Ujung Pandaran	Kotawaringin Timur	APBN &/ APBD	Kemenhub, Dishub	V	V		
21	Peningkatan dan perluasan pelayanan Depo Pertamina	Palangkaraya	APBN &/ APBD &/ swasta	Dis Tamben, Pertamina	V	V		
B2 PKW Kuala Kapuas								
1	Membangun jaringan prasarana dan sarana berbasis sungai (waterfront city) yaitu Sungai Kapuas	Kapuas	APBN &/ APBD Swasta	Dis PU, PDAM, Dis Budpar	V	V		
2	Mengembangkan agroindustri perkebunan terutama komoditas kelapa sawit, kelapa dalam, karet dan buah-buahan sebagai pendorong pertumbuhan wilayah dengan memanfaatkan keberadaan PKN Palangkaraya PKL Pulang Pisau dan Kuala Kurun, PKW Buntok dan PKN Banjarmasin.	Kapuas	APBN &/ APBD Swasta	Dis Bun, BLH	V	V	V	V
3	Mengembangkan tanaman pangan dan holtikultura, lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B), peternakan, perikanan sebagai pendorong pertumbuhan wilayah dengan memanfaatkan keberadaan PKN Palangkaraya, PKW Buntok PKL Pulang Pisau dan PKN Banjarmasin.	Kapuas	APBN &/ APBD Swasta	Dis Tanak, BLH	V	V	V	V
4	Membangun stasiun besar sebagai simpul jaringan jalur kereta api (Palangkaraya-Pulang Pisau-Kuala Kapuas) sebagai pendorong pertumbuhan wilayah dengan memanfaatkan keberadaan PKN Palangkaraya, PKW Buntok PKL Pulang Pisau dan PKN Banjarmasin.	Kapuas	APBN &/ APBD Swasta	Dis Hub	V	V	V	V



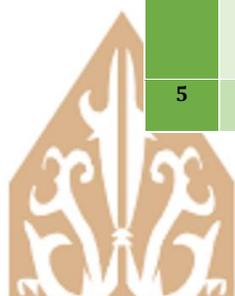


NO	SASARAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2025)	III (2025-2030)	IV (2030-2035)
5	Meningkatkan kualitas pelayanan jasa keuangan dan pemerintahan yang mendukung kegiatan ekspor-impor.	Kapuas	APBN &/ APBD &/ Swasta	Perbankan	V	V		
6	Mengembangkan jaringan transportasi sungai di Sungai Kahayan dan Sungai Kapuas untuk menghubungkan daerah hulu dengan daerah pesisir.	Kapuas	APBN &/ APBD &/ Swasta	Dis Hub	V	V		
7	Membangun pusat pengelolaan dan pengembangan lahan gambut.	Kapuas	APBN &/ APBD &/ Swasta	Dis Tanak, Universitas Palangka Raya, LSM	V	V		
8	Membangun stasiun kelas menengah sebagai simpul jaringan jalur kereta api Muara Teweh (Puruk Cahu - Bangkuang Puruk Cahu - Kuala Kurun - Palangkaraya - Pulang Pisau - Kuala Kapuas) untuk mengembangkan PKW Muara Teweh, Buntok, Kuala Kapuas, dan PKL Puruk Cahu, Tamiyang Layang, dan Pulang Pisau .	Kapuas	APBN &/ APBD &/ Swasta	Dis Hub	V	V	V	V
9	Meningkatkan kapasitas, kualitas, dan keterpaduan pelayanan sistem infrastruktur perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, limbah, drainase, RTH) berskala regional.	Kapuas	APBN &/ APBD Swasta	Dis PU, Dis Tata Kota	V	V		
10	Menyiapkan dan menetapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) untuk setiap alokasi ruang.	Kapuas	APBN &/ APBD	Dinas PU	V			
11	Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan perkotaan.	Kapuas	APBN &/ APBD Swasta	Dis PU, Dis Kes	V	V		
12	Pengembangan Bandara Iskandar sebagai pendukung fungsi PKW Sampit dan Pangkalan Bun dan PKL Sukamara, Lamandau dan Seruyan	Kapuas	APBN &/ APBD	Dis Hub, Dis PU	V	V	V	
12	Pengembangan jaringan energi dan kelistrikan yang melayani sistem perkotaan dan kawasan yang berada di sekitar PKL Kuala Kurun PKW Kapuas yang terintegrasi dengan sistem transmisi tenaga listrik Kalimantan Tengah.	Kapuas	APBN &/ APBD	PLN, Dis Tamben	V	V	V	V
13	Pengembangan pendidikan sebagai pendukung fungsi PKW Kapuas PKW Sampit dan mendorong pengembangan PKW Pangkalan Bun, PKL Kasongan dan Seruyan. PKL Pulang Pisau dan Gunung Masdan Seruyan. PKL Pulang Pisau dan Gunung Mas	Kapuas	APBN &/ APBD	Dinas Pendidikan	V	V		
14	Pembangunan terminal tipe B sebagai simpul jalan arteri primer jalan trans Kalimantan poros selatan	Kapuas	APBN &/ APBD	Dis Hub, Dis PU	V	V		



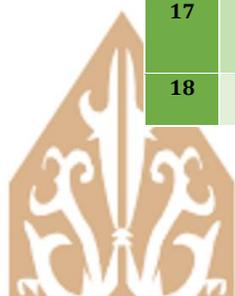


NO	SASARAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2025)	III (2025-2030)	IV (2030-2035)
15	Pembangunan terminal barang sebagai simpul jalan arteri primer jalan trans Kalimantan poros selatan	Kapuas	APBN &/ APBD	Dis Hub.	V	V		
16	Pengembangan atau pembangunan Rumah Sakit Umum tipe B untuk mendukung fungsi PKW Sampit PKW Kapuas dan sekitarnya.	Kapuas	APBN &/ APBD	Dis Kesehatan	V	V		
17	Meningkatkan kualitas pelayanan jasa keuangan dan pemerintahan yang mendukung kegiatan ekspor-impor.	Kapuas	APBN &/ APBD Swasta	Perbankan	V	V		
18	Pemantapan dan pengembangan kawasan konservasi dan lindung.	Kapuas	APBN &/ APBD	Dinas Perikanan, Dishut	V	V		
19	Pengembangan potensi wisata alam dan budaya	Kapuas	APBN &/ APBD	Dishub, Dis PU, Disbudpar, Dishut	V	V	V	
20	Pembangunan sistem mitigasi bencana alam terutama banjir dan kebakaran lahan dan hutan	Kapuas	APBN &/ APBD	Badan Penanggulangan Bencana, BMG	V	V		
22	Pembangunan Pelabuhan Batanjung	Kapuas	APBN &/ APBD	Kemenhub, Dishub	V	V		
B3 PKW Pangkalan Bun								
1	Membangun jaringan prasarana dan sarana berbasis sungai (waterfront city) yaitu Sungai Kumai	Kotawaringin Barat	APBN &/ APBD Swasta	Dis PU, PDAM, Dis Budpar	V	V		
2	Mengembangkan agroindustri perkebunan terutama komoditas kelapa sawit, kelapa dalam, lada dan karet sebagai pendorong pertumbuhan wilayah dengan memanfaatkan keberadaan PKW Sampit, PKL Seruyan dan Kasongan serta PKL Sukamara dan vNanga Bulik.	Kotawaringin Barat	APBN &/ APBD	Dis Bun, BLH	V	V	V	V
3	Mengembangkan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan perikanan tangkap sebagai pendorong pertumbuhan wilayah dengan memanfaatkan keberadaan PKW Sampit, PKL Seruyan dan Kasongan serta PKL Sukamara dan Nanga Bulik.	Kotawaringin Barat	APBN &/ APBD	Dis Tanak, BLH	V	V	V	V
4	Mengembangkan pertambangan (batuan beku, bijih besi, kaolin, batubara, zircon) sebagai pendorong pertumbuhan wilayah dengan memanfaatkan keberadaan PKW Sampit, PKL Seruyan dan Kasongan serta PKL Sukamara dan Nanga Bulik.	Kotawaringin Barat	APBN &/ APBD	Dis Tamben, BLH	V	V	V	V
5	Meningkatkan aksesibilitas melalui peningkatan jaringan jalan arteri primer (Trans Kalimantan	Kotawaringin Barat	APBN &/ APBD	Dis PU	V	V		





NO	SASARAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2025)	III (2025-2030)	IV (2030-2035)
	poros selatan) serta pembangunan jalan dari dan ke sentra produksi di PKW Sampit dan sekitarnya.							
6	Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan jaringan jalan lintas Selatan menuju PKW Sampit dan PKL Kasongan serta menuju PKL Nanga Bulik.	Kotawaringin Barat	APBN &/ APBD	Dis PU	V	V		
7	Membangun terminal tipe B yang terhubung dengan jaringan jalan antar provinsi (jalan trans Kalimantan poros Selatan).	Kotawaringin Barat	APBN &/ APBD	Dis Hub	V	V		
8	Pembangunan terminal barang sebagai simpul jalan arteri primer jalan trans Kalimantan poros selatan	Kotawaringin Barat	APBN &/ APBD	Dis Hub.	V	V		
9	Membangun stasiun kelas menengah sebagai simpul jaringan jalur kereta api (Kudangan - Kujan - Runtu Sungai Rangit -Pelabuhan Kumai Kudangan - Nanga Bulik - Kumai).	Kotawaringin Barat	APBN &/ APBD	Dis Hub	V	V	V	V
10	Memfungsikan outlet Pelabuhan Kumai sebagai pelabuhan pengumpul.	Kotawaringin Barat	APBN &/ APBD	Dis Hub, Dis	V	V		
11	Memfungsikan outlet Bandar Udara Iskandar sebagai bandara pengumpul skala tersier.	Kotawaringin Barat	APBN &/ APBD	Dis Hub, Dis	V	V		
12	Membangun pusat promosi untuk mendukung pengembangan Taman Nasional Tanjung Putting sebagai pusat kegiatan ekowisata dan pemantapan kawasan Suaka Margasatwa Lamandau dan Taman Buru	Kotawaringin Barat	APBN &/ APBD	Dis Hut, Dis	V	V		
13	Meningkatkan kapasitas, kualitas, dan keterpaduan pelayanan sistem infrastruktur perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, limbah, drainase, RTH) berskala regional.	Kotawaringin Barat	APBN &/ APBD	Dis PU, Dis Tata Kota	V	V		
14	Pembangunan PLTU Pangkalan Bun untuk melayani sistem perkotaan dan kawasan yang berada di sekitar PKW Pangkalan Bun yang terintegrasi dengan sistem transmisi tenaga listrik Kalimantan Tengah.	Kotawaringin Barat	APBN &/ APBD Swasta	PT.PLN (Persero), Distamben	V	V	V	V
15	Pembangunan Gardu Induk P.Bun	Kotawaringin Barat	APBN &/ APBD	PT.PLN(Persero), Distamben		V	V	
16	Pembangunan Depo Gas Elpiji di Kotawaringin Barat	Kotawaringin Barat	APBN &/ APBD/Swasta	Distamben Pertamina/Swasta		V		
17	Membangun jaringan air baku untuk mendukung PKW Pangkalan Bun yang pangkalan Bun sebagai PKW bersumber dari WS Jelai - Kendawangan.	Kotawaringin Barat	APBN &/ APBD	Dis PU	V	V		
18	Membangun jaringan telekomunikasi terestrial dengan pelayanan nasional.	Kotawaringin Barat	APBN &/ APBD	Dis Hub, Telkom	V	V		



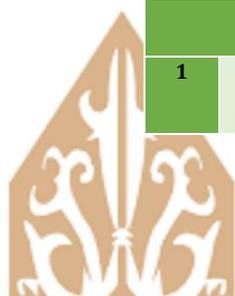


NO	SASARAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2025)	III (2025-2030)	IV (2030-2035)
19	Menyiapkan dan menetapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) untuk setiap alokasi ruang.	Kotawaringin Barat	APBN &/ APBD	Dis PU	V	V		
20	Pengembangan atau pembangunan Rumah Sakit Umum tipe B untuk mendukung fungsi PKW Pangkalan Bun dan sekitarnya.	Kotawaringin Barat	APBN &/ APBD	Dis Kesehatan	V	V		
21	Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan perkotaan.	Kotawaringin Barat	APBN &/ APBD/Swasta	Dis PU, Dis Kes	V	V		
20	Pengembangan Kawasan Pariwisata alam dan wisata laut	Kotawaringin Barat	APBN &/ APBD &/ swasta	DKP, Dis Parw	V	V		
22	Pembangunan Pelabuhan Laut Sebuai sebagai pengembangan pelabuhan Pangkalan Bun	Kotawaringin Barat	APBN &/ APBD	Kemenhub, Dishub	V	V		
23	Pembangunan Bandara baru Pangkalan Bun di desa Sebuai	Kotawaringin Barat	APBN &/ APBD	Kemenhub, Dishub	V	V		
21	Peningkatan dan perluasan pelayanan Depo Pertamina	Palangkaraya	APBN &/ APBD	Dis Tamben, Pertamina	V	V		
B4 PKW Muara Teweh								
1	Membangun jaringan prasarana dan sarana berbasis sungai (waterfront city) yaitu Sungai Barito	Barito Utara	APBN &/ APBD Swasta	Dis PU, PDAM, Dis Budpar	V	V		
2	Mengembangkan agroindustri perkebunan terutama komoditas kelapa sawit dan karet sebagai pendorong pertumbuhan wilayah dengan memanfaatkan keberadaan PKW Buntok dan PKL Tamiang Layang dan Puruk Cahu, dan PKN Banjarmasin	Barito Utara	APBN &/ APBD Swasta	Dis Bun, BLH	V	V	V	V
3	Mengembangkan pertanian tanaman pangan dan holtikultura sebagai pendorong pertumbuhan wilayah dengan memanfaatkan keberadaan PKW Buntok dan PKL Tamiang Layang dan Puruk Cahu, dan PKN Banjarmasin	Barito Utara	APBN &/ APBD Swasta	Dis Tanak, BLH	V	V	V	V
4	Mengembangkan pertambangan (emas, bijih besi, kaolin, batubara, zircon) dengan memanfaatkan keberadaan PKW Buntok dan PKL Tamiang Layang dan Puruk Cahu, dan PKN Banjarmasin	Barito Utara	APBN &/ APBD Swasta	Dis Tamben, BLH	V	V	V	V
5	Meningkatkan aksesibilitas melalui peningkatan jaringan jalan arteri primer (Trans Kalimantan poros Tengah) serta pembangunan jalan dari dan ke sentr produksi di PKW Muara Teweh dan sekitarnya.	Barito Utara	APBN &/ APBD	Dis PU	V	V		



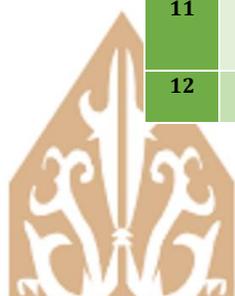


NO	SASARAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2025)	III (2025-2030)	IV (2030-2035)
6	Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan jaringan jalan lintas Tengah menuju PKL Puruk Cahu, Kuala Kurun, PKW Pangkalan Bun.	Barito Utara	APBN &/ APBD	Dis PU	V	V		
7	Membangun terminal tipe A yang terhubung dengan jaringan jalan antar provinsi (jalan lintas Tengah).	Barito Utara	APBN &/ APBD	Dis Hub	V			
8	Membangun stasiun kelas menengah sebagai simpul jaringan jalur kereta api Muara Teweh (Puruk Cahu- Bangkuang Puruk Cahu - Bangkuang - Batanjung) untuk mengembangkan PKW Muara Teweh, Buntok Kuala Kapuas, dan PKL Puruk Cahu dan Tamian Layang.	Barito Utara	APBN &/ APBD Swasta	Dis Hub	V	V	V	V
9	Meningkatkan kapasitas, kualitas, dan keterpaduan pelayanan sistem infrastruktur perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, limbah, drainase, RTH) berskala regional.	Barito Utara	APBN &/ APBD Swasta	Dis PU, Dis Tata Kota	V	V		
10	Pembangunan PLTGU di Muara Tewe dengan sistem transmisi tenaga listrik Kalimantan Tengah yang berada di sekitar PKW Muara Teweh yang terintegrasi	Barito Utara	APBN/ APBD/Swasta	PT.PLN(Persero) /Distamben/Swasta	V			
11	Pembangunan Gardu Induk Muara Teweh	Barito Utara	APBN	PT.PLN (Persero)	V			
12	Membangun jaringan air baku untuk mendukung fungsi PKW Muara Teweh yang bersumber dari WS Barito.	Barito Utara	APBN &/ APBD	Dis PU	V	V		
13	Membangun jaringan telekomunikasi terestrial dengan pelayanan nasional.	Barito Utara	APBN &/ APBD	Dis Hub, Telkom	V	V		
14	Menyiapkan dan menetapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) untuk setiap alokasi ruang.	Barito Utara	APBN &/ APBD	Dis PU	V			
15	Pengembangan atau pembangunan Rumah Sakit Umum tipe B untuk mendukung fungsi PKW Muara Teweh	Barito Utara	APBN &/ APBD	Dis Kes	V	V		
16	Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan perkotaan.	Barito Utara	APBN &/ APBD Swasta	Dis PU, Dis Kes	V	V		
17	Pengembangan Kawasan Pariwisata alam dan wisata laut	Barito Utara	APBN &/ APBD	Dishut, Dis	V	V		
18	Pembangunan Bandara baru Muara Teweh di desa Trinsing	Barito Utara	APBN &/ APBD	Kemenhub,	V	V		
B5 PKW Buntok								
1	Membangun jaringan prasarana dan sarana berbasis sungai (waterfront city) yaitu Sungai Barito Mengembangkan agroindustri perkebunan terutama	Barito Selatan	APBN &/ APBD Swasta	Dis PU, PDAM, Dis Budpar	V	V	V	V



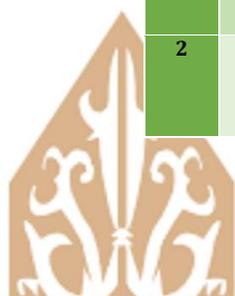


NO	SASARAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2025)	III (2025-2030)	IV (2030-2035)
	komoditas kelapa sawit dan karet sebagai pendorong pertumbuhan wilayah dengan memanfaatkan							
2	keberadaan PKW Muara Teweh dan PKL Tamiang Layang dan Puruk Cahu, dan PKN Banjarmasin	Barito Selatan	APBN &/ APBD Swasta	Dis Bun, BLH	V	V	V	V
3	Mengembangkan pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagai pendorong pertumbuhan wilayah dengan memanfaatkan keberadaan PK Muara Teweh dan PKL Tamiang Layang dan Puruk Cahu, dan PKN Banjarmasin	Barito Selatan	APBN &/ APBD Swasta	Dis Tanak, BLH	V	V	V	V
4	Mengembangkan pertambangan (emas, bijih besi, kaolin, batubara, zircon) sebagai pendorong pertumbuhan wilayah dengan memanfaatkan keberadaan PKW Muara Teweh dan PKL Tamiang Layang dan Puruk Cahu, dan PKN Banjarmasin	Barito Selatan	APBN &/ APBD Swasta	Dis Tamben, BLH	V	V	V	V
5	Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan jaringan jalan kolektor primer menuju PKW Muara Teweh, PKN Palangkaraya, PKW Kuala Kapuas, PKL Tamiang Layang dan PKN Banjarmasin.	Barito Selatan	APBN &/ APBD	Dis PU	V	V		
6	Pembangunan terminal tipe B yang terhubung dengan jaringan jalan kolektor primer PKW Muara Teweh dan PKN Palangkaraya serta PKL Tamiang Layang dan PKN Banjarmasin.	Barito Selatan	APBN &/ APBD	Dis Hub	V	V		
7	Membangun stasiun kelas menengah sebagai simpul jaringan jalur kereta api Puruk Cahu-Bangkuang-Batanjung untuk mengembangkan PKW Muara Teweh, Kuala Kapuas, dan PKL Puruk Cahu dan Tamiang Layang.	Barito Selatan	APBN &/ APBD Swasta	Dis Hub	V	V	V	V
8	Meningkatkan kapasitas, kualitas, dan keterpaduan pelayanan sistem infrastruktur perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, limbah, drainase, RTH) berskala regional.	Barito Selatan	APBN &/ APBD Swasta	Dis PU, Dis Tata Kota	V	V		
9	Pembangunan PLTU Buntok yang berada di sekitar PKW Buntok yang terintegrasi dengan sistem transmisi tenaga listrik Kalimantan Tengah	Barito Selatan	APBN	PT.PLN(Persero)	V			
10	Pembangunan Gardu Induk Buntok	Barito Selatan	APBN &/ APBD	PT.PLN(Persero), Distamben	V	V		
11	Pembangunan Depo BBM di Buntok	Barito Selatan	APBN &/APBD/Swasta	Pertamina/ Distamben/Swasta	V	V	V	V
12	Membangun jaringan air baku untuk mendukung fungsi PKW Buntok bersumber dari WS Barito.	Barito Selatan	APBN &/ APBD		V	V		





NO	SASARAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2025)	III (2025-2030)	IV (2030-2035)
13	Membangun jaringan telekomunikasi terestrial dengan pelayanan nasional.	Barito Selatan	APBN &/ APBD		V	V		
14	Menyiapkan dan menetapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) untuk setiap alokasi ruang.	Barito Selatan	APBN &/ APBD		V			
15	Pengembangan atau pembangunan Rumah Sakit Umum tipe B untuk mendukung fungsi PKW Muara Teweh	Barito Selatan	APBN &/ APBD		V	V		
16	Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan perkotaan.	Barito Selatan	APBN &/ APBD Swasta		V	V		
17	Pengembangan Kawasan Pariwisata alam	Barito Selatan	APBN &/ APBD Swasta		V	V		
18	Peningkatan dan perluasan pelayanan Depo Pertamina	Palangkaraya Barito Selatan	APBN &/ APBD		V	V		
10	Membangun jaringan telekomunikasi terestrial dengan pelayanan regional.	Pulang Pisau	APBN &/ APBD		V	V		
11	Menyiapkan dan menetapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) untuk setiap alokasi ruang.	Pulang Pisau	APBN &/ APBD		V			
12	Pengembangan atau pembangunan Rumah Sakit Umum tipe B untuk mendukung fungsi PKL Pulang Pisau dan sekitarnya	Pulang Pisau	APBN &/ APBD		V	V		
13	Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan perkotaan.	Pulang Pisau	APBN &/ APBD Swasta	Dis PU, Dis Kes	V	V		
14	Peningkatan dan perluasan pelayanan Depo Pertamina	Pulang Pisau	APBN &/ APBD	Dis Tamben, Pertamina	V	V		
15	Pembangunan Pelabuhan Baru di Tanjung Perawan	Pulang Pisau	APBN &/ APBD	Kemenhub dan Dishub	V	V		
D. Mendorong Perwujudan Sistem Transportasi Provinsi								
1	Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan arteri primer Jalan Lintas Kalimantan poros Selatan ruas Batas Kalimantan Barat – Runtu – Sampit – Kasongan – Palangkaraya – Pulang Pisau – Kuala Kapuas – Batas Kalimantan Selatan (814 km); dan Jl. Adonis Samad-Palangkaraya (6 Km).	Kapuas, Pulang Pisau, Palangkaraya, Katingan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Lamandau	APBN &/ APBD	Kemen PU, Dis PU	V	V	V	V
2	Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan kolektor primer (K1); jalan Penghubung Antar Jalan Lintas Kalimantan, dan jalan Lainnya.	Barito Utara, Murung Raya, Gunung Mas, Katingan,	APBN &/ APBD	Kemen PU, Dis PU	V	V	V	V





NO	SASARAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2025)	III (2025-2030)	IV (2030-2035)
		Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Barito Selatan, Barito Timur.						
3	Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan kolektor primer K2; jalan Penghubung Antar Jalan Lintas Kalimantan, dan jalan Lainnya.	Palangkaraya, Barito Selatan, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, Kapuas, Lamandau, Seruyan, Kotawaringin Barat, Pulang Pisau	APBN &/ APBD	Dis PU	V	V	V	V
4	Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan kolektor primer K3.	Tersebar di 13 Kabupaten dan 1 Kota	APBN &/ APBD	Dis PU	V	V	V	V
5	Peningkatan struktur, kapasitas dan pemeliharaan jalan dan jembatan kolektor primer Jalan Strategis Nasional	Tersebar di 13 Kabupaten dan 1 Kota	APBN &/ APBD	Kemen PU, Dis PU	V	V	V	V
6	Pembangunan : 1) Terminal penumpang Tipe A di Palangkaraya, Ampah, Mua Layang, Puruk Cahu dan Kuala Kapuas. 2) Terminal penumpang Tipe B di Kota Sukamara, Sampit, Kuala Pemuang, Kasongan, Pulang Pisau, Kuala Kurun, Buntok, Tamiyang	Tersebar di 13 Kabupaten dan 1 Kota	APBN &/ APBD &/ Swasta	Kemen Hub, Dis Hub,	V	V	V	V
7	Pembangunan Terminal barang yaitu di Kumai, Sampit dan Kuala Kapuas.	Tersebar di 3 Kabupaten	APBN &/ APBD &/ Swasta	Kemen Hub, Dis Hub,	V	V	V	V
8	Pembangunan dan peningkatan Jembatan Timbang di :Anjir serapat Km 12 di Kapuas, Pasar Panas di Barito Timur, Simpang Runtu di Kotawaringin Barat, Sampit di Kotawaringin Timur, Simpang Kandui di Barito Utara, Bukit Liti di Pulang Pisau, Lamandau di Lamandau, ruas jalan Bahaur - Pulang Pisau di Pulang Pisau, ruas jalan Sampit - Kuala Pemuang.	Tersebar di 13 Kabupaten dan 1 Kota	APBN &/ APBD &/ Swasta	Kemen Hub, Dis Hub,	V	V	V	V
9	Peningkatan Jembatan Timbang : Anjir serapat Km 12 di Kapuas, Jembatan Timbang Pasar Panas di Barito Timur. Pembangunan Jembatan Timbang : Simpang Runtu di Kotawaringin Barat, Jembatan Timbang Sampit di Kotawaringin Timur, Jembatan Timbang Simpang Kandui di Barito Utara, Jembatan	Tersebar di 13 Kabupaten dan 1 Kota	APBN &/ APBD &/ Swasta	Kemen Hub, Dis Hub,	V	V	V	V





NO	SASARAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2025)	III (2025-2030)	IV (2030-2035)
	Timbang Bukit Liti di Pulang Pisau, Jembatan Timbang Lamandau di Lamandau, Jembatan Timbang ruas jalan Bahaur - Pulang Pisau di Pulang Pisau, Jembatan Timbang ruas jalan Sampit - Kuala Pembuang.							
10	Pengembangan kapasitas penyeberangan lintas antar provinsi dan eksternal wilayah Kalimantan Tengah: Kumai - Kendal di Jawa Tengah, Kumai - Paciran di Jawa Timur, Bahaur - Paciran di Jawa Timur, Bahaur - Kendal di Jawa Tengah	Kotawaringin Barat, Pulang Pisau		APBN &/ APBD	V	V		
11	Pembangunan Jalur kereta api 1) Puruk Cahu - Muara Teweh - Buntok - Mengkatip - Kuala Kapuas - Batanjung, 2) Puruk Cahu - Kuala Kurun - Rabambang - Palangkaraya - Pulang Pisau, 3) Rabambang - Tumbang Samba - Sampit - Kuala Pembuang - Teluk Segintung, 4) Tumbang Samba - Rantau Pulut - Nanga Bulik - Pangkalan Bun - Kumai. 1) Puruk Cahu - Bangkuang - Batanjung, 2) Puruk Cahu - Kuala Kurun - Palangkaraya - Pulang Pisau - Kuala Kapuas, 3) Kuala Kurun - Tumbang Samba - Sampit - Bagendang - Kuala Pembuang - Teluk Segintung, 4) Tumbang Samba - Rantau Pulut - Nanga Bulik - Pangkalan Bun - Kumai, 5) Kudangan - Nanga Bulik - Kumai Pembangunan simpul-simpul utama jaringan jalur kereta api di PKN, PKW, dan PKL Kalimantan Tengah.	Tersebar di 13 Kabupaten dan 1 Kota		APBN &/ APBD &/ Swasta	V	V	V	V
12	Pembangunan simpul-simpul utama jaringan jalur kereta api di PKN, PKW, dan PKL Kalimantan Tengah.	Tersebar di 13 Kabupaten dan 1 Kota	APBN &/APBD&/Swasta	Dis Hub, Kemen Hub, PT. KAI, Bappenas	V	V	V	V
13	Pembangunan dan peningkatan kapasitas Pelabuhan Laut (PL) di Kalimantan Tengah: PL Kumai, PL Bun, PL Sukamara, PL Teluk Segintung, PL Batanjung, PL Sebauai, PL Ujung Pandaran, PL Pulau Damar dan PL Tanjung Perawan	Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Katingan, Sukamara, Seruyan, Kapuas, Pulang Pisau.	APBN &/ APBDP	Kemen Hub, Dis Hub,	V	V		
14	Pembangunan dan peningkatan kapasitas Dermaga Sungai di Kalimantan Tengah.	Tersebar di 13 Kabupaten dan 1 Kota	APBN &/ APBD	Kemen Hub, Dis Hub	V	V	V	V





NO	SASARAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2025)	III (2025-2030)	IV (2030-2035)
15	Pengumpul Skala Tersier : Bandara Tjilik Riwut di Palangkaraya (termasuk sebagai Embarkasi Haji Penuh) dan Bandara Iskandar di Pangkalan Bun.	Palangkaraya dan Kotawaringin Barat.	APBN &/ APBD	Dis Hub	V	V	V	V
16	Pembangunan dan peningkatan Pengumpan: Haji Asan di Kab. Kotawaringin Timur, Bandara Kuala Pembuang di Kab. Seruyan, Bandara Tumbang Samba di Kab. Katingan, Bandara Kuala Kurun di Kab. Gunung Mas, Bandara Dirung di Kab. Murung Raya, Bandara Beringin di Kab. Barito Utara, Bandara Sanggu di Kab. Barito Selatan.	Kotawaringin Timur, Seruyan, Katingan, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan.	APBN &/ APBD	Dis Hub	V	V	V	V
17	Pembangunan Bandara Baru meliputi : Bandara Internasional di Km. 70 Jalan Palangkaraya - Kasongan, Bandara di desa Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat, Bandara di desa Trinsing di Barito Utara, Bandara di desa Bahitom di Murung Raya, Bandara di desa Guci di Lamandau, Bandara di desa Kandriss Barito Timur dan Bandara di desa Natai Sedawak di Kabupaten Sukamara.	Katingan, Barito Utara, Murung Raya, Kotawaringin Barat, Lamandau, Barito Timur.	APBN &/ APBD	Kemen Hub, Dis Hub	V	V	V	V
18	Pembangunan simpul-simpul utama jaringan jalur kereta api di PKN, PKW, dan PKL Kalimantan Tengah.	Tersebar di 13 Kabupaten dan 1 Kota	APBN &/ APBDP &/	Dis Hub, Kemen Hub, Swasta, PT. KAI , Bappenas	V	V	V	V
E1 Konservasi Sumber Daya Air								
1	Pelestarian fungsi lingkungan sempadan Danau Sembuluh di Kabupaten Seruyan, Danau Malawen di Kab. Barito Selatan , dan Danau Pamait di Kab. Seruyan.	Kab. Seruyan, Barito Selatan, Seruyan.	APBN &/ APBD	Dis PU, BLH, Dishut	V	V	V	V
2	Pelestarian fungsi lingkungan sempadan sungai, waduk/ bendungan, mata air, dan daerah rawa serta sumber daya air lainnya	di 13 Kabupaten dan 1 Kota	APBN &/ APBD	Dis PU, BLH, Dishut	V	V	V	V
3	Pelestarian fungsi lingkungan sempadan pantai dan hutan mangrov	di 13 Kabupaten dan 1 Kota	APBN &/ APBD	Dis PU, BLH, Dishut, DKP	V	V	V	V
4	Pengendalian kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan atau penurunan kualitas sempadan Danau Sembuluh di Kabupaten Seruyan, Danau Malawen di Kab. Barito Selatan, dan Danau Pamait di Kab. Seruyan.	s sempadan Danau Sembuluh di Kabupaten Seruyan, Danau Malawen di Kab. Barito Selatan, dan Danau Pamait di Kab. Seruyan. di 13	APBN &/ APBD	Dis PU, BLH, Dishut	V	V	V	V



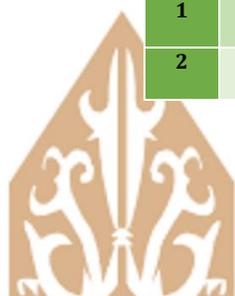


NO	SASARAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2025)	III (2025-2030)	IV (2030-2035)
		Kabupaten dan 1 Kota						
5	Pengendalian kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan atau penurunan kualitas sempadan sungai, waduk/bendungan, mata air, dan daerah rawa serta sumber daya air lainnya	di 13 Kabupaten dan 1 Kota	APBN &/ APBD	Dis PU, BLH, Dishut	V	V	V	V
6	Pengendalian kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan atau penurunan kualitas sempadan pantai dan hutan mangrove	di 13 Kabupaten dan 1 Kota	APBN &/ APBD	Dis PU, BLH, Dishut, DK	V	V	V	V
E2 Pendayagunaan Sumber Daya Air								
1	Pembangunan dan Pengembangan jaringan irigasi pertanian basah (swah) akibat perkembangan dan pertumbuhan Kota - kota	Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Barito Timur, Katingan, Kotawaringin Timur, Seruyan.	APBN &/ APBD	Dis PU, Dis Tanak	V	V	V	V
2	Pengembangan kawasan agroindustri yang melayani pengembangan jagung, Kedelai, Ubi Kayu	Kabupaten Kapuas, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Pulang Pisau	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Swasta DN/LN	Dis Tanak, Dis PU	V	V	V	V
3	Pengembangan kawasan agroindustri yang melayani pengembangan Padi	Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Barito Timur, Katingan, Kotawaringin Timur, Seruyan,	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Swasta DN/LN	Dis Tanak, Dis PU	V	V	V	V
4	Pengembangan alur pelayanan transportasi sungai	di 13 Kabupaten dan 1 Kota	APBDP dan APBD Kab/ Kota	Dis PU, Dis Hub	V	V	V	V
5	Pengembangan kawasan sektor pertanian tanaman pangan	di 13 Kabupaten	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Swasta DN/LN.	Dis Tanak, Dis PU	V	V	V	V
6	Pengembangan Kawasan Hortikultura	Kabupaten Katingan, Barito Utara, Murung Raya, Barito Selatan, Seruyan, Kotawaringin Barat	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Swasta DN/LN.	Dis Tanak, Dis PU	V	V	V	V





NO	SASARAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2025)	III (2025-2030)	IV (2030-2035)
7	Pengembangan kawasan lahan rawa gambut	Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Barito Selatan dan Kota Palangkaraya.	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Swasta DN/LN.	Dis Tanak, Dis PU	V	V	V	V
8	Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan Daerah Irigasi	Kotawaringin Barat, Lamandau, Kotawaringin Timur, Pulang Pisau, Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Murung Raya, Gunung Mas.	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Swasta DN/LN.	Dis Tanak, Dis PU	V	V	V	V
9	Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan Daerah Rawa	Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara, Murung Raya, Katingan, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Swasta DN/LN.	Dinas Pertanian dan Peternakan	V	V	V	V
11	Membangun jaringan prasarana dan sarana berbasis sungai (waterfront city)	di 13 Kabupaten dan 1 Kota	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Swasta DN/LN	Dis PU, PDAM, Dis Budpar, Dis Hub	V	V	V	V
12	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	di Kabupaten Katingan, Murung Raya, Barito	APBN &/APBD &/ Swasta &/ PLN,	Dis Murung Raya, Barito Tamben Utara, Lamandau. &/ Swasta &/ BLN	V	V		
E3 Perencanaan Pengendalian Daya Rusak Air								
1	Penanganan Terpadu Daerah Aliran Sungai (DAS) Kritis	di 13 Kabupaten dan 1 Kota	APBN &/APBD/& BLN	Dis PU, Dis Hut, BLH	V	V		
2	Pembangunan dan peningkatan waduk/bendung	di 13 Kabupaten dan 1 Kota	APBN &/APBP/& BLN	Dis PU	V	V		



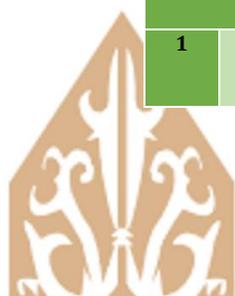


NO	SASARAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2025)	III (2025-2030)	IV (2030-2035)
F. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya								
1	Pembangunan sistem interkoneksi jaringan data informasi dari tingkat provinsi sampai ke tingkat desa	di 13 Kabupaten dan 1 Kota	APBN &/APBDP &/ BLN	Dis Hub	V	V	V	
2	Pembangunan PLTU di mulut tambang batubara	di Kabupaten Pulang Pisau, Sampit, Pangkalan Bun, Buntok, Tamiang Layang, Gunung Mas, Katingan, Puruk Cahu	APBN &/APBDP &/Swasta &/ BLN	PLN, Dis Tamben	V	V	V	
3	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU)	di Kabupaten Barito Utara	APBN &/APBD &/ Swasta &/BLN	PLN, Swasta, Dis Tamben	V	V	V	
4	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air	di Kabupaten Katingan, Murung Raya, dan Lamandau.		APBN &/Swasta &/ BLN	V	V	V	V
5	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dan Mikrohidro (PLTMH)	di Kabupaten Gunung Mas, Kapuas dan Seruyan	APBN &/APBD &/ Swasta &/BLN	PLN, Dis Tamben	V	V		
6	Pembangunan Pembangkit Listrik Bayu/Angin (PLTB)	di Kabupaten Sukamara, Seruyan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, dan Katingan .	APBN &/APBD	PLN, Dis Tamben	V	V	V	V
7	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa-desa terpencil yang sulit dijangkau jaringan listrik PLN	di Kabupaten Sukamara, Seruyan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Katingan, Pulang Pisau, Kapuas, Barito Timur, Barito	APBN &/APBD	PLN, Dis Tamben	V	V	V	V



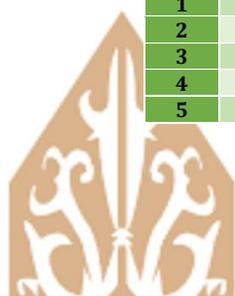


NO	SASARAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2025)	III (2025-2030)	IV (2030-2035)
		selatan, Barito Utara, Gunung Mas, Murung Raya.						
8	Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi terestrial yang melintasi ibukota provinsi dan kabupaten/kota	di Kabupaten Sukamara, Seruyan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Katingan, Pulang Pisau, Kapuas, Barito Timur, Barito selatan, Barito Utara, Gunung Mas, Murung Raya.	APBN &/APBD	Telkom	V	V	V	V
9	Pendayagunaan WARMASIF sesuai program "Kalteng Harati dan Kalteng Barigas"	Kota P. Raya	APBD	Dis Hub	V	V	V	
10	Penyediaan jaringan komunikasi Telepon Pedesaan (tambahan Desa Berdering) dan tambahan Internet Kecamatan.	323 Desa dan 11 Kecamatan di Prov. Kalteng	APBN/ APBD/SWASTA	BTIP Ditjen Postel, Dis Hub	V	V	V	
11	Pembangunan Sistem Interkoneksi dan Jaringan Transmisi Tegangan Menengah 150 KV P.Raya - Kasongan - Sampit; Sampit-Pangkalan Bun; Muara Teweh -Buntok - P.Raya; Kasongan - Kuala Kurun; Pangkalan Bun- Nanga Bulik.	di Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan- Palangkaraya, Gunung Mas, Lamandau.	APBN	PLN, Dis Tamben		V	V	V
A. Perwujudan Kawasan Lindung di Provinsi Kalimantan Tengah								
A1 Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung								
1	Mengembangkan pengelolaan kawasan lindung	di 13 Kabupaten dan 1 Kota	APBN &/ APBD &/ APBD Kab/kota	Dishut, Kemenhut	V	V	V	V





NO	SASARAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2025)	III (2025-2030)	IV (2030-2035)
2	Rehabilitasi dan pemantapan kawasan hutan lindung	di 13 Kabupaten dan 1 Kota	APBN &/ APBD &/ APBD Kab/kota	Dishut, Kemenhut	V	V	V	V
3	Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan	Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Kotawaringin Timur, Sukamara, Kotawaringin Barat, Seruyan, Barito Selatan.	APBN &/ APBDP &/ APBDK	Dishut, BLH	V	V	V	V
A2 Pengembangan Pengelolaan Kawasan Konservasi								
1	Cagar Alam Bukit Sapat Hawung		APBN &/ APBD	Dishut, Kemenhut	V	V	V	V
2	Cagar Alam Pararawen I dan II		APBN &/ APBD	Dishut, Kemenhut	V	V	V	V
3	Cagar Alam Bukit Tangkiling		APBN &/ APBD	Dishut, Kemenhut	V	V	V	V
4	Suaka Margasatwa Sungai Lamandau		APBN &/ APBD	Dishut, Kemenhut	V	V	V	V
5	Taman Nasional Tanjung Puting		APBN &/ APBD	Dishut, Kemenhut	V	V	V	V
6	Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya		APBN &/ APBD	Dishut, Kemenhut	V	V	V	V
7	Taman Nasional Sebangau		APBN &/ APBD	Dishut, Kemenhut	V	V	V	V
8	Taman Nasional Gunung Lumut-Lampeong		APBN &/ APBD	Dishut, Kemenhut	V	V	V	V
9	Taman Hutan Raya Kalimantan Tengah		APBN &/ APBD	Dishut, Kemenhut	V	V	V	V
10	Taman Hutan Raya Lapak Jaru		APBN &/ APBD	Dishut, Kemenhut	V	V	V	V
11	Taman Buru		APBN &/ APBD	Dishut, Kemenhut	V	V	V	V
A3 Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)								
1	DAS Barito		APBN &/ APBD	Dis. PU/Dishut.	V	V		
2	DAS Kahayan		APBN &/ APBD	Dis. PU/Dishut.	V	V		
3	DAS Mentaya		APBN &/ APBD	Dis. PU/Dishut.	V	V		
4	DAS Seruyan		APBN &/ APBD	Dis. PU/Dishut.	V	V		
5	DAS Kapuas		APBN &/ APBD	Dis. PU/Dishut.	V	V		





NO	SASARAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2025)	III (2025-2030)	IV (2030-2035)
6	DAS Katingan		APBN &/ APBD	Dis. PU/Dishut.	V	V		
7	DAS Sebangau		APBN &/ APBD	Dis. PU/Dishut.	V	V		
9	DAS Kumai		APBN &/ APBD	Dis. PU/Dishut.	V	V		
10	DAS Lamandau		APBN &/ APBD	Dis. PU/Dishut.	V	V		
11	DAS Arut		APBN &/ APBD	Dis. PU/Dishut.	V	V		
12	DAS Jelai		APBN &/ APBD	Dis. PU/Dishut.	V	V		
B. Perwujudan Pengembangan Kawasan Budi Daya								
B1 Pengembangan Kawasan Andalan Sektor Kehutanan								
1	Revitalisasi pemanfaatan hasil hutan kayu dan industri kehutanan	Kadal Sampit dsk, Kadal Pangkalan Bun dsk, Kadal Palangkaraya dsk, Kadal Kuala Kapuas dsk, Kadal Buntok dsk, Kadal Muara Teweh dsk	APBN &/ APBD &/ Swasta	Dis Hut, Dis Perindag	V	V	V	V
2	Pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan	Kadal Sampit dsk, Kadal Pangkalan Bun dsk, Kadal Palangkaraya dsk, Kadal Kuala Kapuas dsk, Kadal Buntok dsk, Kadal Muara Teweh dsk	APBN &/ APBD &/ Swasta	Dis Hut, Dis Perindag, Dis Par	V	V	V	V
3	Pengamanan hutan dan kebakaran hutan	Tersebar di 13 Kab. Dan 1 Kota	APBN &/ APBD	Dis Hut, BLH	V	V	V	V
4	Pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan	Tersebar di 13 Kab. Dan 1 Kota	APBN &/ APBD	Dis Hut	V	V	V	V
B2 Pengembangan Kawasan Andalan Sektor Pertanian dan Perkebunan								
1	Pengembangan Kawasan andalan sektor pertanian tanaman pangan (padi, palawija, dan buah-buahan)	Kadal Sampit dsk, Kadal Pangkalan Bun dsk, Kadal Palangkaraya dsk, Kadal Kuala Kapuas dsk, Kadal Buntok dsk, Kadal Muara Teweh dsk	APBN &/ APBD &/ Swasta	Dis Tanak	V	V	V	V



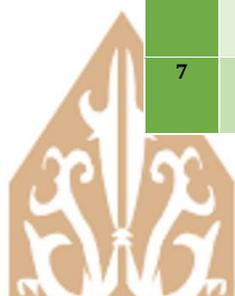


NO	SASARAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2025)	III (2025-2030)	IV (2030-2035)
2	Pengembangan Kawasan andalan sektor perkebunan kelapa sawit	Kadal Sampit dsk, Kadal Pangkalan Bun dsk, Kadal Kuala Kapuas dsk.	APBN &/ APBD &/ Swasta	Dis Bun	V	V	V	V
B3 Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Perikanan dan Kelautan								
1	Pengembangan Kawasan Andalan sektor perikanan kelautan di laut/pantai Selatan	Kadal Sampit dsk dan Kadal Pangkalan Bun dsk, Kadal Kuala Kapuas dsk, dan Kadal Laut Seruyan.	APBN &/ APBD &/ Swasta	Dinas Perikanan	V	V	V	V
2	Pengembangan Kawasan Andalan sektor perikanan perairan darat (sungai, danau)	Kadal Sampit dsk, Kadal Pangkalan Bun dsk, Kadal Palangkaraya dsk, Kadal Kuala Kapuas dsk, Kadal Buntok dsk, Kadal Muara Teweh dsk	APBN &/ APBD &/ Swasta	Dinas Perikanan	V	V	V	V
B4 Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor ekonomi perdagangan dan jasa								
4	Mengembangkan outlet Bandar Udara, Pelabuhan laut dilengkapi fasilitas bongkar muat untuk mendukung komoditas perkebunan, perikanan, pertambangan dan lainnya	Kadal Sampit dsk, Kadal Pangkalan Bun dsk, Kadal Palangkaraya dsk, Kadal Kuala Kapuas dsk, Kadal Muara Teweh dsk	APBN & APBD	Dis Hub, Dis PU	V	V		
1	Pengembangan kawasan andalan untuk pertambangan (batubara, emas, bijih besi dan zircon)	Kadal Sampit dsk, Kadal Pangkalan Bun dsk, Kadal Palangkaraya dsk, Kadal Kuala Kapuas dsk, Kadal Buntok dsk, Kadal Muara Teweh dsk	APBN & APBD	Dis Tamben, BLH	V	V	V	V
C. Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi								



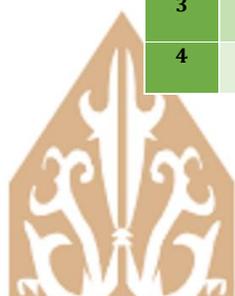


NO	SASARAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2025)	III (2025-2030)	IV (2030-2035)
C1 Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari Sudut Pandang Kepentingan Pertahanan dan keamanan								
1	Rehabilitasi dan Pengembangan Hutan Kawasan Tertentu untuk Latihan Militer (HKT-M)	Kabupaten Kotawaringin Barat.	APBN & APBD	TNI, Polri	V	V		
C2 Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari Sudut Pandang Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi								
1	Rehabilitasi dan pengembangan Kawasan Strategis Pusat Kegiatan Nasional	Kota Palangkaraya;	APBN & APBD	Lintas Sektor	V	V	V	V
2	Rehabilitasi dan pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduselaraskan dengan pengembangan irigasi teknis	Kapuas, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Pulang Pisau, dan Barito Timur;	APBN & APBD	Dis Tanak, Dis PU	V	V	V	V
3	Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan pengembangan lahan gambut (PLG) satu juta hektare	Kapuas, Pulang Pisau, dan Barito Selatan, Palangkaraya.	APBN & APBD	Lintas Sektor	V	V	V	V
4	Rehabilitasi dan pengembangan kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) Das KAKAB	Kota Palangkaraya, Pulang Pisau, Kapuas, dan Barito Selatan.	APBN & APBD	Lintas Sektor	V	V	V	V
5	Rehabilitasi dan pengembangan Kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa dalam, karet, lada dan kakao)	Lamandau, Sukamara, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan, Katingan, Gunung Mas, dan Barito Utara;	APBN & APBD	Dis Bun	V	V	V	V
6	Rehabilitasi dan pengembangan Kawasan terpadu Industri, pelabuhan, petikemas dan pergudangan, serta Simpul transportasi darat, laut dan udara (KSP Pangkalan Bun - Kumai, KSP Sampit - Bagendang, dan KSP Batanjung-Kapuas	Kotawaringin Barat, di Kotawaringin Timur, di Kapuas	APBN & APBD	Dis PU, Dis Perindag, Dis Hub, Dis Bun	V	V	V	V
7	Rehabilitasi dan pengembangan Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan.	Kotawaringin Barat, Kapuas, Barito Timur,	APBN & APBD	Dis Tanak, Disbun,	V	V	V	V





NO	SASARAN PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2025)	III (2025-2030)	IV (2030-2035)
		Sukamara, Seruyan, Katingan, Kotawaringin Timur, Pulang Pisau.						
C2 Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Pandang Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup								
1	Rehabilitasi dan pengembangan Kawasan Strategis Ekosistem Nasional di Kalimantan Tengah (Kawasan Ekosistem Air Hitam, Dome Gambut, dan Kawasan Gambut Tebal. Kawasan Ekosistem Pantai (mangrove), Kawasan Ekosistem Gambut, Kawasan	Kapuas, Barito Selatan, dan di sepanjang jalur pantai selatan	APBN &/ APBD	Dis PU, Dis Hut.	V	V	V	V
2	Rehabilitasi dan pengembangan Daerah Aliran Sungai (DAS), (DAS Barito, DAS Kapuas, DAS Kahayan, DAS Katingan, DAS Seruyan, dan DAS Mentaya, DAS Jelai, dan DAS Jemaras)	di 13 Kabupaten dan Kota	APBN &/ APBD	Dis PU, Dis Hut.	V	V	V	V
C3 Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Pandang Kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi								
1	Rehabilitasi dan pengembangan kawasan berpotensi pengembangan sumber daya perikanan di Kawasan Andalan Laut Seruyan.	Seruyan, Katingan, Kotawaringin Barat, dan sekitarnya.	APBN &/ APBD	Dis Kelautan & Perikanan				
2	Rehabilitasi dan pengembangan kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energi	Lamandau, Gunung Mas, Murung Raya, Katingan, Kapuas, Barito Timur, Barito Selatan, dan Barito Utara.	APBN &/ APBD	BALIHRISTI, Dinas PU				
C4 Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Pandang Kepentingan Sosial Budaya								
1	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Rumah Adat Betang	Gunung Mas;	APBN &/ APBD	Dinas Pendidikan			V	V
2	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Sekitar Kawasan Pahewan	Pulang Pisau, Katingan, Kota Palangkaraya	APBN &/ APBD	Disperindag, Dinas Pariwisata			V	V
3	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Sekitar Kawasan Adat Masyarakat	tersebar di seluruh kabupaten/kota	APBN &/ APBD				V	V
4	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Sekitar Bangunan Kerajaan/Kesultanan	Kotawaringin Barat.	APBN &/ APBD				V	V



II.7.3 INDIKASI KINERJA RENCANA SEKTORAL LAINNYA

Bagian ini menyajikan indikasi kinerja yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RPJPD Kalimantan Tengah ke depannya. Dalam bagian ini dianalisis tiga dokumen yang terkait rencana jangka panjang 20 tahun ke depan. Adapun tiga dokumen tersebut adalah:

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis
2. Grand Design Pembangunan Kependudukan
3. Master Plan Food Estate Kalimantan Tengah

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

Kondisi sosial politik, ekonomi, lingkungan hidup, serta hukum dan tata kelola kelembagaan harus menjadi pertimbangan dalam pengkajian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Kondisi keempat aspek tersebut dapat dianalisis melalui data capaian pada tiap indikator TPB yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan membandingkannya terhadap target nasional untuk mengetahui pencapaian target TPB di Provinsi Kalimantan Tengah.

Identifikasi Permasalahan, Rumusan Isu Strategis dan Sasaran Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial

Tabel II.7.3su Strategis dan Sasaran Prioritas KLHS RPJMD Kalteng Pilar Sosial

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun			
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Tidak ada data	Belum diterapkannya sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Belum tercapainya target nasional	Belum terwujudnya jaminan bagi semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan,	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan	Belum tercapainya target nasional		

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
sumber air minum layak dan berkelanjutan.		memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Belum tercapainya target nasional		
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	Belum tercapainya target nasional meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Se derajat pada tahun 2019 menjadi 91,63%		
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Belum tercapainya target nasional meningkatnya akses penerangan untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 100%		
Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Masih meningkatnya jumlah korban meninggal akibat terkena dampak bencana	Belum terwujudnya ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.
Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Belum dilaksanakan		
Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Tidak ada data		
Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapatkan pendidikan layanan khusus.(SMAB= Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Tidak ada data		
Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Belum dilaksanakan		
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Belum dilaksanakan		

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami peningkatan	Belum meratanya mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.
Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan			
Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami penurunan	Belum tercapainya akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.
Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Belum mencapai target nasional proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari menurun hingga mencapai 85%		
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami penurunan	Belum hilangnya segala bentuk kekurangan gizi, termasuk belum tercapainya target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami penurunan		
Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Belum mencapai target nasional Menurun menjadi 28%		
Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Belum mencapai target nasional meningkat skor PPH mencapai 92,5 dan tinggkat		



Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	konsumsi ikan mencapai 54,5 kg/kapita/tahun		
Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami peningkatan	Masih rendahnya produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.
Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia			
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Belum mencapai target nasional Peningkatan persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 %	Masih terjadinya angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Belum mencapai target nasional meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95%	Masih terjadinya kasus kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.
Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Belum mencapai target nasional Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245	Masih adanya epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.
Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Belum dilaksanakan	Masih terjadinya sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan,
Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Belum mencapai target nasional		



Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
	prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas pada tahun 2019 menjadi 15,4%	pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
Angka kematian (insidence rate) akibat bunuh diri.	Belum dilaksanakan		
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Belum mencapai target nasional meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa pada tahun 2019 menjadi 280		
Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Tidak ada data	Belum optimalnya pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.
Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Tidak ada data		
Unmet need pelayanan kesehatan.	Belum mencapai target nasional Menurunnya unmet need pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91%	Belum tercapainya cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Belum mencapai target Nasional Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95%		
Proporsi kematian akibat keracunan.	Tidak ada data	Masih tingginya jumlah jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.
Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Belum mencapai target nasional	Belum maksimalnya pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di



Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun menurun setiap tahun	WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	seluruh negara sebagai langkah yang tepat.
Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua			
Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Belum mencapai target nasional persentase SMA/MA berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,6%	Belum optimalnya semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami peningkatan	Masih rendahnya fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.
Tujuan 5: Mencapai Ksetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan			
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami penurunan	Masih tingginya angka kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun	Masih terjadinya praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak,



Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	mengalami penurunan		perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.
Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Belum mencapai target nasional median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun		
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate /ASFR).	Belum mencapai target nasional menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38		
Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami peningkatan	Belum terwujudnya partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Belum dilaksanakan	Masih rendahnya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.
Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Belum mencapai target nasional Menurunnya unmet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9%		
Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Belum mencapai target nasional meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur		



Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
	(PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2019 menjadi 85%		

Identifikasi Permasalahan, Rumusan Isu Strategis dan Sasaran Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi

Tabel II.7.4 Isu Strategis dan Sasaran Prioritas KLHS RPJMD Kalteng Pilar Ekonomi

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
Tujuan 7: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern untuk Semua			
Rasio elektrifikasi.	Belum mencapai target nasional meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi 96,6% pada tahun 2019	Belum terwujudnya jaminan akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.
Konsumsi listrik per kapita	Belum mencapai target nasional meningkatnya konsumsi listrik per kapita menjadi 1.200 KWh pada tahun 2019		
Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua			
Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami peningkatan	Belum terwujudnya pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Belum mencapai target nasional pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja setiap tahun meningkat	Belum terwujudnya produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.
Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami peningkatan	Belum terwujudnya kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas



Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
Persentase tenaga kerja formal.	Belum mencapai target nasional Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019	dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami peningkatan		
Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami penurunan	Belum terwujudnya pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
Persentase usia muda (1524 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Belum mencapai target nasional meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.	Belum tercapainya proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.
Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Tidak ada data	Belum terwujudnya kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Belum dilaksanakan		
Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Tidak ada data	Belum optimalnya kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.
Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Tidak ada data		
Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Belum mencapai target nasional meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.		



Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi			
Jumlah dermaga penyeberangan.	Belum mencapai target nasional meningkatnya jumlah dermaga penyeberangan menjadi 275 pada tahun 2019	Belum terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.
Jumlah pelabuhan strategis.	Belum mencapai target nasional Terbangunnya pelabuhan strategis untuk menunjang tol laut pada 24 pelabuhan pada tahun 2019		
Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami peningkatan	Belum optimalnya industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.
Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Belum mencapai target nasional meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB		
Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Tidak ada data	Masih rendahnya akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.
Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara			
Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Belum dilaksanakan	Belum terwujudnya inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari
Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi	Belum dilaksanakan	dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya	usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.



Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
menurut hukum HAM Internasional.			
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Tidak ada data	Belum terwujudnya kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.
Tujuan 17: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan			
Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami peningkatan	Belum terwujudnya sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.
Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Tidak ada data		
Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Tidak ada data		
Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Belum mencapai target nasional meningkatnya penetrasi akses bergerak pita lebar (mobile broadband) dengan kecepatan 1 Megabyte per second (Mbps) pada	Belum optimalnya kerjasama Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.
Proporsi individu yang menggunakan internet.	tahun 2019 di: - Perkotaan menjangkau 100% populasi. - Perdesaan menjangkau 52% populasi.	Belum optimalnya penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami peningkatan	Belum terwujudnya dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara

Identifikasi Permasalahan, Rumusan Isu Strategis dan Sasaran Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan

Tabel II.7.5 Isu Strategis dan Sasaran Prioritas KLHS RPJMD Kalteng Pilar Lingkungan

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan dan Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan			
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Belum mencapai target nasional meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100%	Belum tercapainya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Belum dilaksanakan		
Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Belum mencapai target nasional meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100%	Belum terwujudnya akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang
Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Belum dilaksanakan		

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Belum mencapai target nasional akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100%	air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Belum mencapai target nasional peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju	Belum tercapainya kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.
Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Belum dilaksanakan	Belum terlaksananya efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.
Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Tidak ada data	Belum terwujudnya pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.
Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Tidak ada data		
Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Belum dilaksanakan		
Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	Tidak ada data	Belum terwujudnya perlindungan dan restorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.



Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Tidak ada data	basah, sungai, air tanah, dan danau.	
Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan			
Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Belum dilaksanakan	Belum terwujudnya akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.
Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami penurunan	Masih tingginya jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.
Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Belum dilaksanakan		
Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Belum dilaksanakan		
Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Belum mencapai target nasional cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019	Masih tingginya dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.
Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Belum dilaksanakan	Belum terwujudnya ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas.
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Belum dilaksanakan	Belum terwujudnya kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework





Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
			for Disaster Risk Reduction 2015-2030.
Tujuan 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan			
Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Belum mencapai target nasional Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019	Belum optimalnya pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Tidak ada data	Belum optimalnya pengurangan produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.
Tujuan 13: Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya			
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Belum dilaksanakan	Belum terwujudnya ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.
Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami penurunan		
Tujuan 14: Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber daya Kelautan untuk Pembangunan Berkelanjutan			
Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun terkendalinya Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) fishing dan kegiatan di laut yang merusak ditandai dengan kepatuhan sebanyak 87% pelaku usaha pada tahun 2019	Belum terwujudnya pelarangan subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan	Pada tahun 2020, melarang bentukbentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan





Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
		pada the World Trade Organization.	pada the World Trade Organization.
Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi, dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati			
Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Belum mencapai target nasional meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019	Belum tercapainya pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.
Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Belum mencapai target nasional Tercapainya luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 ha	Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global	Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.
Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Belum dilaksanakan	Belum terwujudnya penghentian penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.
Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Tidak ada data	Belum terwujudnya integrasi nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.

Identifikasi Permasalahan, Rumusan Isu Strategis dan Sasaran Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola



Tabel II.7.6 Isu Strategis dan Sasaran Prioritas KLHS RPJMD Kalteng Pilar Hukum dan Tata Kelola

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
Tujuan 16: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan			
Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Belum dilaksanakan	Belum terwujudnya pengurangan segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.
Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Tidak ada data		
Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Belum dilaksanakan		
Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Tidak ada data		
Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Tidak ada data	Masih terjadinya perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.
Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Tidak ada data		
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Belum mencapai target nasional Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,0 pada tahun 2019	Belum optimalnya pengurangan korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.
Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Tidak ada data	Belum terwujudnya lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Belum mencapai target nasional Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem		

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019		
Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Belum mencapai target nasional Meningkatkan penggunaan Eprocurement terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2019		
Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Belum mencapai target nasional meningkatnya indeks RB menjadi Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%		
Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Belum mencapai target nasional keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) meningkat	Belum terwujudnya pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.
Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Tidak ada data	Belum terwujudnya kebijakan diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.

Isu Strategis Lingkungan Hidup

Permasalahan utama lingkungan hidup selalu berkaitan dengan tiga komponen utama lingkungan hidup yakni tanah, air, dan udara. Dari hasil analisis yang telah dilakukan dan diskusi intensif dengan berbagai pihak, maka dihasilkan enam kelompok komponen lingkungan yang perlu dibahas secara seksama, yakni: (i) lahan dan hutan; (ii) air; (iii) udara; (iv) pesisir dan lautan; (v) kebencanaan dan perubahan iklim, dan (vi)

pangan. Berikut ini daftar panjang isu strategis terkait dengan masing-masing komponen tersebut.

Tabel II.7.7 Isu Strategis Lingkungan Hidup

Kelompok Komponen Lingkungan	Isu Strategis Lingkungan Hidup
Lahan dan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Alih fungsi lahan gambut untuk kegiatan PSN food estate seluas ± 165.000 Ha. b. Kebakaran hutan dan lahan. c. Konflik tenurial antara perusahaan perkebunan/pertambangan dengan masyarakat. d. Alih fungsi lahan untuk proyek PSN (tanaman singkong) oleh Badan Badan Cadangan Logistik Strategis (BCLS), kementerian Pertahanan seluas ± 30.000 Ha dan direncanakan akan dikembangkan hingga mencapai hingga mencapai ± 400.000 Ha. e. Masih tingginya laju deforestasi dan alih fungsi lahan menjadi kebun sawit.
Air	<ul style="list-style-type: none"> a. Penurunan indeks kualitas air (IKA) sehingga berpengaruh terhadap penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup b. Fluktuasi debit ar sungai saat musim hujan dan kemarau sangat tinggi
Udara dan Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> a. Penurunan kualitas udara saat terjadi kebakaran hutan yang berdampak pada peningkatan konsentrasi PM 10 dan PM2.5, dan menyebabkan emisi carbon sehingga berdampak terhadap perubahan iklim.
Pesisir dan Lautan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terjadinya abrasi di pantai yang mengancam pemukiman dan sarana vital masyarakat.
Kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terjadinya kejadian banjir di beberapa wilayah b. Terjadinya longsor

Indikator TPB Di Kalimantan Tengah yang Sudah dilaksanakan dan Belum Mencapai Target

Sampai dengan evaluasi TPB tahun 2020 dalam Dokumen KLHS RPJMD Kalteng tahun 2021-2026 masih terdapat indikator TPB yang belum mencapai target dalam Perpres 59/2017. Belum tercapainya target ini menjadi bahan evaluasi penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJPD ke depannya agar TPB dapat dicapai dan menjamin arah kebijakan sasaran dan program dapat terus dalam korido tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan analisis capaian TPB Provinsi Kalimantan Tengah terhadap 204 indikator TPB yang relevan, menunjukkan bahwa sebanyak 45,59% Indikator TPB telah mencapai target nasional, 30,39% indikator TPB sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target, 10,29% indikator TPB belum

dilaksanakan dan belum mencapai target dan sebanyak 13,73% tidak dapat dilakukan analisis karena tidak tersedia data

Tabel II.7.8 *Gap* Pelaksanaan Indikator Turunan SDG's

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	SKPD Pelaksana	Target Perpres 59/2017	Kondisi Saat Ini	Gap
Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun				
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial	Menurun	Masih meningkat	-
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkat menjadi 100%	82,16%	-17,84%
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkat menjadi 100%	64,79%	-35,21
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	Dinas Pendidikan	Meningkat menjadi 91,63%	77,58%	-14,05
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Dinas ESDM	Meningkat menjadi 100%	1,62%	-98,38
Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan	Menurun	Fluktuatif	-
Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	BAPPEDALITBANG	Meningkat	Fluktuatif	-
Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan				
Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah	Menurun	Fluktuatif	-
Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah	Menurun menjadi 8,5 %	11,09%	+2,59
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Menurun	Fluktuatif	-
Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Menurun	Fluktuatif	-
Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Menurun menjadi 28%	54,90%	+31,9%

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	SKPD Pelaksana	Target Perpres 59/2017	Kondisi Saat Ini	Gap
Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	83,2	-9,3
Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat	Fluktuatif	-
Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia				
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat menjadi 95%	78,15%	-16,85
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat menjadi 95%	79%	-16
Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Menurun	Fluktuatif	-
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat menjadi 280	11	-269
Unmet need pelayanan kesehatan.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Menurun menjadi 9,91%	16,4%	+6,49
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat menjadi minimal 95%	71,4	-23,6
Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Menurun	Fluktuatif	-
Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua				
Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan	Meningkat menjadi 84,6%	75%	-9,6
Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	Dinas Pendidikan	Meningkat	Fluktuatif	-
Tujuan 5: Mencapai Kestaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan				

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	SKPD Pelaksana	Target Perpres 59/2017	Kondisi Saat Ini	Gap
Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	DP3AKKB	Menurun	Fluktuatif	-
Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	DP3AKKB	Meningkat menjadi 21 tahun	20,80 Tahun	-0,2
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	DP3AKKB	Menurun menjadi 38	83	+45
Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	DP3AKKB	Meningkat	Fluktuatif	-
Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah	Menurun menjadi 9,9%	12%	+2,1
Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat menjadi 85%	77,10	-7,9
Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan				
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkat menjadi 100%	82,16%	-17,84
Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkat menjadi 100%	49,81%	-50,19
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkat menjadi 100%	64,79%	-35,21
Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat	Menurun	-
Tujuan 7: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern untuk Semua				
Rasio elektrifikasi.	Dinas ESDM	Meningkat menjadi 96,6%	85,72%	-10,88
Konsumsi listrik per kapita.	Dinas ESDM	Meningkat menjadi 1.200 KWh		
Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua				
Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat	Menurun	-
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan	Meningkat	Fluktuatif	-

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	SKPD Pelaksana	Target Perpres 59/2017	Kondisi Saat Ini	Gap
Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan	Meningkat	Menurun	-
Persentase tenaga kerja formal.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan	51%	50,04%	-0,96
Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan	Meningkat	Menurun	-
Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan	Meningkat	Fluktuatif	-
Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi				
Jumlah dermaga penyeberangan.	Dinas Pehubungan Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat	Menurun	-
Jumlah pelabuhan strategis.	Dinas Pehubungan Provinsi Kalimantan Tengah	24 pelabuhan (skala nasional)	19	-5
Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkat	Fluktuatif	-
Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	Fluktuatif	-
Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan				
Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Menurun	Fluktuatif	-
Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat menjadi 80%	71,30%	-8,7
Tujuan 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan				
Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	Fluktuatif	-
Tujuan 13: Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya				
Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Menurun	Fluktuatif	-
Tujuan 14: Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan				
Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Meningkat menjadi 87%	85%	-2%
Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati				
Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat	Menurun	-

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	SKPD Pelaksana	Target Perpres 59/2017	Kondisi Saat Ini	Gap
Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya.	BPDASHL Kahayan (UPT KemenLHK)	Meningkat menjadi 100.000 ha (skala nasional)	325	-
Tujuan 16: Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan				
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah			
Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Biro Organisasi, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat menjadi: 75% (Provinsi)	63,05%	-11,95
Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Biro Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat menjadi 80%	57,68%	-22,32
Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Biro Organisasi, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat menjadi 60%,	59,59%	-0,41
Tujuan 17: Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan				
Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat	Fluktuatif	-
Proporsi individu yang menggunakan internet.	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat	90	-

Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024-2049

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) adalah arahan kebijakan pembangunan kependudukan yang diwujudkan dalam program lima tahunan untuk mencapai target pembangunan kependudukan. GDPK merupakan dokumen perencanaan pembangunan kependudukan untuk jangka waktu 25 tahun mendatang. Penyusunan GDPK merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 153 tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan. Aspek pembangunan dalam GDPK terdiri dari pengendalian kuantitas penduduk,

peningkatan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga dan pengembangan data base kependudukan. Pada tiap pilar tersebut disusun arah kebijakan dan roadmap tiap 5 tahun untuk menjawab permasalahan dari masing masing aspek yang dihadapi dan akan dihadapi daerah dalam 25 tahun ke depan. Adapun Dokumen Roadmap GDPK Kalimantan Tengah mengamanahkan arah kebijakan sebagai berikut.

Tabel II.7.9 Roadmap GDPK Kalimantan Tengah 2024-2049

Aspek	Periode 1 (2024-2029)	Periode 2 (2030-2034)	Periode 3 (2035-2039)	Periode 4 (2040-2044)	Periode 5 (2045-2049)
Kuantitas Penduduk	Tercapainya penduduk tumbuh seimbang	Bertahannya penduduk tumbuh seimbang	Bertahannya penduduk tumbuh seimbang	Bertahannya penduduk tumbuh seimbang	Bertahannya penduduk tumbuh seimbang
Kualitas Penduduk	Tercapainya kualitas Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi yang kuat.	Tercapainya kualitas Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi yang kuat didukung terciptanya <i>good governance</i> .	Tercapainya kualitas penduduk yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan produktifitas kerja.	Tercapainya kualitas penduduk yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan produktifitas kerja dan daya saing.	Tercapainya kualitas penduduk yang BERKAH yaitu bermartabat, elok, religious, kuat, Amanah dan harmonis
Mobilitas Penduduk	Penataan dan penyebaran penduduk antar kabupaten/kot a	Penataan dan penyebaran penduduk antar kabupaten/kot a sesuai daya dukung sosial dan lingkungan	Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk melalui pengembangan daerah penyangga	Peningkatan mobilitas non permanen dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan ad ministrasi di beberapa daerah yang diproyeksika n sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk	Terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata antar daerah kabupaten/ kota sehingga konsentrasi penduduk terkendali dan harmonis
Pembangunan Keluarga	Tercapainya keluarga yang berketahanan	Tercapaiannya keluarga yang berketahanan dan sejahtera	Tercapainya keluarga yang berkualitas	Peningkatan keluarga yang berkualitas	Peningkatka n keluarga yang berkualitas dengan ciri tenteram, mandiri dan bahagia

Aspek	Periode 1 (2024-2029)	Periode 2 (2030-2034)	Periode 3 (2035-2039)	Periode 4 (2040-2044)	Periode 5 (2045-2049)
Pengelolaan Administrasi dan Database Kependudukan	Terciptanya tertib administrasi kependudukan	Terciptanya pelayanan prima administrasi kependudukan	Tercipta kondisi masyarakat berbasis database dan Informasi kependudukan	Terciptanya integrasi data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber dalam suatu database	Terciptanya pendayagunaan data dan informasi kependudukan sebagai sistem pendukung keputusan

Dokumen Food Estate Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas area sebesar 153.564 km² dengan luasan lahan gambut mencapai 3,01 juta ha atau 52,2% dari seluruh luasan gambut di Kalimantan (BBPOPT, 2020). Pengembangan Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah berada di Area of Interest (AoI) dengan prioritas wilayah berada di kawasan Eks-PLG. Wilayah Eks-PLG sebagian besar merupakan kawasan ekosistem gambut yang memiliki fungsi lindung ekosistem gambut (885.517,18 Ha), fungsi budidaya ekosistem gambut (497.133,23 Ha) dan seluas 87.618,95 Ha merupakan lahan yang berada di luar kawasan hidrologi gambut (Ditjen PPKL KLHK, 2020). Pengembangan Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan di wilayah ini berfokus pada wilayah yang berada di luar fungsi lindung ekosistem gambut. Terdapat tiga aspek dalam pengembangan food estate yakni aspek geospasial, on-farm, dan off-farm. Secara lebih mendetail tantangan dan arah kebijakan masing-masing aspek dijabarkan sebagai berikut.

Tantangan Geospasial

Dalam pengembangan aspek geospasial, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu:

1. Tumpang tindih dan konflik pemanfaatan lahan; beberapa ijin pemanfaatan lahan masih terdapat di kawasan hutan, selain itu juga terdapat konflik lahan antara masyarakat adat tradisional dengan perusahaan perkebunan sawit, khususnya di blok E.
2. Ketidakjelasan kepemilikan lahan; kurangnya kejelasan mengenai kepemilikan lahan di kawasan transmigrasi, dimana sekitar 7.107 keluarga telah meninggalkan

kawasan ini dan terjadi pembangunan baru di kawasan ini, seperti pembangunan kelapa sawit.

3. Minimnya keberadaan infrastruktur dasar wilayah; pelayanan dasar dan infrastruktur pedesaan kurang berkembang, terutama di daerah terpencil. Sebagian besar wilayah tidak memiliki sistem transportasi yang memadai, air bersih dan layanan sanitasi dasar.
4. Kerusakan sistem hidrologi (tata air makro) dan infrastruktur pertanian; akibat pembangunan irigasi, kanal dan drainase yang memotong garis kontur alami. Hal ini berisiko terhadap penurunan muka air di lahan gambut yang berdampak pada kekeringan di lahan gambut dan memicu terjadinya kebakaran.
5. Kesulitan dalam pengendalian tinggi muka air irigasi di lapangan, dimana salah satu diakibatkan oleh perubahan cuaca yang fluktuatif.
6. Pemahaman masyarakat yang terbatas mengenai pentingnya ekosistem hutan dan gambut serta pengelolaannya yang lestari.

Tantangan On Farm

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan aspek on-farm adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan lahan rawa dan gambut tipis; wilayah perencanaan seluas 770.600,48 Ha didominasi oleh lahan rawa lebak dan lahan rawa pasang surut yang memiliki jenis tanah mineral dan ketebalan gambut tipis (<0,5 m). Tantangan pengembangan lahan pangan dan pertanian di lahan tersebut adalah adanya potensi mineral pirit yang terekspos sehingga menyebabkan meningkatnya pH tanah menjadi masam dan sangat masam (pH 2-3), dan memicu terlepasnya logam-logam berat seperti besi, aluminium dan mangan yang bersifat racun dan mengganggu produktivitas pertanian. Kunci utama mengatasi hal ini adalah dengan memahami teknik penanganan lahan yang sesuai dan mempertahankan tinggi muka air tanah minimum di lahan gambut.
2. Pengelolaan tata air makro dan mikro; merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan lahan rawa dan gambut untuk lahan pertanian. Rusaknya sistem hidrologi gambut (tata air makro) akibat pembangunan kanal, drainase dan irigasi yang memotong kontur alami menyebabkan turunnya muka air di lahan gambut. Hal tersebut berpengaruh terhadap tata air mikro di lahan pertanian dalam bentuk kekeringan, banjir dan tereksposnya pirit, serta meningkatnya kadar pH.



3. Minimnya akses terhadap infrastruktur pertanian presisi, saprodi dan alsintan; jalan masuk dan keluar lokasi relatif sempit dan tidak semuanya dalam kondisi bagus, sehingga biaya transportasi relatif mahal dan berakibat meningkatnya biaya saprodi dan alsintan yang didatangkan dari luar kawasan. Selain itu belum semua lokasi terkoneksi baik dengan jaringan internet.
4. Kuantitas dan kualitas petani untuk pelaksanaan budidaya pangan dan pertanian; pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan dengan pendekatan pertanian presisi dan korporasi petani memerlukan petani yang memiliki kapasitas dalam jumlah yang sesuai dengan lahan yang dikembangkan. Saat ini kebanyakan petani masih memiliki karakteristik berikut:
 - a) Sebagian petani masih memiliki pola pikir dan sikap sebagai petani subsisten yang belum berorientasi terhadap pasar. Selain itu mereka lebih memilih untuk menanam padi varietas lokal yang umurnya panjang (7-8 bulan), sehingga hanya tanam sekali setahun (IP rendah).
 - b) Pemahaman dan kapasitas petani dalam mengolah lahan pertanian di lahan rawa secara berkelanjutan masih minim. Umumnya mereka bercocok tanam dengan cara-cara konvensional yang dipelajari secara turun-temurun atau berdasarkan informasi terbatas di antara mereka. Adopsi teknik dan teknologi baru yang lebih efisien dan efektif belum banyak dilakukan. Berdasar dari hal tersebut perlu dilakukan pendampingan terkait praktik Good Agriculture Practices (GAP) yang dilakukan oleh penyuluh setempat kepada petani di lokasi Kawasan Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan.
 - c) Tingkat adaptasi terhadap perkembangan teknologi masih rendah.
 - d) Tingkat kepercayaan terhadap keberhasilan program baru masih rendah akibat kegagalan sebelumnya.

Tantangan Aspek Off-Farm

Dalam pengembangan aspek off-farm, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi yaitu sebagai berikut:

1. Masih lemahnya kelembagaan petani baik secara sosial maupun ekonomi. Kelembagaan petani yang ada belum berperan nyata dalam meningkatkan posisi



tawar petani maupun kesejahteraannya. Kelembagaan ini masih lemah baik dari sisi organisasi maupun kapasitasnya.

2. Pada hilirisasi produk pertanian yang dihasilkan petani dinilai masih rendah sehingga perlu dilakukan pendampingan kepada petani dengan menggunakan praktik Good Handling Practices (GHP) agar produk yang dihasilkan berkualitas premium.
2. Minimnya akses petani terhadap pasar; selain belum adanya jaminan penyerapan pasar, petani juga terkendala dengan terbatasnya informasi mengenai harga pasar, dan tingginya biaya transportasi menuju pusat perdagangan (pasar), sehingga petani lebih memilih menjual hasil panen ke tengkulak dengan harga relatif lebih rendah daripada harga pasar.
3. Ketidakstabilan harga bahan pangan; hal ini salah satunya disebabkan oleh adanya ancaman impor bahan pangan dengan harga yang lebih kompetitif dan rendahnya harga gabah dari Perum Bulog dibandingkan dengan harga yang ditawarkan dari tengkulak.
4. Usaha hilir pertanian belum banyak dikembangkan, khususnya untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Petani belum banyak melakukan kegiatan yang menghasilkan nilai tambah dalam rangkaian rantai nilai agribisnis hulu-hilir.
5. Minimnya akses terhadap lembaga keuangan formal, sehingga petani bergantung pada pihak pemberi pinjaman informal dengan bunga tinggi. Koperasi desa dan program kredit mikro di masa lalu belum berhasil.
6. Iklim investasi belum cukup baik untuk menarik minat investor

Arah Kebijakan dan Target

Pengembangan Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah diarahkan pada terbangunnya Kawasan Sentra Produksi Pangan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan sistem penataan ruang dan infrastruktur wilayah dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem hutan dan gambut. Adapun Arah kebijakan dari masing masing bidang dijabarkan sebagai berikut.

Arah Kebijakan Bidang Geospasial



1. terintegrasinya Kawasan Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
2. terbangunnya sistem pengelolaan irigasi yang terintegrasi dengan lahan; dan
2. terbangunnya infrastruktur jalan dan transportasi perairan mendukung pemasaran produk pertanian.

Arah Kebijakan Bidang On Farm

1. meningkatnya produktivitas komoditas pertanian;
2. meningkatnya Indeks Pertanaman padi; dan
3. meningkatnya produksi hasil pertanian (berbagai/multi komoditas pangan dan pertanian).

Arah Kebijakan Bidang Off-Farm

1. terbangunnya sarana pengolahan komoditas pertanian, seperti RMU dan mesin penetas ternak;
2. terbentuknya korporasi petani; dan
4. meningkatnya pemasaran produk, baik di pasar lokal maupun di luar kabupaten/provinsi lokasi Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan.

Adapun target yang direncanakan dalam Pengembangan Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah dijabarkan dalam tabel berikut:



Tabel II.7.10 Target Pengembangan *Food Estate*/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah

No	Sasaran/Indikator	Satuan	Tahun							
			2020		2021		2022		2023	2024
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
Aspek Geospasial. Terbangunnya kawasan Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan										
1	Luasan kawasan Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan (kumulatif)*	Ha	30.000	30.000	60.778,64	59.831,52	62.456,24	61.434,88	61.434,88	61.434,88
	Intensifikasi	Ha	30.000	30.000	44.135	44.135	44.637	44.637	44.637	44.637
	Ekstensifikasi	Ha	-	-	16.643,64	15.696,52	17.819,24	16.797,88	17.819,24	17.819,24
2	Luas layanan irigasi yang terehabilitasi (kumulatif)	Ha	2.000	2.000	43.503	43.503	-	-	-	-
3	Panjang saluran yang terehabilitasi (kumulatif)	Km	119	119	2.252	2.195	-	-	-	-
4	Bangunan air yang terbangun (kumulatif)	unit	-	-	225	238	239	252	249	-
Aspek On-Farm. Meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman di kawasan Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan										
1	Peningkatan produktivitas padi per tahun	%	5,3	5,7	5,3	-5,25	5,3	6,34	5,3	5,3
2	Peningkatan indeks pertanaman per tahun*	%	5	-	5	-	5	0	5	5
3	Produksi padi	Juta Ton GKG	0,43	0,46	0,40	0,38	0,38	0,35	0,51	0,71



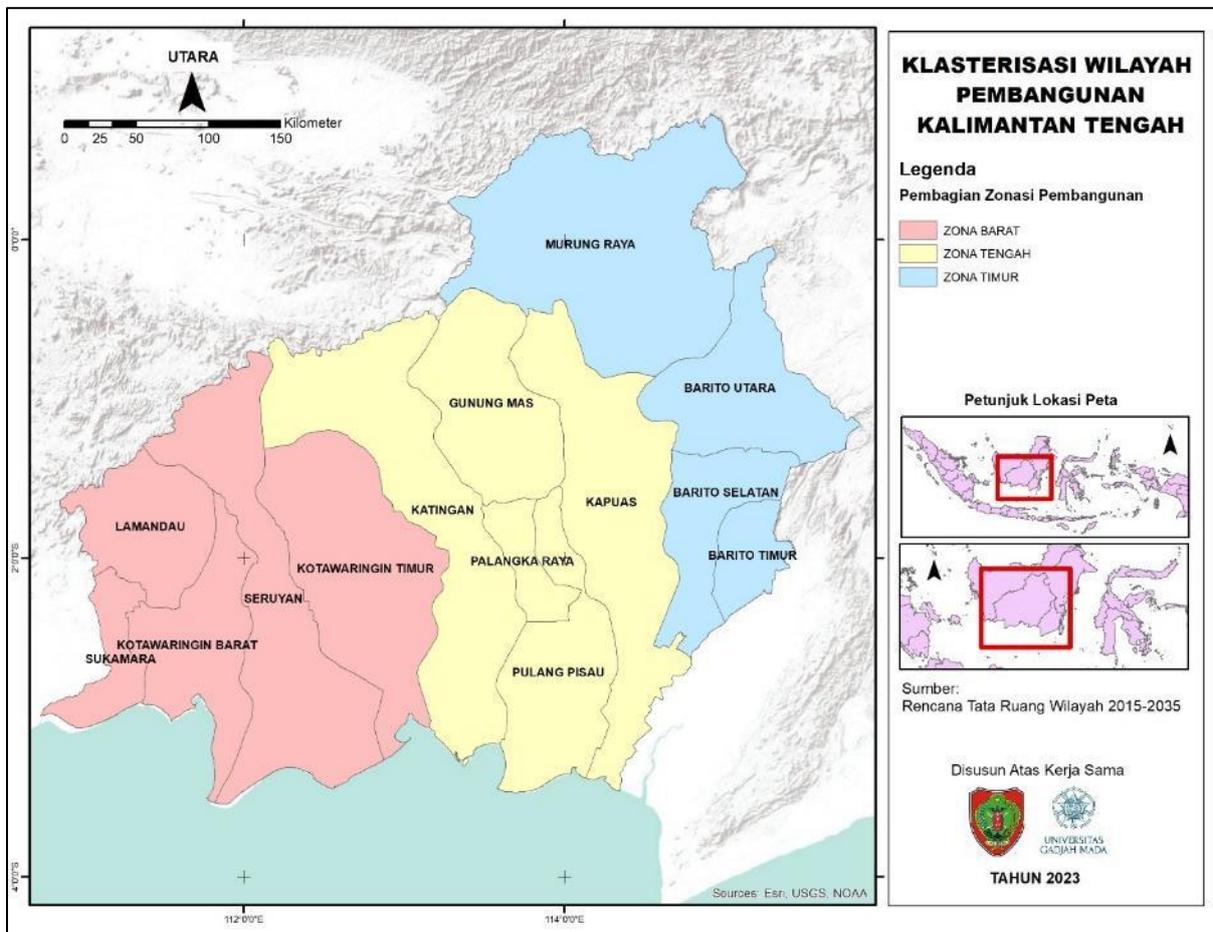
No	Sasaran/Indikator	Satuan	Tahun							
			2020		2021		2022		2023	2024
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
Aspek Off-Farm. Meningkatnya kesejahteraan petani di kawasan Food Estate/ Kawasan Sentra Produksi Pangan										
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	105-107	103,55	105-107	118,53	105-107	121,60	105-107	105-108
2	Produksi Beras	Juta Ton	0,25	0,27	0,24	0,27	0,23	0,23	0,30	0,42





II.7.4 REGIONALISASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Pembagian klaster pembangunan bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di Kalimantan Tengah. Pembagian klaster pembangunan didasarkan pada kedekatan geografis wilayah serta zona perencanaan. Zona Barat terdiri dari Klaster Pangkalan Bun dan Klaster Sampit. Zona Tengah terdiri dari Klaster Palangkaraya dan Klaster Kuala Kapuas. Zona Timur terdiri dari Klaster Buntok dan Klaster Muara Teweh. Masing-masing klaster memiliki pusat pertumbuhan utama yang disebut dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Dalam sistem perkotaan nasional, PKW berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau melayani beberapa kabupaten/kota yang artinya PKW memiliki daya jangkau pengaruh yang luas dibandingkan pusat kegiatan dibawahnya. Penetapan PKW pada masing-masing klaster sesuai dengan rincian PKW yang terdapat dalam RTRW Kalimantan Tengah. Peta klasterisasi wilayah di Kalimantan Tengah dapat dilihat pada



Gambar II.7.3. Peta Pembagian Zona Wilayah di Kalimantan Tengah





Tabel II.7.11. Pembagian Zona dan Klaster di Kalimantan Tengah

ZONA	KLASTER	KABUPATEN
Zona Barat	Klaster Pangkalan Bun	Kotawaringin Barat
		Sukamara
		Lamandau
	Klaster Sampit	Kotawaringin Timur
		Seruyan
Zona Tengah	Klaster Palangkaraya	Kota Palangkaraya
		Katingan
		Gunung Mas
	Klaster Kuala Kapuas	Kapuas
		Pulang Pisau
Zona Timur	Klaster Buntok	Barito Selatan
		Barito Timur
	Klaster Muara Teweh	Murung Raya
		Barito Utara

Penetapan PKW dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, diantaranya sebagai kawasan perkotaan yang menjadi simpul kegiatan ekspor-impor dalam mendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN); sebagai kawasan yang menjadi pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani provinsi atau beberapa kabupaten/kota; serta sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi dan beberapa kabupaten. Berdasarkan kriteria tersebut dapat diketahui bahwa suatu PKW memiliki keterkaitan terhadap wilayah lainnya yang dipengaruhi oleh transportasi, aktivitas perdagangan dan jasa, serta arus barang, manusia, jasa, dan lainnya. PKW juga berperan sebagai sentra pertumbuhan dengan berpusatnya aktivitas ekonomi industri dan jasa. PKW yang berperan sebagai simpul transportasi memiliki akses menuju wilayah dibawahnya terutama didalam kluster yang sama. Sarana dan prasarana transportasi memiliki peran yang signifikan terhadap perkembangan wilayah, karena dengan adanya akses transportasi akan memperlancar aktivitas masyarakat, baik aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, dan



sebagainya. Oleh karena itu, dalam pengembangan PKW harus memperhatikan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang mendukung kegiatan ekonomi yang dilayani.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS



BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PROBLEMS AND STRATEGIC ISSUES

PERMASALAHAN

ISU STRATEGIS

Bidang Sosial

- Kualitas layanan pendidikan masih rendah
- Derajat kesehatan masyarakat belum optimal

- Perlunya peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan beserta tenaga kesehatan
- Ketidakmerataan akses pendidikan (angka putus sekolah SMP/Mts dan SMA/SMK/MA masih tinggi)

Bidang Ekonomi

- Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi pasca pandemi
- Ketahanan pangan masyarakat belum terwujud
- Rendahnya akses terhadap hunian terjangkau, keberlanjutan kawasan kumuh dan belum terpenuhinya akses sanitasi layak bagi rumah tangga

- Belum optimalnya hilirisasi produk dan kualitas SDM
- Terbatasnya diversifikasi bahan pangan dan pengetahuan masyarakat tentang kualitas pangan serta sulitnya akses logistik

Bidang Ekologi, Sosial, Budaya

- Rendahnya resiliensi daerah terhadap bencana
- Tingginya alih fungsi lahan
- Pengolahan limbah dan persampahan yang belum maksimal

- Potensi sumber daya yang besar baik energi terbarukan dan tidak terbarukan
- Pengentasan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh serta peningkatan standar sanitasi

Bidang Tata Kelola

- Masih sedikitnya jumlah kajian litbang

- Penerbitan dokumen kependudukan yang belum optimal

Isu Khusus Kewilayahan

- Pembentukan Daerah Otonomi Baru Sebagai pemekaran Provinsi Kalimantan Tengah



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

III.1 PERMASALAHAN

Permasalahan pembangunan daerah diperoleh melalui identifikasi masalah berdasarkan pencapaian eksisting pada setiap bidang. Permasalahan timbul sebagai akibat dari belum dioptimalkannya kekuatan dan peluang yang dimiliki daerah, belum diantisipasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi daerah. Selama proses pembangunan, terdapat capaian-capaian yang belum optimal ataupun belum pada kondisi ideal, sehingga diharapkan hasil rumusan permasalahan berikut dapat ditindaklanjuti dalam pembangunan kedepannya.

III.1.1 Bidang Sosial

Permasalahan pendidikan di Kalimantan Tengah berupa **kualitas layanan pendidikan yang masih rendah**, dipengaruhi oleh nilai rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah belum optimal, angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan menengah (SMP dan SMA) masih rendah, peran pendidikan pra-sekolah (PAUD) yang belum maksimal dalam mempersiapkan anak untuk memasuki jenjang pendidikan dasar. Selain itu, masih belum terintegrasi antara pendidikan karakter, keagamaan, dan kebudayaan lokal terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia; serta pendidikan vokasional yang belum terlaksana dengan optimal dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja.

Derajat kesehatan masyarakat masih belum optimal, yang dipengaruhi oleh kuantitas SDM kesehatan yang masih dibawah standar ideal, layanan kesehatan belum merata dan optimal, serta kepesertaan masyarakat dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belum optimal. Kepesertaan JKN belum merata disebabkan oleh faktor-faktor seperti belum memiliki kesadaran terhadap substansi kepesertaan jaminan kesehatan, tidak memahami alur registrasi JKN, serta faktor ekonomi karena pendapatan keluarga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi kesehatan belum optimal tercermin dari usia harapan hidup yang masih dibawah rata-rata nasional, angka kematian ibu yang tinggi, prevalensi stunting tinggi, terjadi penurunan pemberian pengobatan lengkap bagi pasien AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria, serta kesadaran terhadap





pentingnya pemenuhan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan yang masih rendah.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam aspek kebudayaan dan literasi, disebabkan oleh faktor individu maupun aksesibilitas. Pada aspek literasi, tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan masih rendah, tingkat literasi masyarakat belum optimal, layanan perpustakaan belum optimal serta ketersediaan fasilitas baca di lingkungan sekolah dan masyarakat yang belum merata sehingga belum menjangkau lokasi-lokasi tertentu. Pada aspek ketenagakerjaan, **pengelolaannya juga belum terlaksana dengan optimal**. Hal ini disebabkan oleh masih adanya angka pengangguran terbuka walaupun secara nilai lebih rendah daripada angka TPT nasional; serta pembangunan ketenagakerjaan yang belum optimal.

Perlindungan sosial merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberi dukungan kepada masyarakat dalam rangka mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial, menjaga tingkat kesejahteraan, dan mengurangi masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, capaian perlindungan sosial menjadi penting untuk dapat mengukur kondisi sosial masyarakat. **Upaya perlindungan sosial di Kalimantan Tengah dinilai belum optimal**, dilihat dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang meningkat serta cakupan penanganannya belum optimal. Sementara itu, tingkat kemiskinan Kalteng mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya walaupun sudah mencapai angka yang lebih rendah daripada rata-rata kemiskinan nasional.

III.1.2 Bidang Ekonomi

Permasalahan dalam bidang ekonomi mencakup pendewasaan dini pertumbuhan ekonomi, utamanya beberapa tahun sejak pandemi global Covid-19; kurangnya sinergi dalam industri pengolahan berwawasan lingkungan; pengembangan sektor perdagangan yang kurang optimal disertai belum terpetakannya hilirisasi dan rantai pasar; dan belum optimalnya pembangunan ekonomi hijau dan biru. Pendewasaan dini pertumbuhan ekonomi tercermin melalui **perlambatan laju pertumbuhan pasca pandemi**. Di sisi lain, kendala dalam industri pengolahan melibatkan **kurangnya nilai tambah produk, keterbatasan teknologi, dan pasokan SDM terampil**. Pengembangan



perdagangan yang belum optimal mencakup rendahnya nilai ekspor, kurangnya pemahaman regulasi, serta pemasaran dan branding produk lokal yang masih bersifat konvensional. Sementara itu, **belum optimalnya ekonomi hijau dan biru** terkait dengan kurangnya komitmen jangka panjang, pemanfaatan potensi ekonomi biru, dan **rendahnya SDM dalam sektor kreatif dan pariwisata lingkungan**. Selain itu, belum terdapat komitmen dalam mengembangkan **sumber daya biofarmaka** yang begitu tinggi. Diperlukan persamaan tujuan dan komitmen *multihelix* untuk memulai studi terpusat berskala nasional di Kalimantan Tengah terkait pengembangan biofarmaka dan produk turunannya yang potensial menjadi daya saing global.

Tidak hanya itu, aspek **ketahanan pangan masyarakat juga belum terwujud** dengan komitmen pemerintah provinsi dalam diversifikasi pangan saat ini. Terdapat kerawanan pangan di tiga kabupaten disertai rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap gizi seimbang. Sementara itu, sektor pertanian masih memiliki **kualitas SDM yang rendah dan kurangnya optimalisasi pengolahan lahan**, seperti mekanisasi dalam mendukung intensifikasi pertanian, untuk mendukung diversifikasi pangan. Terkait hal tersebut, secara esensial diperlukan adanya optimalisasi dan *refocusing* program **food estate agar efisien** dalam pengolahan lahan dan penggunaan anggaran dalam rangka mendukung ketahanan pangan.

Pemenuhan kebutuhan energi berkelanjutan juga menjadi tantangan, ditandai dengan belum terpenuhinya target bauran energi terbarukan, tingginya intensitas penggunaan energi final, dan rasio elektrifikasi yang belum menyeluruh. **Konektivitas antar wilayah masih belum memadai**, tercermin dari buruknya kualitas infrastruktur konektivitas dan tidak idealnya transportasi umum barang dan orang. Belum meratanya pembangunan wilayah melibatkan konektivitas antar pusat kota yang belum optimal dan kesesuaian penerapan rencana tata ruang wilayah yang belum maksimal. Adapun akses terhadap ruang hidup yang layak dan berkelanjutan diindikasikan dengan **rendahnya akses terhadap hunian terjangkau, keberlanjutan kawasan kumuh, dan belum terpenuhinya akses sanitasi layak bagi rumah tangga**. Tak hanya itu, infrastruktur **sumber daya air masih belum memadai**, terlihat dari tidak

terpenuhinya kualitas dan kuantitas sarana prasarana irigasi, serta belum optimalnya efektivitas produksi air bersih.

III.1.3 Bidang Ketahanan Ekologi

Permasalahan pada aspek ekologi telah semestinya menjadi perhatian bagi Provinsi Kalimantan Tengah sebagai *Heart of Borneo*. Beberapa permasalahan yang patut digarisbawahi terkait dampak jangka panjangnya ialah **rendahnya resiliensi daerah terhadap bencana** di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini berkaitan dengan kurangnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, sehingga menciptakan kerentanan dalam menghadapi ancaman, baik alami maupun buatan. Implementasi alat Sistem Peringatan Dini (EWS) dan jalur evakuasi masih belum merata, sementara **keterbatasan kualitas SDM dan anggaran untuk manajemen kebencanaan** turut menghambat upaya evakuasi, rehabilitasi, rekonstruksi, dan mitigasi yang baik dan inklusif. Selain itu, sinergi yang belum optimal antara pemda lintas sektor, masyarakat, perguruan tinggi/akademisi, media massa, dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana mempersulit penanganan bencana secara holistik.

Di sisi lain, selalu adanya **tekanan terhadap kekayaan keanekaragaman hayati** mengancam biodiversitas Kalimantan Tengah sebagai hutan hujan tropis yang begitu kaya. **Tingginya alih fungsi lahan yang menyebabkan deforestasi, banjir, dan erosi** menjadi akar masalah utama dalam mengancam keberlanjutan ekosistem. Adapun **kerusakan fungsi ekosistem gambut**, baik fungsi budidaya maupun lindung, semakin memperburuk kondisi keberlanjutan ekologi di Kalimantan Tengah. Selanjutnya, permasalahan berkaitan dengan belum optimalnya integrasi upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup. **Pengolahan limbah dan persampahan** masih belum maksimal yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan tekanan terhadap daya dukung lahan. **Kualitas air yang buruk juga menjadi masalah serius** yang memerlukan perhatian khusus hingga pemberian *big push* dalam upaya peningkatan kualitasnya. Kemudian, kualitas tutupan lahan menuntut langkah-langkah konkret dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah.



III.1.4 Bidang Tata Kelola

Dalam bidang tata kelola pemerintahan, permasalahan yang dijumpai berkaitan dengan pencatatan dan administrasi kependudukan, berupa **belum optimalnya penerbitan dokumen kependudukan**. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat sehingga belum mengurus dokumen kependudukan, serta permasalahan teknis berupa keterbatasan jumlah paket peralatan adminduk di setiap kabupaten/kota. Masih ada kecamatan yang tidak memiliki paket peralatan adminduk serta kondisi peralatan yang rusak sehingga mempengaruhi efektivitas penerbitan dokumen.

III.2 ISU STRATEGIS

III.2.1 Bidang Sosial

- a) Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022 berjumlah 2.741.000 jiwa penduduk sedangkan pada tahun 2021 berjumlah 2.702.400 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk dinilai relatif terkendali dan meningkat stabil pada tahun 2022 sebesar 1,43%. Tingkat fertilitas Provinsi Kalimantan Tengah saat ini juga menunjukkan penurunan menuju angka Penduduk Tumbuh Seimbang sehingga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan penduduk kedepannya.
- b) Provinsi Kalimantan Tengah memiliki piramida penduduk stasioner awal. Piramida ini menunjukkan jumlah penduduk usia produktif yang tinggi, angka kelahiran yang mulai stabil, dan angka harapan hidup mulai membaik. Jumlah penduduk usia produktif pada tahun 2022 sebesar 1.936.100 jiwa sedangkan jumlah penduduk non produktif sebesar 804.900. Dominasi penduduk usia produktif menjadi salah satu modal pembangunan terutama jika dikelola dan difasilitasi secara optimal. Disisi lain, apabila potensi penduduk produktif tidak dioptimalkan maka akan menimbulkan beban pembangunan dan memunculkan masalah seperti kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan ekonomi, dan sebagainya
- c) Dalam bidang kesehatan, terdapat beberapa permasalahan seperti angka harapan hidup (AHH) Kalimantan Tengah yang masih berada dibawah rata-rata nasional. Pada tahun 2022, AHH Kalimantan Tengah sebesar 70,04



sementara AHH Nasional sebesar 73,6. Walaupun demikian, secara progres, Provinsi Kalteng menunjukkan peningkatan nilai AHH setiap tahunnya.

- d) Prevalensi stunting masih tinggi, yaitu sebesar 26.9 pada tahun 2022. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata prevalensi stunting nasional yaitu 21,6. Provinsi Kalimantan Tengah berada pada urutan ke-11 pada prevalensi balita stunting tertinggi di Indonesia. Prevalensi stunting menunjukkan persentase jumlah balita yang mengalami stunting dalam pertumbuhan fisiknya (pendek dan sangat pendek). Angka stunting berpengaruh terhadap masalah gizi pada balita. Semakin tinggi prevalensi stunting menunjukkan bahwa semakin tingginya permasalahan gizi di suatu daerah.
- e) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020 sebesar 140. Angka ini memang lebih rendah dari nilai AKI nasional yang bernilai 189. Ada berbagai penyebab dari Angka Kematian Ibu, diantaranya karena faktor kesehatan ibu sebelum dan saat hamil serta akses terhadap fasilitas kesehatan memadai yang terdekat. Peningkatan AKI berkorelasi dengan penurunan cakupan kunjungan ibu hamil K4 pada tahun 2020. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 pada tahun 2019 sebesar 84,49%, sedangkan pada tahun 2020 menjadi 80,36%. Akan tetapi saat ini tren cakupan kunjungan ibu hamil menunjukkan peningkatan hingga mencapai 88,45% pada tahun 2022.
- f) Perlu ditingkatkan ketersediaan fasilitas kesehatan beserta tenaga kesehatan agar mampu menjangkau seluruh wilayah. Jumlah tenaga medis disetiap kabupaten belum mencukupi, kecuali Kota Palangkaraya yang justru memiliki jumlah tenaga medis lebih banyak daripada kebutuhan. Tenaga medis yang dimaksud meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis (UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran). Jumlah ideal dokter menurut standar WHO adalah 1 per 1.000 penduduk.
- g) Masih rendahnya cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis. Pada tahun 2022 sebanyak 40,01% cakupan.
- h) Ketidakmerataan akses pendidikan dilihat melalui nilai angka putus sekolah terutama pada siswa SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Diantara penyebab tingginya angka putus sekolah, yaitu faktor ekonomi berupa keterbatasan finansial keluarga untuk membiayai pendidikan anak. Anak dengan kondisi

finansial keluarga yang terbatas akan memilih membantu orang tua nya untuk memperoleh penghasilan sehingga dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, daripada pergi bersekolah. Permasalahan ini perlu ditangani oleh pemerintah agar tidak memunculkan permasalahan lainnya di masa mendatang.

i) Program Keluarga Berencana

Keberhasilan program keluarga berencana diantaranya dipengaruhi oleh peningkatan wawasan masyarakat tentang kesehatan reproduksi serta peningkatan akses masyarakat untuk memperoleh layanan penggunaan alat kontrasepsi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keberhasilan program maka perlu diperhatikan faktor-faktor tersebut sehingga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ini. Pelaksanaan program KB juga menjadi tantangan di Kalimantan Tengah karena terjadi penurunan cakupan peserta KB aktif, sehingga penting menjadi perhatian pemerintah untuk kembali meningkatkan peserta KB.

j) Mempertahankan angka Total Fertility Rate dalam kondisi stabil agar tercipta kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS).

Angka TFR Kalimantan Tengah pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 2,31; kemudian menurun menjadi 2,29 pada tahun 2022. Penurunan TFR hingga mencapai replacement level, yaitu pada angka 2,1 sangat dianjurkan. Akan tetapi dengan melihat TFR Kalteng yang sudah hampir mencapai *replacement level*, maka perlu dilakukan pengendalian agar angka TFR tidak terus menurun.

k) Rata-rata usia kawin pertama wanita masih rendah.

Rata-rata usia kawin pertama wanita masih rendah. yaitu 19,7 pada tahun 2022. Artinya, wanita di Kalimantan Tengah rata-rata menikah di usia muda yaitu 19 tahun. Angka ini masih berada di bawah usia ideal menikah, yaitu 21 tahun sesuai arahan BKKBN. Penetapan usia ini mempengaruhi kesiapan kesehatan, mental, dan ekonomi. Pernikahan di usia muda berpengaruh terhadap angka kelahiran total (Total Fertility Rate), serta melahirkan di usia muda dapat berisiko terhadap kesehatan ibu dan bayi. Oleh karena itu diperlukan pendewasaan usia perkawinan sehingga mengurangi jumlah pernikahan di usia dini.



- l) Belum optimalnya kepesertaan masyarakat dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Masih ada masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan. Kepesertaan masyarakat dalam JKN bertujuan untuk memberi perlindungan kesehatan sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat. Pada tahun 2022, persentase kepesertaan JKN sebesar 59,67%, menurun dari tahun sebelumnya yang bernilai 64,28%.

- m) Menurunnya nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender merupakan rasio yang membandingkan capaian IPM Perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG Kalteng mengalami fluktuasi naik dan turun. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya peningkatan agar dapat mencapai angka 100. Selain IPM juga terdapat Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Semakin tinggi nilai IDG artinya semakin tinggi partisipasi perempuan dalam keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan ataupun dari sisi distribusi pendapatan. Permasalahan mengenai hal ini dihadapi oleh Kalteng karena terjadi penurunan IDG pada tahun 2022. Nilai IDG mulai menurun pada tahun 2020 hingga tahun 2022.

- n) Masalah kemiskinan daerah

Persentase penduduk miskin di Kalimantan Tengah pada tahun 2022 sebesar 5,28%. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin sebesar 5,16%. Artinya, Kalimantan Tengah mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin. Kondisi kemiskinan juga bisa diukur dengan melihat Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan kesenjangan pengeluaran penduduk terhadap kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kalteng tahun 2022 sebesar 0,91. Angka ini meningkat dari tahun 2021 dengan nilai 0,71. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan bahwa semakin jauh rata-rata penghasilan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan. Artinya kondisi kemiskinan semakin dalam atau semakin parah. Pengukuran berikutnya yaitu Indeks Keparahan Kemiskinan yang menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Nilai indeks keparahan kemiskinan tahun 2022 meningkat dari tahun





sebelumnya, yang artinya semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

- o) Belum optimalnya penanganan masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Persentase penanganan PMKS pada tahun 2022 sebesar 61,71%, yang artinya masih bisa ditingkatkan lagi agar mampu mencapai 100% atau menangani seluruh PMKS di Kalteng. Selain penanganan yang belum optimal, jumlah PMKS di Kalteng juga mengalami peningkatan cukup banyak. Pada tahun 2021, PMKS berjumlah 226.518 jiwa sedangkan tahun 2022 berjumlah 420.533 jiwa.

- p) Pada tahun 2022, Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,26. Angka ini sudah menurun dari tahun sebelumnya yang memiliki nilai TPT 4,53. Penurunan TPT perlu terus dilakukan sehingga jumlah pengangguran berkurang dan berdampak pada kondisi ekonomi daerah yang juga semakin baik. Meningkat dan menurunnya nilai TPT dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi daerah, upah minimum kabupaten/kota, tingkat pendidikan yang ditamatkan, serta kondisi angkatan kerja lainnya.

- q) Belum optimalnya nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) disusun menggunakan indikator (1) pemerataan layanan perpustakaan, (2) ketercukupan koleksi perpustakaan, (3) ketercukupan tenaga perpustakaan, (4) tingkat kunjungan masyarakat per hari, (5) perpustakaan ber-SNP, (6) keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, dan (7) anggota perpustakaan. Pada tahun 2022, angka IPLM sebesar 54,26. Nilai indeks ini bisa ditingkatkan dengan cara meningkatkan kualitas dan layanan perpustakaan baik berupa sarana prasarana maupun tenaga perpustakaan.

- r) Nilai Indeks Literasi Membaca pada kategori “sedang”. Perhitungan Indeks Literasi Membaca menggunakan empat dimensi, yaitu dimensi kecakapan, dimensi akses, dimensi alternatif, dan dimensi budaya. Salah satu penyebab nilai ILM masih sedang ialah belum meratanya persebaran fasilitas baca sehingga tidak semua masyarakat bisa mengakses sumber bacaan, terutama di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

- s) Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan yang belum stabil. Tahun 2019 sebesar 55,76; tahun 2020 sebesar 53,88; dan tahun 2022 sebesar 55,21.





Indeks Pembangunan Kebudayaan memiliki tujuh dimensi, yaitu (1) ekonomi budaya, (2) pendidikan, (3) ketahanan sosial budaya, (4) warisan budaya, (5) kebebasan ekspresi budaya, (6) budaya literasi, dan (7) gender. Seluruh dimensi IPK Kalteng memiliki nilai yang lebih rendah daripada nilai dimensi pada IPK nasional, kecuali pada aspek gender. Nilai dimensi ketahanan sosial dan dimensi warisan budaya di Kalteng masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan kondisi bahwa terjadi penurunan jumlah penetapan benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya; serta menurunnya jumlah penyelenggaraan festival atau kegiatan seni budaya.

- t) Pemenuhan hak-hak politik masyarakat yang belum optimal, yang dilihat dari meningkatnya jumlah demo di Kalimantan Tengah. Demo terjadi karena beberapa hal, seperti tidak terakomodirnya suara masyarakat dan tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang memicu terjadinya protes kepada pemerintah ataupun pihak bersangkutan. Masyarakat memiliki hak-hak politik termasuk diantaranya untuk menyampaikan kekurangan dari pelayanan pemerintah terhadap kehidupan masyarakat.
- u) Kesadaran terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan yang menurun dilihat dari penurunan jumlah Linmas per 10.000 penduduk. Keberadaan linmas yang dijalani oleh warga masyarakat berperan penting dalam melindungi masyarakat, serta memelihara ketertiban, ketenteraman dan keamanan masyarakat. Pada tahun 2021, jumlah linmas sebanyak 58.886 linmas, sedangkan pada tahun 2022 menurun menjadi 52.032 linmas.
- v) Meningkatnya jumlah kejahatan yang dilaporkan serta menurunnya persentase penyelesaian kejahatan. Peningkatan jumlah kejahatan dapat memunculkan rasa tidak aman bagi masyarakat dalam beraktivitas di ruang publik. Pada tahun 2019, jumlah kejahatan terlapor sebanyak 2.444 kasus, yang kemudian meningkat menjadi 2.629 kasus pada tahun 2022. Disisi lain, pada tahun 2019 penyelesaian kasus kejahatan sebesar 87,19% dan menurun menjadi 78,89% pada tahun 2020. Diperlukan tindakan yang tegas agar tercipta ketenteraman dalam masyarakat.





III.2.2 Bidang Ekonomi

- a) Peningkatan valuasi nilai ekspor yang dipengaruhi oleh produk dan kesadaran pelaku usaha.

Nilai ekspor yang masih rendah dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang regulasi ekspor, *branding* produk lokal yang belum optimal, dan jenis pemasaran yang digunakan. Meningkatkan nilai ekspor memerlukan diversifikasi produk lokal dan peningkatan kualitas, sementara kesadaran pelaku usaha mengacu pada peningkatan daya saing dan akses pasar global. Hal ini kemudian akan memicu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah. Namun, tantangan ini juga melibatkan masalah infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, dan regulasi yang mendukung yang harus diatasi untuk mencapai hasil yang signifikan dalam jangka panjang.

- b) Belum optimalnya hilirisasi produk dan kualitas SDM.

Beberapa permasalahan seperti kurangnya nilai tambah produk, terbatasnya teknologi produksi, dan terbatasnya suplai SDM terampil berdampak pada produktivitas kinerja serta hasil produk industri. Kendala dalam meningkatkan hilirisasi produk lokal juga dapat menghambat nilai tambah ekonomi daerah dan menciptakan ketergantungan pada produk impor. Sementara itu, rendahnya kualitas SDM industri dapat membatasi inovasi dan produktivitas. Oleh karena itu, perlu investasi dalam pelatihan dan pembinaan, peningkatan infrastruktur, dan dukungan kebijakan yang mendorong investasi sektor industri. Upaya ini akan berkontribusi pada diversifikasi ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah.

- c) Terbatasnya diversifikasi bahan pangan dan pengetahuan masyarakat tentang kualitas pangan serta sulitnya akses logistik

Masyarakat masih bergantung pada beras sebagai bahan pangan utama yang berimplikasi pada tingginya permintaan terhadap beras. Diperlukan peningkatan produksi padi dan diversifikasi bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata, mandiri, dan berkelanjutan. Selain itu, bahaya penggunaan pestisida dan pengawet pada makanan belum banyak



disadari oleh masyarakat. Tidak hanya belum meratanya konektivitas daerah di Kalimantan Tengah menyebabkan tingginya biaya logistik bahan pangan beserta sandang, bahan makanan, dan pendidikan. Adapun hal ini menjadi sebab tingginya inflasi di Kalimantan Tengah.

d) Mata Pencaharian Utama Masyarakat

Sektor pertanian menjadi sektor utama di Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus sebagai mata pencaharian utama masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat dalam RTRW Kalimantan Tengah bahwa penataan ruang provinsi ini bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang yang berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agorindustri. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi sebesar 22,14% terhadap total PDRB di Kalimantan Tengah pada tahun 2022. Selain sektor pertanian, sektor ekonomi lainnya yang potensial dikembangkan adalah sektor industri pengolahan berupa barang anyaman yang terbuat dari bambu, rotan, dan sejenisnya (Kemenkeu, 2021).

e) Potensi Ekonomi Melalui Keragaman Budaya Kalimantan Tengah

Potensi budaya Kalimantan Tengah sebagai kearifan lokal sekaligus daya tarik bagi masyarakat atau pengunjung dari luar daerah. Keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat menjadi kekayaan yang tak terbatas dan perlu untuk dijaga. Diantara upaya untuk memperkenalkan keunikan budaya daerah ialah melalui pertunjukan seni atau festival kebudayaan. Penyelenggaraan festival sudah dilaksanakan dari tahun ke tahun, walaupun mengalami penurunan jumlah festival pada tahun 2022. Diantara festival yang diselenggarakan adalah Festival Budaya Isen Mulang, yaitu festival menjelang ulang tahun provinsi Kalimantan Tengah yang menampilkan kearifan lokal Suku Dayak. Selain festival budaya, pemanfaatan potensi budaya dapat dikolaborasikan dengan aktivitas pariwisata atau menjadi atraksi wisata itu sendiri.

f) Potensi Ekonomi Melalui Wisata Alam

Wisata alam yang tersebar diseluruh kabupaten/kota menjadi salah satu keunggulan dan penggerak ekonomi di Kalimantan Tengah. Pengembangan pariwisata secara partisipatif mampu mendayagunakan masyarakat lokal, diantaranya dengan mengadakan pembinaan, menciptakan masyarakat yang

sadar wisata, mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjaga alam dan melestarikan budaya adat-istiadat

g) **Potensi Ekonomi Melalui Kuliner Tradisional**

Potensi kuliner tradisional dapat diperkenalkan dan dikembangkan melalui sosial media, kegiatan pariwisata, dan festival budaya. Kuliner tradisional memberikan otentisitas dan menjadi ciri khas suatu daerah. Selain memberikan cita rasa baru bagi para pengunjung, pengembangan potensi kuliner dapat berimplikasi pada aktivitas ekonomi kreatif masyarakat setempat.

III.2.3 Bidang Ketahanan Ekologi, Sosial, dan Budaya

- a) Rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya membaca dan rendahnya kualitas serta cakupan layanan perpustakaan daerah.
- b) Kalimantan Tengah memiliki sumber energi yang besar, baik energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Potensi sumber daya tidak terbarukan seperti batu bara dan gas alam. Potensi sumber daya terbarukan seperti energi surya, air, angin, biomassa dan biogas. Potensi energi terbarukan yang besar di Kalimantan Tengah perlu dikembangkan dan direalisasikan terutama untuk sebagai alternatif dari sumber daya tidak terbarukan sebagai pembangkit listrik.
- c) Tantangan pemenuhan ketahanan energi di tengah upaya transisi energi Ketahanan energi merupakan tantangan penting dalam hal perencanaan pembangunan pada 20 tahun mendatang. Komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon yang diejawantahkan dalam *Enhanced NDC* serta komitmen transisi energi hingga tahun 2050 menjadi tantangan bagi pemenuhan ketahanan energi di daerah. Daerah pada masa mendatang tidak dapat bergantung pada bahan bakar yang bersumber dari fosil serta memiliki emisi karbon tinggi. Bagaimanapun proses alih energi ini memerlukan biaya yang tidak kecil sehingga dapat meningkatkan harga atas energi. Harga atas energi yang tinggi ke depannya dapat berpengaruh pada ketahanan energi di daerah karena dapat mendisrupsi keterjangkauan harga dan akses di masyarakat. Peluang daerah untuk memaksimalkan potensi EBT ke depannya diperlukan untuk menjamin transisi energi tetap dalam koridor yang ditetapkan dan tetap menjaga ketahanan energi di level daerah.

- d) Tantangan pemenuhan air minum layak, aman, dan berkelanjutan Air Minum merupakan salah satu pelayanan dasar yang penting sebagai penunjang kehidupan dan penghidupan. Masih adanya rumah tangga dengan akses air minum belum layak dan berkelanjutan menjadi pekerjaan rumah mengingat pemenuhan aspek ini dapat berpengaruh bagi berbagai aspek lain seperti kesehatan, ekonomi, dan juga sosial. Alih fungsi lahan dan juga pencemaran badan air sumber air baku dapat menjadi ancaman ke depan yang dapat memperburuk kualitas air minum.
- e) Perlunya pemenuhan kebutuhan irigasi dan kualitas irigasi Masih terdapat luas daerah irigasi di Provinsi Kalimantan Tengah yang belum terlayani oleh jaringan irigasi. Hal ini berarti secara kebutuhan masih terdapat daerah irigasi yang perlu dibangun jaringan irigasi ke depannya. Pun, daerah yang telah terlayani masih terdapat jaringan irigasi yang berkondisi tidak baik. Sehingga baik secara kuantitas dan kualitas jaringan irigasi ke depannya perlu dipenuhi. Hal ini menjadi perhatian utamanya karena program food estate yang salah satunya menasar Provinsi Kalimantan Tengah
- f) Kesesuaian pelaksanaan RTRW belum sepenuhnya terlaksana Masih terdapat ketidaksesuaian implementasi RTRW baik pada aspek pola dan struktur ruang. Hal ini juga dapat dilihat dari ketaatan terhadap RTRW yang belum mencapai 100%. Terlaksananya amanah penataan ruang menjadi kunci penting untuk dapat menjamin keberlanjutan pembangunan.
- g) Pengentasan Rumah Tidak Layak Huni dan Kawasan Kumuh serta peningkatan standar sanitasi
Saat ini masih terdapat rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh yang belum terentaskan. Kondisi ini selayaknya sudah menjadi permasalahan yang diselesaikan sesuai amanah program Kota Tanpa Kumuh dan Indikator SDG's. Selain itu standar sanitasi di Kalimantan Tengah yang masih berada di bawah standar nasional patut menjadi perhatian. Hal ini mengingat kualitas permukiman yang layak perlu menjadi perhatian untuk menunjang provinsi yang liveable dan dapat menunjang penghidupan warganya.
- h) Peningkatan Performa Logistik dan Pengembangan Transportasi Umum Terintegritasi
Mobilitas orang dan barang menjadi urat nadi bagi pertumbuhan

perekonomian bagi suatu daerah. Kesiapan secara kuantitas dan jumlah sarana prasarana penunjang mobilitas orang dan barang menjadi penting untuk dapat menjamin keberlanjutan pembangunan. Performa logistik dan pengembangan transportasi umum terintegrasi menjadi salah satu indikator penting untuk meminimalisir hambatan mobilitas. Selain daripada infrastruktur fisik perlu disusun secara lebih spesifik untuk infrastruktur non fisik seperti sistem maupun kerangka kebijakan.

i) Perwujudan Kalteng sebagai Smart Province

Sampai saat ini belum ada kota/kab di Kalteng yang berstatus Smart City/Regency oleh karenanya ke depan perlu ada perluasan penerapan konsep smart city di tiap kab/kota. Smart city dipahami bukan hanya sebagai penyediaan akan teknologi namun perlu juga dipahami sebagai kerangka untuk ke depannya tiap kab/kota mampu menemukan permasalahan dan menyelesaikan permasalahan pembangunan dengan efisien dan efektif dengan bantuan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

j) Pemerataan akses internet

Tidak dapat dipungkiri kondisi pasca pandemi COVID-19 mendorong dan mendisrupsi proses digitalisasi di berbagai aspek. Salah satu prasyarat penting agar daerah mampu berdaya saing di era digitalisasi adalah akses akan internet yang dapat diandalkan. Saat ini masih terdapat daerah yang belum terlayani jaringan internet seluler di Kalimantan Tengah. Pun, dari daerah yang terakses internet baru setengah daerah yang memiliki jaringan internet 4G/LTE yang dapat menjamin koneksi stabil. Oleh karena itu, pemerataan akses internet baik secara kuantitas dan kualitas perlu menjadi perhatian ke depannya.

III.2.4 Bidang Tata Kelola

- a) Penerbitan dokumen kependudukan yang belum optimal
Cakupan penerbitan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, akta nikah, KTP elektronik, akta kelahiran, akta kematian, dan kartu identitas anak yang belum mencapai angka 100%. Artinya, masih terdapat penduduk yang belum mengurus dokumen kependudukan tersebut. Pada tahun 2020, penerbitan Kartu Keluarga sebesar 99,93%, akta nikah sebesar 35,32%, KTP elektronik sebesar 93,3%, akta kelahiran sebesar 83,5%, dan akta kematian

sebesar 89,61%. Persentase masyarakat yang sudah mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil masih sebesar 95% pada tahun 2020. Untuk mencapai angka 100%, diperlukan inovasi dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga dapat terwujud tertib administrasi kependudukan (adminduk).

- b) Permasalahan terkait penerbitan dokumen kependudukan dipengaruhi oleh ketersediaan peralatan yang terbatas. Setiap kecamatan minimal memiliki satu paket alat cetak KTP. Namun, masih terdapat beberapa kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak memiliki alat cetak KTP sehingga berdampak pada terhambatnya penerbitan dokumen kependudukan.
- c) Belum optimalnya pencapaian target pada indikator RPJMD Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai atau melebihi target pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2019, capaian sebesar 47,45% yang kemudian menurun menjadi 36,52% pada tahun 2020.
- d) Masih sedikitnya jumlah kajian litbang yang dilakukan kajian penelitian dan pengembangan memiliki peran terhadap inovasi daerah. Melalui litbang, dapat diperoleh ide atau terobosan baru serta dirumuskannya strategi pembangunan yang sesuai dengan kondisi daerah. Kajian kelitbang yang dilakukan oleh pemerintah Kalimantan Tengah masih sedikit, pada tahun 2021 hanya terdapat dua kali kajian.
- e) Masih belum terwujudnya manajemen talenta dan peningkatan kapasitas SDM pemerintahan yang mumpuni.
- f) Masih regulasi, kelembagaan, proses bisnis, manajemen talenta, meritokrasi dan integritas, manajemen ASN strategis, pelayanan publik, pelayanan strategis, digitalisasi, tata kelola partai politik dan relasi pemerintah dengan masyarakat sipil

III.2.5 Isu Khusus Kewilayahan

- a) **Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)** sebagai pemekaran Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai provinsi terluas di Indonesia manajemen pembangunan menjadi tantangan yang besar bagi Kalimantan Tengah. Jauhnya akses antar pusat kegiatan dan sedikitnya jumlah penduduk membuat akselerasi pembangunan menjadi cukup berat untuk dilakukan. Oleh karena hal tersebut, isu mengenai pemekaran wilayah provinsi menjadi isu yang

hangat dibicarakan dan telah menjadi perhatian beberapa pemangku kepentingan di provinsi. Zonasi pembangunan saat ini yang menjadikan tiga zona utama merupakan cikal bakal provinsi baru yang akan terbentuk. Oleh karena demikian, penyusunan RPJPD ini perlu memperhatikan kemungkinan perkembangan isu ini untuk menunjang kebersinambungan pembangunan

- b) **Pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.** Provinsi Kalimantan Tengah sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur diharapkan dapat menjadi daerah mitra bagi IKN. Lebih lanjut, Kalimantan Tengah juga harus mampu menerima *spillover effect* dari pembangunan IKN melalui penyiapan konektivitas antar wilayah yang baik, penyiapan tenaga kerja lokal, dan penyediaan sumber daya alam.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH





BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

IV.1 VISI

Visi RPJPD adalah pandangan jangka panjang selama 20 tahun mengenai pembangunan daerah yang didasarkan pada kepentingan daerah. Visi RPJPD menggambarkan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang diharapkan oleh masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat terwujud. Visi ini menjelaskan arah atau kondisi ideal yang ingin dicapai sesuai dengan kondisi saat ini, dengan mempertimbangkan menganalisis tren periode sebelumnya, sehingga dapat ditentukan target masa depan yang diinginkan. Visi bukan sekadar impian atau serangkaian harapan, melainkan suatu komitmen dan usaha untuk merencanakan dan mengelola perubahan demi mencapai tujuan yang diinginkan.

Tabel IV.1.1 Komparasi Visi Pembangunan

Visi RPJPN 2025-2045	Visi RPJPD Kalteng 2005-2025
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Kalimantan Tengah Yang Maju Mandiri dan Adil.
Visi RPJMN 2020-2025	Visi RPJMD Kalteng 2021-2026
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis

Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2045 dirumuskan setelah mengkaji kondisi umum daerah, menganalisis potensi dan permasalahan yang ada, menilai isu-isu strategis, dan memperhatikan aspirasi dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang kemudian dirumuskan sebagai berikut.

KALIMANTAN TENGAH TANGGUH 2045: BERMARTABAT, BERKAH, MAJU, DAN BERKELANJUTAN

Visi tersebut merupakan pengejawantahan sebuah proses dalam merangkai dan mewujudkan rajutan mimpi masyarakat Kalimantan Tengah di masa mendatang. Provinsi Tangguh diambil dari filosofi masyarakat yang tangguh dan tidak pantang menyerah sebagaimana disebut oleh Suku Dayak yakni "*Menteng Ureh Mamot*". Harapannya ke depan Pembangunan Kalimantan Tengah dapat disongsong bersama



dengan semangat gotong royong dan tidak kenal menyerah guna mencapai mimpi dan tujuan bersama masyarakat Kalimantan Tengah.



Gambar IV.1.1 Penjabaran Visi RPJPD 2025-2045 Provinsi Kalimantan Tengah

Secara lebih mendetail tiap komponen kata dalam Visi RPJPD Provinsi Kalteng memiliki makna dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka panjang. “Kalimantan Tengah Tangguh 2045” memiliki makna di mana kondisi tahun 2045 tercapai cita-cita di mana Kalteng dapat menjadi Provinsi yang Tangguh karena mampu terus beradaptasi, berinovasi dan berkembang di tengah perkembangan zaman. Provinsi yang *agile* dan selalu relevan terhadap tantangan zaman menjadi kondisi yang dipilih untuk menghadapi masa depan di era *Volatile, Uncertain, Complex, dan Ambiguous* (VUCA).

Aspek **Bermartabat** diejawantahkan dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing dan pembangunan yang memanusaiakan serta meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Kalteng. Aspek **Berkah** diejawantahkan dalam mewujudkan kepemimpinan daerah dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Aspek **Maju** mencita-citakan provinsi yang kompetitif, modern, dan inovatif. Terakhir, aspek **Berkelanjutan** sebagai bentuk pengejawantahan bahwa pembangunan akan terus diwariskan ke generasi mendatang sehingga pembangunan haruslah lestari dan seimbang antara pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.



IV.2 SASARAN VISI

Terwujudnya Provinsi Kalimantan Tengah sebagai provinsi tangguh 2045 dijabarkan dalam poin-poin sasaran visi yang sejatinya merupakan bagian dalam cita-cita besar Bangsa Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Adapun keterkaitan antara sasaran visi RPJPN dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah tersaji sebagaimana gambar berikut





Gambar IV.2.1 Penyelarasan Sasaran Utama Visi RPJPD Kalimantan Tengah

Berdasarkan penyelarasan tersebut Kalimantan Tengah visi BERMARTABAT, BERKAH, MAJU, DAN BERKELANJUTAN digambarkan melalui lima sasaran utama visi: (1) Peningkatan Pendapatan Per Kapita, (2) Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan

Berkurang, (3) Kepemimpinan Berintegritas, (4) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia, dan (5) Penurunan Emisi GRK Menuju Net Zero Emission.

Tabel IV.2.1. Sasaran Utama Visi RPJPD Kalimantan Tengah

No	Sasaran Visi	Baseline 2025	Sasaran 2045
1	Peningkatan Pendapatan Per Kapita		
	a. PDRB per Kapita (RP Juta)	82,71	629,75
	b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	27,78	40,58
	c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	15,76	26,75
	Pertumbuhan Ekonomi	5,6	6,64
2	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang		
	a. Tingkat Kemiskinan (%)	4,61	0,58
	b. Rasio Gini (Indeks)	0,315	0,249
	c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,02	1,47
3	Kepemimpinan Berintegritas		
	Rata-Rata Wilayah <i>Monitoring Centre for Prevention</i> (%)	84	95
4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia		
	a. Indeks Modal Manusia	0,54	0,70
5	Penurunan Emisi GRK Menuju Net Zero Emission		
	a. Penurunan intensitas emisi GRK (%)	76	100
	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,34	82,65

Sasaran Visi tersebut menjadi representasi dari poin-poin yang tersusun dalam Visi Kalteng Tangguh Tahun 2045 sebagai berikut:

1. **Maju** direpresentasikan pada poin sasaran visi 1 Peningkatan Pendapatan Per Kapita
2. **Bermartabat** direpresentasikan pada poin sasaran visi 2 dan 4 yakni Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang serta Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3. **Berkah** direpresentasikan pada poin sasaran visi 3 Kepemimpinan Berintegritas
4. **Berkelanjutan** direpresentasikan pada poin sasaran visi 5: Penurunan Emisi GRK Menuju *Net Zero Emission*

Adapun periodisasi 5 tahunan dari sasaran visi yang telah tersusun di atas tersaji sebagai berikut:



Tabel IV.2.2 Tabel Periodisasi Sasaran Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2045

No	Sasaran Visi	Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045
1	Peningkatan Pendapatan Per Kapita					
	a. PDRB per Kapita (RP Juta)	82,40	224,48	400,00	542,08	650,75
	b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	22,78	27,23	33	36,79	40,58
	c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	15,76	18,20	24,00	25,75	26,75
2	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang					
	a. Tingkat Kemiskinan (%)	4,61	2,93	1,95	1,07	0,58
	b. Rasio Gini (Indeks)	0,315	0,307	0,290	0,281	0,249
	c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,02	1,12	1,30	1,40	1,47
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,6	5,86	6,12	6,38	6,64
3	Kepemimpinan Berintegritas					
	Rata-Rata Wilayah <i>Monitoring Centre for Prevention</i> (%)	84	87	90	92	95
4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia					
	a. Indeks Modal Manusia	0,54	0,59	0,64	0,67	0,70
5	Penurunan Emisi GRK Menuju Net Zero Emission					
	a. Penurunan intensitas emisi GRK (%)	76	82,50	87,00	93,5	100
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,34	77,91	79,48	81,05	82,65

IV.3 UPAYA *BIG PUSH* PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH

Visi Besar RPJPD Kalteng 2025-2045 memerlukan upaya khusus untuk mendorong capaian yang melebihi tren biasa yang diperoleh melalui skenario *business as usual*



(BAU). Strategi Big Push digunakan untuk mendorong peningkatan pembangunan di berbagai aspek utama. Upaya ini disusun dalam upaya-upaya transformatif dan peningkatan ketahanan di bidang-bidang prioritas. Bidang yang dimaksud adalah transformasi sosial dengan memanfaatkan *window of opportunity* dari Bonus Demografi yang diterima Kalimantan Tengah Pada Periode 2025-2045. Selain itu, dengan melakukan transformasi ekonomi dengan melakukan *big push* pada sektor ekonomi unggulan dan pemerataan ekonomi wilayah. Terakhir adalah dengan melakukan peningkatan ketahanan ekologi dengan meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

IV.3.1 Transformasi Ekonomi

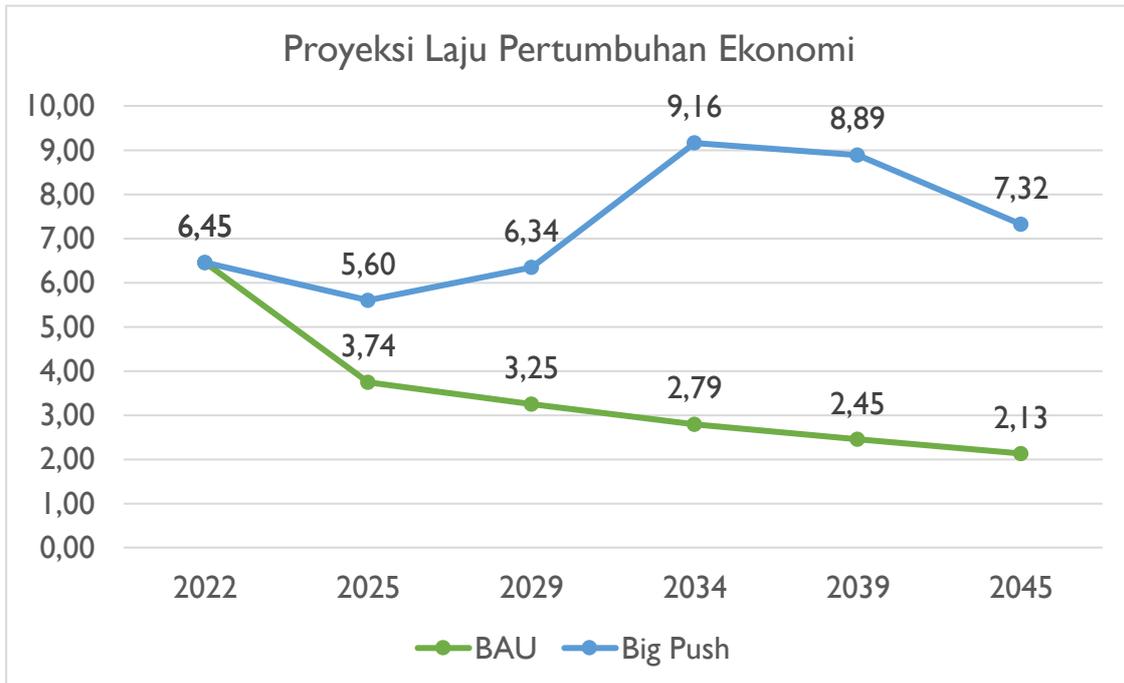
Pertimbangan penting dalam menentukan trajektori pembangunan ekonomi di Kalimantan Tengah berangkat dari arah kebijakan pembangunan dari masing masing kluster pulau dalam RPJPN. Arah kebijakan dalam RPJPN mengamanahkan kontribusi dan pertumbuhan ekonomi dari masing-masing pulau. Semangat dalam RPJPN adalah berusaha memindahkan kontribusi pembangunan ke Kawasan Indonesia Timur termasuk di dalamnya adalah Pulau Kalimantan.

Tabel IV.3.1. Target Kontribusi Pulau Kalimantan

	2022	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Pertumbuhan (%)	4,9	5,6-6,3	8,5-9,9	7,3-8,9	5,7-7,3
Kontribusi (%)	9,2	9,6	10,5	11,1	11,3

Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Dapat diamati bahwa nilai pertumbuhan di Pulau Kalimantan ditargetkan terus meningkat hingga tahun 2045. Terdapat pekerjaan rumah bagi masing-masing provinsi di Kalimantan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan paling tinggi ditargetkan terdapat pada periode kedua RPJP yakni pada periode 2030-2034. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah dengan asumsi *Bussiness As Usual* yang disandingkan dengan asumsi diberikan intervensi/*big push*.



Gambar IV.3.1. Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dalam menjawab amanah RPJPN 2045 disusunlah strategi *big push* di bidang ekonomi. Upaya *big push* di bidang ekonomi di sini diupayakan dalam melakukan tranformasi ekonomi Kalimantan Tengah. Pada gambar di atas dapat diamati bahwa apabila hanya mengandalkan kondisi eksisting dan tanpa intervensi ke depannya maka laju pertumbuhan ekonomi Kalteng cenderung mengalami penurunan. Hal ini tentu bertolak belakang dengan amanah dari trajektori pertumbuhan ekonomi regional Pulau Kalimantan dalam RPJPN. Sekurangnya Kalimantan Tengah memiliki tren yang sama sebagaimana amanah dari RPJPN. Dalam proyeksi *big push* diperoleh bahwa pada periode kedua RPJPN Kalteng akan mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk menjawab tantangan pembangunannya.

Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Kalteng berimplikasi pada kontribusi Provinsi Kalteng terhadap regional Pulau Kalimantan. Berikut merupakan tabel yang menggambarkan proyeksi kontribusi Kalimantan Tengah dan provinsi-provinsi lainnya di Pulau Kalimantan terhadap PDRB Pulau Kalimantan.



Tabel IV.3.2. Proyeksi Kontribusi PDRB Asumsi BAU* di Pulau Kalimantan

Provinsi	Baseline 2022	2025	2030	2035	2040	2045
Kalimantan Barat	14,48%	14,98%	15,46%	15,81%	16,06%	16,25%
Kalimantan Tengah	11,32%	11,37%	11,94%	12,34%	12,64%	12,87%
Kalimantan Selatan	14,22%	13,35%	13,61%	13,79%	13,92%	14,02%
Kalimantan Timur	52,14%	52,04%	50,35%	49,16%	48,28%	47,60%
Kalimantan Utara	7,85%	8,25%	8,63%	8,90%	9,10%	9,26%
Pulau Kalimantan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

*BAU = *Business As Usual*

Terdapat informasi dari tabel di atas bahwa perekonomian Pulau Kalimantan masih di dominasi oleh salah satu provinsi saja dan belum mampu tersebar secara merata pada lima provinsi di dalamnya. Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 baru mampu memberikan kontribusi sebesar 11,32% terhadap keseluruhan PDRB di Pulau Kalimantan. Berdasarkan proyeksi PDRB dengan asumsi *Business As Usual* didapatkan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah hanya mampu mengalami peningkatan sebesar 1,55% selama dua puluh tahun mendatang dan diprediksi akan memberikan kontribusi sebesar 12,87% terhadap PDRB di Pulau Kalimantan. Oleh karenanya sangat dibutuhkan arah kebijakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan menciptakan *big push* sebagai upaya *Non Business As Usual* dalam transformasi pembangunan khususnya di dalam hal transformasi ekonomi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kontribusinya terhadap perekonomian dalam skala regional, nasional, dan/atau global. Berikut merupakan tabel proyeksi yang memuat gambaran perkembangan kontribusi Provinsi Kalimantan Tengah dan provinsi-provinsi lainnya di pulau Kalimantan terhadap PDRB Pulau Kalimantan dengan *Big Push*.

Tabel IV.3.3. Proyeksi Kontribusi PDRB dengan *Big Push* di Pulau Kalimantan

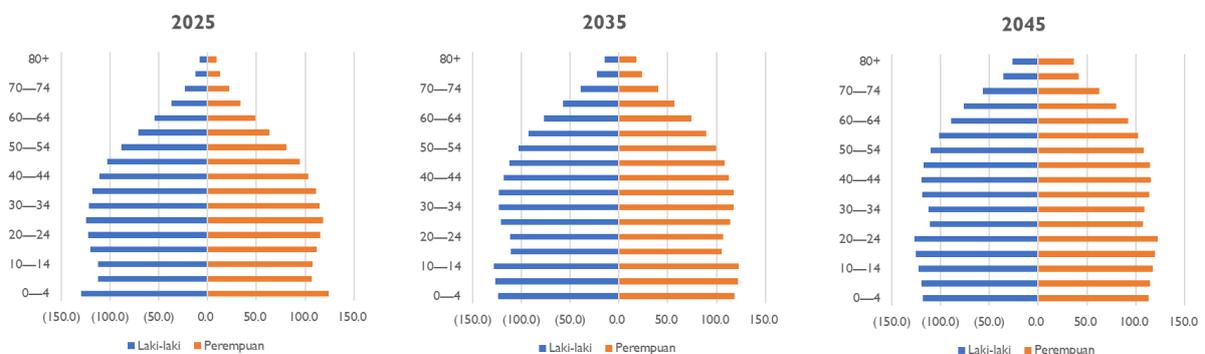
Provinsi	2022	2025	2030	2035	2040	2045
Kalimantan Barat	14,48%	14,98%	14,91%	14,98%	15,04%	15,08%
Kalimantan Tengah	11,32%	11,37%	15,13%	16,93%	18,21%	19,17%
Kalimantan Selatan	14,22%	13,35%	13,12%	13,06%	13,03%	13,01%
Kalimantan Timur	52,14%	52,04%	48,53%	46,59%	45,20%	44,16%
Kalimantan Utara	7,85%	8,25%	8,32%	8,44%	8,52%	8,59%
Pulau Kalimantan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Catatan: Asumsi *Big Push* hanya diterapkan untuk Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel di atas menginformasikan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDRB Pulau Kalimantan. Kondisi tersebut berpeluang besar untuk tercapai saat Provinsi Kalimantan Tengah berani memberikan komitmen dan arah kebijakan yang memuat *big push* untuk masing-masing kluster pembangunan yang telah direncanakan. *Big push* ini dapat diturunkan pada masing-masing sasaran sektoral yang potensial dan tentunya juga pada masing-masing kluster pembangunan agar tercipta pemerataan pembangunan dan perekonomian wilayah.

IV.3.2 Transformasi Sosial

Upaya Transformasi Sosial menjadi penting dalam melakukan *big push* pembangunan. Hal ini berangkat dari kondisi bonus demografi Kalimantan Tengah yang sedang dan akan terjadi. Sebagaimana tertampil dalam piramida penduduk di bawah, dapat diamati bahwa terjadi pergeseran komposisi kelompok usia penduduk Kalimantan Tengah selama periode RPJPD 2025-2045.



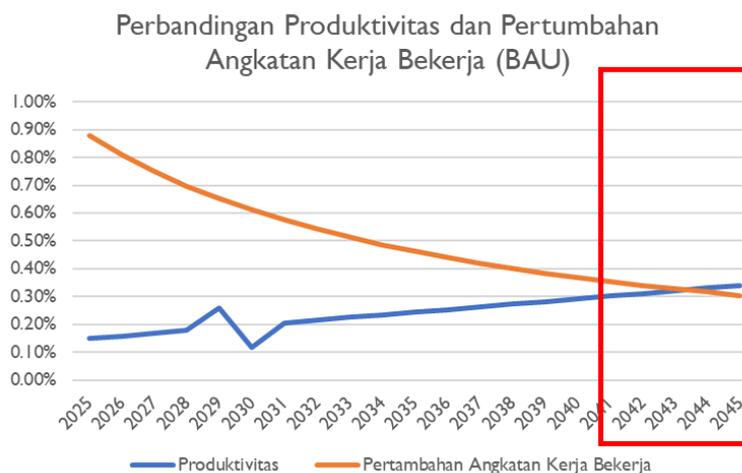
Gambar IV.3.2. Proyeksi Piramida Penduduk Kalimantan Tengah Tahun 2025, 2035, dan 2045

Pergeseran Komposisi penduduk di Kalimantan Tengah menunjukkan terjadinya pergeseran di mana terdapat fase di mana angka ketergantungan penduduk berada dalam bonus demografi dan pada akhir periode masa bonus demografi ini mulai berakhir. Sebagaimana tertampil dalam tabel berikut dapat diperhatikan bahwa angka ketergantungan pada akhir periode sudah lebih dari angka 50 yang mana menandakan berakhirnya bonus demografi.

Tabel IV.3.4. Proyeksi Angka Ketergantungan Kalimantan Tengah

Komposisi Penduduk	2025	2035	2045
0 — 14 Tahun	24,32	23,56	21,02
15 — 64 Tahun	70,12	67,79	66,61
65+ Tahun	5,56	8,66	12,37
Angka Ketergantungan (%)	42,61	47,53	50,13

Kondisi eksisting saat ini dan apabila mengandalkan *Bussiness as Usual* maka produktivitas tenaga kerja masih belum efektif. Dapat dilihat bahwa berdasarkan grafik di bawah persilangan temu antara pertumbuhan angkatan kerja yang bekerja dengan produktivitas baru terwujud pada periode akhir RPJPD. Hal ini tentu tidak menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan akan naik hingga 9% dan mencapai puncaknya pada periode 2. Dalam kata lain pembangunan sosial perlu ditransformasikan guna mewujudkan upaya *big push*.

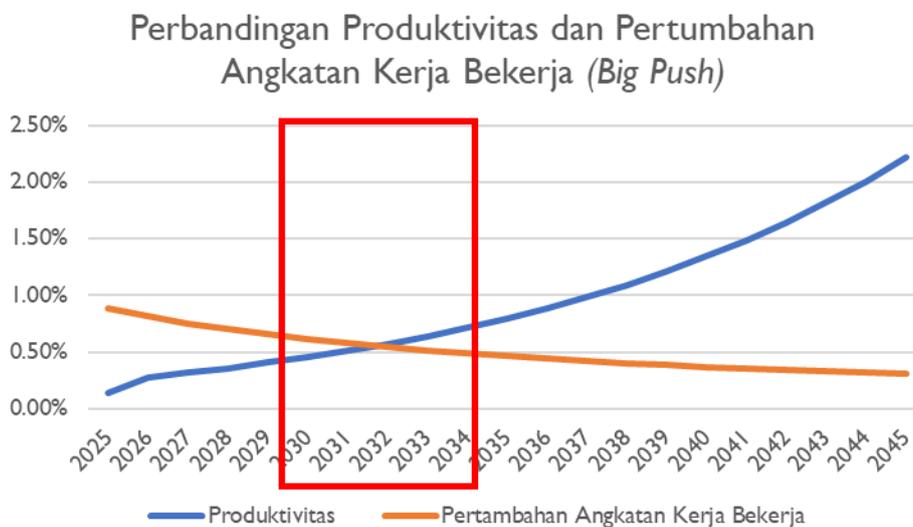


Gambar IV.3.3 Grafik Perbandingan Produktivitas dan Pertambahan Angkatan Kerja (BAU)

Apabila upaya *big push* dilakukan maka dapat dilakukan akselerasi peningkatan produktivitas tenaga kerja. Proses yang perlu dilakukan untuk *big push* adalah meningkatkan laju produktivitas. Aspek seperti peningkatan *link and match* pendidikan dan kebutuhan industri (vokasi) menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan produktivitas. Akan tetapi, hal tersebut tidak dapat tercapai apabila prasyarat pembangunan SDM belum terpenuhi.



Kondisi inilah yang menjadikan pertimbangan penting sehingga peluang ini perlu disambut dengan upaya pembangunan SDM yang unggul. Produktivitas tenaga kerja menjadi aspek penting dalam pembangunan SDM unggul. Namun, tidak cukup di sana guna mewujudkan SDM unggul dibutuhkan upaya dalam peningkatan SDM yang sehat serta cerdas berkepribadian sebagai prasyarat SDM yang unggul dan produktif. Sebagaimana dalam gambar di bawah tertampil bahwa upaya *big push* dapat mengakselerasi produktivitas sehingga pada periode kedua RPJPD produktivitas tenaga kerja dapat melebihi pertumbuhan penambahan jumlah angkatan kerja yang bekerja.

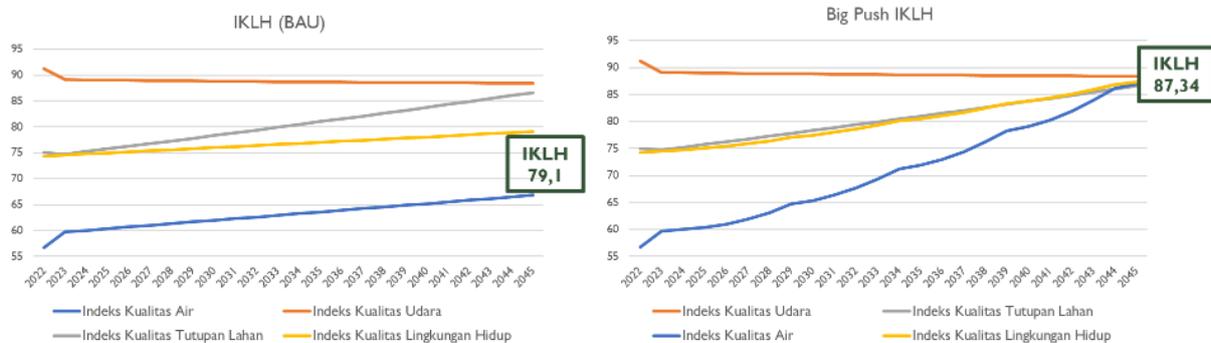


Gambar IV.3.4. Grafik Perbandingan Produktivitas dan Pertumbuhan Penduduk Bekerja (*Big Push*)

Terdapat Beberapa Tantangan untuk memanfaatkan *Window of Opportunity* Bonus Demografi Kalimantan Tengah. **Secara Kuantitas:** Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pengangguran, sehingga diperlukan lapangan pekerjaan baru yang cukup masif untuk mengatasi pengangguran ke depannya. **Secara Kualitas:** Produktivitas Tenaga Kerja masih relatif rendah, sehingga diperlukan peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, serta manusia yang berbudaya dan berkarakter sehingga produktivitas dapat meningkat.

IV.3.3 Penguatan Ketahanan Ekologi

Aspek Ketahanan Ekologi menjadi aspek penting dalam upaya *Big Push*. Upaya ini dilakukan dalam rangka menjaga koridor pembangunan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Indikator dan aspek yang menjadi perhatian dalam upaya ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Gambar IV.3.5. Grafik IKLH Asumsi BAU (kiri) dan Intervensi/*Big Push* (kanan)

Secara umum indeks kualitas lingkungan hidup Kalimantan Tengah sudah pada angka yang baik namun terdapat dua pekerjaan rumah ke depannya. Pekerjaan pertama adalah terkait upaya meningkatkan Indeks Kualitas Air. Hingga saat ini angka Indeks Kualitas Air masih pada kondisi yang kurang baik. Hal ini menjadi tantangan mengingat upaya *Big Push* memerlukan akses terhadap air baku maupun air minum yang cukup baik secara kuantitas dan kualitas. Kedua adalah menjaga IKLH tetap dalam kondisi baik di tengah upaya *Big Push* yang tentunya memiliki dampak baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kualitas lingkungan. Sehingga upaya meminimalisir dampak menjadi pekerjaan penting dengan mengendalikan pencemaran dan pengolahan limbah.

IV.4 MISI

Misi merupakan pernyataan umum mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Misi juga dapat dianggap sebagai strategi yang akan diambil oleh pemerintahan daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dalam konteks pembangunan secara umum, termasuk untuk seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan. Adapun Misi RPJPD Kalteng tersusun dalam kerangka sebagai berikut:



Gambar IV.4.1. Huma Betang Kerangka RPJPD Kalteng 2025-2045

Misi RPJPD Kalimantan Tengah disusun dalam kerangka rumah adat “Huma Betang”. Filosofi Huma Betang yang memiliki makna mengedepankan musyawarah dan mufakat, kesetaraan sesama manusia, kebersamaan, kekeluargaan/persaudaraan menjadi pertimbangan menyusun kerangka mengingat makna yang terkandung itulah yang menjadi prasyarat dan modal penting menuju pembangunan yang berkelanjutan. Harapannya RPJPD Kalimantan Tengah ini dapat menjadi rumah besar yang menaungi tujuan-tujuan pembangunan yang disepakati bersama oleh masyarakat Kalimantan Tengah. Sebagaimana filosofi rumah betang bagian kerangka ini dibagi menjadi tiga bagian yakni atap, badan rumah, dan pilar rumah. Ketiga bagian ini menjadi faktor yang saling mendukung dan menjamin rumah tetap berdiri dan melayani penghuninya. Bagian atap merupakan visi RPJPD, bagian badan rumah merupakan misi RPJPD yang ditopang 3 pilar transformasi pembangunan yakni aspek ekonomi, sosial, dan tata kelola serta 1 pilar ketahanan yakni penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Hal ini didukung pula oleh pilar Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia. Terdapat 8 Misi dan 17 Arah Pembangunan. Secara lebih mendetail, penjabaran transformasi pembangunan dijelaskan pada bagian berikut:

Tabel IV.4.1 Tabel Cascading Misi RPJPD

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD 2025-2045
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Misi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Transformasi Indonesia	Transformasi sosial	Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun SDM yang sehat, unggul, berdaya saing dan adaptif
2		Transformasi ekonomi	Mewujudkan transformasi ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi berwawasan lingkungan dan berdaya saing global
3		Transformasi tata kelola	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan
4	Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah
5		Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi
6	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan
7		Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan penyediaan infrastruktur melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ramah lingkungan
8		Kesinambungan pembangunan	Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah antarperiode

Adapun penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut: **(1) Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun SDM yang sehat, unggul, berdaya saing dan adaptif** untuk membangun manusia Kalimantan Tengah yang dapat menjadi insan bermartabat, berkarakter dan siap menghadapi perubahan zaman di era disrupsi dan *uncertainty* di era kini. **(2) Mewujudkan transformasi ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi berwawasan lingkungan dan berdaya saing global** untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru, hijau, dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi, tenaga kerja, serta BUMD), transformasi digital, integrasi ekonomi global, serta pembangunan

perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi **(3) Mewujudkan reformasi transformasi tata kelola pemerintahan** dengan membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. **(4) Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah** dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, serta keamanan daerah **(5) Mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi** dengan memperluas ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan iklim, dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. **(6) Mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan** diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang dilengkapi dengan landasan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah, serta ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing masing wilayah. **(7) Mewujudkan penyediaan infrastruktur melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ramah lingkungan** yang menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi **(8) Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah antarperiode** yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan. Pada misi 8 ini keberlanjutan pembangunan daerah perlu diterjemahkan dalam dokumen perencanaan baik yang bersifat lintas sektor, lintas daerah, serta lintas periode. Hal ini guna menjamin keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor, di seluruh kabupaten/kota, dan di tiap periode pembangunan. Selain keberlanjutan secara substansi penerjemahan kebutuhan anggaran dan skema pembiayaan pembangunan perlu didorong untuk menggunakan berbagai skema kreatif, efisien, dan efektif untuk mencapai sasaran pokok pembangunan.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK



BAB 5

ARAH KEBIJAKAN & SASARAN POKOK

POLICY DIRECTION AND MAIN OBJECTIVES

Arah Kebijakan

Periode I
2025-2029

Periode II
2025-2029

Periode III
2025-2029

Periode IV
2025-2029

PENGUATAN PONDASI

Penguatan Pondasi
Transformasi

AKSELERASI TRANSFORMASI

Pengembangan Big Push
Transformation

EKSPANSI TRANSFORMASI

Pengembangan Big Push
Transformation

PERWUJUDAN KALTENG TANGGUH

Perwujudan Kalteng Tangguh
Bermartabat, Maju, dan
Berkelanjutan dalam Kerangka
Indonesia Emas 2045

Arah Pembangunan

- KT 1. Kesehatan untuk Semua
- KT 2. Pendidikan Berkualitas yang Merata
- KT 3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
- KT 4. Iptek Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
- KT 5. Penerapan Ekonomi Hijab dan Biru
- KT 6. Transforms Digital
- KT 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
- KT 8. Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
- KT 9. Regulation dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adoptif

- KT 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh
- KT 11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
- KT 12. Demokrasi Substansial
- KT 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
- KT 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
- KT 15. Lingkungan Hidup Berkualitas dan Pusat Konservasi International
- KT 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
- KT 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Tema Pembangunan

Zona Barat

Pusat hilirisasi sumber daya alam, kawasan hub perdagangan besar, serta konservasi taman nasional berkelanjutan.

Zona Tengah

Hub pusat perdagangan dan jasa, pengembangan sentra pertanian terintegrasi, serta pusat pendidikan dan kebudayaan.

Zona Timur

Lumbung energi baru dan terbarukan Kalimantan, serta wilayah mitra dari pembangunan IKN di Kalimantan Timur.



BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Arah kebijakan memberikan pedoman tentang langkah-langkah atau tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan-tujuan strategis yang ingin dicapai. Arah kebijakan mencakup pemahaman yang mendalam mengenai masalah atau isu tertentu yang ingin diatasi, serta strategi-strategi yang akan digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Arah kebijakan berkaitan pula dengan rencana jangka panjang suatu pemerintah atau organisasi untuk mengarahkan pembangunan dan pengambilan keputusan.

V.1 ARAH KEBIJAKAN

Turunan daripada visi RPJPD Kalimantan Tengah diwujudkan dalam periodisasi lima tahunan pelaksanaan RPJPD Kalteng sampai dengan tahun 2045. Logika periodisasi RPJPD mengikuti bagaimana proses transformasi yang ingin dicapai oleh nasional dengan melakukan penguatan dan perluasan transformasi. Pendekatan yang sama pula dilakukan dalam periodisasi pelaksanaan pembangunan jangka panjang. Secara lebih terperinci kondisi yang diharapkan dan arah kebijakan pada masing-masing periode tersaji pada gambar berikut.



Gambar V.1.1 Periodisasi Arah Kebijakan Pembangunan Kalteng

Periode I (2025-2029): PENGUATAN PONDASI

Periode ini merupakan periode dimana dilakukan penguatan pada pondasi yang akan menjadi penopang upaya transformasi pembangunan di Kalimantan Tengah. Sebagaimana kondisi eksisting semasa penyusunan RPJPD tahun 2024 masih terdapat





banyak pekerjaan rumah pembangunan di Kalimantan Tengah. Masih terdapat banyak permasalahan mendasar di berbagai sektor yang masih perlu dibenahi dan diakselerasi pengentasannya.

Periode II (2030-2034): AKSELERASI TRANSFORMASI

Setelah pondasi pembangunan tersusun dengan baik dan mantab maka tahap selanjutnya adalah melaju. Pada periode ini upaya transformasi mulai gencar digalakkan. Pengembangan upaya-upaya transformatif dilakukan secara massif guna memanfaatkan puncak masa bonus demografi dan juga *economic boom* di periode ini. Pembangunan padat karya dan padat modal diupayakan untuk mencapai target besar pertumbuhan ekonomi

Periode III (2035-2039): EKSPANSI TRANSFORMASI

Pada periode ini upaya transformatif terus dilanjutkan dan dikembangkan. Proses pada periode ini adalah memantapkan basis ekonomi, memperkuat daya saing SDM sehingga dapat tercapai kondisi provinsi yang tangguh. Pada periode ini pula ekonomi didorong semakin efisien dan efektif serta pemerataan mulai terwujud.

Periode IV (2040-2045): PERWUJUDAN KALTENG TANGGUH

Periode terakhir dari RPJPD ditandai dengan proses-proses pembangunan yang sudah berkelanjutan. Semua sektor telah mantab dalam berkembang. Pada periode ini taraf pembangunan diharapkan mampu mensejahterakan dan meningkatkan martabat masyarakat Kalimantan Tengah.

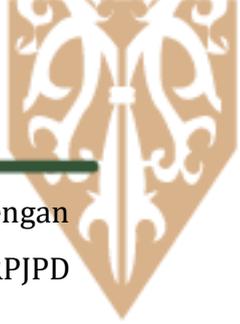
V.2 SASARAN POKOK

Sasaran pokok adalah elemen kunci dalam merinci kondisi yang diinginkan pada akhir periode 20 tahun, serta bagaimana cara mencapai tujuan tersebut sesuai dengan visi dan misi yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan merujuk kepada penjelasan misi dalam bab sebelumnya, maka sasaran-sasaran utama telah dirumuskan untuk dicapai dalam jangka waktu 20 tahun mendatang.

V.2.1 ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

Arah Pembangunan menjadi landasan serta menjadi petunjuk rambu-rambu pembangunan daerah selama periode RPJPD 2025-2045. Sebagai pengejawantahan dari





upaya upaya transformatif big push ke depan disusun Arah Pembangunan selaras dengan Arah Pembangunan RPJPN 2025-2045. Adapun penyelarasan arah pembangunan RPJPD Kalimantan Tengah tersaji dalam tabel berikut:

Tabel V.2.1 Arah Pembangunan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2045

	Transformasi	Arah Pembangunan		Transformasi	Arah Pembangunan		
Arah Pembangunan RPJPN 2025-2045	Transformasi Sosial	IE1. Kesehatan untuk Semua	Arah Pembangunan RPJPD 2025-2045	Transformasi sosial	KT1. Kesehatan untuk Semua		
		IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata			KT2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		
		IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif			KT3. Perlindungan Sosial yang Adaptif		
	Transformasi Ekonomi	IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi		KT4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Transformasi Ekonomi	KT5. Penerapan Ekonomi Hijau	
		IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau		KT6. Transformasi Digital		KT7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	
		IE 6. Transformasi Digital		KT8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		Transformasi Tata Kelola	KT9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
		IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah			KT10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial
	IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	KT11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah			Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	KT12. Birokrasi Ideal	
	Transformasi Tata Kelola	IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif		KT13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju		Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	KT14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif
		Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia		IE 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	KT15. Lingkungan Hidup Berkualitas dan Pusat Konservasi Internasional		Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
	IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro			KT17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	
	IE 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan			Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi			
	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju					Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
		IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif			Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	
		IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas		Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi			
		IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan					Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
		IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	

Singkatan KT dalam tabel di atas merupakan singkatan dari Kalteng Tangguh. Arah pembangunan yang berjumlah 17 mengejawantahkan semangat Kalteng Tangguh dalam kerangka Indonesia Emas 2045. Upaya transformatif dari RPJPN diterjemahkan kalteng melalui upaya transformatif yang sama. Penyesuaian dilakukan dalam upaya transformatif di bidang Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia. Kalteng menerjemahkan upaya transformatif ini dengan mempertimbangkan pembagian wewenang pemerintah daerah dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di mana arah pembangunan terkait dengan Pertahanan dan Politik Luar Negeri tidak diturunkan di level provinsi. Sebagai gantinya Kalteng menjawab tantangan dari segi keamanan daerah, demokrasi, dan juga stabilitas ekonomi di level provinsi.



V.2.2 ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI

Dalam upaya mewujudkan visi misi dan arah pembangunan disusun arah-arrah kebijakan transformasi. Arah ini menjadi upaya penting untuk mencapai arah pembangunan dan sasaran pokok daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam RPJPD tahun 2025-2045. Adapun arah kebijakan transformasi disusun sebagai berikut:

Tabel V.2.2 Arah Kebijakan Transformasi Pembangunan Kalteng 2025-2045

No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Periode			
			2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
1	Transformasi Sosial	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.	V			
		Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor	V			
		Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkelanjutan didukung peningkatan produksi dan kompetensinya (termasuk tenaga kesehatan spesialis) serta afirmasi di daerah 3T.	V	V	V	V
		Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas disertai inovasi pelayanan berbasis kewilayahan dan teknologi.	V	V		
		Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	V	V		
		Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebecerjaan tinggi.	V	V	V	V
		Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai klaster ekonomi potensial masa depan melalui kemitraan bersama perguruan tinggi global.	V	V	V	V
		Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang modern dan adaptif.	V	V	V	V
		Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman, terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan, serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema education to employment.	V	V		
		Peningkatan akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh	V	V	V	V

No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Periode			
			2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau seluruh wilayah				
		Pengentasan kemiskinan ekstrem melalui perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal.	V	V	V	V
		Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.	V	V	V	V
		Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.	V	V	V	V
		Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.	V	V	V	V
		Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.	V	V	V	V
		Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.	V	V	V	V
		Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu.	V	V	V	V
		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.	V	V	V	V

No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Periode			
			2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.	V	V	V	V
		Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.	V	V	V	V
		Pengendalian jumlah dan distribusi penduduk untuk mewujudkan kondisi penduduk tumbuh seimbang	V	V	V	V
2	Transformasi Ekonomi	Pembangunan dan pengembangan Kalimantan Tengah sebagai daerah mitra untuk mendukung Ibu Kota Nusantara sebagai super hub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing.	V	V		
		Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan.	V	V	V	
		Pengembangan industri hijau dan basis sektor ekonomi baru bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan didukung dengan berbagai pengembangan inovasi.	V	V	V	V
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan termasuk food estate untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani.	V	V	V	
		Pengembangan destinasi wisata potensial berkelanjutan dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti pengembangan ecotourism berbasis aset alam di Taman Nasional Tanjung Puting dan Taman Nasional Sebangau.	V	V	V	
		Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dan internasional.	V	V	V	V
		Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman antara lain pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling serta transisi school-to-work.	V	V		
		Pengembangan kawasan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan khususnya di PKN Palangka Raya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.	V	V		
		Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	V	V	V	V

No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Periode			
			2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.	V	V		
		Peningkatan produktivitas BUMD.	V	V	V	V
		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja.	V	V	V	V
		Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.	V	V	V	V
		Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia	V	V	V	V
		Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik	V	V	V	V
		Pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik	V	V	V	V
		Pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan	V	V		
		Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik	V	V	V	V
		Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas	V	V	V	
		Pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi	V	V	V	V
		Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi	V	V	V	V
		Pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat	V	V		
		Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.	V	V	V	V
		Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital melalui penuntasan dan penguatan infrastruktur	V	V		

No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Periode			
			2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok.				
		Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran).	V	V	V	
		Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).	V	V	V	V
		Percepatan sertifikasi halal untuk mendukung ekosistem ekonomi syariah	V	V		
		Peningkatan dan pembinaan industri jasa keuangan syariah dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat di level mikro	V	V	V	V
		Edukasi literasi keuangan bagi masyarakat multi segmen untuk menurunkan aktivitas ilegal dan merugikan masyarakat yang berkaitan dengan produk keuangan	V	V	V	V
		Pemanfaatan potensi industri biofarmaka dari tanaman obat hutan berdasarkan kearifan lokal masyarakat.	V	V	V	V
3	Reformasi Tata Kelola	Penguatan regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah.	V	V	V	V
		Peningkatan keterlibatan masyarakat adat dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.	V	V	V	V
		Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.	V	V	V	V
		Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.	V	V	V	V
		Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.	V	V	V	V
		Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi,	V	V	V	V

No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Periode			
			2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.				
		Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.	V	V	V	V
		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	V	V	V	V
		Penguatan integritas partai politik.	V	V	V	V
4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas, khususnya pidana narkoba/psikotropika dan pencurian.	V	V	V	V
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional.	V	V	V	V
		Penguatan pengendalian inflasi daerah.	V	V	V	V
		Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.	V	V	V	V
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.	V	V	V	V
		Peningkatan pengakuan dan penghormatan terhadap lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.	V	V	V	V
		Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi.	V	V	V	V
		Pelestarian tradisi dan kebudayaan lokal untuk pemantapan penjenamaan daerah dan penguatan modal sosial masyarakat	V	V	V	V
		Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam aktivitas sosial dan pembentukan karakter, terutama pada generasi muda.	V	V	V	V

No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Periode			
			2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai sarana masyarakat untuk berinteraksi dan berbudaya.	V	V	V	V
		Pengembangan diversifikasi pangan.	V	V	V	V
		Rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan bekas tambang serta penghambatan laju deforestasi.	V	V	V	V
		Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal.	V	V	V	V
		Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi, seperti Orang Utan Borneo dan Gajah Kalimantan.	V	V	V	V
		Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana.	V	V	V	V
		Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim.	V	V	V	V
		Pengembangan solusi berbasis alam (natural based solution) untuk pengendalian bencana, seperti banjir dan kebakaran hutan.	V	V	V	V
		Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana.	V	V	V	V
		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	V	V	V	V
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	V	V	V	V
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	V	V	V	V
		Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	V	V	V	V

No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Periode			
			2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Pembangunan irigasi baru terutama pada sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya.	V	V		
		Pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin.	V	V		
		Pengembangan check dam sebagai pengendali aliran sedimen untuk menjaga fungsi sungai sebagai alur pelayaran dan sumber pengairan persawahan.	V	V		
		Ketahanan energi dengan pendekatan terpadu FEW Nexus.	V	V	V	V
		Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.	V	V		
		Penguatan karakter dan jati diri bangsa.	V	V	V	V
6	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;	Penguatan kerja sama dengan daerah lainnya dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Kalimantan.	V	V	V	V
		Penuntasan RDTR kab/kota dan kawasan strategis.	V	V		
		Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.	V	V	V	V
7	Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Pengembangan pelabuhan-pelabuhan secara terpadu dan pembangunan pelabuhan utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi strategis daerah.	V	V		
		Pengembangan Bandara Tjilik Riwut di Palangka Raya, Bandara Iskandar, dan bandara lainnya secara bertahap, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan pengembangan wilayah.	V	V		
		Pembangunan bandara baru untuk mendukung konektivitas wilayah.	V	V	V	V
		Penyiapan dukungan teknis dalam pembangunan jalan tol dan penyelesaian jalan trans Kalimantan serta pembangunan dan peningkatan jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.	V	V	V	V
		Penyiapan dukungan teknis dalam pembangunan infrastruktur perkeretaapian dan sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.	V	V	V	V
		Pengembangan angkutan sungai danau dan penyeberangan untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi.	V	V	V	V
		Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal utamanya di PKN Palangka Raya.	V	V	V	

No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Periode			
			2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.	V	V	V	V
		Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.	V	V	V	V
		Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.	V	V	V	V
		Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.	V	V	V	V
		Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.	V	V	V	
		Penyediaan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah rawan air.	V	V		
		Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan bertumpu pada pengembangan teknologi yang efektif dan efisien, serta pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, antara lain dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam upaya pemenuhan akses air minum aman serta mendukung pengurangan risiko bencana.	V	V	V	V
		Pembangunan bendungan multiguna untuk mendukung penyediaan air baku dan air minum, pengendali banjir, serta sebagai upaya pemenuhan infrastruktur yang berkaitan dengan ketenagalistrikan, pertanian, dan pariwisata.	V	V	V	V
		Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).	V	V	V	
		Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemecuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman.	V	V		
		Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik.	V	V	V	V

No	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Periode			
			2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
		Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.	V	V		
		Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.	V	V	V	V
		Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah afirmasi.	V	V	V	
8	Kesesinambungan pembangunan	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	V	V	V	V
		Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.	V	V	V	V
		Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.	V	V	V	V
		Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.	V	V	V	V
		Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.	V	V	V	V
		Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.	V	V	V	V

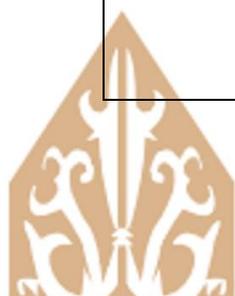


V.2.3 INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN

Indikator Utama Pembangunan (IUP) Daerah merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Adapun IUP RPJPD Provinsi Kalteng Berjumlah 45 Indikator dengan rincian sebagai berikut:

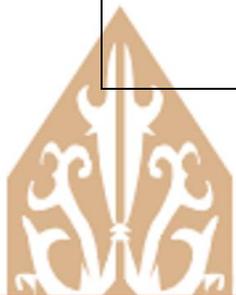
Tabel V.2.3 Tabel Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kalteng 2025-2045

Misi	Arah Pembangunan (IE)	Arah Pembangunan (KT)	No	IUP RPJPN			No	IUP RPJPD			Sasaran Pokok
				Indikator	Target Nasional			Indikator	Target Daerah		
					2025	2045			2025	2045	
Misi 1: Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun SDM yang sehat, unggul, berdayasaing dan adaptif	IE 1. Kesehatan untuk Semua	KT 1. Kesehatan untuk Semua		Kesehatan untuk Semua				Kesehatan untuk Semua			Terwujudnya Kesehatan untuk Semua
			1	Usia harapan hidup (tahun)	74,4	80,0	1	Usia harapan hidup (UHH) (tahun)	73,65	79,09	
			2	Kesehatan ibu dan anak		2	Kesehatan ibu dan anak:				
				Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	115		16	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	190	16	
				Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,5	5,0		Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20,6	5,5	
			3	Insidensi turberkolis (per 100.000 penduduk)	274	76	3	Penanganan tuberkulosis:			
				a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)*	66	95					





Misi	Arah Pembangunan (IE)	Arah Pembangunan (KT)	No	IUP RPJPN			No	IUP RPJPD			Sasaran Pokok
				Indikator	Target Nasional			Indikator	Target Daerah		
					2025	2045			2025	2045	
			4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,0	99,5	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,5	99,5	
				Pendidikan Berkualitas yang Merata				Pendidikan Berkualitas yang Merata			
				Hasil pembelajaran				Hasil pembelajaran			
				Rata-rata nilai PISA				a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:			
				- Membaca	396	485		i) Literasi membaca	14,29	64,29	
				- Matematika	404	490		ii) Numerasi	7,14	64,29	
				- Sains	416	487		b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:			
								i) Literasi membaca	39,69	69,61	
								ii) Numerasi	27,22	59,62	
								Indeks pembangunan literasi masyarakat	74,27	93	

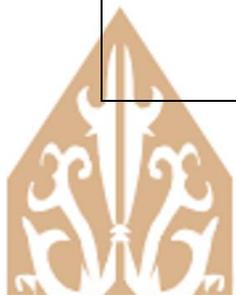




Misi	Arah Pembangunan (IE)	Arah Pembangunan (KT)	No	IUP RPJPN			No	IUP RPJPD			Sasaran Pokok		
				Indikator	Target Nasional			Indikator	Target Daerah				
					2025	2045			2025	2045			
Misi 1: Mewujudkan transformasi ekonomi				Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,46	12,0		a) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,41	11,95			
				Harapan lama sekolah	13,37	14,81		b) Harapan lama sekolah (tahun)	13,01	14,40			
				6	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%)	33,94		60,00	6	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)*		11,23	13,10
			7	Persentase pekerjaan lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja dibidang keahlian menengah tinggi (%)	61,87	75,00	7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	72,82	85			
				Perlindungan sosial yang adaptif				Perlindungan sosial yang adaptif					
	IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	KT3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	8	Tingkat kemiskinan (%)	6,0-7,0	0,5-0,8	8	Tingkat Kemiskinan (%)	4,61	0,58		Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	
			9	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	44,1	99,5	9	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan provinsi (%)	43,97	94,06			
			10	Persentasi penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	20,0	60,0	10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	40	80			
	Misi 2: Mewujudkan transformasi ekonomi	IE4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	KT4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi		Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi				Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi				Terwujudnya pemanfaatan Iptek, Inovasi, dan
				11	Rasio PDB industri pengolahan (%)	20,8	28,0	11	Rasio PDRB industri pengolahan (%)	15,76		27,00	

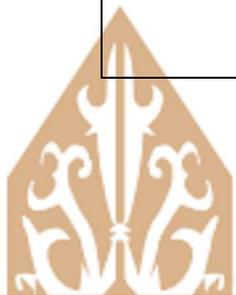


Misi	Arah Pembangunan (IE)	Arah Pembangunan (KT)	No	IUP RPJPN			No	IUP RPJPD			Sasaran Pokok
				Indikator	Target Nasional			Indikator	Target Daerah		
					2025	2045			2025	2045	
melalui pertumbuhan ekonomi berwawasan lingkungan dan berdayasaing global			12	Pengembangan Pariwisata			12	Pengembangan Pariwisata			Produktivitas Ekonomi
				Rasio PDB pariwisata (%)	4,5	8,0		a) Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum (%)*	1,94	3,29	
				Devisa pariwisata (Milliar US Dollar)	18,0	100		b) Jumlah tamu wisatawan mancanegara (hotel berbintang) (ribu orang)*	5,47	13,68	
			13	Proporsi PDB ekonomi kreatif (%)	7,9	110	13	Indeks Daya Saing Daerah	3,13	4,7	
			14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			
				Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,3 (2019)	5,0		a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%)	15,19	18,98	
				Rasio kewirausahaan (%)	2,9 (Aug 2022)	8,0		b) Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)	1,90	4,10	
				Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,1 (2021)	10,0		c) Rasio kewirausahaan daerah (%)	3,33	8,71	
				Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,4	5,6		d) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,62	3,61	
								e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	1,89	5,22	



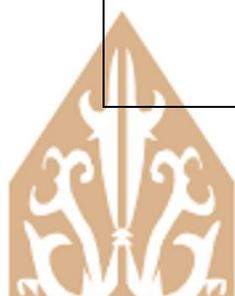


Misi	Arah Pembangunan (IE)	Arah Pembangunan (KT)	No	IUP RPJPN			No	IUP RPJPD			Sasaran Pokok
				Indikator	Target Nasional			Indikator	Target Daerah		
					2025	2045			2025	2045	
			15	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,0	4,0	15	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,91	1,8	
				Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)				Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	52	90	
			16	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	55,4	70,0	16	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	52,03	66	
			17	Tingkat penguasaan IPTEK			17	Indeks kapabilitas inovasi	2,59	4,61	
				Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB)	0,28 (2020)	2,2-2,3					
				Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	75 (2022)	30 besar					
	IE5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	KT5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru		Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru				Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru			Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru
			18	Tingkat penerapan ekonomi hijau			18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			
				Indeks ekonomi hijau (%)	70,80	90,65		a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	80,88	93,30	
				Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	20	70		b) Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	17	78,62	
				Transformasi Digital				Transformasi Digital			Terwujudnya a



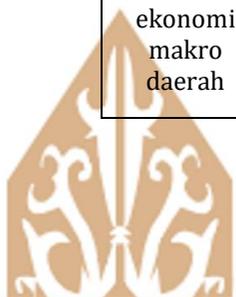


Misi	Arah Pembangunan (IE)	Arah Pembangunan (KT)	No	IUP RPJPN			No	IUP RPJPD			Sasaran Pokok	
				Indikator	Target Nasional			Indikator	Target Daerah			
					2025	2045			2025	2045		
	IE6. Transformasi Digital	KT6. Transformasi Digital	19	Indeks daya saing digital ditingkat global (peringkat)	51	20 besar	19	Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi	5,8	7,5	Transformasi Digital	
								Indeks literasi digital	3,7	4,6		
	IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	KT7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			Integrasi Ekonomi Domestik dan Global				Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
			20	Biaya logistik (% PDB)	16,9 (2019)	9,0	20	Koefisien variasi harga antarwilayah tingkat provinsi*	4,28	3,35		
			21	Pembentukan modal tetap bruto (% PDB)	29,8	27,2	21	Pembentukan modal tetap bruto (% PDRB)	38,5	39,33		
			22	Ekspor barang dan jasa (% PDB)	26,0	40,0	22	Ekspor barang dan jasa (% PDRB)	45,6	51,33		
	IE8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	KT8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi				Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
			23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan				
				Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,58	48,92		a) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	64,53	100		
				Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	64	100		b) Persentase desa mandiri (%)	1,61	13,41		



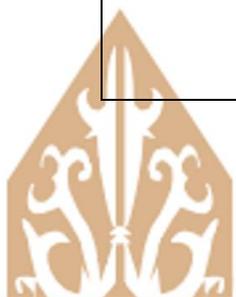


Misi	Arah Pembangunan (IE)	Arah Pembangunan (KT)	No	IUP RPJPN			No	IUP RPJPD			Sasaran Pokok
				Indikator	Target Nasional			Indikator	Target Daerah		
					2025	2045			2025	2045	
Misi 3: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan	IE9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	KT9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif		Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif				Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif			Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
			24	Indeks materi hukum	0,25	0,49	24	Indeks reformasi hukum	70	100	
			25	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	2,34	5,0	25	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	2,9	5	
			26	Indeks pelayanan publik	3,87	5,0	26	Indeks pelayanan publik	2,5	5	
			27	Anti Korupsi							
				Indeks integritas nasional	71,94 (2022)	96,98	27	Indeks integritas nasional	69,54	83,77	
				Indeks persepsi korupsi	34	60					
Misi 4: Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	IE10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional, dan Demokrasi Substansial	KT10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial		Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial				Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial			Terwujudnya Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial
			28	Indeks pembangunan hukum	0,60 (2021)	0,84	28	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	60	80	
			29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di	62,8 (2020)	80,0	29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	69,59	86,97	



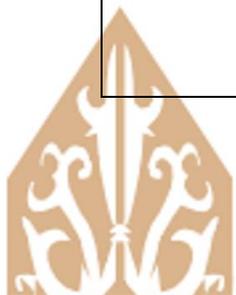


Misi	Arah Pembangunan (IE)	Arah Pembangunan (KT)	No	IUP RPJPN			No	IUP RPJPD			Sasaran Pokok	
				Indikator	Target Nasional			Indikator	Target Daerah			
					2025	2045			2025	2045		
				area tempat tinggalnya (%)								
			30	Indeks demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Tinggi (>80)	30	Indeks demokrasi indonesia	70	85		
				Stabilitas Ekonomi Makro				Stabilitas Ekonomi Makro Daerah			Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	
			31	Rasio pajak terhadap PDB (%)	10,0-12,0	18,0-20,0	31	Rasio pajak daerah terhadap PDRB (%)	1,62	1,1		
			32	Tingkat inflasi (%)	2,5 ± 1	2,0 ± 1	32	Tingkat Inflasi (%)	3,7	3,1		
			33	Pendalaman/Intermediasi sektor keuangan			33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan				
				Aset perbankan/PDB (%)	66,9	200			a) Total dana pihak ketiga/PDRB (%) *	23,19		62,9
				Aset dana pensiun/PDB (%)	7,6	60			b) Aset dana pensiun/PDRB (%)	0,05		1,56
				Aset asuransi/PDB (%)	9,1	20			c) Nilai transaksi saham per provinsi berupa nilai rata-rata tahunan	5.388.734,85		48.213.830,84
				Kapitalisasi pasar modal/PDB (%)	57,8	120			d) Total kredit/PDRB (%)	21,8	60,6	
				Total kredit/PDB (%)	37,8	80-90						



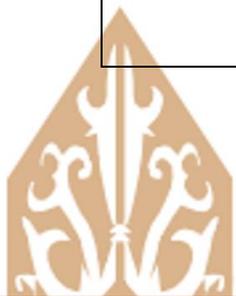


Misi	Arah Pembangunan (IE)	Arah Pembangunan (KT)	No	IUP RPJPN			No	IUP RPJPD			Sasaran Pokok
				Indikator	Target Nasional			Indikator	Target Daerah		
					2025	2045			2025	2045	
	IE12. Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gantar Kawasan	KT12. Birokrasi Ideal	34	Inklusi keuangan (%)	91	98	34	Inklusi keuangan (%)	87,74	98,36	Terwujudnya Birokrasi Ideal
			35	Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gantar Kawasan Asia Power Index (Diplomatic Influencer)	60,4 (2023)	75,0-80,0	35	Birokrasi Ideal Indeks reformasi birokrasi	65	91	
			36	Asia Power Index (Military Capability)	14,16 (2023)	45,00	36	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	71	92	
							36	Nilai Maturitas SPIP	3,16	4,2	
Misi 5: Mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi	IE13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	KT13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju		Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju				Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju			Terwujudnya Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
			37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,57*	68,15	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	62,13	71,75	
			38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75,19*	84,20	38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	80,4	87,52	
	IE14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan	KT14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan		Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif				Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif			Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan





Misi	Arah Pembangunan (IE)	Arah Pembangunan (KT)	No	IUP RPJPN			No	IUP RPJPD			Sasaran Pokok		
				Indikator	Target Nasional			Indikator	Target Daerah				
					2025	2045			2025	2045			
	Masyarakat Inklusif	Masyarakat Inklusif	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,49 (2022)	80,00	39	Indeks pembangunan kualitas keluarga	66,05	70,77	Masyarakat Inklusif		
			40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,459 (2025)	0,15	40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,516	0,266			
	IE15. Lingkungan Hidup Berkualitas	KT15. Lingkungan Hidup Berkualitas dan Pusat Konservasi Internasional			Lingkungan Hidup Berkualitas				Lingkungan Hidup Berkualitas dan Pusat Konservasi Internasional			Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas dan Pusat Konservasi Internasional	
			41	Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati	0,35 (2020)	0,70	41	Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati	0,557	0,667			
			42		Kualitas Lingkungan Hidup			42	Kualitas Lingkungan Hidup				
					Indeks kualitas lingkungan hidup	72,42 (2022)	76,12			a) Indeks kualitas lingkungan hidup	76,34		82,65
					Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	12,5	70,0			b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	11,16		50
					Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolahan sampah (%)	15 (13% terdaur ulang)	90 (35% terdaur ulang)			c) Pengelolaan sampah			
									- Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	7	85		



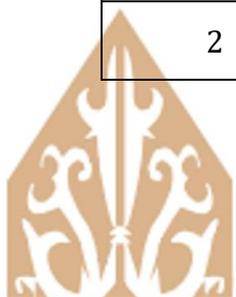


Misi	Arah Pembangunan (IE)	Arah Pembangunan (KT)	No	IUP RPJPN			No	IUP RPJPD			Sasaran Pokok
				Indikator	Target Nasional			Indikator	Target Daerah		
					2025	2045			2025	2045	
	IE.17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	KT.17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			Terwujudnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
44			Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%)	0,14	0,11	4 4	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	94,85	80,77		
45			Presentasi penurunan emisi GRK (%)			4 5	Persentase penurunan emisi GRK (%)				
			Kumulatif	28,12	51,51		a. Kumulatif	27,61	64,32		
	Tahunan	32,65	80,89	b. Tahunan	47,87		100				

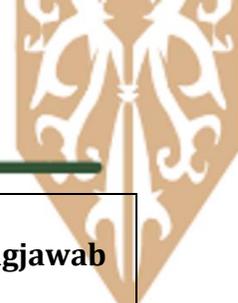
Berikut merupakan penjelasan periodisasi Indikator Utama Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045. Periodisasi dibagi tiap periode 5 tahunan sesuai dengan periode RPJMD

Tabel V.2.4 Periodisasi Indikator Utama Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045

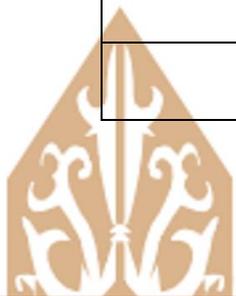
No/Kode	Indikator	Target					Penanggungjawab
		Baseline (2025)	2029	2034	2039	2045	
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,65	74,42	75,24	77,4	79,09	OPD yang membidangi urusan kesehatan
2	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	190	137,9	80,2	50,5	16	OPD yang membidangi urusan kesehatan



No/Kode	Indikator	Target					Penanggungjawab
		Baseline (2025)	2029	2034	2039	2045	
	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20,6	15,75	9,84	6,93	5,5	OPD yang membidangi urusan kesehatan
3	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)*	66	73,25	81,5	89,8	95	OPD yang membidangi urusan kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)*	87,37	89,25	92,5	94,75	98	OPD yang membidangi urusan kesehatan
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	OPD yang membidangi urusan kesehatan
5	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (%)	14,29	28	42	57	64,29	OPD yang membidangi urusan pendidikan
	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi (%)	7,14	14	35	50	64,29	OPD yang membidangi urusan pendidikan



No/Kode	Indikator	Target					Penanggungjawab
		Baseline (2025)	2029	2034	2039	2045	
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (%)	39,69	41	52	62	69,61	OPD yang membidangi urusan pendidikan
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi (%)	27,22	29	40	52	59,62	OPD yang membidangi urusan pendidikan
	Indeks pembangunan literasi masyarakat	74,27	80,97	85,20	90,20	93	OPD yang membidangi urusan perpustakaan
	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,41	9,69	10,41	11,13	11,95	OPD yang membidangi urusan pendidikan
	Harapan lama sekolah (tahun)	13,01	13,37	13,77	14,17	14,40	OPD yang membidangi urusan pendidikan
6	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	11,23	11,71	12,20	12,69	13,10	OPD yang membidangi urusan pendidikan
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan	72,82	75,94	78,96	82,98	85,00	OPD yang membidangi urusan pendidikan

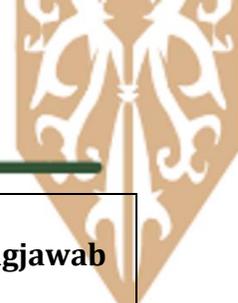


No/Kode	Indikator	Target					Penanggungjawab
		Baseline (2025)	2029	2034	2039	2045	
	menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)						
8	Tingkat kemiskinan (%)	4,61	2,93	1,95	1,07	0,58	OPD yang membidangi urusan sosial
9	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan provinsi	43,97	56	68	81	94,06	OPD yang membidangi urusan tenaga kerja
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	40	50	60	70	80	OPD yang membidangi urusan tenaga kerja
11	Rasio PDRB industri pengolahan (%)	15,76	18,57	22,07	24,53	27	OPD yang membidangi urusan perindustrian
12	Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum (%)*	1,94	2,37	2,99	3,12	3,29	OPD yang membidangi urusan pariwisata
	Jumlah tamu wisatawan mancanegara (hotel berbintang) (ribu orang)*	5,47	7	10	12	13,68	OPD yang membidangi urusan pariwisata
13	Indeks daya saing daerah	3,13	3,54	3,90	4,37	4,7	Sekretariat daerah
14	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%)	15,19	16,14	17,5	18,24	18,98	OPD yang membidangi urusan pertanian

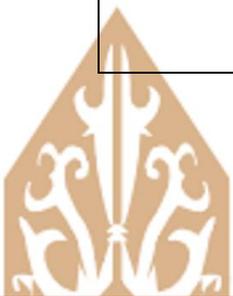
No/Kode	Indikator	Target					Penanggungjawab
		Baseline (2025)	2029	2034	2039	2045	
	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)	1,90	2,45	3,10	3,60	4,10	OPD yang membidangi urusan perindustrian
	Rasio kewirausahaan daerah (%)	3,33	4,8	6,8	7,8	8,71	OPD yang membidangi urusan koperasi usaha kecil dan menengah
	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,62	2,12	2,72	3,16	3,61	OPD yang membidangi urusan koperasi usaha kecil dan menengah
	Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	1,89	2,8	4	4,7	5,22	Sekretariat daerah
15	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,91	3,66	2,7	2,3	1,8	OPD yang membidangi urusan tenaga kerja
	Proporsi Penciptaan Tenaga Kerja Formal (%)	52	60	72	81	90	OPD yang membidangi urusan tenaga kerja
16	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	52,03	55	61	64	66	OPD yang membidangi urusan tenaga kerja
17	Indeks kapabilitas inovasi	2,59	3,10	3,85	4,31	4,61	OPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan
18	Indeks ekonomi hijau daerah	80,88	84	89	92	93,30	Sekretariat daerah
	Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	17	30	46	63	78,62	OPD yang membidangi urusan energi
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,8	6,2	6,6	7	7,5	OPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika

No/Kode	Indikator	Target					Penanggungjawab
		Baseline (2025)	2029	2034	2039	2045	
	Indeks Literasi Digital	3,7	3,9	4,1	4,4	4,6	OPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika
20	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi*	4,28	4	3,80	3,50	3,35	Sekretariat daerah
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	38,5	38,7	39	39,15	39,33	OPD yang membidangi urusan penanaman modal
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	45,6	46	47,3	49,3	51,53	OPD yang membidangi urusan perdagangan
23	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	64,53	75	85	95	100	OPD yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman
	Persentase Desa Mandiri (%)	1,61	4,5	7,5	10	13,41	OPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
24	Indeks Reformasi Hukum	70	75	82	92	100	Sekretariat daerah
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,9	3,4	4	4,5	5	OPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika
26	Indeks Pelayanan Publik	2,5	3	3,7	4,5	5	Sekretariat daerah
27	Indeks Integritas Nasional	69,54	73	76	80	83,77	Inspektorat
28	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	60	65	70	75	80	Inspektorat

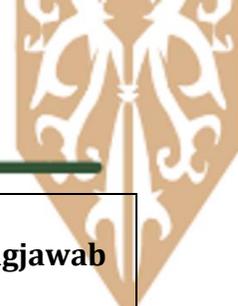
No/Kode	Indikator	Target					Penanggungjawab
		Baseline (2025)	2029	2034	2039	2045	
29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	69,59	75	80	85	86,97	OPD yang membidangi urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
30	Indeks Demokrasi Indonesia	70	75	81	83	85	Badan kesbangpol
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,62	1,43	1,36	1,23	1,1	Sekretariat daerah
32	Tingkat Inflasi (%)	3,7	3,5	3,2	3,2	3,1	Sekretariat daerah
33	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	23,19	30	45	55	62,9	OPD yang membidangi urusan penanaman modal
	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,05	0,42	0,8	1,18	1,56	Sekretariat daerah
	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	5.388.734,85	16.100.000	27.000.000	37.600.000	48.213.830,84	OPD yang membidangi urusan penanaman modal
	Total Kredit/PDRB (%)	21,8	30	40	50	60,6	OPD yang membidangi urusan penanaman modal
34	Inklusi Keuangan (%)	87,74	91	94	96	98,36	Sekretariat daerah
35	Indeks Reformasi Birokrasi	65	71	80	85	91	Sekretariat daerah
36	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	71	81	91	92	92	Sekretariat daerah



No/Kode	Indikator	Target					Penanggungjawab
		Baseline (2025)	2029	2034	2039	2045	
	Nilai Maturitas SPIP	3,16	3,35	3,60	3,90	4,20	Inspektorat
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	62,13	64	68	70	71,75	OPD yang membidangi urusan kebudayaan
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	80,4	82	84	86	87,52	Badan kesbangpol
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	66,05	67	68	69	70,77	OPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,516	0,46	0,39	0,29	0,266	OPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,557	0,597	0,620	0,650	0,667	OPD yang membidangi urusan lingkungan hidup
42	Indeks kualitas lingkungan hidup	76,34	77,91	79,48	81,05	82,65	OPD yang membidangi urusan lingkungan hidup
	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	11,16	20	30	40	50	OPD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	7	20	40	60	85	OPD yang membidangi urusan lingkungan hidup



No/Kode	Indikator	Target					Penanggungjawab
		Baseline (2025)	2029	2034	2039	2045	
	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	38	40	60	80	100	OPD yang membidangi urusan lingkungan hidup
43	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	718	1000	1500	1950	2.225	OPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral
	Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	183	170	150	130	110	OPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	8,5	7	4	3	2,64	OPD yang membidangi urusan pertanian atau pangan
	Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	1,52	2	2,6	3,2	3,73	OPD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	35,34	50	65	85	100	OPD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
44	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	94,85	91,33	87,81	84,29	80,77	OPD yang membidangi urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat



No/Kode	Indikator	Target					Penanggungjawab
		Baseline (2025)	2029	2034	2039	2045	
45	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif(%)	27,61	35	45	55	64,32	OPD yang membidangi urusan lingkungan hidup
	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan (%)	47,87	50	65	90	100	OPD yang membidangi urusan lingkungan hidup

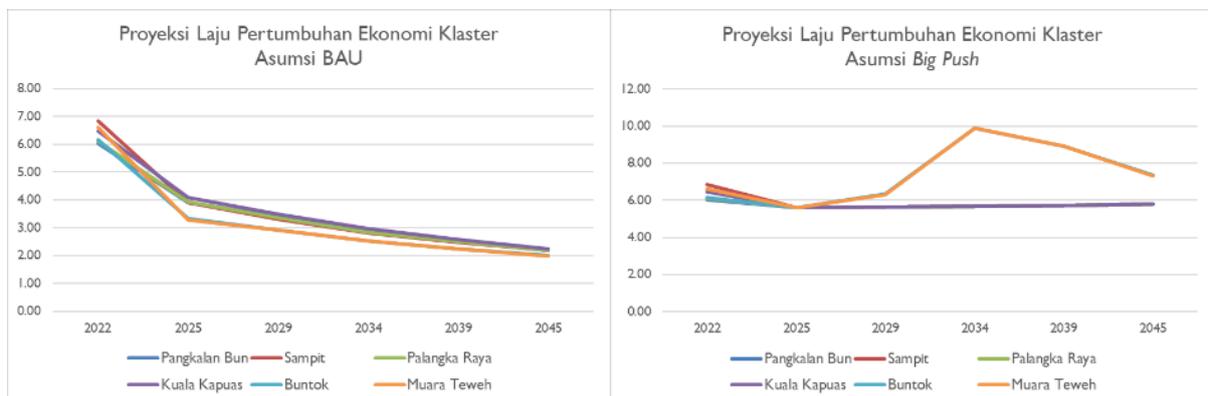


V.2.4 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen RPJPD. Pada bagian ini disusun arah kebijakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kalimantan Tengah berdasarkan pembagian zona dan kluster. Arah kebijakan pembangunan kewilayahan ini melengkapi arah kebijakan yang juga disusun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Pada bagian ini diharapkan arah kebijakan yang disusun dapat menjawab tantangan utamanya perubahan dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Tengah. Berikut merupakan penjabaran dari target dari kondisi kontribusi PDRB yang ingin dicapai di masing-masing kluster.

Target Pertumbuhan Ekonomi Kluster

Guna mencapai pertumbuhan ekonomi provinsi yang compliance dengan target pembangunan regional serta mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi daerah maka laju pertumbuhan ekonomi perlu direkayasa guna mendukung shifting zona timur. Guna untuk mencapai **pemerataan ekonomi** dan **mengejar ketertinggalan di zona Timur** (kluster Buntok dan MuaraTeweh) maka dibutuhkan intervensi >30% lebih tinggi daripada zona Tengah dan Barat. Secara lebih detail laju pertumbuhan ekonomi masing masing kluster terdapat dalam gambar berikut.



Gambar V.2.1. Grafik Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kluster Asumsi BAU (kiri) dan Asumsi Intervensi (kanan)

Dalam grafik proyeksi di atas untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah maka terdapat dua strategi utama. Strategi pertama adalah meningkatkan LPE di kluster zona timur (Buntok dan Muara Teweh) menjadi hingga 9,9% pada periode kedua RPJPD. Pada sisi lain dilakukan pula strategi kedua yakni menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi kluster lain di angka 4-5% per tahun.



Proyeksi Kontribusi PDRB Masing-Masing Klaster

Kontribusi PDRB menjadi penting untuk mempertimbangkan bagaimana kontribusi yang perlu dicapai dari masing-masing zona pembangunan. Pertimbangan dalam menyusun kontribusi PDRB masing-masing zona dan klaster disusun berdasarkan konsep untuk melakukan pemerataan pembangunan di masing-masing zona pembangunan. Berdasarkan proyeksi PDRB dengan asumsi *Business As Usual* didapatkan bahwa kontribusi masing-masing zona pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel V.2.5. Proyeksi Kontribusi PDRB Asumsi BAU per Zona

Zona	Baseline 2022	2025	2029	2034	2039	2045
Zona Barat	43,91%	43,76%	43,90%	44,04%	44,14%	44,23%
Zona Tengah	33,89%	34,23%	34,43%	34,61%	34,75%	34,88%
Zona Timur	22,21%	22,01%	21,66%	21,35%	21,11%	20,88%

Terlihat bahwa kontribusi PDRB zona barat diproyeksikan menjadi penyumbang paling mendominasi terhadap PDRB Kalimantan Tengah. Kontribusi besar ini disumbang dari berbagai aktivitas ekonomi di Zona Barat dan konsentrasi fasilitas sarana prasarana utama dan orde tinggi yang terkonsentrasi di zona ini. Kontribusi zona kemudian dibagi berdasarkan klaster yang menyusun zona. Secara lebih mendetail angka kontribusi dari masing-masing klaster dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.2.6. Proyeksi Kontribusi PDRB Asumsi BAU per Klaster

Kluster	Baseline 2022	2025	2029	2034	2039	2045
Zona Barat						
Pangkalan Bun	20,14%	20,13%	20,22%	20,34%	20,44%	20,51%
Sampit	23,77%	23,63%	23,68%	23,70%	23,70%	23,73%
Zona Tengah						
Palangkaraya	19,36%	19,70%	19,77%	19,83%	19,87%	19,91%
Kuala Kapuas	14,53%	14,53%	14,66%	14,79%	14,88%	14,97%
Zona Timur						
Buntok	9,40%	9,00%	8,86%	8,73%	8,63%	8,54%
Muara Teweh	12,81%	13,02%	12,81%	12,62%	12,48%	12,35%

Terdapat informasi bahwa angka kontribusi terbesar yang mendominasi terdapat dalam klaster pembangunan di zona Barat. Klaster yang memiliki kontribusi besar yakni



Klaster Pangkalan Bun dan Klaster Sampit dan kemudian disusul oleh klaster pembangunan di zona tengah yakni Klaster Palangkaraya dan Kuala Kapuas. Hal ini cukup besar ditopang oleh konsentrasi industri di kedua kluster di zona Barat. Namun, masih menjadi catatan di mana zona timur belum memiliki andil yang signifikan dengan zona barat dan tengah terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah, di mana terdapat 2 klaster pembangunan di zona timur, yakni, Klaster Buntok dan Klaster Muara Teweh. Klaster Buntok merupakan klaster dengan kontribusi paling kecil berjarak cukup jauh hingga >10% daripada klaster dengan kontribusi terbesar menandakan masih ada pekerjaan ekstra yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam menuntaskan ketimpangan pembangunan daerah. Selain itu, Kluster Palangkaraya yang berada di Zona Tengah juga patut menjadi perhatian karena berpotensi mengalami penurunan kontribusi jika tidak diberikan arah kebijakan yang sesuai dengan kondisi wilayah tersebut. Berikut merupakan tabel proyeksi kontribusi masing-masing kluster *Non Business As Usual* yang diharapkan mampu menjawab tantangan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah selama dua puluh tahun mendatang.

Tabel V.2.7. Proyeksi Kontribusi PDRB Klaster dengan Intervensi/*Big Push*

Kluster	Baseline 2022	2025	2030	2035	2040	2045
Zona Barat						
Pangkalan Bun	20,14%	20,13%	19,92%	19,55%	19,04%	18,25%
Sampit	23,77%	23,63%	23,32%	22,77%	22,08%	21,12%
Zona Tengah						
Palangkaraya	19,36%	19,70%	19,47%	19,05%	18,51%	17,72%
Kuala Kapuas	14,53%	14,53%	14,44%	14,21%	13,87%	13,33%
Zona Timur						
Buntok	9,40%	9,00%	9,76%	11,01%	12,57%	14,88%
Muara Teweh	12,81%	13,02%	13,09%	13,41%	13,93%	14,70%

Dapat diinformasikan bahwa dengan asumsi *Non Business As Usual* Kluster Palangkaraya (Zona Tengah) serta Kluster Buntok dan Muara Teweh (Zona Timur) memiliki kesempatan untuk berkontribusi lebih besar terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi *Non Business As Usual* ini dapat diciptakan dengan memberikan *big push* untuk masing-masing kluster pembangunan, di mana idealnya Kluster Palangkaraya diberikan target 10% lebih tinggi, Kluster Buntok diberikan

target 15% lebih tinggi, dan Klaster Muara Teweh diberikan target 5% lebih tinggi daripada target-target yang telah ditetapkan untuk kluster lainnya.

Tabel V.2.8. Proyeksi Kontribusi PDRB Sektor di Klaster Palangkaraya

Palangkaraya	2022	2025	2030	2035	2040	2045
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,05%	13,24%	12,88%	12,65%	12,50%	12,38%
Pertambangan dan Penggalian	4,52%	4,22%	4,04%	3,92%	3,84%	3,79%
Industri Pengolahan	10,97%	10,84%	10,63%	10,50%	10,41%	10,34%
Pengadaan Listrik dan Gas	0,26%	0,27%	0,28%	0,28%	0,29%	0,29%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
Konstruksi	12,01%	11,85%	11,82%	11,80%	11,78%	11,77%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,80%	13,69%	13,56%	13,47%	13,42%	13,37%
Transportasi dan Pergudangan	7,77%	7,56%	7,52%	7,49%	7,48%	7,46%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,59%	3,46%	3,44%	3,43%	3,42%	3,41%
Informasi dan Komunikasi	1,41%	1,49%	1,57%	1,62%	1,65%	1,67%
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,63%	4,94%	5,28%	5,50%	5,65%	5,76%
Real Estat	2,85%	2,86%	2,85%	2,85%	2,84%	2,84%
Jasa Perusahaan	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,22%	13,84%	13,62%	13,48%	13,38%	13,31%
Jasa Pendidikan	6,38%	6,74%	7,07%	7,29%	7,44%	7,55%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,27%	3,71%	4,17%	4,46%	4,66%	4,81%
Jasa lainnya	1,10%	1,15%	1,12%	1,11%	1,10%	1,09%

Klaster Palangkaraya dapat difokuskan dengan menekan kegiatan di sektor tersier yang berkaitan dengan jasa seperti pengembangan jasa keuangan dan asuransi, kegiatan administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Tabel V.2.9. Proyeksi Kontribusi PDRB Sektor di Klaster Buntok

Buntok	2022	2025	2030	2035	2040	2045
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,13%	14,92%	14,86%	14,83%	14,80%	14,78%
Pertambangan dan Penggalian	37,88%	35,95%	33,90%	32,46%	31,40%	30,57%
Industri Pengolahan	5,80%	5,94%	6,16%	6,31%	6,42%	6,51%
Pengadaan Listrik dan Gas	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	0,05%	0,05%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10%	0,10%	0,11%	0,11%	0,12%	0,12%
Konstruksi	6,01%	6,51%	6,80%	7,01%	7,16%	7,28%

Buntok	2022	2025	2030	2035	2040	2045
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,42%	6,71%	7,06%	7,31%	7,49%	7,64%
Transportasi dan Pergudangan	6,83%	7,26%	7,63%	7,90%	8,09%	8,24%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,43%	1,55%	1,63%	1,68%	1,72%	1,76%
Informasi dan Komunikasi	1,20%	1,27%	1,36%	1,42%	1,47%	1,51%
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,68%	2,84%	2,98%	3,08%	3,15%	3,21%
Real Estat	2,07%	2,15%	2,25%	2,32%	2,38%	2,42%
Jasa Perusahaan	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,06%	0,06%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,88%	4,76%	4,65%	4,57%	4,51%	4,47%
Jasa Pendidikan	5,75%	5,99%	6,32%	6,56%	6,73%	6,87%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,78%	2,91%	3,09%	3,23%	3,32%	3,40%
Jasa lainnya	0,97%	1,06%	1,09%	1,11%	1,12%	1,13%

Klaster Buntok dapat difokuskan dengan menekan kegiatan di sektor sekunder yang berkaitan dengan industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan.

Tabel V.2.10. Proyeksi Kontribusi PDRB Sektor di Klaster Muara Teweh

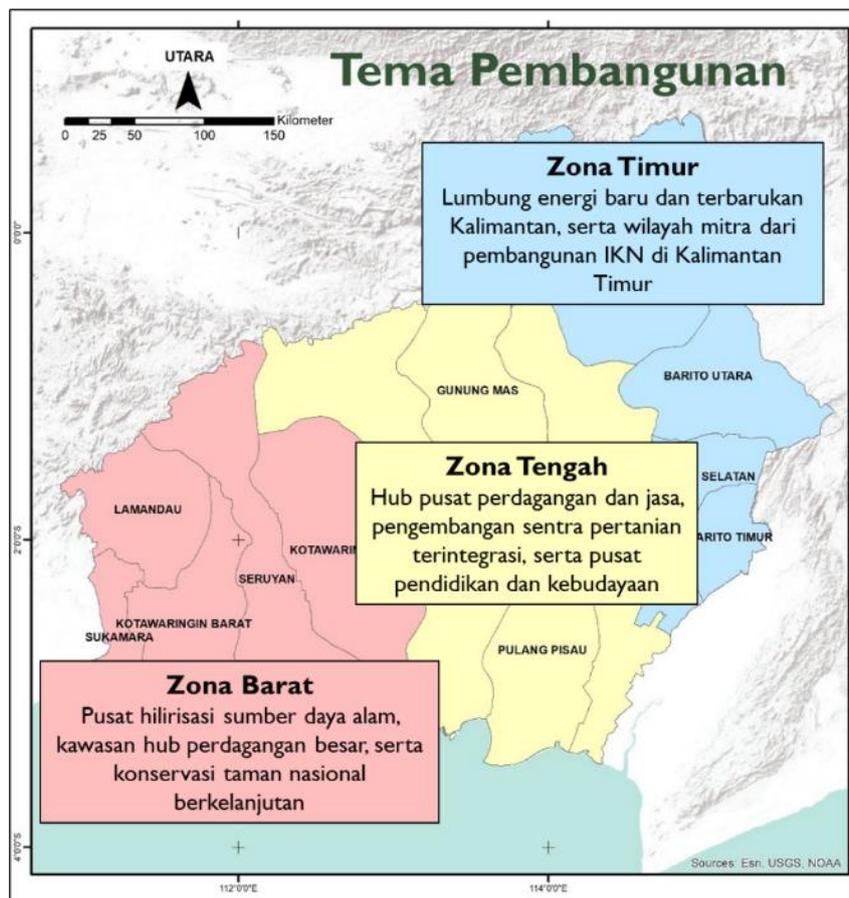
Muara Teweh	2022	2025	2030	2035	2040	2045
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,21%	8,12%	8,01%	7,94%	7,88%	7,84%
Pertambangan dan Penggalian	52,48%	50,15%	47,39%	45,49%	44,10%	43,04%
Industri Pengolahan	5,23%	5,38%	5,57%	5,70%	5,80%	5,87%
Pengadaan Listrik dan Gas	0,04%	0,05%	0,06%	0,07%	0,07%	0,07%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09%	0,09%	0,09%	0,10%	0,10%	0,10%
Konstruksi	6,02%	6,63%	7,34%	7,84%	8,20%	8,47%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,02%	5,17%	5,35%	5,48%	5,57%	5,64%
Transportasi dan Pergudangan	5,22%	6,08%	7,09%	7,79%	8,30%	8,69%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,98%	1,01%	1,05%	1,08%	1,10%	1,12%
Informasi dan Komunikasi	1,11%	1,11%	1,16%	1,20%	1,22%	1,24%
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,15%	1,15%	1,19%	1,22%	1,24%	1,26%
Real Estat	1,32%	1,34%	1,37%	1,39%	1,40%	1,41%
Jasa Perusahaan	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,68%	4,95%	5,24%	5,43%	5,57%	5,68%
Jasa Pendidikan	4,39%	4,48%	4,59%	4,66%	4,72%	4,76%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,72%	2,86%	3,02%	3,13%	3,21%	3,28%

Jasa lainnya	1,32%	1,41%	1,45%	1,49%	1,51%	1,53%
--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Serupa dengan Klaster Buntok, Klaster Muara Teweh juga dapat difokuskan pada sektor sekunder yang berkaitan dengan industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan. Arah kebijakan yang mampu mengakomodir tren pergeseran kontribusi ekonomi dan percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini sangat dibutuhkan di masing-masing klaster di masa mendatang agar mampu saling melengkapi dan komplementari.

Tema Zona Pembangunan Kalteng

Sebagai tindak lanjut arah kebijakan kewilayahan disusunlah tema zona Pembangunan Provinsi. Secara umum tiap zona pembangunan Kalimantan Tengah memiliki Tema Pembangunan yang berbeda. Hal ini sebagai wujud pemerataan serta pembagian peran antar daerah dalam Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun pembagian tema per zona adalah sebagai berikut

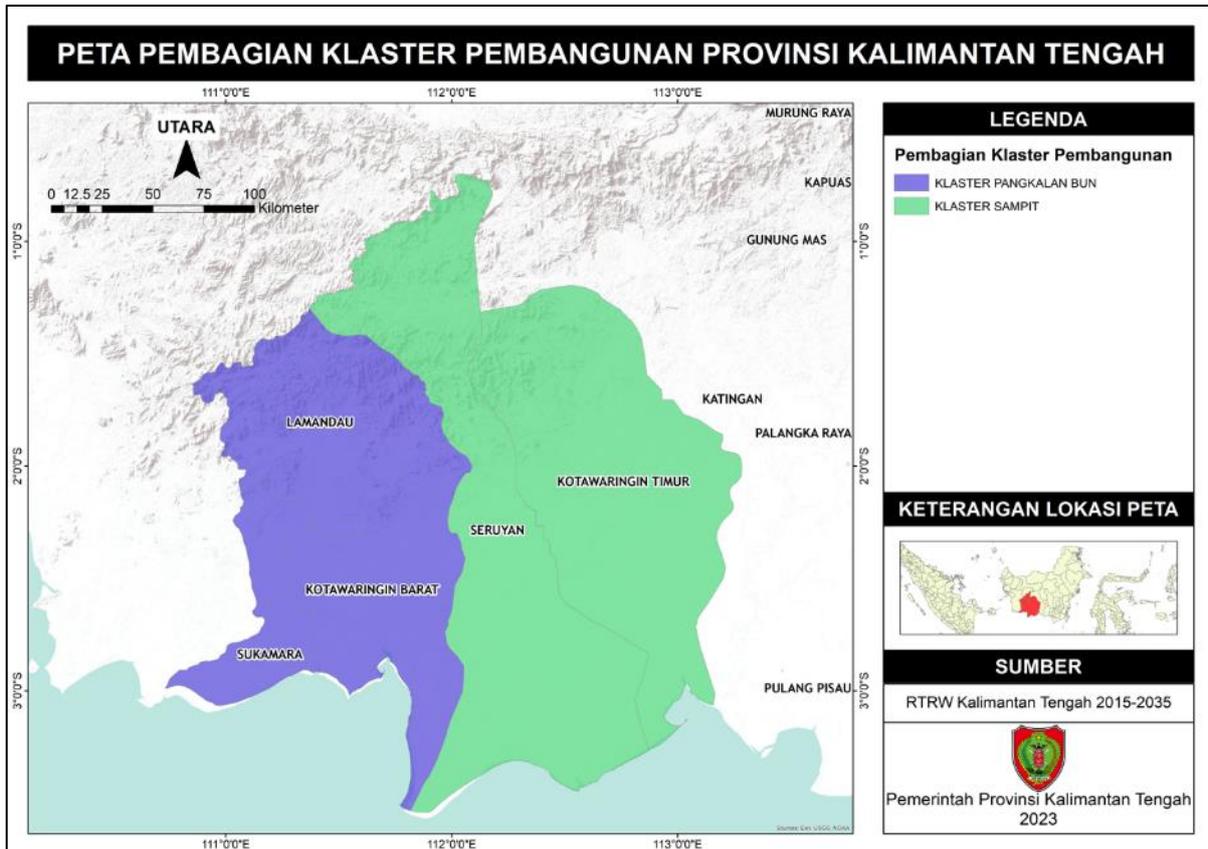


Gambar V.2.2. Pembagian Tema Pembangunan Menurut Zona



Zona Barat

Zona Barat Pembangunan Kalimantan Tengah tersusun dari dua klaster yakni klaster Pangkalan Bun dan Klaster Sampit. Zona ini memiliki penciri tema utama pembangunan yakni sebagai pusat hilirisasi sumber daya alam dan kawasan hub perdagangan besar serta konservasi taman nasional berkelanjutan. Daerah ini secara eksisting memiliki konsentrasi baik penduduk dan juga kontribusi PDRB yang paling tinggi namun belum secara maksimal dapat mengungkit potensi sumber daya ekonomi di Kalimantan Tengah.



Gambar V.2.3. Peta Klasterisasi Wilayah Pembangunan Zona Barat

Secara spesifik arah kebijakan dari masing-masing klaster di Zona Barat Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

KLASTER PANGKALAN BUN

Klaster ini terletak di Zona Barat yang terdiri dari Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Pusat dari kegiatan pada klaster ini terletak di PKW Pangkalan Bun yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat. Secara tematik pembangunan Klaster Pangkalan Bun memiliki tema Konservasi taman nasional



berkelanjutan, Hilirisasi Sumber Daya Alam, dan Sentra perikanan terintegrasi. Adapun arah kebijakan dan sasaran pembangunan klaster ini tersusun sebagai berikut.

Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan disusun sebagai arah indikatif kebijakan pembangunan di masing-masing klaster guna menjawab isu strategis provinsi maupun zona pembangunan. Adapun arah kebijakan pembangunan Klaster Pangkalan Bun adalah sebagai berikut:

Tabel V.2.11. Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Pangkalan Bun

No	Aspek	Arah Kebijakan
1	Transformasi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat. 2. Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor 3. Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkelanjutan didukung peningkatan produksi dan kompetensinya (termasuk tenaga kesehatan spesialis) serta afirmasi di daerah 3T. 4. Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas disertai inovasi pelayanan berbasis kewilayahan dan teknologi. 5. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). 6. Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi. 7. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang modern dan adaptif. 8. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman, terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan, serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema <i>education to employment</i>. 9. Peningkatan akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau seluruh wilayah 10. Pengentasan kemiskinan ekstrem melalui perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal. 11. Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan,

		<p>pengecahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas. 13. Menjaga aspek kuantitas penduduk dengan menjaga tingkat pertumbuhan penduduk pada taraf Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) 14. Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T. 15. Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu. 16. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. 17. Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan. 18. Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.
2	Transformasi Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengembangan Kalimantan Tengah sebagai daerah mitra untuk mendukung Ibu Kota Nusantara sebagai super hub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing. 2. Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan. 3. Pengembangan industri hijau dan basis sektor ekonomi baru bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan didukung dengan berbagai pengembangan inovasi. 4. Pengembangan destinasi wisata potensial berkelanjutan dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti pengembangan <i>ecotourism</i> berbasis aset alam di Taman Nasional Tanjung Puting. 5. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dan internasional. 6. Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman antara lain pelaksanaan pelatihan <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> serta transisi <i>school-to-work</i>. 7. Pengembangan kawasan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung. 8. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. 9. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber

		<p>daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Peningkatan produktivitas BUMD. 11. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. 12. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja. 13. Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan. 14. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan. 15. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).
<p>3</p>	<p>Reformasi Tata Kelola</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah. 2. Peningkatan keterlibatan masyarakat adat dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 3. Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat. 4. Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparaturnya daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan

		<p>keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. 6. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital. 7. Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi. 8. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas, khususnya pidana narkoba/psikotropika dan pencurian. 2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional. 3. Penguatan pengendalian inflasi daerah. 4. Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial. 5. Penguatan integritas partai politik.
	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama. 2. Peningkatan pengakuan dan penghormatan terhadap lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat. 3. Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi. 4. Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam aktivitas sosial dan pembentukan karakter, terutama pada generasi muda. 5. Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai sarana masyarakat untuk berinteraksi dan berbudaya. 6. Pengembangan diversifikasi pangan. 7. Pengembangan pemanfaatan komoditas biofarmaka dan tanaman tropis. 8. Rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan bekas tambang serta penghambatan laju deforestasi. 9. Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, rawa, gambut, Hutan Kerangas, Hutan Hujan Tropis, dll) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal. 10. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>) dan konektivitas spesies

		<p>yang dilindungi, seperti Orang Utan Borneo, Bekantan, Rangkong Papan, dll.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana. 12. Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim. 13. Pengembangan solusi berbasis alam (<i>natural based solution</i>) untuk pengendalian bencana, seperti banjir dan kebakaran hutan. 14. Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana. 15. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. 16. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. 17. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. 18. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. 19. Pembangunan irigasi baru terutama pada sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya. 20. Pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin. 21. Pengembangan check dam sebagai pengendali aliran sedimen untuk menjaga fungsi sungai sebagai alur pelayaran dan sumber pengairan persawahan. 22. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir. 23. Penguatan karakter dan jati diri bangsa.
	Implementasi Transformasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kerja sama dengan daerah lainnya dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Kalimantan. 2. Penuntasan RDTR kab/kota dan kawasan strategis. 3. Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran. 4. Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial. 5. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria. 6. Pengembangan pelabuhan-pelabuhan secara terpadu untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi strategis daerah. 7. Pengembangan bandara secara bertahap, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan pengembangan wilayah. 8. Penyiapan dukungan teknis dalam pembangunan jalan tol dan penyelesaian jalan trans Kalimantan serta pembangunan dan

	<p>peningkatan jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.</p> <ol style="list-style-type: none">9. Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi.10. Pengembangan transportasi umum perkotaan.11. Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.12. Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.13. Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.14. Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.15. Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.16. Penyediaan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah rawan air.17. Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan bertumpu pada pengembangan teknologi yang efektif dan efisien, serta pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, antara lain dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam upaya pemenuhan akses air minum aman serta mendukung pengurangan risiko bencana.18. Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).19. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemecuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman.20. Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik.21. Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.22. Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.23. Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah afirmasi.24. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.25. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota.26. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.27. Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.28. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.
--	--

		29. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> .
--	--	--

Sasaran Pembangunan Kewilayahan

Sasaran Pembangunan Kewilayahan merupakan indikator makro pencapaian pembangunan di masing-masing klaster. Maksud dari penyusunan sasaran pembangunan di sini adalah untuk menjawab tantangan pembangunan dan menjamin ketersinambungan target rencana pembangunan provinsi. Adapun sasaran pembangunan Klaster Pangkalan Bun adalah sebagai berikut:

Tabel V.2.12. Sasaran Pembangunan Klaster Pangkalan Bun

No	Sasaran Pokok	Baseline 2022	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
1	LPE	6,04	5,60	5,63	5,68	5,73
2	Share PDRB Klaster	20,14%	19,92%	19,55%	19,04%	18,25%

KLASTER SAMPIT

Klaster ini terletak di Zona Barat yang terdiri dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Pusat dari kegiatan pada klaster ini terletak di PKW Sampit yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun arah kebijakan dan sasaran pembangunan klaster ini tersusun sebagai berikut.

Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan disusun sebagai arah indikatif kebijakan pembangunan di masing-masing klaster guna menjawab isu strategis provinsi maupun zona pembangunan. Adapun arah kebijakan pembangunan Klaster Sampit adalah sebagai berikut:

Tabel V.2.13. Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Sampit

No	Aspek	Arah Kebijakan
1	Transformasi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat. 2. Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor 3. Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkelanjutan didukung peningkatan produksi dan kompetensinya (termasuk tenaga kesehatan spesialis) serta afirmasi di daerah 3T. 4. Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas disertai inovasi pelayanan berbasis kewilayahan dan teknologi. 5. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat ke bekerjaan tinggi. 7. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang modern dan adaptif. 8. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman, terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan, serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema <i>education to employment</i>. 9. Peningkatan akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau seluruh wilayah 10. Pengentasan kemiskinan ekstrem melalui perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal. 11. Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim. 12. Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas. 13. Menjaga aspek kuantitas penduduk dengan menjaga tingkat pertumbuhan penduduk pada taraf Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) 14. Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T. 15. Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu. 16. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. 17. Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan. 18. Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.
2	Transformasi Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengembangan Kalimantan Tengah sebagai daerah mitra untuk mendukung Ibu Kota Nusantara sebagai super hub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing. 2. Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan,

	<p>hususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pengembangan industri hijau dan basis sektor ekonomi baru bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan didukung dengan berbagai pengembangan inovasi.4. Pengembangan destinasi wisata potensial berkelanjutan dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti pengembangan <i>ecotourism</i> berbasis aset alam di Taman Nasional Tanjung Puting.5. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dan internasional.6. Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman antara lain pelaksanaan pelatihan <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> serta transisi <i>school-to-work</i>.7. Pengembangan kawasan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.8. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.9. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.10. Peningkatan produktivitas BUMD.11. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah.12. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja.13. Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.14. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.
--	---

		<p>15. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).</p>
3	Reformasi Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah. 2. Peningkatan keterlibatan masyarakat adat dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 3. Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat. 4. Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah. 5. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. 6. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital. 7. Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi. 8. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas, khususnya pidana narkoba/psikotropika dan pencurian. 2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional. 3. Penguatan pengendalian inflasi daerah. 4. Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial. 5. Penguatan integritas partai politik.
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.

	<ol style="list-style-type: none">2. Peningkatan pengakuan dan penghormatan terhadap lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.3. Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi.4. Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam aktivitas sosial dan pembentukan karakter, terutama pada generasi muda.5. Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai sarana masyarakat untuk berinteraksi dan berbudaya.6. Pengembangan diversifikasi pangan.7. Pengembangan pemanfaatan komoditas biofarmaka dan tanaman tropis.8. Rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan bekas tambang serta penghambatan laju deforestasi.9. Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, rawa, gambut, Hutan Kerangas, Hutan Hujan Tropis, dll) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal.10. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>) dan konektivitas spesies yang dilindungi, seperti Orang Utan Borneo, Bekantan, Rangkong Papan, dll.11. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana.12. Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim.13. Pengembangan solusi berbasis alam (<i>natural based solution</i>) untuk pengendalian bencana, seperti banjir dan kebakaran hutan.14. Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana.15. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.16. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.17. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.18. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.19. Pembangunan irigasi baru terutama pada sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya.20. Pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin.
--	--

		<p>21. Pengembangan check dam sebagai pengendali aliran sedimen untuk menjaga fungsi sungai sebagai alur pelayaran dan sumber pengairan persawahan.</p> <p>22. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.</p> <p>23. Penguatan karakter dan jati diri bangsa.</p>
6	Implementasi Transformasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kerja sama dengan daerah lainnya dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Kalimantan. 2. Penuntasan RDTR kab/kota dan kawasan strategis. 3. Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran. 4. Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial. 5. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria. 6. Pengembangan pelabuhan-pelabuhan secara terpadu untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi strategis daerah. 7. Pengembangan bandara secara bertahap, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan pengembangan wilayah. 8. Penyiapan dukungan teknis dalam pembangunan jalan tol dan penyelesaian jalan trans Kalimantan serta pembangunan dan peningkatan jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah. 9. Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi. 10. Pengembangan transportasi umum perkotaan. 11. Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah. 12. Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan. 13. Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal. 14. Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum. 15. Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah. 16. Penyediaan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah rawan air. 17. Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan bertumpu pada pengembangan teknologi yang efektif dan efisien, serta pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, antara lain dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam upaya pemenuhan akses air minum aman serta mendukung pengurangan risiko bencana. 18. Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).

		<p>19. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman.</p> <p>20. Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik.</p> <p>21. Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.</p> <p>22. Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.</p> <p>23. Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah afirmasi.</p> <p>24. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.</p> <p>25. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota.</p> <p>26. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.</p> <p>27. Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.</p> <p>28. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.</p> <p>29. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>.</p>
--	--	---

Sasaran Pembangunan Kewilayahan

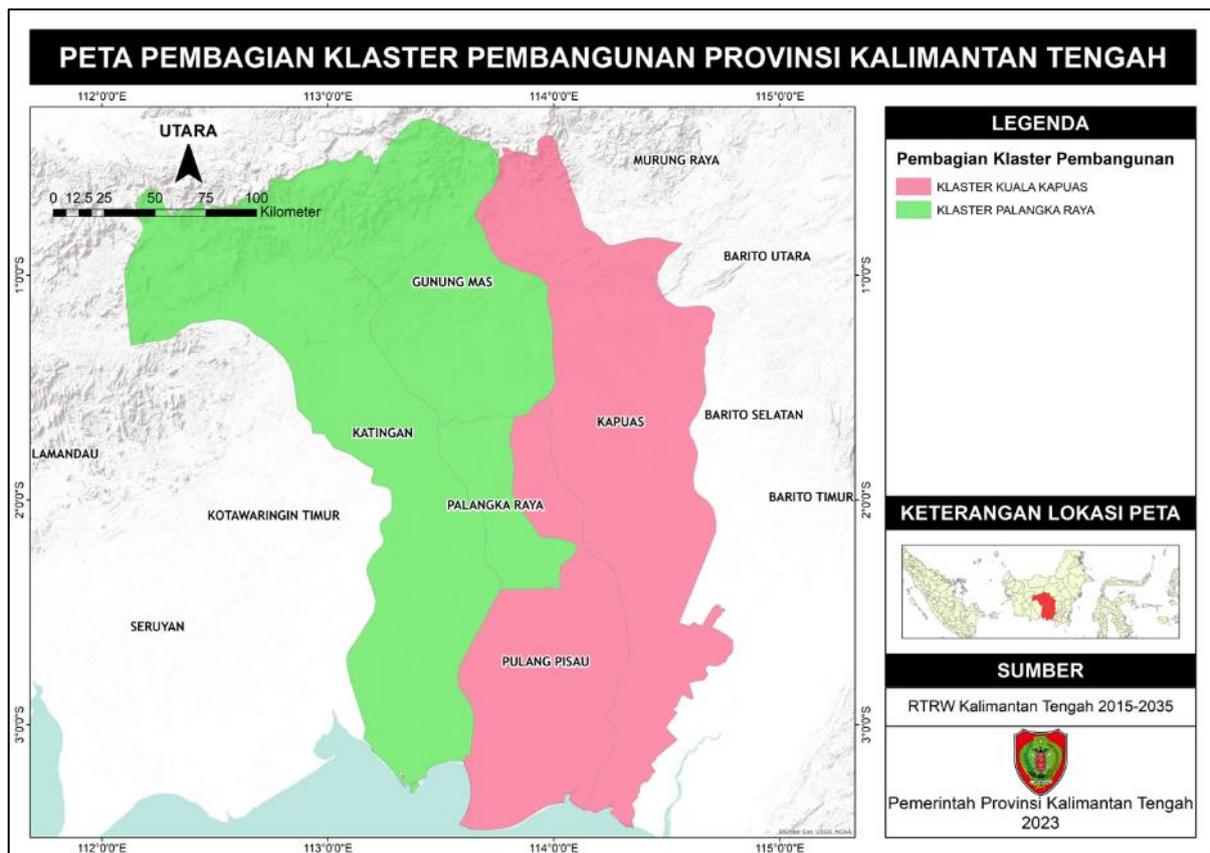
Sasaran Pembangunan Kewilayahan merupakan indikator makro pencapaian pembangunan di masing-masing klaster. Maksud dari penyusunan sasaran pembangunan di sini adalah untuk menjawab tantangan pembangunan dan menjamin ketersinambungan target rencana pembangunan provinsi. Adapun sasaran pembangunan Klaster Sampit adalah sebagai berikut:

Tabel V.2.14. Sasaran Pembangunan Klaster Sampit

No	Sasaran Pokok	Baseline 2022	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
1	LPE	6,83	5,60	5,63	5,68	5,73
2	Share PDRB Klaster	23,77%	23,32%	22,77%	22,08%	21,12%

Zona Tengah

Zona Tengah Pembangunan Kalimantan Tengah tersusun dari dua klaster yakni klaster Palangkaraya dan Klaster Kuala Kapuas. Zona ini memiliki penciri tema utama pembangunan yakni sebagai hub pusat perdagangan dan jasa, pengembangan sentra pertanian terintegrasi serta pusat riset dan pendidikan. Daerah ini secara eksisting memiliki konsentrasi baik penduduk dan juga kontribusi PDRB kedua di Kalimantan Tengah namun belum secara maksimal dapat mengungkit potensi sumber daya ekonomi di Kalimantan Tengah.



Gambar V.2.4. Peta Klasterisasi Wilayah Pembangunan Zona Tengah

Secara spesifik arah kebijakan dari masing-masing klaster di Zona Tengah Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

KLASTER PALANGKARAYA

Klaster ini terletak di Zona Tengah yang terdiri dari Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, dan Kota Palangkaraya. Pusat dari kegiatan pada klaster ini terletak di PKN Palangkaraya yang terletak di Kota Palangkaraya. Adapun arah kebijakan dan sasaran pembangunan klaster ini tersusun sebagai berikut.

Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan disusun sebagai arah indikatif kebijakan pembangunan di masing-masing klaster guna menjawab isu strategis provinsi maupun zona pembangunan. Adapun arah kebijakan pembangunan Klaster Palangkaraya adalah sebagai berikut:

Tabel V.2.15. Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Palangkaraya

No	Aspek	Arah Kebijakan
1	Transformasi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat. 2. Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor 3. Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkelanjutan didukung peningkatan produksi dan kompetensinya (termasuk tenaga kesehatan spesialis) serta afirmasi di daerah 3T. 4. Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas disertai inovasi pelayanan berbasis kewilayahan dan teknologi. 5. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). 6. Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi. 7. Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai klaster ekonomi potensial masa depan melalui kemitraan bersama perguruan tinggi global. 8. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang modern dan adaptif. 9. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman, terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan, serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema education to employment. 10. Peningkatan akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau seluruh wilayah 11. Pengentasan kemiskinan ekstrem melalui perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal. 12. Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan,

		<p>pengecahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas. 14. Menjaga aspek kuantitas penduduk dengan menjaga tingkat pertumbuhan penduduk pada taraf Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) 15. Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T. 16. Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu. 17. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. 18. Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan. 19. Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.
2	Transformasi Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengembangan Kalimantan Tengah sebagai daerah mitra untuk mendukung Ibu Kota Nusantara sebagai super hub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing. 2. Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan. 3. Pengembangan industri hijau dan basis sektor ekonomi baru bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan didukung dengan berbagai pengembangan inovasi. 4. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan termasuk food estate untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani. 5. Pengembangan destinasi wisata potensial berkelanjutan dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti pengembangan ecotourism berbasis aset alam di Taman Nasional Sebangau. 6. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dan internasional. 7. Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman antara lain pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling serta transisi school-to-work. 8. Pengembangan kawasan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan khususnya di PKN Palangkaraya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.

		<ol style="list-style-type: none"> 9. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. 10. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha. 11. Peningkatan produktivitas BUMD. 12. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. 13. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja. 14. Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan. 15. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan. 16. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).
3	Reformasi Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah. 2. Peningkatan keterlibatan masyarakat adat dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat. 4. Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah. 5. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. 6. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital. 7. Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi. 8. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas, khususnya pidana narkoba/psikotropika dan pencurian. 2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional. 3. Penguatan pengendalian inflasi daerah. 4. Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial. 5. Penguatan integritas partai politik.
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama. 2. Peningkatan pengakuan dan penghormatan terhadap lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat. 3. Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi. 4. Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam aktivitas sosial dan pembentukan karakter, terutama pada generasi muda. 5. Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai sarana masyarakat untuk berinteraksi dan berbudaya. 6. Pengembangan diversifikasi pangan. 7. Pengembangan pemanfaatan komoditas biofarmaka dan tanaman tropis. 8. Rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan bekas tambang serta penghambatan laju deforestasi. 9. Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, rawa, gambut, Hutan Kerangas, Hutan Hujan Tropis, dll) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal.

		<ol style="list-style-type: none"> 10. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>) dan konektivitas spesies yang dilindungi, seperti Orang Utan Borneo, Bekantan, Rangkong Papan, dll. 11. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana. 12. Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim. 13. Pengembangan solusi berbasis alam (<i>natural based solution</i>) untuk pengendalian bencana, seperti banjir dan kebakaran hutan. 14. Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana. 15. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. 16. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. 17. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. 18. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. 19. Pembangunan irigasi baru terutama pada sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya. 20. Pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin. 21. Pengembangan check dam sebagai pengendali aliran sedimen untuk menjaga fungsi sungai sebagai alur pelayaran dan sumber pengairan persawahan. 22. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir. 23. Penguatan karakter dan jati diri bangsa.
6	Implementasi Transformasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kerja sama dengan daerah lainnya dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Kalimantan. 2. Penuntasan RDTR kab/kota dan kawasan strategis. 3. Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran. 4. Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial. 5. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria. 6. Pengembangan pelabuhan-pelabuhan sungai secara terpadu untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi strategis daerah. 7. Pengembangan bandara secara bertahap, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan pengembangan wilayah.

8. Penyiapan dukungan teknis dalam pembangunan jalan tol dan penyelesaian jalan trans Kalimantan serta pembangunan dan peningkatan jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.
9. Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi.
10. Pengembangan transportasi umum perkotaan.
11. Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.
12. Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.
13. Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.
14. Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.
15. Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.
16. Penyediaan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah rawan air.
17. Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan bertumpu pada pengembangan teknologi yang efektif dan efisien, serta pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, antara lain dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam upaya pemenuhan akses air minum aman serta mendukung pengurangan risiko bencana.
18. Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).
19. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman.
20. Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik.
21. Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
22. Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.
23. Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah afirmasi.
24. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
25. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota.
26. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
27. Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.

		28. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. 29. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> .
--	--	---

Sasaran Pembangunan Kewilayahan

Sasaran Pembangunan Kewilayahan merupakan indikator makro pencapaian pembangunan di masing-masing klaster. Maksud dari penyusunan sasaran pembangunan di sini adalah untuk menjawab tantangan pembangunan dan menjamin ketersinambungan target rencana pembangunan provinsi. Adapun sasaran pembangunan Klaster Palangkaraya adalah sebagai berikut:

Tabel V.2.16. Sasaran Pembangunan Klaster Palangkaraya

No	Sasaran Pokok	Baseline 2022	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
1	LPE	6,12	5,60	5,63	5,68	5,73
2	Share PDRB Klaster	19,36%	19,47%	19,05%	18,51%	17,72%

KLASTER KUALA KAPUAS

Klaster ini terletak di Zona Tengah yang terdiri dari Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Pusat dari kegiatan pada klaster ini terletak di PKW Kuala Kapuas yang terletak di Kabupaten Kapuas. Adapun arah kebijakan dan sasaran pembangunan klaster ini tersusun sebagai berikut.

Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan disusun sebagai arah indikatif kebijakan pembangunan di masing-masing klaster guna menjawab isu strategis provinsi maupun zona pembangunan. Adapun arah kebijakan pembangunan Klaster Kuala Kapuas adalah sebagai berikut:

Tabel V.2.17. Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Kuala Kapuas

No	Aspek	Arah Kebijakan
1	Transformasi Sosial	1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat. 2. Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor

	<ol style="list-style-type: none">3. Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkelanjutan didukung peningkatan produksi dan kompetensinya (termasuk tenaga kesehatan spesialis) serta afirmasi di daerah 3T.4. Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas disertai inovasi pelayanan berbasis kewilayahan dan teknologi.5. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).6. Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi.7. Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai klaster ekonomi potensial masa depan melalui kemitraan bersama perguruan tinggi global.8. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang modern dan adaptif.9. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman, terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan, serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema education to employment.10. Peningkatan akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau seluruh wilayah11. Pengentasan kemiskinan ekstrem melalui perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal.12. Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.13. Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.14. Menjaga aspek kuantitas penduduk dengan menjaga tingkat pertumbuhan penduduk pada taraf Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS)15. Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.16. Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu.
--	--

		<p>17. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.</p> <p>18. Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.</p> <p>19. Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.</p>
2	Transformasi Ekonomi	<p>1. Pembangunan dan pengembangan Kalimantan Tengah sebagai daerah mitra untuk mendukung Ibu Kota Nusantara sebagai super hub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing.</p> <p>2. Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan.</p> <p>3. Pengembangan industri hijau dan basis sektor ekonomi baru bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan didukung dengan berbagai pengembangan inovasi.</p> <p>4. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan termasuk food estate untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani.</p> <p>5. Pengembangan destinasi wisata potensial berkelanjutan dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti pengembangan ecotourism berbasis aset alam di Taman Nasional Sebangau.</p> <p>6. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dan internasional.</p> <p>7. Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman antara lain pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling serta transisi school-to-work.</p> <p>8. Pengembangan kawasan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.</p> <p>9. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.</p> <p>10. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.</p> <p>11. Peningkatan produktivitas BUMD.</p> <p>12. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah.</p> <p>13. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja.</p> <p>14. Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.</p> <p>15. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi</p>

		<p>pembangkit terbaru; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.</p> <p>16. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).</p>
3	Reformasi Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah. 2. Peningkatan keterlibatan masyarakat adat dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 3. Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat. 4. Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparaturnya daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah. 5. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. 6. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital. 7. Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi. 8. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

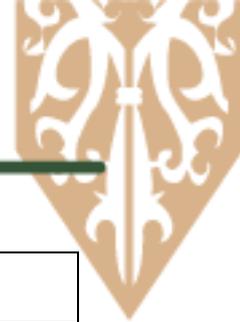
4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas, khususnya pidana narkoba/psikotropika dan pencurian. 2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional. 3. Penguatan pengendalian inflasi daerah. 4. Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial. 5. Penguatan integritas partai politik.
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama. 2. Peningkatan pengakuan dan penghormatan terhadap lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat. 3. Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi. 4. Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam aktivitas sosial dan pembentukan karakter, terutama pada generasi muda. 5. Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai sarana masyarakat untuk berinteraksi dan berbudaya. 6. Pengembangan diversifikasi pangan. 7. Pengembangan pemanfaatan komoditas biofarmaka dan tanaman tropis. 8. Rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan bekas tambang serta penghambatan laju deforestasi. 9. Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, rawa, gambut, Hutan Kerangas, Hutan Hujan Tropis, dll) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal. 10. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>) dan konektivitas spesies yang dilindungi, seperti Orang Utan Borneo, Bekantan, Rangkong Papan, dll. 11. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana. 12. Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim. 13. Pengembangan solusi berbasis alam (<i>natural based solution</i>) untuk pengendalian bencana, seperti banjir dan kebakaran hutan. 14. Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana. 15. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. 16. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan

		<p>perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 17. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. 18. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. 19. Pembangunan irigasi baru terutama pada sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya. 20. Pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin. 21. Pengembangan check dam sebagai pengendali aliran sedimen untuk menjaga fungsi sungai sebagai alur pelayaran dan sumber pengairan persawahan. 22. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir. 23. Penguatan karakter dan jati diri bangsa.
6	Implementasi Transformasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kerja sama dengan daerah lainnya dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Kalimantan. 2. Penuntasan RDTR kab/kota dan kawasan strategis. 3. Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran. 4. Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial. 5. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria. 6. Pengembangan pelabuhan-pelabuhan secara terpadu untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi strategis daerah. 7. Pengembangan bandara secara bertahap, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan pengembangan wilayah. 8. Penyiapan dukungan teknis dalam pembangunan jalan tol dan penyelesaian jalan trans Kalimantan serta pembangunan dan peningkatan jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah. 9. Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi. 10. Pengembangan transportasi umum perkotaan. 11. Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah. 12. Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan. 13. Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal. 14. Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum. 15. Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.

		<ol style="list-style-type: none"> 16. Penyediaan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah rawan air. 17. Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan bertumpu pada pengembangan teknologi yang efektif dan efisien, serta pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, antara lain dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam upaya pemenuhan akses air minum aman serta mendukung pengurangan risiko bencana. 18. Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang). 19. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman. 20. Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik. 21. Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. 22. Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan. 23. Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah afirmasi. 24. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. 25. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota. 26. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional. 27. Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko. 28. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. 29. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>.
--	--	---

Sasaran Pembangunan Kewilayahan

Sasaran Pembangunan Kewilayahan merupakan indikator makro pencapaian pembangunan di masing-masing klaster. Maksud dari penyusunan sasaran pembangunan di sini adalah untuk menjawab tantangan pembangunan dan menjamin ketersinambungan target rencana pembangunan provinsi. Adapun sasaran pembangunan Klaster Kuala Kapuas adalah sebagai berikut:



Tabel V.2.18. Sasaran Pembangunan Klaster Kuala Kapuas

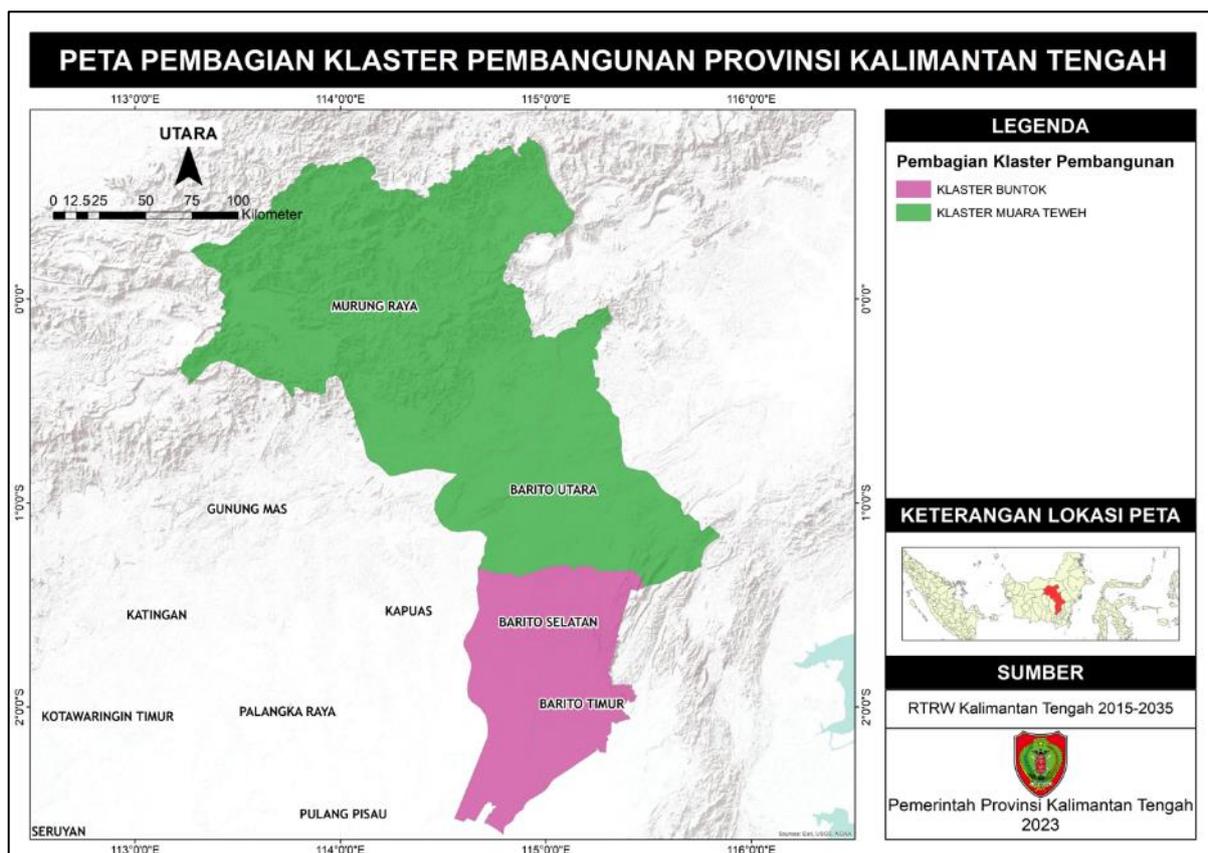
No	Sasaran Pokok	Baseline 2022	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
1	LPE	6,47	5,60	5,63	5,68	5,73
2	Share PDRB Klaster	14,53%	14,44%	14,21%	13,87%	13,33%





Zona Timur

Zona Timur Pembangunan Kalimantan Tengah tersusun dari dua klaster yakni klaster Buntok dan Klaster Muara Teweh. Zona ini memiliki penciri tema utama pembangunan yakni sebagai lumbung energi baru dan terbarukan Kalimantan, serta wilayah mitra dari pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Daerah ini secara eksisting memiliki konsentrasi baik penduduk dan juga kontribusi PDRB yang paling rendah sehingga perlu *big push* dalam pembangunan guna mengungkit potensi sumber daya ekonomi di Kalimantan Tengah.



Gambar V.2.5. Peta Klasterisasi Wilayah Pembangunan Zona Timur

Secara spesifik arah kebijakan dari masing-masing klaster di Zona Timur Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

KLASTER BUNTOK

Klaster ini terletak di Zona Timur yang terdiri dari Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur. Pusat dari kegiatan pada klaster ini terletak di PKW Buntok



yang terletak di Kabupaten Barito Selatan. Adapun arah kebijakan dan sasaran pembangunan klaster ini tersusun sebagai berikut.

Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan disusun sebagai arah indikatif kebijakan pembangunan di masing-masing klaster guna menjawab isu strategis provinsi maupun zona pembangunan. Adapun arah kebijakan pembangunan Klaster Buntok adalah sebagai berikut:

Tabel V.2.19. Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Buntok

No	Aspek	Arah Kebijakan
1	Transformasi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat. 2. Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor 3. Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkelanjutan didukung peningkatan produksi dan kompetensinya (termasuk tenaga kesehatan spesialis) serta afirmasi di daerah 3T. 4. Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas disertai inovasi pelayanan berbasis kewilayahan dan teknologi. 5. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). 6. Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi. 7. Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi. 8. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang modern dan adaptif. 9. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman, terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan, serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema education to employment. 10. Peningkatan akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau seluruh wilayah 11. Pengentasan kemiskinan ekstrem melalui perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal. 12. Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan,

		<p>pengecahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas. 14. Menjaga aspek kuantitas penduduk dengan menjaga tingkat pertumbuhan penduduk pada taraf Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) 15. Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T. 16. Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu. 17. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. 18. Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan. 19. Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.
2	Transformasi Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengembangan Kalimantan Tengah sebagai daerah mitra untuk mendukung Ibu Kota Nusantara sebagai super hub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing. 2. Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan. 3. Pengembangan industri hijau dan basis sektor ekonomi baru bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan didukung dengan berbagai pengembangan inovasi. 4. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan termasuk food estate untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani. 5. Pengembangan destinasi wisata potensial berkelanjutan dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti pengembangan ecotourism berbasis aset alam. 6. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dan internasional. 7. Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman antara lain pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling serta transisi school-to-work. 8. Pengembangan kawasan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung. 9. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.

		<ol style="list-style-type: none"> 10. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha. 11. Peningkatan produktivitas BUMD. 12. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. 13. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja. 14. Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan. 15. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan. 16. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).
3	Reformasi Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah. 2. Peningkatan keterlibatan masyarakat adat dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 3. Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparaturnya daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah. 5. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. 6. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital. 7. Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi. 8. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas, khususnya pidana narkoba/psikotropika dan pencurian. 2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional. 3. Penguatan pengendalian inflasi daerah. 4. Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial. 5. Penguatan integritas partai politik.
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama. 2. Peningkatan pengakuan dan penghormatan terhadap lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat. 3. Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi. 4. Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam aktivitas sosial dan pembentukan karakter, terutama pada generasi muda. 5. Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai sarana masyarakat untuk berinteraksi dan berbudaya. 6. Pengembangan diversifikasi pangan. 7. Pengembangan pemanfaatan komoditas biofarmaka dan tanaman tropis. 8. Rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan bekas tambang serta penghambatan laju deforestasi. 9. Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, rawa, gambut, Hutan Kerangas, Hutan Hujan Tropis, dll) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal. 10. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat

		<p>wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>) dan konektivitas spesies yang dilindungi, seperti Orang Utan Borneo, Bekantan, Rangkong Papan, dll.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana. 12. Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim. 13. Pengembangan solusi berbasis alam (<i>natural based solution</i>) untuk pengendalian bencana, seperti banjir dan kebakaran hutan. 14. Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana. 15. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. 16. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. 17. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. 18. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. 19. Pembangunan irigasi baru terutama pada sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya. 20. Pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin. 21. Pengembangan check dam sebagai pengendali aliran sedimen untuk menjaga fungsi sungai sebagai alur pelayaran dan sumber pengairan persawahan. 22. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir. 23. Penguatan karakter dan jati diri bangsa.
6	Implementasi Transformasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kerja sama dengan daerah lainnya dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Kalimantan. 2. Penuntasan RDTR kab/kota dan kawasan strategis. 3. Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran. 4. Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial. 5. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria. 6. Pengembangan pelabuhan-pelabuhan sungai secara terpadu untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi strategis daerah. 7. Pengembangan bandara secara bertahap, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan pengembangan wilayah. 8. Penyiapan dukungan teknis dalam pembangunan jalan tol dan penyelesaian jalan trans Kalimantan serta pembangunan dan

	<p>peningkatan jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.</p> <ol style="list-style-type: none">9. Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi.10. Pengembangan transportasi umum perkotaan.11. Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.12. Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.13. Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.14. Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.15. Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.16. Penyediaan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah rawan air.17. Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan bertumpu pada pengembangan teknologi yang efektif dan efisien, serta pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, antara lain dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam upaya pemenuhan akses air minum aman serta mendukung pengurangan risiko bencana.18. Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).19. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemecuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman.20. Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik.21. Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.22. Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.23. Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah afirmasi.24. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.25. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota.26. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.27. Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.28. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.
--	--

29. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*.

Sasaran Pembangunan Kewilayahan

Sasaran Pembangunan Kewilayahan merupakan indikator makro pencapaian pembangunan di masing-masing klaster. Maksud dari penyusunan sasaran pembangunan di sini adalah untuk menjawab tantangan pembangunan dan menjamin ketersinambungan target rencana pembangunan provinsi. Adapun sasaran pembangunan Klaster Buntok adalah sebagai berikut:

Tabel V.2.20. Sasaran Pembangunan Klaster Buntok

No	Sasaran Pokok	Baseline 2022	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
1	LPE	6,16	5,60	6,35	9,90	8,90
2	Share PDRB Klaster	9,40%	9,76%	11,01%	12,57%	14,88%

KLASTER MUARA TEWEH

Klaster ini terletak di Zona Timur yang terdiri dari Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya. Pusat dari kegiatan pada klaster ini terletak di PKW Muara TeweH yang terletak di Kabupaten Barito Utara. Adapun arah kebijakan dan sasaran pembangunan klaster ini tersusun sebagai berikut.

Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan disusun sebagai arah indikatif kebijakan pembangunan di masing-masing klaster guna menjawab isu strategis provinsi maupun zona pembangunan. Adapun arah kebijakan pembangunan Klaster Muara TeweH adalah sebagai berikut:

Tabel V.2.21. Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Muara TeweH

No	Aspek	Arah Kebijakan
1	Transformasi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat. 2. Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor 3. Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkelanjutan didukung peningkatan produksi dan kompetensinya (termasuk tenaga kesehatan spesialis) serta afirmasi di daerah 3T. 4. Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas disertai inovasi pelayanan berbasis kewilayahan dan teknologi.

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). 6. Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi. 7. Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi. 8. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang modern dan adaptif. 9. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman, terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan, serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema education to employment. 10. Peningkatan akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau seluruh wilayah 11. Pengentasan kemiskinan ekstrem melalui perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal. 12. Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim. 13. Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas. 14. Menjaga aspek kuantitas penduduk dengan menjaga tingkat pertumbuhan penduduk pada taraf Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) 15. Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T. 16. Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu. 17. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. 18. Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan. 19. Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.
2	Transformasi Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengembangan Kalimantan Tengah sebagai daerah mitra untuk mendukung Ibu Kota Nusantara sebagai

		<p>super hub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan.3. Pengembangan industri hijau dan basis sektor ekonomi baru bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan didukung dengan berbagai pengembangan inovasi.4. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan termasuk food estate untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani.5. Pengembangan destinasi wisata potensial berkelanjutan dengan melibatkan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti pengembangan ecotourism berbasis aset alam.6. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dan internasional.7. Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman antara lain pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling serta transisi school-to-work.8. Pengembangan kawasan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.9. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.10. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.11. Peningkatan produktivitas BUMD.12. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah.13. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja.14. Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.15. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan
--	--	---

		<p>pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.</p> <p>16. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).</p>
3	Reformasi Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah. 2. Peningkatan keterlibatan masyarakat adat dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 3. Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat. 4. Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparaturnya daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah. 5. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. 6. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital. 7. Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi. 8. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas, khususnya pidana narkoba/psikotropika dan pencurian. 2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Penguatan pengendalian inflasi daerah. 4. Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial. 5. Penguatan integritas partai politik.
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama. 2. Peningkatan pengakuan dan penghormatan terhadap lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat. 3. Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi. 4. Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam aktivitas sosial dan pembentukan karakter, terutama pada generasi muda. 5. Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai sarana masyarakat untuk berinteraksi dan berbudaya. 6. Pengembangan diversifikasi pangan. 7. Pengembangan pemanfaatan komoditas biofarmaka dan tanaman tropis. 8. Rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan bekas tambang serta penghambatan laju deforestasi. 9. Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, rawa, gambut, Hutan Kerangas, Hutan Hujan Tropis, dll) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal. 10. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>) dan konektivitas spesies yang dilindungi, seperti Orang Utan Borneo, Bekantan, Rangkong Papan, dll. 11. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana. 12. Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim. 13. Pengembangan solusi berbasis alam (<i>natural based solution</i>) untuk pengendalian bencana, seperti banjir dan kebakaran hutan. 14. Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana. 15. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. 16. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. 17. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. 18. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.

		<ol style="list-style-type: none"> 19. Pembangunan irigasi baru terutama pada sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya. 20. Pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin. 21. Pengembangan check dam sebagai pengendali aliran sedimen untuk menjaga fungsi sungai sebagai alur pelayaran dan sumber pengairan persawahan. 22. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir. 23. Penguatan karakter dan jati diri bangsa.
6	Implementasi Transformasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kerja sama dengan daerah lainnya dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Kalimantan. 2. Penuntasan RDTR kab/kota dan kawasan strategis. 3. Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran. 4. Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial. 5. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria. 6. Pengembangan pelabuhan-pelabuhan sungai secara terpadu untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi strategis daerah. 7. Pengembangan bandara secara bertahap, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan pengembangan wilayah. 8. Penyiapan dukungan teknis dalam pembangunan jalan tol dan penyelesaian jalan trans Kalimantan serta pembangunan dan peningkatan jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah. 9. Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi. 10. Pengembangan transportasi umum perkotaan. 11. Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah. 12. Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan. 13. Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal. 14. Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum. 15. Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah. 16. Penyediaan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah rawan air. 17. Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan bertumpu pada pengembangan teknologi yang efektif dan efisien, serta pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, antara lain dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam upaya pemenuhan akses air minum aman serta mendukung pengurangan risiko bencana.

		<ol style="list-style-type: none"> 18. Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang). 19. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemecuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman. 20. Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik. 21. Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. 22. Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan. 23. Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah afirmasi. 24. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. 25. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota. 26. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional. 27. Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko. 28. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. 29. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>.
--	--	--

Sasaran Pembangunan Kewilayahan

Sasaran Pembangunan Kewilayahan merupakan indikator makro pencapaian pembangunan di masing-masing klaster. Maksud dari penyusunan sasaran pembangunan di sini adalah untuk menjawab tantangan pembangunan dan menjamin ketersinambungan target rencana pembangunan provinsi. Adapun sasaran pembangunan Klaster Muara Teweh adalah sebagai berikut.

Tabel V.2.22. Sasaran Pembangunan Klaster Muara Teweh

No	Sasaran Pokok	Baseline 2022	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
1	LPE	6,60	5,60	6,30	9,90	8,90
2	Share PDRB Klaster	12,81%	13,09%	13,41%	13,93%	14,70%

BAB VI

PENUTUP





BAB VI PENUTUP

VI.1 KAJIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan menjadi penting untuk memastikan seluruh arah kebijakan dan sasaran pembangunan dapat tercapai dan terlaksana. Beberapa kaidah pelaksanaan memuat substansi mulai dari pelaksanaan rencana turunan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta proses peninjauan kembali. Beberapa skema yang dimaksud dalam kaidah pelaksanaan ini termuat sebagai berikut:

1. Setelah diterbitkannya dokumen RPJPD ini dan diundangkan sebagai Peraturan Daerah, maka perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dalam periode lima tahunan dalam wujud RPJMD dan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek tahunan dalam wujud RKPD. Dokumen-dokumen tersebut harus mengacu dan mempertimbangkan target yang tercantum di dalam dokumen RPJPD. Di samping itu, dokumen RPJPD ini harus menjadi acuan dan pertimbangan pula dalam merumuskan berbagai dokumen perencanaan sektoral yang disusun oleh perangkat daerah khususnya pada sektor-sektor tertentu yang menjadi kewenangannya.
2. Dokumen RPJPD ini juga dapat menjadi acuan penyelarasan terhadap dokumen perencanaan pembangunan spasial yang termuat dalam dokumen RTRW beserta turunannya. Hal ini dimaksudkan untuk keselarasan perwujudan ruang di masyarakat yang sesuai dengan target dan arah kebijakan RPJPD.
3. Proses pengalokasian pembiayaan pembangunan yang termuat dalam APBD setiap tahunnya dapat diawali dengan proses *trilateral meeting* antara 3 (tiga) pihak yaitu Bappedalitbang sebagai pengawal rencana pembangunan, BPKAD sebagai kuasa pengalokasian anggaran, serta OPD sektoral yang sesuai dengan urusan dalam perencanaan anggaran.
4. Monitoring harus dilakukan secara rutin dan berkala yaitu dalam kurun waktu tahunan, untuk melihat pencapaian target di masing-masing tahunnya.
5. Evaluasi dan peninjauan kembali dapat dilakukan setiap periode 5 (lima) tahunan, untuk mengetahui pencapaian target pembangunan, serta apakah diperlukan melakukan perbaikan pada dokumen RPJPD ini. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen RPJPD dilakukan melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Pelaksanaan semua kebijakan sampai dengan kegiatan yang termuat dalam dokumen ini harus dilaksanakan dengan melibatkan multi-pihak baik pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, sektor bisnis, media massa, organisasi



kemasyarakatan, sampai dengan seluruh elemen masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Ini menandakan perlunya adanya komunikasi publik yang baik oleh pemerintah daerah dalam proses perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah.

7. Prinsip mendasar lain dalam proses perencanaan adalah pengarusutamaan gender dan inklusi sosial. Ini termasuk di dalamnya adalah masyarakat umum, termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia. Hal ini berfokus pada upaya untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan dalam jangka waktu 2025 hingga 2045. Selain itu, partisipasi ini juga mendorong kelompok-kelompok masyarakat memberikan saran, kritik, dan/atau dukungan terhadap pembangunan.
8. Untuk menunjukkan upaya konsistensi dalam perencanaan pembangunan, khususnya apabila periode 2025-2045 nantinya berakhir, diperlukan upaya-upaya lebih lanjut melalui koordinasi, sinkronisasi, konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka kerja logis, skema pendanaan dan penganggaran, integrasi lintas perangkat daerah, kaidah pelaksanaan RPJPD dalam RPJMD 4 Periode ke depan di RPJPD yang baru, serta kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi secara normatif. Ini untuk mendukung proses perencanaan yang matang dan sinkron antarperiode pembangunan.

VI.2 Kaidah Pembiayaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan jangka Panjang daerah ini dapat dilaksanakan pula dengan didukung sumber pembiayaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam memetakan sumber pembiayaan tersebut, diperlukan kaidah pembiayaan pembangunan yang dapat disebutkan dibawah ini:

1. Sumber pembiayaan pembangunan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam dokumen ini bersumber dari APBN, APBD, sampai dengan sumber lain yang sah.
2. Bagian kaidah pembiayaan pembangunan harus turut disertakan di dalam substansi yang tercantum di dalam RPJMD yang akan disusun sebagai penjabaran lima tahunan dari dokumen RPJPD ini.
3. Sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah dapat ditingkatkan melalui peningkatan pendapatan asli daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

4. Sumber pembiayaan pembangunan lain yang bersumber dari dana inovasi Kerjasama harus dapat diwujudkan sebagai bentuk keterlibatan multi-pihak untuk pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Pemanfaatan barang produksi dalam negeri menjadi penting, khususnya yang berasal dari dalam Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini untuk mewujudkan peningkatan dampak berganda dan nilai tambah dari hasil produk ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN

Jl. R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 3222000, Fax: (0536) 3222845
www.kalteng.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH



**Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2025-2045**

